



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas, menuju masyarakat maju, sejahtera dan berkelanjutan dalam mendorong kemajuan daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah, diperlukan arah kebijakan pengendalian pembangunan kependudukan tahun 2025 –2045;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Denpasar yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan pengendalian pembangunan kependudukan Daerah tahun 2025-2045 yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan.
7. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
8. Penduduk adalah warga negara Indonesia di Daerah dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan Penduduk setempat.
10. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas Penduduk pada seluruh dimensi Penduduk.
11. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan perubahan keadaan Kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

13. Kuantitas Penduduk adalah jumlah Penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah Penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
14. Kualitas Penduduk adalah kondisi Penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
16. Keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
17. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang dalam lingkungan yang sehat.
18. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
19. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan dan mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
22. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

23. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan Kependudukan.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu Keluarga, kartu tanda Penduduk elektronik dan/atau surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
26. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
27. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran Penduduk secara keruangan.
28. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran Penduduk agar sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
29. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
30. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan Penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
31. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan Kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.
32. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang peri kehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
33. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi peri kehidupan Penduduk.

34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
35. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman terhadap arah kebijakan, tujuan dan strategi serta program Pembangunan yang berwawasan Kependudukan.

Pasal 3

Arah kebijakan GDPK meliputi:

- a. Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mewujudkan keadilan;
- b. Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan dan masyarakat;
- c. Pembangunan Kependudukan menitikberatkan Penduduk sebagai pelaku dan pemanfaat pembangunan;
- d. Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan; dan
- e. Pembangunan Kependudukan berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 4

- (1) Tujuan utama pelaksanaan GDPK yaitu tercapainya kualitas Penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan Daerah.
- (2) Tujuan khusus pelaksanaan GDPK yaitu untuk mewujudkan:
 - a. Penduduk tumbuh seimbang;
 - b. Penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - c. Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni;
 - d. keseimbangan persebaran Penduduk yang serasi dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan; dan
 - e. Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Pasal 5

Strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 (lima) pilar yaitu:

- a. pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. peningkatan Kualitas Penduduk;
- c. Pembangunan Keluarga;
- d. Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
- e. penataan Administrasi Kependudukan.

BAB II SISTEMATIKA *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 6

- (1) GDPK tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika yang terdiri dari :

- | | | |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I | : | PENDAHULUAN; |
| BAB II | : | ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN
CAPAIAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN DAERAH; |
| BAB III | : | PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI
IDEAL KEPENDUDUKAN; |
| BAB IV | : | VISI DAN ISU STRATEGI PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN DAERAH; |
| BAB V | : | KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
DAERAH; |
| BAB VI | : | PETA JALAN (<i>ROADMAP</i>); |
| BAB VII | : | PENUTUP. |

- (2) GDPK tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PELAKSANAAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan GDPK.
- (2) Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB IV
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Walikota membentuk tim koordinasi pelaksanaan GDPK di Daerah.
- (2) Tim koordinasi pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK;
 - b. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan GDPK;
 - c. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian program GDPK;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GDPK; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - k. Instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama; dan
 - l. Perangkat Daerah, lembaga pemerintah, serta pihak lain yang dipandang perlu.
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Pembentukan tim koordinasi pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Tim koordinasi melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal dan pelaksanaan GDPK;
 - b. menerima, mempelajari, dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan GDPK; dan
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan GDPK.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen laporan tahunan GDPK.
- (4) Laporan tahunan GDPK disampaikan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan GDPK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Oktober 2025

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI:
(5,58/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025-2045

I. Umum

Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam Pembangunan Berkelanjutan karena jumlah Penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan Kualitas Penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan Penduduk yang seimbang dan mengembangkan Kualitas Penduduk serta Keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang harus mengacu pada kebijakan nasional, serta kebijakan dan program ditetapkan Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD.

GDPK tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui strategi pengendalian Kuantitas Penduduk, peningkatan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk dan penataan Administrasi Kependudukan. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah terhadap Pembangunan Kependudukan serta untuk mewujudkan Kualitas Penduduk yang optimal sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045



PEMERINTAH KOTA
DENPASAR

***GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**
TAHUN 2025-2045

GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 PILAR
KOTA DENPASAR

Disusun Atas Kerjasama

**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar**

dengan

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Udayana**

KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (P3AP2KB)
KOTA DENPASAR

Om Swastyastu



Atas Asung Kertha Wara Nugraha, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Kota Denpasar 2025-2045 dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Dokumen ini memberi makna strategis dalam mendukung Rencana pembangunan yang telah dirancang Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026, juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Denpasar 2025-2045.

Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, selain berisi arahan pembangunan secara nasional, juga arah pembangunan kependudukan di daerah khususnya Kota Denpasar serta isu-isu yang berkembang. GDPK 5 pilar merupakan dokumen rencana pembangunan yang komprehensif yang menggambarkan kondisi kependudukan dalam jangka panjang yang akan direviu setiap lima tahun sekali. Gambaran tersebut terlihat dari keterkaitan pembangunan yang terkait satu dengan lainnya yaitu Pengelolaan Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, serta pilar kelima adalah Penataan Administrasi Kependudukan. Konsep dasar yang digunakan dalam mengembangkan GDPK 5 Pilar tersebut adalah Pembangunan yang berpusat pada manusia yang dikenal dengan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK). Dalam upaya lebih serius dalam memberikan respon terhadap kondisi kependudukan yang digambarkan dalam GDPK 5 pilar, langkah penting berikutnya adalah melihat kondisi dan evaluasi capaian berbagai indikator pembangunan kependudukan tahunan berupa Laporan Kependudukan Kota Denpasar yang dilakukan setiap tahun.

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi khususnya kepada Penyusun dan atas dukungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan baik yang memungkinkan GDPK 5 Pilar Kota Denpasar dapat terwujud. Semoga GDPK 5 Pilar yang telah tersusun bermanfaat sebagai dasar penyusunan berbagai program dan kebijakan yang lebih efektif berbasis isu kependudukan.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om.

Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar

ttd.

Dra. I GUSTI AGUNG SRI WETRAWATI, M.Si.

SAMBUTAN WALIKOTA DENPASAR

Om Swastyastu



Puji Syukur dipanjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Kota Denpasar Tahun 2024-2045 telah dapat diselesaikan. Tersusunnya dokumen strategis ini menguatkan komitmen kita dalam melakukan pembangunan yang berpusat pada manusia. Problem Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih kita hadapi dapat kita urai melalui perencanaan yang lebih berfokus pada isu kependudukan.

Agenda besar Indonesia yang sudah kita sepakati bersama, yaitu Indonesia Emas 2045, menuntut komitmen yang kuat dari kita semua mengenai bagaimana kita dapat mempercepat upaya-upaya pencapaian pertumbuhan penduduk yang seimbang, percepatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya peningkatan produktivitas dan pendapatan perkapita. Pembangunan Keluarga dapat kita jadikan sebagai basis penting untuk peningkatan Kualitas sumber daya manusia dan juga kesejahteraan. Tak kalah pentingnya adalah dukungan terhadap pemerataan persebaran penduduk dalam upaya menjaga kualitas lingkungan. Data dan Informasi kependudukan menjadi basis penting dalam mewujudkan perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi pembangunan. Pemenuhan komitmen pelayanan dokumen kependudukan juga perlu kita mantapkan.

Saya berharap dokumen GDPK 5 Pilar yang telah dihasilkan ini dapat meningkatkan efektivitas capaian-capaian kinerja pembangunan. Saya memberi apresiasi kepada Dinas P3AP2KB Kota Denpasar yang telah secara serius melakukan koordinasi lintas OPD dan juga kerjasama dengan pihak-pihak lainnya yang memungkinkan dokumen ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga partisipasi tersebut mendapatkan imbalan yang setimpal atas karunia Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Terima kasih.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om.

WALIKOTA DENPASAR

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN WALIKOTA DENPASAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran	4
1.2.1 Maksud.....	4
1.2.2 Tujuan.....	5
1.2.3 Sasaran.....	6
1.3 Ruang Lingkup.....	7
1.3.1 Lingkup Wilayah.....	7
1.3.2 Lingkup Materi	8
1.4 Kedudukan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan.....	10
BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA DENPASAR.....	13
2.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	13
2.1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	14
2.1.2 Struktur Umur dan Jenis Kelamin	17
2.1.3 Indikator Kuantitas Penduduk Lainnya.	23
2.1.4 <i>Total Fertility Rate</i> (TFR).....	30
2.1.5 <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR) Kelompok Usia 15–19.....	32
2.1.6 Kehamilan Tidak Diinginkan	33
2.1.7 Proporsi Kebutuhan ber-KB yang terpenuhi (<i>Demand Satisfied</i>).....	35
2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk.....	36
2.2.1 Peningkatan Kualitas Bidang Kesehatan.....	37
2.2.2 Peningkatan Kualitas Bidang Pendidikan	56
2.2.3 Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi.....	61
2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia dan Kualitas Gender	86
2.3 Pembangunan Keluarga	88
2.3.1 Perkawinan	92
2.3.2 Tingkat Perceraian.....	94
2.3.3 Indeks Pembangunan Keluarga	95
2.3.4 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	96
2.3.5 Indeks Perlindungan Anak	98
2.3.6 Partisipasi Masyarakat dalam Bina Keluarga.....	100
2.3.7 Indeks Ketahanan Keluarga.....	108
2.3.8 Anak Terlantar	108

2.3.9 Lanjut Usia Terlantar.....	110
2.3.10 Keluarga dengan Kepemilikan Rumah Sendiri	113
2.3.11 Rumah Layak Huni.....	114
2.3.12 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	117
2.3.13 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.....	118
2.3.14 Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak....	119
2.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	121
2.4.1 Kepadatan Penduduk.....	122
2.4.2 Migrasi.....	123
2.4.3 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat .	124
2.4.4 Sarana Prasarana Irigasi Kondisi Baik	125
2.4.5 Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap.....	127
2.4.6 Permukiman Layak Huni.....	131
2.5 Penataan Administrasi Kependudukan	135
2.5.1 Penataan dan Pengelolaan Database Kependudukan	135
2.5.2 Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan.....	136
2.5.3 Perekaman Dokumen KTP Elektronik	144
2.5.4 Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	145
2.5.5 Kepemilikan Dokumen Akta Kematian	146
2.5.6 Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak	147
2.5.7 Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan.....	148
2.5.8 Kepemilikan Dokumen Akta Perceraian.....	149
2.5.9 Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak.....	149
2.5.10 Cakupan Dokumen Akta Pengakuan Anak	150
2.4.11 Cakupan Dokumen Akta Pengesahan Anak.....	151
2.5.12 Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Nama	151
2.5.13 Cakupan Ketersediaan Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).....	152
BAB III PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN	154
3.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Proyeksi Penduduk	154
3.2 Peningkatan Kualitas Penduduk.....	162
3.3 Pembangunan Keluarga	169
3.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	172
3.5 Penataan Administrasi Kependudukan	173
BAB IV VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH	176
4.1 Visi Pembangunan Kependudukan Daerah.....	176
4.2 Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah	177
BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH	181
5.1 Strategi Kebijakan.....	181
5.2 Arah Kebijakan	182
5.2.1 Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	183

5.2.1 Pilar Peningkatan Kualitas Penduduk	183
5.2.3 Pilar Pembangunan Keluarga	185
5.2.4 Pilar Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.....	185
5.2.5 Pilar Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan	186
BAB VI PETA JALAN (<i>ROADMAP</i>)	187
6.1 <i>Roadmap</i> Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	187
6.2 <i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk	190
6.2.1 Bidang Ekonomi.....	190
6.2.2 Bidang Pendidikan.....	192
6.2.3 Bidang Kesehatan.....	194
6.2.4 Bidang Kualitas Lainnya	196
6.3 <i>Roadmap</i> Pembangunan Keluarga	198
6.4 <i>Roadmap</i> Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.....	201
6.5 <i>Roadmap</i> Penataan Administrasi Kependudukan	203
BAB VII PENUTUP	207
DAFTAR PUSTAKA	208

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Penduduk Kota Denpasar Menurut Kelompok Umur tahun 2017 – 2023 (%).....	18
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kota Denpasar Menurut Kelompok Umur Tahun 2017 – 2023	20
Tabel 2.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Denpasar tahun 2018 - 2023	57
Tabel 2.4	Harapan Lama Sekolah di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2018 - 2024	58
Tabel 2.5	Rata – Rata Lama Sekolah di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2018 - 2024	59
Tabel 2.6	Angka Partisipasi Sekolah Kota Denpasar menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin tahun 2017 - 2022.....	60
Tabel 2.7	Nilai PDRB Atas Harga Berlaku di Kota Denpasar (Juta Rupiah) tahun 2019 -2023.....	62
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan di Kota Denpasar tahun 2019 - 2023.....	63
Tabel 2.9	PDRB Per Kapita di Kota Denpasar Tahun 2018-2024	64
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kota Denpasar tahun 2017 – 2022	66
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk dan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2017 - 2022 di Kota Denpasar	67
Tabel 2.12	Penduduk yang Bekerja di Kota Denpasar dan Provinsi Bali tahun 2018 – 2023 (jiwa).....	71
Tabel 2.13	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Formal-Informal di Kota Denpasar tahun 2017-2024.....	73
Tabel 2.14	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Formal- Informal.....	75
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Usia Kerja Kota Denpasar dan Provinsi Bali tahun 2018 – 2023 (jiwa)	75
Tabel 2.16	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tertangani di Kota Denpasar tahun 2014 - 2020	83
Tabel 2.17	Indeks Pembangunan Manusia di Kota Denpasar tahun 2017 – 2024	86
Tabel 2.18	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2024 Kota Denpasar.....	90
Tabel 2.19	Indeks Pengasuhan Keluarga Yang Memiliki Remaja	105
Tabel 2.20	Indeks Lansia Berdaya	105
Tabel 2.21	Persentase Kelompok UPPKA Berkegiatan di Kota Denpasar tahun 2022 - 2024.....	108
Tabel 2.22	Rasio Rumah Layak Huni di Kota Denpasar tahun 2018 – 2024	108
Tabel 2.23	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2022 (jiwa/km ²).....	122
Tabel 2.24	Rasio Permukiman Layak Huni tahun 2019 – 2022 (%).....	131
Tabel 2.25	Persentase Perekaman Dokumen KTP-el Kota Denpasar Tahun 2018- 2023	145

Tabel 2.26	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kota Denpasar Tahun 2018-2024	146
Tabel 2.27	Penerbitan Akta Kematian Kota Denpasar Tahun 2020-2023	146
Tabel 2.28	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian di Kota Denpasar Tahun 2018-2024	147
Tabel 2.29	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kota Denpasar Tahun 2018 - 2024	148
Tabel 2.30	Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan Kota Denpasar Tahun 2018 – 2024.....	149
Tabel 2.31	Persentase Cakupan Dokumen Akta Perceraian Kota Denpasar Tahun 2018-2024.....	149
Tabel 2.32	Persentase Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak Kota Denpasar Tahun 2017-2020 (Persen)	150
Tabel 2.33	Persentase Cakupan Dokumen Akta Pengakuan Anak Kota Denpasar Tahun 2017 -2020 (%)	151
Tabel 2.34	Persentase Cakupan Dokumen Akta Pengesahan Anak Kota Denpasar Tahun 2017-2020 (%)	151
Tabel 2.35	Persentase Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak Kota Denpasar Tahun 2017-2020.....	152
Tabel 2.36	Persentase Cakupan ketersediaan data SIAK Kota Denpasar Tahun 2017 - 2020.....	153
Tabel 6.1	<i>Roadmap</i> Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Denpasar Tahun 2025-2045.....	187
Tabel 6.2	<i>Roadmap</i> Pengendalian Kuantitas Penduduk tahun 2025 – 2029.....	188
Tabel 6.3	<i>Roadmap</i> Pengendalian Kuantitas Penduduk tahun 2030 – 2034.....	188
Tabel 6.4	<i>Roadmap</i> Pengendalian Kuantitas Penduduk tahun 2035 – 2039.....	189
Tabel 6.5	<i>Roadmap</i> Pengendalian Kuantitas Penduduk tahun 2040 – 2045.....	180
Tabel 6.6	<i>Roadmap</i> Indikator Ekonomi Kota Denpasar tahun 2025-2045	190
Tabel 6.7	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi tahun 2025-2029	191
Tabel 6.8	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi tahun 2030-2034.....	191
Tabel 6.9	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi tahun 2035-2039.....	192
Tabel 6.10	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi Tahun 2040-2045	192
Tabel 6.11	<i>Roadmap</i> Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2025-2045.....	193
Tabel 6.12	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan Tahun 2025-2029	193
Tabel 6.13	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan Tahun 2030-2034	193
Tabel 6.14	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan Tahun 2035-2039	194
Tabel 6.15	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan Tahun 2040-2045	194
Tabel 6.16	<i>Roadmap</i> Indikator Kesehatan Kota Denpasar tahun 2025-2045	194

Tabel 6.17	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029	195
Tabel 6.18	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan Tahun 2030-2034	195
Tabel 6.19	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan Tahun 2035-2039	196
Tabel 6.20	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan Tahun 2040-2045	196
Tabel 6.21	<i>Roadmap</i> Indikator Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kualitas Lainnya tahun 2025-2045.....	197
Tabel 6.22	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kualitas Lainnya Tahun 2025-2029	197
Tabel 6.23	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kualitas Lainnya Tahun 2030-2034	197
Tabel 6.24	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kualitas Lainnya Tahun 2035-2039	198
Tabel 6.25	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kualitas Lainnya Tahun 2040-2045	198
Tabel 6.26	<i>Roadmap</i> Indikator Pembangunan Keluarga Kota Denpasar	198
Tabel 6.27	<i>Roadmap</i> Pembangunan Keluarga tahun 2025-2029.....	199
Tabel 6.28	<i>Roadmap</i> Pembangunan Keluarga tahun 2030-2034.....	200
Tabel 6.29	<i>Roadmap</i> Pembangunan Keluarga tahun 2035-2039.....	200
Tabel 6.30	<i>Roadmap</i> Pembangunan Keluarga tahun 2040-2045.....	201
Tabel 6.31	<i>Roadmap</i> Indikator Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Kota Denpasar Tahun 2025-2045	201
Tabel 6.32	<i>Roadmap</i> Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Tahun 2025-2029	202
Tabel 6.33	<i>Roadmap</i> Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Tahun 2030-2034	202
Tabel 6.34	<i>Roadmap</i> Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Tahun 2035-2039	202
Tabel 6.35	<i>Roadmap</i> Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Tahun 2040-2045	203
Tabel 6.36	<i>Roadmap</i> Indikator Penataan Administrasi Kependudukan Kota Denpasar Tahun 2025-2045	204
Tabel 6.37	<i>Roadmap</i> Penataan Administrasi Kependudukan tahun 2025-2029	204
Tabel 6.38	<i>Roadmap</i> Penataan Administrasi Kependudukan tahun 2030-2034	205
Tabel 6.39	<i>Roadmap</i> Penataan Administrasi Kependudukan tahun 2035-2039	205
Tabel 6.40	<i>Roadmap</i> Penataan Administrasi Kependudukan tahun 2040-2045	205

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan dan Jalur Formulasi GDPK	12
Gambar 2.1	Grafik Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Per Tahun Kota Denpasar Tahun 2017 – 2024	15
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar tahun 2018-2024	17
Gambar 2.3	Rasio Jenis Kelamin Kota Denpasar tahun 2018 – 2022	19
Gambar 2.4	Piramida Penduduk Kota Denpasar Tahun 2020 - 2035	22
Gambar 2.5	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia Subur di Kota Denpasar tahun 2020-2024	24
Gambar 2.6	Prevalensi Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i>) Kota Denpasar dan Provinsi Bali tahun 2021 – 2024	26
Gambar 2.7	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kota Denpasar tahun 2017 – 2024 (%)	28
Gambar 2.8	Persentase <i>Unmetneed</i> di Kota Denpasar tahun 2017 – 2024	29
Gambar 2.9	Indikator Fertilitas Total/TFR di Kota Denpasar Tahun 2017 – 2024.....	31
Gambar 2.10	Indikator Fertilitas Total/TFR Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2022 – 2023.....	31
Gambar 2.11	ASFR 15-19 Tahun Kota Denpasar Tahun 2021-2024.....	32
Gambar 2.12	Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan di Kota Denpasar tahun 2023-2024.....	34
Gambar 2.13	Proporsi Kebutuhan ber-KB yang terpenuhi (<i>Demand Satisfied</i>)	36
Gambar 2.14	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar Tahun 2017 – 2024	39
Gambar 2.15	Jumlah Kematian Bayi Absolut di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020	39
Gambar 2.16	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar Tahun 2017 – 2024	40
Gambar 2.17	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar Tahun 2017-2024	41
Gambar 2.18	Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar 2018 – 2024.....	43
Gambar 2.19	Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional pada Tahun 2018 – 2023	43
Gambar 2.20	Persentase Rumah Tangga menurut Akses Sumber Air Minum Layak di Kota Denpasar	44
Gambar 2.21	Persentase Balita Berat Badan Kurang di Kota Denpasar tahun 2020 – 2023 (%).....	46
Gambar 2.22	Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang di Kota Denpasar tahun 2020 – 2023.....	47
Gambar 2.23	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di Kota Denpasar tahun 2023 (%).....	48
Gambar 2.24	Cakupan ASI Eksklusif Kota Denpasar, 2019 – 2024 (%)	49
Gambar 2.25	Persentase Balita Stunting di Kota Denpasar tahun 2017 – 2024.....	51

Gambar 2.26 Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kota Denpasar tahun 2017-2020	54
Gambar 2.27 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Penduduk Kota Denpasar Tahun 2020-2024	55
Gambar 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar tahun 2018-2024	68
Gambar 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar Tahun 2017–2022....	69
Gambar 2.30 Persentase Kesempatan Kerja di Kota Denpasar tahun 2017-2022	70
Gambar 2.31 Tingkat Kesempatan Kerja Kota Denpasar dan Provinsi Bali tahun 2018 – 2023.....	76
Gambar 2.32 Jumlah Anggota DPRD Kota Denpasar Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Denpasar (%).....	77
Gambar 2.33 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Denpasar tahun 2018 – 2024 (Ribu Jiwa).....	79
Gambar 2.34 Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar (%) Tahun 2017-2024	80
Gambar 2.35 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Denpasar dan Provinsi Bali 2018 – 2023.....	82
Gambar 2.36 Gini Rasio Kota Denpasar tahun 2018 – 2024.....	82
Gambar 2.37 Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar dan Provinsi Bali tahun 2018 – 2024 (%).....	84
Gambar 2.38 Rasio Ketergantungan Penduduk Total Kota Denpasar tahun 2017 – 2024.....	86
Gambar 2.39 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Denpasar tahun 2018 – 2024	87
Gambar 2.40 Jumlah Perkawinan Kota Denpasar Tahun 2017 – 2022	93
Gambar 2.41 Jumlah Kasus Perceraian di Kota Denpasar Tahun 2017-2023	95
Gambar 2.42 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Denpasar tahun 2021 – 2024	96
Gambar 2.43 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	97
Gambar 2.44 Indeks Perlindungan Anak.....	99
Gambar 2.45 Persentase Kelompok Kegiatan BKB di Kota Denpasar yang Berkegiatan tahun 2022 – 2024.....	102
Gambar 2.46 Persentase Kelompok Kegiatan BKR di Kota Denpasar yang Berkegiatan tahun 2022 – 2024.....	103
Gambar 2.47 Persentase Kelompok Kegiatan BKL di Kota Denpasar yang Berkegiatan tahun 2022 – 2024.....	105
Gambar 2.48 Persentase Kelompok PIK-R yang berkegiatan di Kota Denpasar tahun 2022 – 2024.....	107
Gambar 2.49 Jumlah Anak Terlantar Kota Denpasar Tahun 2019 – 2023	110
Gambar 2.50 Jumlah Lansia terlantar di Kota Denpasar Tahun 2019 – 2023.....	111
Gambar 2.51 Lanjut Usia Terlantar di Kota Denpasar tahun 2014 – 2018.....	113
Gambar 2.52 Persentase Rumah Tangga di Kota Denpasar dan Provinsi menurut Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri, 2017-2020 (%).....	114
Gambar 2.53 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni tahun 2018 – 2024	115

Gambar 2.54 Persentase Rumah Tangga memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di Kota Denpasar tahun 2018 – 2024	118
Gambar 2.55 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi IPAL DSDP dan Komunal di Kota Denpasar tahun 2016 – 2024 (%)	119
Gambar 2.56 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak di Kota Denpasar tahun 2016 – 2023	120
Gambar 2.57 Migrasi Masuk, Migrasi Keluar dan Migrasi Netto Seumur Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020	124
Gambar 2.58 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik di Kota Denpasar tahun 2021 – 2024.....	124
Gambar 2.58 Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Denpasar Tahun 2021 – 2024	126
Gambar 2.59 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Denpasar Tahun 2015 – 2020 (%).....	127
Gambar 2.60 Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap di Kota Denpasar Tahun 2021-2024.....	128
Gambar 2.61 Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2017 – 2023 (%) ..	129
Gambar 2.62 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Denpasar 2016 – 2020.....	130
Gambar 2.63 Persentase Area Kawasan Kumuh di Kota Denpasar tahun 2016 – 2020.....	134
Gambar 3.1 Jumlah Lansia di Kota Denpasar tahun 2020 – 2045	158
Gambar 3.2 Proyeksi Penduduk Kota Denpasar 2020-2045 (Ribuan Jiwa)	161

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk serta dinamikanya memiliki peran yang penting dan sangat signifikan. Berbagai aspek pembangunan kependudukan. Pembangunan kependudukan, arah kebijakan, serta strategi kependudukan di masa depan berkaitan erat dengan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK). Namun, GDPK tidak sekadar menjadi sebuah arah kebijakan, melainkan merupakan panduan terinci yang tercakup dalam program pembangunan kependudukan. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah sebuah panduan strategis yang dirancang dengan tujuan untuk menciptakan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan kependudukan. Dokumen ini tidak hanya berperan sebagai sebuah rencana statis, tetapi juga menjadi fondasi utama yang digunakan dalam merumuskan visi, misi, arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan kependudukan. Selain itu, *Grand Design* ini merupakan panduan yang vital dalam menyusun langkah-langkah konkret untuk mencapai pembangunan kependudukan yang berkelanjutan mewujudkan target-target pembangunan kependudukan dengan menyusun langkah strategis dan program-program yang visibel untuk diimplementasikan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Pembangunan Kependudukan menempatkan penduduk sebagai elemen utama, bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai pelaku aktif dan penikmat langsung dari berbagai upaya pembangunan. Pemahaman bahwa pertumbuhan, distribusi, dan kualitas penduduk memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan di berbagai sektor menjadi dasar dalam perumusan GDPK.

Perencanaan pembangunan dikarenakan posisinya yang strategis, Pembangunan Kependudukan menjadi sebuah komponen integral yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pembangunan di berbagai bidang. Melalui peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, pemerintah memiliki panduan yang jelas dalam Menyusun kebijakan dan program pembangunan kependudukan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan

masyarakat. Kebutuhan penduduk mencakup kebutuhan fisik dan non-fisik individu, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan. Pemenuhan kebutuhan fisik dan non-fisik akan menciptakan penduduk yang berkualitas. Kualitas ini digunakan sebagai parameter dasar untuk mengukur kemampuan individu dalam menikmati kehidupan dengan nilai-nilai bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk bertujuan untuk menciptakan manusia yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mencapai tujuan ini, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi individu untuk berkembang secara holistik dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Keberhasilan GDPK berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, termasuk dalam perencanaan keluarga, peningkatan akses dan mutu pendidikan, penguatan kesehatan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat secara umum. Pentingnya Pembangunan Kependudukan tidak hanya terletak pada aspek kuantitatif pertumbuhan penduduk, melainkan juga pada upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh penduduk. GDPK berperan sebagai panduan untuk mengelola, mengarahkan, dan menyelaraskan berbagai kebijakan dan program sehingga tercipta keseimbangan yang berkelanjutan antara pertumbuhan penduduk dan kemampuan negara atau wilayah untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai.

Pembahasan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) melibatkan lima pilar utama yang merinci langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan. Kelima pilar tersebut secara komprehensif melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan struktur administratif. Berikut merupakan penjelasan mengenai masing-masing pilar GDPK:

- 1) **Pengendalian Kuantitas Penduduk:** GDPK menitikberatkan pada pengendalian jumlah penduduk sebagai salah satu pilar utama. Langkah-langkah konkret seperti penyuluhan perencanaan keluarga, peningkatan akses terhadap alat kontrasepsi, dan dukungan kepada masyarakat untuk membuat keputusan bijak

terkait dengan jumlah anak menjadi bagian integral dari upaya pengendalian kuantitas penduduk.

- 2) **Peningkatan Kualitas Penduduk:** Pilar ini mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan reproduksi, dan pembinaan keluarga. GDPK berupaya menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan optimal bagi setiap anggota masyarakat, termasuk anak-anak dan perempuan.
- 3) **Pembangunan Keluarga:** GDPK memberikan perhatian pada pembangunan keluarga berkualitas karena keluarga merupakan unit dasar masyarakat dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup keluarga dalam aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, sehingga mampu berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa.
- 4) **Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk:** Pilar ini menekankan pada penataan dan pengendalian mobilitas penduduk sebagai dasar yang kuat untuk mengelola mobilitas penduduk secara efektif.
- 5) **Penataan Administrasi Kependudukan:** Sebagai tambahan, GDPK mengakui pentingnya penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.

Mengingat penguatan sistem data dan informasi kependudukan yang akurat serta pengelolaan administrasi kependudukan dapat mendukung kebijakan yang berbasis bukti. Sistem ini bertujuan untuk memberikan data yang tepat guna bagi perencanaan pembangunan di berbagai sektor.

Dengan merangkai seluruh lima pilar yang terdapat dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK), terbentuklah suatu kerangka kerja yang sangat komprehensif. Kerangka kerja ini bukan sekadar sekumpulan strategi, melainkan representasi terperinci dari upaya-upaya yang diperlukan untuk mengarahkan dan mengelola pembangunan kependudukan secara holistik. Setiap pilar, mulai dari pengendalian kuantitas penduduk hingga penataan administrasi kependudukan, saling melengkapi satu sama lain dalam menciptakan fondasi yang kokoh. Pengendalian kuantitas penduduk menciptakan dasar bagi pertumbuhan yang terkendali, sementara

peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga memberikan perhatian khusus pada aspek kesejahteraan manusia. Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk menjamin bahwa pertumbuhan penduduk tidak hanya merata tetapi juga didukung oleh pembangunan infrastruktur yang tepat. Sementara itu, penataan administrasi kependudukan menjamin adanya landasan yang kuat untuk manajemen data yang akurat dan efisien.

Melalui kerangka berpikir tersebut, GDPK bukan hanya menargetkan pertumbuhan penduduk yang seimbang, tetapi juga memandang jauh kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini mencakup aspek-aspek penting seperti perencanaan keluarga yang bijak, peningkatan akses dan mutu pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kesehatan masyarakat. Selain penyesuaian target, dokumen GDPK ini juga mencerminkan inovasi dalam rentang waktu yang dikaji. Jika sebelumnya GDPK mencakup arahan kebijakan kependudukan dari 2016 hingga 2026, dokumen terbaru ini memperluas cakupan hingga tahun 2045. Keputusan untuk melibatkan jangka waktu yang lebih panjang menunjukkan visi yang progresif dan komitmen pemerintah dalam mencapai pembangunan kependudukan yang berkelanjutan dan terencana. Dengan demikian, GDPK bukan hanya sekadar mengejar angka-angka demografis, melainkan juga menitikberatkan pada kualitas hidup penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar Kota Denpasar menjadi suatu upaya sistematis yang bertujuan menjadi panduan utama dalam menetapkan arah, tujuan, dan kebijakan program yang merangkum lima pilar penting pembangunan kependudukan. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai sekadar petunjuk, tetapi juga sebagai fondasi kuat bagi perumusan kebijakan yang efektif dan relevan dalam konteks Kota Denpasar. Dokumen GDPK tidak hanya menyoroti pengendalian kuantitas penduduk, melainkan juga menggarap upaya peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Semua ini menyatu dalam satu dokumen sebagai strategi holistik untuk mencapai pembangunan kependudukan yang berkelanjutan di Kota Denpasar.

Dalam pengendalian kuantitas penduduk, dokumen GDPK akan merinci kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mengatur pertumbuhan penduduk sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan wilayah. Fokusnya melibatkan program-program untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tidak kalah penting adalah pembangunan keluarga, yang akan mencakup strategi untuk mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga. Kemudian dari sisi persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, dokumen GDPK akan memberikan panduan tentang bagaimana mengelola perpindahan penduduk agar merata dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan wilayah. Terakhir, penataan administrasi kependudukan akan menjadi landasan untuk mengelola data penduduk secara efisien dan efektif, mendukung perencanaan kebijakan yang berbasis bukti.

Dengan demikian, Dokumen GDPK Kota Denpasar akan menjadi dokumen kunci yang membimbing pemerintah dan stakeholder terkait dalam merancang kebijakan serta mengimplementasikannya, untuk mencapai tujuan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat Kota Denpasar.

1.2.2 Tujuan

Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) bertujuan utama untuk mencapai kualitas penduduk yang tinggi, sehingga dapat menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan daerah. Lebih lanjut, tujuan khusus pelaksanaan GDPK mencakup:

1) Mengoptimalkan Pertumbuhan Penduduk

Langkah-langkah pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk menjadi fokus untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang, menghindari ketidakseimbangan yang dapat merugikan kemajuan daerah.

2) Meningkatkan kualitas hidup penduduk

Tujuan ini mencakup upaya peningkatan kualitas penduduk, baik secara jasmani maupun rohani, dengan mengintegrasikan program-program kesehatan, pendidikan, dan pengembangan karakter.

3) Membangun keluarga yang sejahtera dan tangguh

Fokus pada pembangunan keluarga melibatkan kebijakan dan program untuk menciptakan kondisi yang mendukung keluarga dalam mencapai ketahanan, kesejahteraan, kesehatan, kemajuan, kemandirian, dan harmoni.

4) Mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan

Tujuan ini mencakup upaya untuk menciptakan suatu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat berjalan secara harmonis dan berkelanjutan.

5) Memperkuat keterpaduan kebijakan kependudukan

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya administrasi kependudukan yang efisien dan dapat diandalkan sebagai dasar kebijakan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang diterapkan melibatkan lima pendekatan utama, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Melalui serangkaian strategi ini, diharapkan GDPK mampu memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk masyarakat yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu memberikan dampak positif pada kemajuan daerah.

1.2.3 Sasaran

Terdapat beberapa sasaran penyusunan GDPK Kota Denpasar yang diharapkan dapat mendukung GDPK Nasional. Sasaran penyusunan GDPK Kota Denpasar dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Tercapainya pembangunan berwawasan kependudukan:** Sasaran ini menekankan pada pentingnya mengintegrasikan kebijakan pembangunan dengan aspek kependudukan untuk meningkatkan kualitas penduduk secara keseluruhan, sejalan dengan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM):** Sasaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan penguasaan keterampilan SDM melalui bonus demografi. Kualitas SDM yang optimal dapat dicapai melalui pengendalian penduduk, pengarahan mobilitas penduduk serta pembangunan karakter SDM.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan keluarga:** Fokus pada pembentukan keluarga berkualitas dengan ciri ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya tinggi. Sasaran ini

menyoroti pentingnya mengembangkan keluarga sebagai unit yang tangguh dan berperan dalam mendukung pembangunan kependudukan secara holistik.

- 4) Mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang modern dan terintegrasi:** Sasaran ini mencakup pembangunan database kependudukan di Kota Denpasar melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan dasar data yang kuat guna mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis fakta.

Dengan merinci sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Denpasar diharapkan akan menjadi panduan yang sangat terperinci, memberikan arahan yang jelas, dan mengarahkan fokus pada aspek-aspek krusial pembangunan kependudukan. Dokumen ini diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan dampak positif yang signifikan pada kualitas hidup penduduk, serta memberikan kontribusi besar dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Dengan demikian, Dokumen GDPK Kota Denpasar diharapkan bukan hanya menjadi dokumen panduan, tetapi juga instrumen yang mampu membimbing implementasi kebijakan dan program secara spesifik, menghasilkan dampak positif yang berkesinambungan pada kualitas hidup penduduk, dan menyokong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah pekerjaan penyusunan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) mencakup seluruh kecamatan di Kota Denpasar. Dengan demikian, proses penyusunan ini dirancang untuk melibatkan dan memperhitungkan karakteristik, kebutuhan, serta dinamika kependudukan yang ada di setiap kecamatan di wilayah Kota Denpasar. Melibatkan seluruh kecamatan menjamin bahwa Dokumen GDPK benar-benar merangkum realitas dan variasi kependudukan secara komprehensif, memberikan dasar yang kokoh untuk merumuskan kebijakan dan program yang relevan dengan kondisi setempat di seluruh Kota Denpasar. Dengan memperhatikan setiap kecamatan, diharapkan hasil dari dokumen ini dapat lebih akurat

dan bersifat inklusif, mendukung terciptanya kebijakan kependudukan yang efektif dan berkelanjutan untuk seluruh wilayah Kota Denpasar.

1.3.2 Lingkup Materi

Dasar hukum penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Indonesia didasarkan pada sejumlah regulasi nasional yang berfungsi sebagai landasan formal dan legal dalam pelaksanaan kebijakan kependudukan. Adapun dasar hukum penyusunan GDPK meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengatur berbagai aspek terkait pembangunan kependudukan, dengan tujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan pembangunan keluarga.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan kependudukan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing, sehingga GDPK dapat diimplementasikan secara fleksibel di tingkat lokal.
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, menjadi pedoman nasional yang mengatur kerangka dasar dan arah pembangunan kependudukan di Indonesia, yang meliputi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, serta persebaran penduduk yang merata.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memperkuat peran pemerintah dalam mengelola perkembangan kependudukan melalui berbagai kebijakan yang terintegrasi.

Peraturan tersebut menetapkan kerangka kerja yang jelas dan terukur untuk mengelola kependudukan melalui lima pilar utama. Lingkup materi penyusunan dokumen GDPK Kota Denpasar berfungsi untuk membatasi dan menjabarkan topik secara mendalam, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam regulasi ini. Dengan demikian, penyusunan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Denpasar mencakup lima pilar utama GDPK, yaitu pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengembangan keluarga, pengarahannya mobilitas, serta pengelolaan administrasi kependudukan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengendalian kuantitas penduduk dan pencapaian tumbuh seimbang dilakukan melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.
- 2) Peningkatan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri. Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dilakukan melalui peningkatan:
 - a) kesehatan;
 - b) pendidikan;
 - c) perekonomian (pendapatan per kapita);
 - d) indeks pembangunan manusia;
 - e) kondisi dan kualitas gender; dan

Kualitas penduduk dalam penyusunan GDPK dimaksud adalah menganalisis kondisi existing, identifikasi potensi dan kondisi kualitas penduduk ke depan dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

- 3) Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Untuk mewujudkan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, dilakukan:
 - a) pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b) pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - c) pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
 - d) pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.
- 4) Pengarahan mobilitas penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dilakukan melalui :
 - a) pengarahannya mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;

- b) pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
 - c) pengarahannya persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah; Kebijakan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan menghormati hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dilaksanakan melalui:
 - a) mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk;
 - b) mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.
- 5) Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan pemberian hak-hak individu penduduk pada berbagai pelayanan publik. Hal ini dilakukan dengan:
- a) penataan dan pengelolaan *database* kependudukan; dan
 - b) penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

1.4 Kedudukan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan

Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) memiliki kedudukan yang strategis dalam kerangka perencanaan pembangunan pemerintah, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam jangka panjang, GDPK berfungsi sebagai pedoman utama dalam mencapai visi dan tujuan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan. Dokumen ini mencakup arah kebijakan untuk mengontrol kuantitas penduduk, meningkatkan kualitas, serta memastikan distribusi dan mobilitas yang merata sesuai dengan daya dukung wilayah. Hal ini penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mendukung kesejahteraan secara keseluruhan. Sementara dalam jangka pendek, GDPK memainkan peran penting dalam mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan rencana tahunan atau lima tahunan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang lebih teknis seperti program pengendalian angka kelahiran, perbaikan akses layanan kesehatan, pendidikan, serta reformasi administrasi

kependudukan bisa segera diimplementasikan untuk menghasilkan dampak yang lebih cepat.

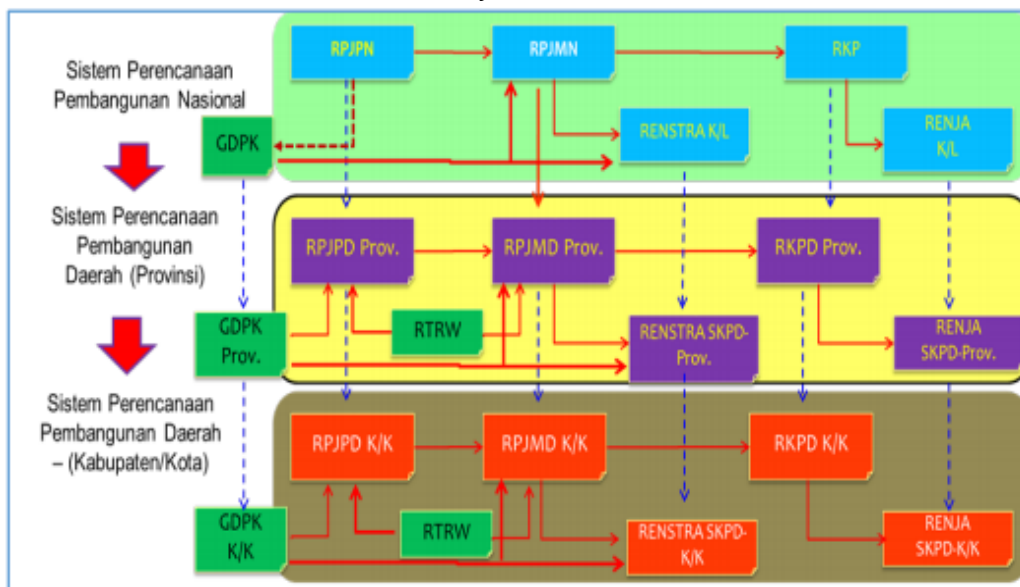
Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) berfungsi sebagai pedoman jangka panjang untuk pembangunan kependudukan, yang kemudian dioperasionalkan melalui *Roadmap* Pembangunan Kependudukan setiap lima tahun. *Roadmap* ini bersifat fleksibel atau *living document*, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan dinamika pemerintahan. Dalam implementasinya, *Roadmap* Pembangunan Kependudukan diinternalisasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang juga menjadi referensi bagi penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga serta Rencana Strategis Daerah. Di tingkat kabupaten/kota, RPJMD menjadi acuan utama dalam menyusun rencana pembangunan kependudukan yang lebih spesifik, sesuai dengan pedoman GDPK nasional. Dalam penyusunan GDPK di daerah, seperti di Kota Denpasar, tahapan perencanaan dan pelibatan beberapa pihak penting untuk memastikan bahwa GDPK diintegrasikan ke dalam kebijakan lokal, mengikuti arahan yang lebih besar dari *Grand Design* di tingkat nasional. Integrasi ini menggambarkan bagaimana *roadmap* GDPK dan RPJMD bekerja selaras untuk memastikan pencapaian target kependudukan dalam periode lima tahunan sebagai bagian dari kerangka pembangunan jangka panjang.

Dalam rangka menjadikan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagai dokumen perencanaan yang bersifat fleksibel atau *living document*, komprehensif dan sesuai dengan kondisi terkini, maka dokumen GDPK akan dilakukan review setiap 5 (lima) tahun. Proses review ini dilaksanakan untuk menyinkronisasikan dokumen GDPK Kota Denpasar dan memutakhirkan *Roadmap*/Peta Jalan GDPK sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMD, *roadmap* dan capaian Pembangunan Kependudukan periode sebelumnya, serta perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar. Penyusunan review dokumen GDPK melibatkan komponen Pemerintah Kota Denpasar maupun pihak lain yang dianggap perlu untuk bersama-sama memastikan perencanaan dan target pembangunan kependudukan pada dokumen GDPK sesuai dengan kondisi terkini.

Gambar 1.1 menggambarkan Kedudukan GDPK dalam sistem perencanaan pembangunan di kabupaten/kota. Proses penyusunan dimulai dari pemerintah pusat

yang merumuskan strategi dan kebijakan nasional terkait kependudukan, mencakup lima pilar utama: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengelolaan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan. Setelah itu, GDPK nasional menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dalam menyusun GDPK di tingkat provinsi, yang kemudian diterjemahkan lagi ke dalam rencana pembangunan kabupaten/kota. Pada setiap tingkatan, proses formulasi GDPK harus memperhatikan data, isu strategis, serta kebijakan yang ada baik di tingkat atas (nasional) maupun di bawahnya (provinsi dan kabupaten/kota) untuk memastikan keselarasan dan integrasi. Dengan demikian, jalur formulasi GDPK bersifat bottom-up dan top-down secara simultan, di mana masukan dari tingkat bawah juga berperan dalam memperkaya kebijakan di tingkat atas. Proses ini memastikan bahwa GDPK di semua tingkatan berjalan secara terpadu dan efektif dalam mengatasi isu-isu kependudukan yang dinamis di setiap wilayah.

Gambar 1.1
Kedudukan dan Jalur Formulasi GDPK



Sumber: BKKBN, 2020

BAB II

ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA DENPASAR

Bab ini menguraikan secara situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan di Kota Denpasar, termasuk analisis data dan indikator demografi yang mencakup struktur dan komposisi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, serta distribusi penduduk di berbagai wilayah kota. Analisis ini meliputi tren pertumbuhan penduduk yang mencerminkan dinamika demografi dari aspek kelahiran, kematian, dan migrasi, yang turut berperan dalam pertumbuhan populasi Denpasar sebagai kota dengan daya tarik ekonomi dan sosial-budaya yang tinggi di Bali. Pembahasan ini mencakup kondisi kependudukan saat ini serta beberapa tahun ke belakang sebagai landasan dalam merumuskan arah pembangunan kependudukan yang diinginkan ke depan.

Bab ini menyoroti tantangan utama yang dihadapi Kota Denpasar, seperti laju pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan kepadatan penduduk dan memberikan tekanan pada fasilitas kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur perkotaan. Tantangan lainnya mencakup kesenjangan sosial, masalah lingkungan, dan kebutuhan peningkatan sistem administrasi kependudukan. Secara keseluruhan, Bab II tidak hanya menyajikan evaluasi atas capaian pembangunan, tetapi juga menganalisis hambatan-hambatan yang ada sebagai acuan bagi pengambilan kebijakan pembangunan kependudukan yang lebih efektif di masa mendatang. Penyajian gambaran mengenai kondisi saat ini serta pencapaian masa lalu akan menjadi landasan penting untuk merumuskan kondisi yang diinginkan di masa mendatang. Pembahasan ini akan mencakup seluruh aspek lima pilar *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK), melibatkan analisis dari sisi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta pembangunan data dan informasi kependudukan.

2.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah upaya untuk mengatur jumlah dan laju pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan daya dukung lingkungan serta kemampuan ekonomi dan sosial suatu wilayah. Langkah ini bertujuan melihat

peningkatan jumlah penduduk, yang dapat menyebabkan beragam masalah seperti kepadatan tinggi, berkurangnya sumber daya alam, tekanan pada infrastruktur, dan menurunnya kualitas hidup. Aspek pengendalian kuantitas penduduk akan memberikan gambaran mengenai kondisi kependudukan di Kota Denpasar melalui tiga dimensi utama. Pertama, akan dibahas jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, dengan menggambarkan tren pertumbuhan populasi Kota Denpasar dalam beberapa tahun terakhir. Analisis ini akan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, seperti tingkat kelahiran dan kematian. Dimensi kedua pembahasan akan menyoroti struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Analisis ini akan mengungkapkan distribusi usia penduduk dan perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan di berbagai kelompok usia. Hal ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika demografis di Kota Denpasar. Dimensi ketiga pembahasan akan fokus pada indikator pengendalian kuantitas lainnya, melibatkan beberapa parameter kunci. Pertama, median usia kawin pertama perempuan (MUKP) di seluruh wanita pada usia 15-49 tahun akan diulas, menggambarkan pola perkawinan di kalangan perempuan di Kota Denpasar. Selanjutnya, akan dianalisis persentase pemakaian kontrasepsi modern (MCPR) dan peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), memberikan gambaran mengenai prevalensi dan preferensi metode kontrasepsi di masyarakat.

Pembahasan akan mencakup persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), Total Fertility Rate (TFR), dan Age-Specific Fertility Rate (ASFR) di kelompok usia 15-19 tahun. Analisis ini akan memberikan informasi penting mengenai tingkat akses dan penggunaan kontrasepsi, serta tingkat kebutuhan yang belum terpenuhi di antara masyarakat Kota Denpasar. Melalui pendekatan ini, diharapkan pembahasan aspek pengendalian kuantitas penduduk dapat memberikan pemahaman yang holistik, mendalam, dan relevan untuk merumuskan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat Kota Denpasar.

2.1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk suatu wilayah menjadi indikator penting yang mencerminkan seberapa besar kebutuhan yang harus dipenuhi di wilayah tersebut. Selain itu, informasi mengenai laju pertumbuhan penduduk juga memiliki nilai strategis karena dapat

digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Oleh karena itu, melalui data jumlah dan laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah, kita dapat merencanakan estimasi kebutuhan dasar penduduk baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Secara khusus, jumlah penduduk Kota Denpasar terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana tergambar pada Gambar 2.1., total populasi Kota Denpasar pada tahun 2020 mencapai 725.314 jiwa. Namun, perlu dicatat bahwa jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar mengalami penurunan pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan data sensus pada tahun 2010. Penurunan ini dapat diperkirakan terkait dengan dampak pandemi Covid-19, yang mungkin menyebabkan sebagian penduduk yang bekerja di Denpasar memilih untuk kembali ke kampung halaman mereka. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 dan 2022 sudah meningkat dengan laju pertumbuhan masing-masing 0,18 persen dan 0,03 persen dengan jumlah total penduduk adalah 726.599 pada tahun 2021 serta 726.800 pada tahun 2022.

Dengan melihat dinamika jumlah dan pertumbuhan penduduk ini, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Analisis ini dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan penduduk Kota Denpasar, termasuk upaya-upaya untuk memitigasi dampak pandemi dan mendukung pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Gambar 2.1
Grafik Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Per Tahun Kota Denpasar Tahun 2017-2024



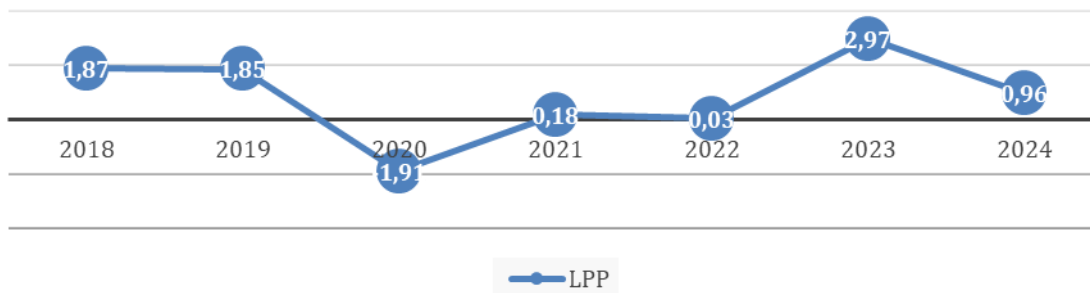
Sumber: BPS Kota Denpasar dan Kota Denpasar Dalam Angka (diolah), 2023

*Data tahun 2021 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, Data tahun 2022 berdasarkan hasil Longform Sensus Penduduk 2020, Data tahun 2023 dan 2024 berdasarkan hasil proyeksi.

Gambar 2.1 menunjukkan perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kota Denpasar dari tahun 2018 hingga 2024 memiliki keterkaitan erat dengan arah dan kebijakan pembangunan kependudukan di wilayah Kota Denpasar. Pembangunan kependudukan tidak hanya bertujuan untuk mengatur jumlah penduduk, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas, persebaran, dan mobilitas penduduk yang seimbang dengan daya dukung lingkungan serta kebutuhan pembangunan sosial-ekonomi. Pada periode 2018–2019, ketika LPP Denpasar berada di angka tinggi (sekitar 1,87%–1,85%), tantangan pembangunan kependudukan lebih berfokus pada pengelolaan urbanisasi dan penyediaan layanan dasar—seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan—yang sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Kota Denpasar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan administrasi menarik banyak penduduk dari luar daerah, sehingga pembangunan kependudukan pada masa itu diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dan kapasitas pelayanan publik.

Namun, memasuki tahun 2020, terjadi penurunan tajam LPP ke -1,91%, dipicu oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan lonjakan kematian, menurunnya angka kelahiran, serta eksodus penduduk non-permanen. Hal ini menandai perubahan orientasi dalam pembangunan kependudukan, yang bergeser dari pengendalian jumlah ke pemulihan kesejahteraan penduduk, pemenuhan layanan kesehatan darurat, dan perlindungan kelompok rentan. Di sinilah pentingnya kebijakan yang adaptif terhadap krisis, termasuk dukungan sosial dan reformasi pelayanan kesehatan. Meskipun pada tahun 2022, 2023, dan 2024 pertumbuhan penduduk mulai pulih, angkanya cukup fluktuatif yaitu 0,03 pada tahun 2022, 2,97 pada tahun 2023 dan 0,96 pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa upaya pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19 sudah menunjukkan keberhasilan, dimana jumlah penduduk di Kota Denpasar sudah kembali meningkat yang disebabkan oleh penduduk yang migrasi masuk ke Denpasar. Dengan demikian, fluktuasi LPP di Denpasar mencerminkan bahwa pembangunan kependudukan perlu bersifat terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan, tidak hanya menanggapi perubahan jumlah penduduk, tetapi juga mampu merespons krisis dan mendukung transformasi sosial menuju penduduk yang lebih berkualitas, produktif, dan sejahtera.

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar tahun 2018-2024



Sumber: BPS Kota Denpasar, 2024

*Data tahun 2021 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, Data tahun 2022 berdasarkan hasil Longform Sensus Penduduk 2020, Data tahun 2023 dan 2024 berdasarkan hasil proyeksi.

2.1.2 Struktur Umur dan Jenis Kelamin

Struktur umur dan jenis kelamin adalah komponen fundamental dalam analisis demografi, karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai komposisi penduduk suatu wilayah berdasarkan usia dan gender. Informasi mengenai struktur umur dan jenis kelamin membantu dalam memahami karakteristik populasi, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Struktur umur menunjukkan pembagian penduduk dalam berbagai kelompok usia, seperti usia anak-anak, usia produktif, dan usia lanjut. Pembagian ini memungkinkan analisis mengenai ketergantungan penduduk, di mana populasi usia produktif diharapkan mendukung kelompok usia non-produktif, yaitu anak-anak dan lanjut usia. Komposisi jenis kelamin, menyoroti perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap kelompok umur. Analisis ini sangat penting karena perbandingan ini dapat memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi, seperti distribusi tenaga kerja dan kebutuhan layanan kesehatan yang spesifik gender. Misalnya, proporsi perempuan yang lebih tinggi pada kelompok usia lanjut menunjukkan kebutuhan akan layanan kesehatan yang lebih khusus, mengingat perempuan cenderung memiliki usia harapan hidup lebih panjang daripada laki-laki.

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk menurut struktur umur dan jenis kelamin, sebagaimana didefinisikan sebagai jumlah individu yang dihitung dalam setahun dengan pembulatan ke bawah atau setara dengan usia yang mencapai ulang tahun yang terakhir. Penduduk yang dibagi menurut kelompok umur lima tahunan. Sementara itu, penduduk menurut jenis kelamin menggambarkan total jumlah individu berdasarkan kategorinya sebagai laki-laki atau perempuan. Data penduduk yang

diorganisir berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin tidak hanya menyediakan informasi dasar tentang penyebaran populasi, tetapi juga menjadi landasan bagi sejumlah indikator demografi. Seperti data kependudukan memungkinkan perhitungan *sex ratio*, yaitu rasio jumlah laki-laki terhadap perempuan dalam suatu populasi. Kemudian dapat menjadi dasar untuk menghitung rasio ketergantungan, yang menunjukkan proporsi antara penduduk usia produktif dan non-produktif dalam masyarakat. Data ini juga digunakan dalam penyusunan piramida penduduk, grafik visual yang mengilustrasikan pembagian penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Melalui pemanfaatan data penduduk yang terperinci, pemerintah dapat merumuskan kebijakan demografis yang lebih efektif dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika populasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Distribusi penduduk menurut kelompok umur, selain memberikan gambaran mengenai proses demografi yang terjadi di masa lalu, juga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan penduduk di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil Proyeksi Jumlah Penduduk dan Sensus Penduduk, dapat diketahui bahwa di Bali secara perlahan telah terjadi pergeseran komposisi penduduk menurut kelompok umur penduduk. Pada Tabel 2.1 terlihat peningkatan komposisi penduduk kelompok umur tua dan penurunan penduduk kelompok umur muda. Sementara itu, pada kelompok umur tua proporsi penduduk tua terus meningkat. Secara lebih rinci, angka persentase penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2017 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Komposisi Penduduk Kota Denpasar Menurut Kelompok Umur
tahun 2017 – 2023 (%)

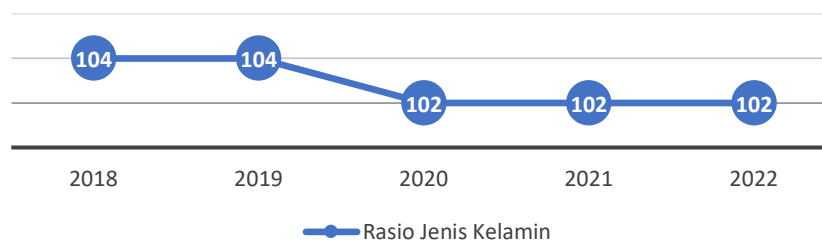
Kelompok Umur	Tahun (%)						
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*
0-4	7,8	7,8	7,8	6,8	6,9	6,9	6,9
5-9	7,8	7,6	7,4	7	6,8	6,7	6,6
10-14	7,1	7	7	7,8	7,6	7,4	7,2
15-19	8,7	8,6	8,5	7,8	7,7	7,7	7,6
20-24	11,1	11,1	11	8,2	8,1	7,9	7,7
25-29	11	11	11	8,1	8,1	8,0	8,0
30-34	10	9,9	9,9	8	7,9	7,9	7,8
35-39	8,7	8,7	8,7	8	7,9	7,8	7,7
40-44	7,4	7,4	7,3	8,2	8,1	8,0	7,8
45-49	6,9	6,9	7	7,7	7,8	7,8	7,8

50-54	5	5,1	5,2	7,1	7,2	7,2	7,3
55-59	3,3	3,4	3,5	5,5	5,8	6,0	6,3
60-64	2,4	2,5	2,6	3,8	4,0	4,3	4,5
65-69	1,3	1,3	1,4	2,7	2,9	3,0	3,1
70-75	0,8	0,8	0,9	1,6	1,7	1,8	2,0
75+	0,9	0,9	0,9	1,4	1,5	1,6	1,7
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Data proyeksi 2017-2019 berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015^a; Data 2020 berdasarkan Sensus Penduduk (SP2020); *Proyeksi penduduk Kota Denpasar 2021 - 2023 (BPS)^b

Hasil data sensus penduduk tahun 2020 (SP2020) menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Denpasar menunjukkan kecenderungan yang lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Secara spesifik, pada tahun 2020, rasio jenis kelamin di Kota Denpasar tercatat sebesar 102,01. Artinya, dari setiap 100 penduduk perempuan di Denpasar, terdapat tidak kurang dari 102 penduduk laki-laki. Angka rasio jenis kelamin ini memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai distribusi dan proporsi penduduk laki-laki dan perempuan di wilayah tersebut. Menariknya, ketidakseimbangan ini dapat menjadi sumber informasi yang penting dalam merencanakan kebijakan dan program pembangunan. Analisis mendalam terhadap profil jenis kelamin penduduk Kota Denpasar dapat mengungkapkan pola-pola sosial dan ekonomi yang mempengaruhi dinamika populasi. Dengan demikian, pemahaman akan ketidakseimbangan jenis kelamin ini dapat menjadi landasan untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mendukung kesetaraan gender di Kota Denpasar.

Gambar 2.3
Rasio Jenis Kelamin Kota Denpasar tahun 2018 - 2022



Sumber: Denpasar dalam Angka 2018-2022

Jumlah penduduk secara keseluruhan di Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini. Selama tahun 2017 sampai tahun 2023 terlihat bahwa jumlah penduduk di Kota Denpasar mengalami tren yang menurun, terutama pada kelompok usia 0-14 tahun. Sedangkan kelompok umur produktif, yaitu 15 tahun ke atas cenderung

mengalami peningkatan, dimana peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dengan jelas terjadi pada kelompok usia 45 tahun ke atas. Dengan mengetahui perkembangan jumlah penduduk berdasarkan komposisi umur, maka dapat diketahui struktur demografi penduduk Kota Denpasar. Dapat disimpulkan bahwa pada saat ini, penduduk Kota Denpasar mengalami penurunan jumlah pada penduduk usia muda, dan pertumbuhan jumlah pada penduduk usia tua. Hal ini sekaligus menjadi informasi, agar saat ini dan kedepannya Pemerintah Kota Denpasar menyusun kebijakan terkait dengan kondisi demografi penduduk, misalnya meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta jaminan sosial untuk mengantisipasi pertumbuhan lansia yang semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Denpasar Menurut Kelompok Umur
Tahun 2017 - 2023

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
0-4	77.000	77.600	37.856	49.461	50.300	51.040	51.690
5-9	72.400	71.900	50.327	50.801	50.150	49.750	49.590
10-14	68.900	69.900	55.545	56.696	56.000	54.920	53.660
15-19	74.700	77.300	58.952	56.909	56.770	56.890	57.090
20-24	97.200	98.000	53.530	59.501	59.140	58.500	57.760
25-29	97.700	99.000	45.166	58.703	59.060	59.400	59.670
30-34	85.300	87.000	41.389	57.989	58.140	58.290	58.460
35-39	78.200	78.600	49.067	57.887	57.660	57.600	57.660
40-44	75.500	76.100	53.879	59.285	59.710	59.280	58.670
45-49	61.600	63.100	58.009	56.182	57.020	57.900	58.720
50-54	46.300	49.000	49.667	51.506	52.740	53.630	54.300
55-59	32.200	33.600	33.998	40.082	42.390	44.670	46.810
60-64	19.800	20.900	24.293	27.904	29.670	31.660	33.800
65+	27.500	28.600	37.575	41.868	37.575	41.868	37.575

Sumber: Badan Pusat Statistik. Kota Denpasar dalam Angka 2016-2023

RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. Proyeksi Penduduk Kota Denpasar 2023.

Perkembangan jumlah penduduk selain berdasarkan umur juga menurut jenis kelamin disajikan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk menjadi cermin dari struktur penduduk suatu wilayah yang mencakup kelompok umur dan jenis kelamin. Bentuk piramida penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh pertumbuhan

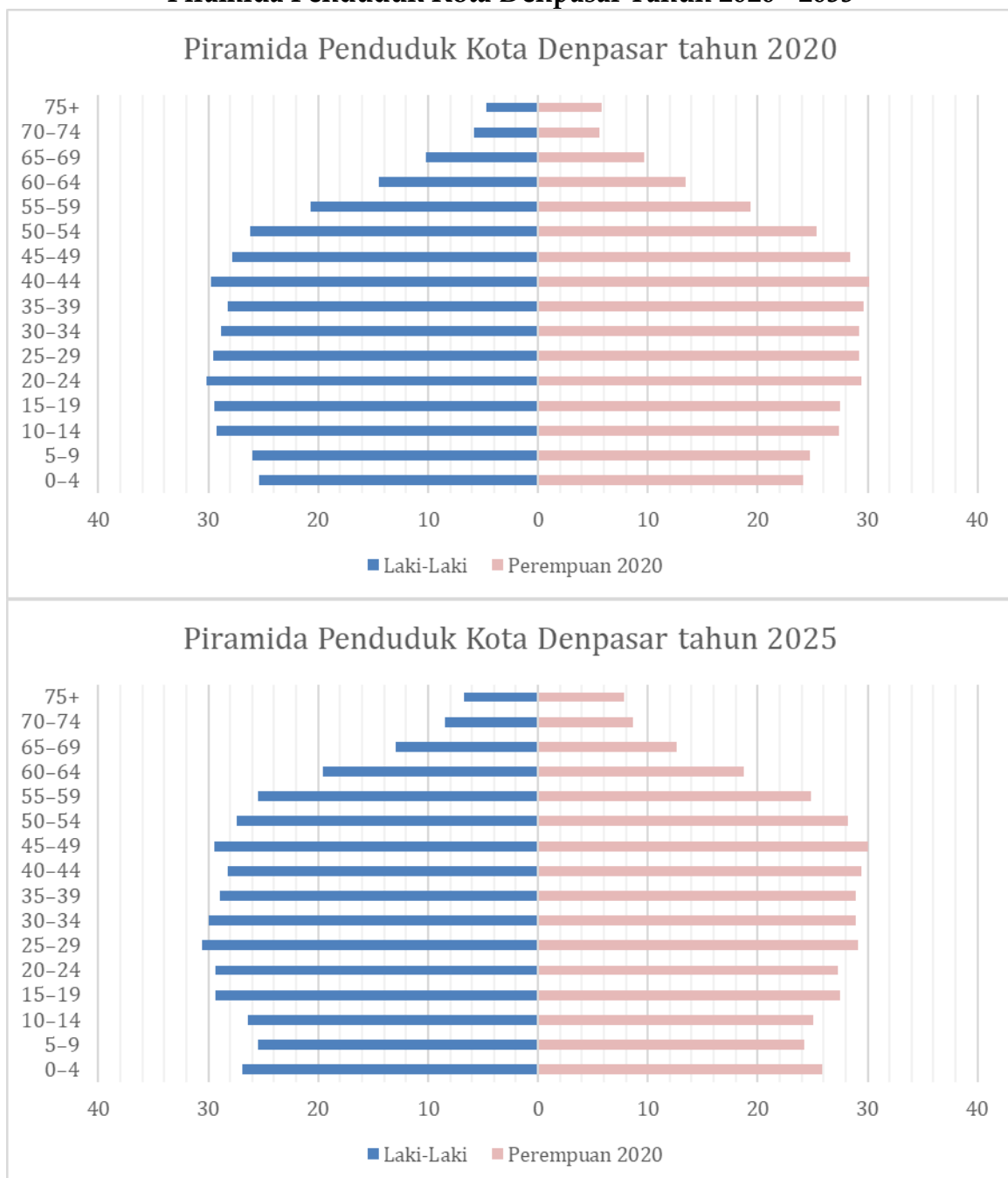
alamiah dan migrasi neto yang terjadi. Secara umum, struktur umur penduduk wilayah berkembang sering menunjukkan proporsi yang lebih tinggi pada kelompok usia muda daripada usia dewasa, yang disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran dan kematian. Di sisi lain, wilayah maju biasanya memiliki proporsi yang lebih seimbang antara kelompok usia muda dan usia tua.

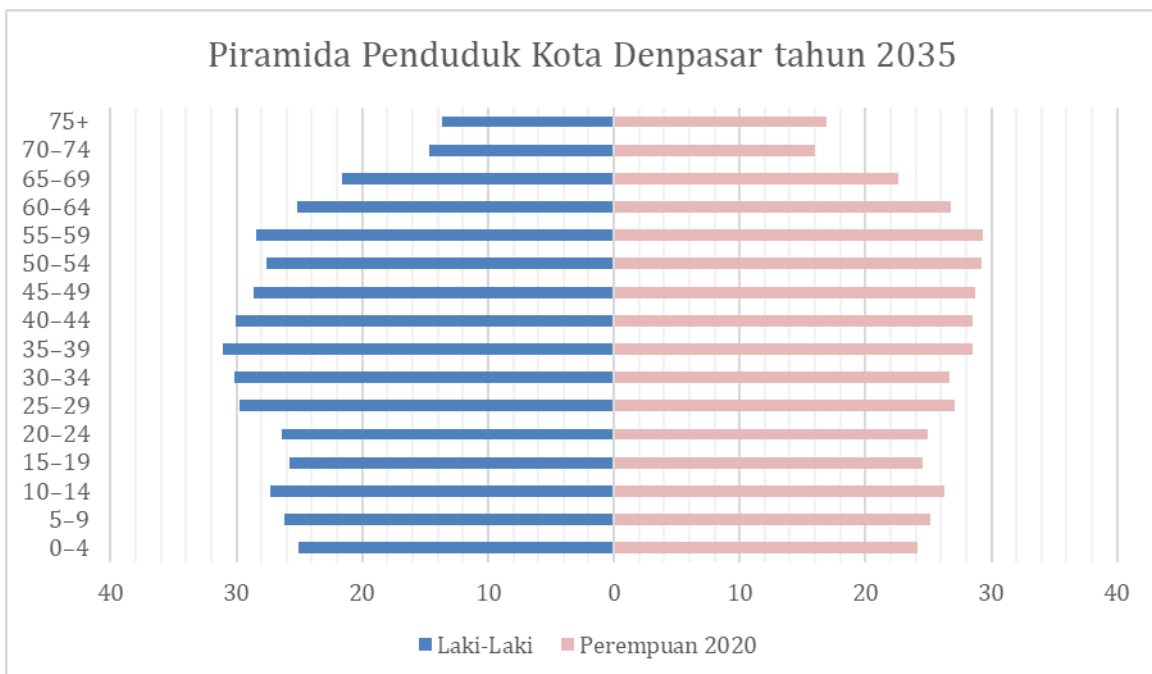
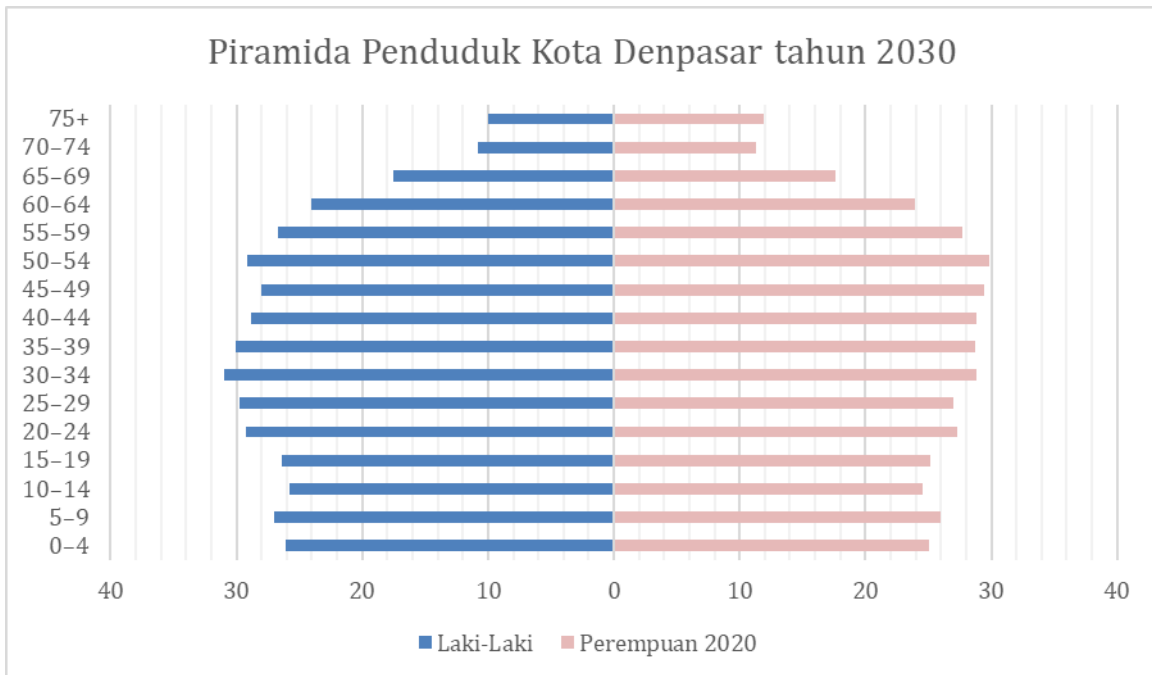
Piramida penduduk adalah representasi visual yang menggambarkan distribusi populasi berdasarkan umur dan jenis kelamin dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Gambar piramida penduduk Kota Denpasar untuk tahun 2020, 2025, 2030, dan 2035 memberikan gambaran mendalam tentang struktur demografis dan tren populasi kota Denpasar. Pada tahun 2020, piramida penduduk Denpasar menunjukkan struktur yang mendekati bentuk piramida tradisional, dimana populasi terbesar berada pada kelompok usia muda (0-4 tahun) dan berkurang secara bertahap pada kelompok umur yang lebih tua. Kelompok usia produktif (20-49 tahun) memiliki populasi yang cukup besar, mengindikasikan potensi tenaga kerja yang signifikan. Selain itu, terdapat keseimbangan yang relatif antara jumlah laki-laki dan perempuan di sebagian besar kelompok umur. Pada tahun 2025, terlihat adanya peningkatan jumlah penduduk di kelompok umur 25-29 tahun dan 30-34 tahun. Struktur ini masih mempertahankan bentuk piramida, dengan basis yang lebar pada kelompok usia muda, menunjukkan tingkat kelahiran yang stabil. Pada tahun 2030, piramida penduduk mulai menunjukkan pelebaran di bagian tengah, khususnya pada kelompok umur 30-34 tahun dan 35-39 tahun. Hal ini menandakan populasi usia produktif yang terus meningkat, sementara jumlah penduduk pada kelompok umur tua (60 tahun ke atas) mulai mengalami peningkatan, menunjukkan tanda-tanda awal penuaan populasi. Pada tahun 2035, struktur penduduk semakin menyerupai bentuk tabung atau lonceng, dengan populasi yang hampir merata di kelompok umur muda dan usia produktif. Terdapat peningkatan signifikan pada kelompok umur 30-34 tahun dan 35-39 tahun, menandakan dominasi kelompok usia produktif yang terus berlanjut. Selain itu, jumlah penduduk usia tua (65 tahun ke atas) juga semakin meningkat, yang mengindikasikan perlunya perhatian lebih pada layanan kesehatan dan sosial bagi kelompok usia lanjut. Piramida penduduk Kota Denpasar dari tahun 2020 hingga 2035 menunjukkan tren demografis yang berpotensi mengalami penuaan populasi, dengan kelompok usia produktif tetap mendominasi namun diikuti oleh peningkatan populasi usia lanjut. Informasi ini sangat penting bagi

perencanaan kota dalam hal kebijakan ekonomi, kesehatan, dan sosial untuk mengakomodasi perubahan demografis yang terjadi.

Penting untuk menjadi catatan bahwa perkembangan ini juga mencerminkan perubahan dalam tingkat kelahiran. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok umur balita (0–4 tahun) hampir setara dengan kelompok umur di atasnya. Hal ini menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat kelahiran dan mungkin mencerminkan pergeseran menuju struktur penduduk yang lebih seimbang di masa depan. Dengan pemahaman mendalam terhadap piramida penduduk ini, dapat dirancang kebijakan yang responsif terhadap dinamika demografis dan kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar.

Gambar 2.4
Piramida Penduduk Kota Denpasar Tahun 2020 - 2035





Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024. Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 2020 - 2035

2.1.3 Indikator Kuantitas Penduduk Lainnya.

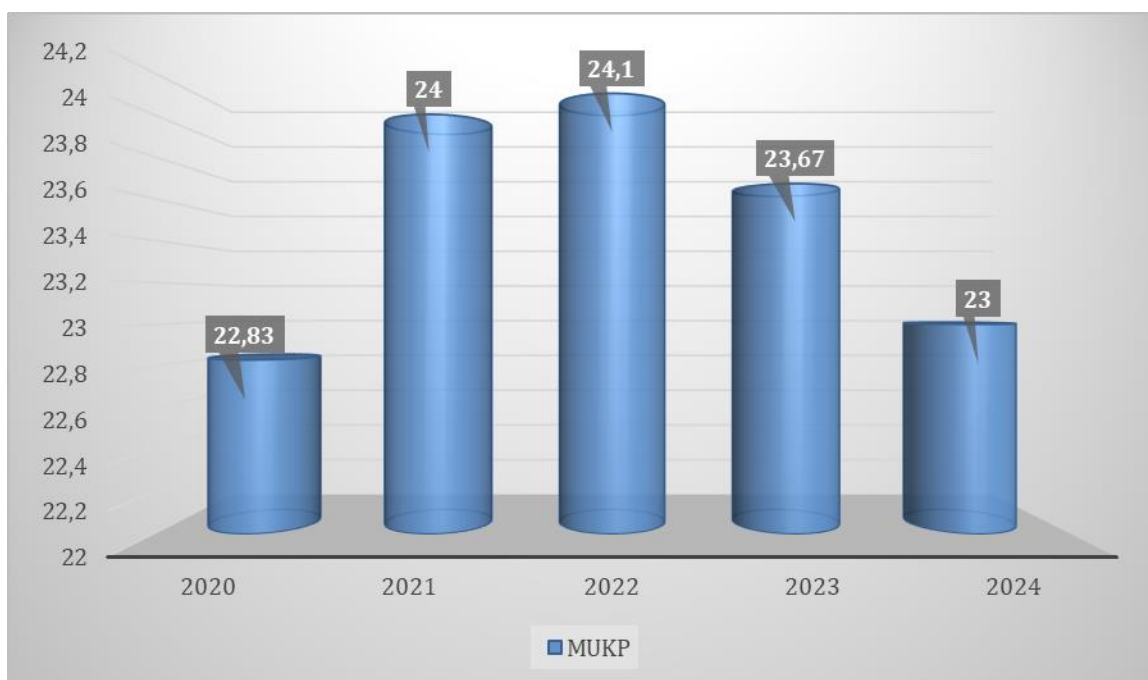
2.1.3.1 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Wanita Pada Usia 15-49 Tahun

Usia perempuan saat perkawinan pertama memiliki dampak signifikan terhadap tingkat fertilitas dalam populasi penduduk. Secara umum, semakin muda seseorang menikah, semakin panjang periode reproduksi yang mereka alami, sehingga meningkatkan kesempatan untuk memiliki keturunan. Sebaliknya, menikah pada usia yang terlalu tua juga dapat mempengaruhi tingkat fertilitas karena periode reproduksi

yang lebih pendek dan lebih berisiko bagi seorang perempuan untuk memiliki anak. Kesehatan ibu dan anak dapat dipengaruhi oleh usia pernikahan yang tidak ideal, baik terlalu muda maupun terlalu tua, karena kondisi fisik selama kehamilan dan persalinan sangat dipengaruhi oleh usia ibu. Usia pernikahan yang tidak tepat juga dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak.

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditunjukkan oleh Gambar 2.4 menunjukkan bahwa tahun 2020, usia rata-rata pernikahan pertama bagi wanita usia subur (15-49 tahun) di Kota Denpasar mencapai 22,83 tahun atau dibulatkan menjadi 23 tahun, yang menempatkannya sebagai angka tertinggi di antara semua kabupaten/kota di Provinsi Bali. Studi terkait menunjukkan bahwa usia pernikahan pertama yang lebih tinggi pada wanita umumnya terkait dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan akses yang lebih baik terhadap informasi serta layanan kesehatan reproduksi. Pada sisi lain, faktor ekonomi dan sosial juga dapat mempengaruhi keputusan mengenai usia pernikahan pertama wanita, dengan adanya indikasi bahwa kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi dapat memungkinkan pasangan menikah pada usia yang lebih matang, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap kesehatan reproduksi ibu dan anak serta pengelolaan keluarga secara keseluruhan.

Gambar 2.5
Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia Subur di Kota Denpasar tahun 2020-2024



Sumber: BKKBN Provinsi Bali, 2024

Penting untuk memahami bahwa umur perkawinan pertama yang tidak ideal dapat memiliki dampak serius pada kesehatan ibu dan anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam kaitan antara umur perkawinan pertama, tingkat fertilitas, dan dampaknya pada kesehatan ibu dan anak. Temuan-temuan tersebut dapat memberikan dasar yang kuat untuk merancang intervensi kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung kesehatan reproduksi di Kota Denpasar dan masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada Gambar 2.4 dapat dilihat bahwa rata – rata umur perkawinan wanita usia subur di Kota Denpasar pada 2020 adalah sebesar 22,83 dan pada 2023 meningkat menjadi 23,67. Hal ini berarti bahwa rata-rata umur perkawinan Wanita di Kota Denpasar semakin tinggi. Hal ini berarti ada individu telah menyelesaikan pendidikannya serta ditinjau dari sisi ekonomi individu memiliki stabilitas mental dan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, menikah pada usia yang lebih matang ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan keluarga, dan pengelolaan kehamilan yang lebih baik. Hal ini juga dapat mengurangi risiko kesehatan ibu dan anak yang terkait dengan usia pernikahan yang terlalu muda. Meskipun demikian, usia ini masih berada pada batas baik untuk bereproduksi, dimana waktu terbaik untuk perempuan hamil dan melahirkan adalah antara 20 tahun sampai dengan 35 tahun. Kehamilan di bawah usia 20 tahun atau di atas 35 tahun akan dapat berisiko terhadap kondisi ibu dan anak.

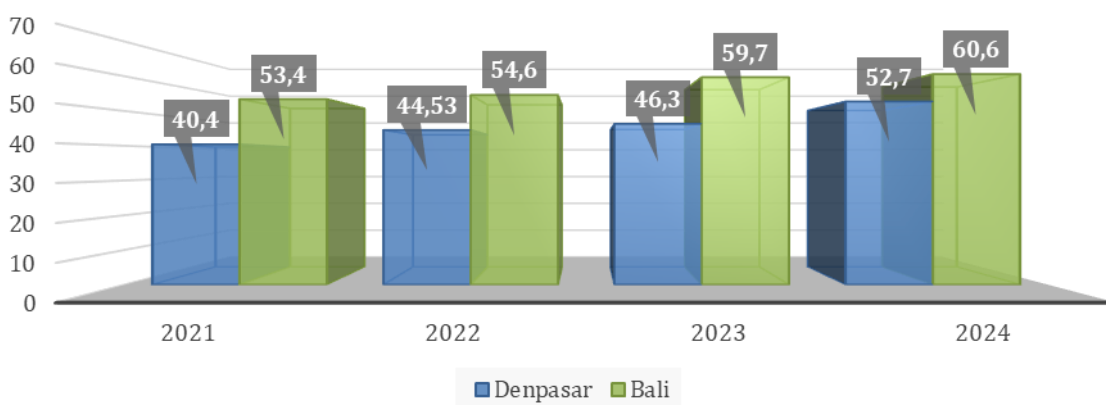
2.1.3.2 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mPCR*)

Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) merupakan subbagian dari *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) yang melibatkan peserta Keluarga Berencana (KB) menggunakan metode modern, seperti IUD, Implant, MOP, MOW, Suntik, Pil, Kondom, dan Metode Amenore Laktasi (MAL). mCPR didefinisikan sebagai persentase perempuan yang telah menikah dalam rentang usia 15-49 tahun yang menggunakan metode kontrasepsi modern pada periode pengamatan tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi dalam penggunaan alat/obat kontrasepsi modern, yang menjadi kunci dalam pengendalian fertilitas penduduk.

Pentingnya mCPR sebagai indikator adalah karena kontrasepsi modern menawarkan pengukuran yang lebih terukur terhadap efektivitas dan durasi

penggunaan dibandingkan dengan metode kontrasepsi tradisional. Penggunaan metode kontrasepsi modern di Kota Denpasar mencerminkan tingkat penerimaan dan keberlanjutan masyarakat terhadap upaya pengendalian fertilitas. Analisis lebih lanjut terkait mCPR dapat memberikan wawasan mendalam tentang preferensi dan aksesibilitas terhadap metode kontrasepsi modern, memungkinkan perencanaan program KB yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Gambar 2.6
Prevalensi Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR*) Kota Denpasar dan Provinsi Bali tahun 2021 – 2024



Sumber: BKKBN, 2024. SiPerindu.

Berdasarkan Gambar 2.5, data menunjukkan tren peningkatan signifikan mCPR di Kota Denpasar selama periode 2021–2024. Pada 2021, mCPR Denpasar berada di 40,4%, jauh di bawah rata-rata Provinsi Bali yang sudah mencapai 53,4%. Selisih ini menunjukkan bahwa pada awal periode, pemanfaatan kontrasepsi modern di Denpasar relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Pada 2022, angka mCPR Denpasar meningkat menjadi 44,53%, meskipun masih tertinggal dari Bali (54,6%). Tren positif berlanjut pada 2023 dengan capaian 46,3% di Denpasar, sementara Bali naik ke 59,7%.

Lonjakan terbesar terjadi pada 2024, ketika mCPR Denpasar mencapai 52,7%, mendekati rata-rata Bali sebesar 60,6%. Fenomena peningkatan mCPR Denpasar juga konsisten dengan tren nasional dan global pasca-pandemi COVID-19, di mana banyak daerah memperluas layanan kesehatan reproduksi untuk mengejar ketertinggalan akibat pembatasan layanan pada 2020–2021 (UNFPA, 2022). Secara internasional, WHO (2021) menekankan bahwa penggunaan kontrasepsi modern memiliki korelasi kuat dengan penurunan angka kehamilan tidak diinginkan, perbaikan kesehatan ibu, dan penguatan ketahanan keluarga. Peningkatan mCPR dapat dijelaskan melalui konsep *Health Belief Model* (Rosenstock, 1974), yang menyatakan bahwa individu akan lebih

cenderung menggunakan layanan kesehatan (termasuk kontrasepsi) jika mereka memahami manfaatnya, merasa rentan terhadap risiko kesehatan, dan memiliki akses mudah ke layanan tersebut. Peningkatan mCPR di Denpasar menunjukkan adanya pergeseran kesadaran dan perilaku masyarakat menuju adopsi metode kontrasepsi modern yang lebih konsisten.

Meskipun mengalami kemajuan signifikan, mCPR Denpasar masih belum setara dengan capaian rata-rata Bali. Hal ini dapat mencerminkan adanya disparitas akses layanan antarwilayah, perbedaan tingkat literasi kesehatan reproduksi, atau pengaruh norma budaya dan agama yang memengaruhi penerimaan kontrasepsi modern. Untuk mencapai kesetaraan, diperlukan strategi yang lebih inklusif, seperti penyediaan layanan KB ramah remaja, penguatan peran kader kesehatan, dan integrasi program KB dalam layanan kesehatan primer. Peningkatan mCPR yang konsisten juga memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya target 3.7, akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk keluarga berencana merupakan salah satu pilar penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan antar generasi.

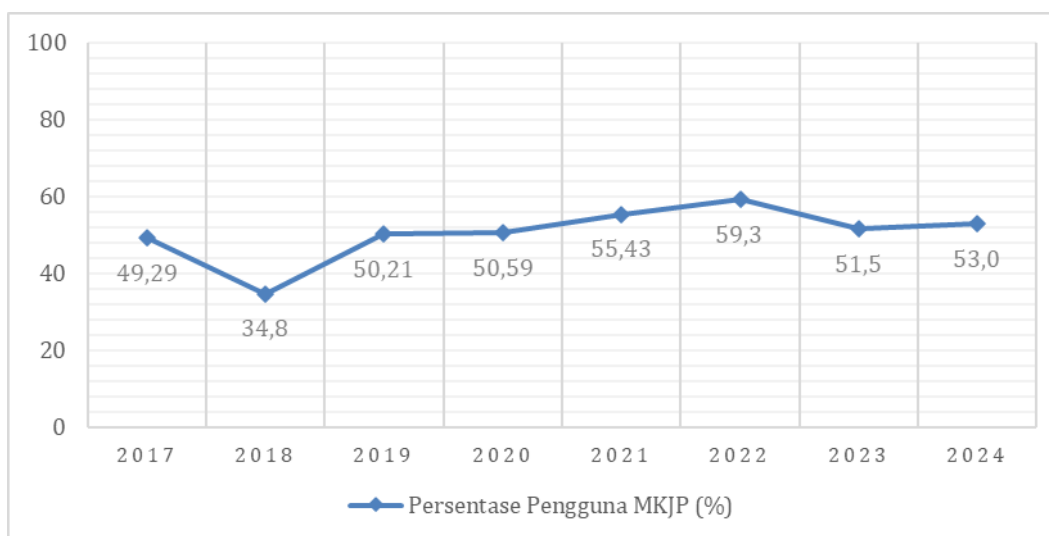
2.1.3.3 Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode kontrasepsi yang diimplementasikan dalam program pemerintah didasarkan pada konsep masa perlindungan, yaitu dibagi menjadi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Metode Kontrasepsi Non-Jangka Panjang (non-MKJP) (Kementerian Kesehatan, 2021). MKJP merupakan bagian dari metode kontrasepsi modern yang mencakup Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW), IUD (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim – AKDR), dan Implant (susuk). Keberlanjutan MKJP menjadi perhatian utama karena memberikan perlindungan jangka waktu yang lebih panjang terhadap kehamilan, sambil mengurangi angka putus pakai dalam jangka waktu pendek.

Keunggulan MKJP terletak pada efektivitasnya dalam menurunkan risiko kehamilan, yang secara simultan dapat meningkatkan ketahanan penggunaan kontrasepsi dalam jangka waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, metode ini diharapkan dapat terus meningkatkan tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat. Analisis angka MKJP di Kota Denpasar dapat memberikan gambaran tentang sejauh

mana masyarakat mengadopsi dan memanfaatkan metode kontrasepsi jangka panjang dalam upaya mengendalikan fertilitas dan mendukung perencanaan keluarga yang lebih efektif.

Gambar 2.7
Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kota Denpasar tahun 2017 – 2024 (%)



Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Gambar 2.6 diatas, dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan dalam persentase peserta KB aktif MKJP. Sejak tahun 2019, persentase peserta KB secara konsisten berada di atas target yang telah direncanakan. Peningkatan ini mencerminkan respons positif dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat terhadap program KB yang diimplementasikan. Tren peningkatan persentase peserta KB aktif MKJP selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya promosi dan edukasi mengenai manfaat Keluarga Berencana telah berhasil merangsang kesadaran masyarakat. Keterlibatan yang kuat ini dapat diartikan sebagai dukungan luas terhadap upaya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

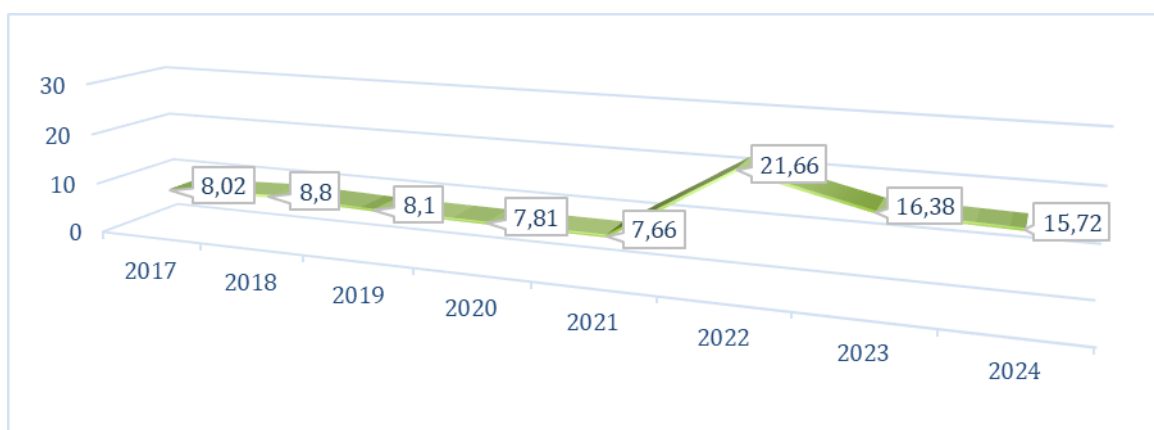
Berdasarkan persentase yang melebihi target sejak tahun 2019 menunjukkan keberhasilan implementasi program KB dan tingginya tingkat kesadaran serta penerimaan masyarakat terhadap program tersebut. Hal ini memberikan indikasi positif bahwa strategi pemerintah dalam mempromosikan program keluarga berencana telah mencapai tujuan dan memberikan dampak yang signifikan pada tingkat partisipasi peserta KB di wilayah Kota Denpasar.

2.1.3.4 Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmetneed*)

Definisi operasional dari *unmetneed* merujuk pada kelompok Pasangan Usia Subur (PUS) yang menginginkan penundaan kehamilan atau tidak ingin memiliki anak lagi, namun kebutuhan mereka terhadap keluarga berencana (alat kontrasepsi) belum terpenuhi. Rumus operasional untuk mengukur *unmetneed* adalah jumlah PUS yang menginginkan penundaan atau tidak ingin memiliki anak lagi tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi dibagi dengan total jumlah PUS, lalu hasilnya dikalikan 100. Menurut Bradley et al. (2012), *unmetneed* KB didefinisikan sebagai persentase perempuan usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi, namun memiliki keinginan untuk menunda atau mengurangi kehamilan. Dalam konteks ini, makna harafiah atau literal dari *unmetneed* adalah ketidaktersediaan atau ketidakpenuhannya kebutuhan keluarga berencana. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan usia subur menginginkan jenis kontrasepsi tertentu yang belum tersedia, sehingga mereka memutuskan untuk tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Sebagai alternatif, kondisi ini juga dapat terjadi jika alat kontrasepsi yang digunakan saat ini tidak sesuai dengan preferensi mereka (Listyaningsih et al., 2016).

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi di Kota Denpasar menjadi indikator yang relevan dan signifikan dalam konteks kesehatan reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dinamika faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpenuhan kebutuhan ber-KB di wilayah tersebut, sehingga dapat merancang strategi intervensi yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan reproduksi masyarakat.

Gambar 2.8
Persentase *Unmetneed* di Kota Denpasar tahun 2017 – 2024



Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2024

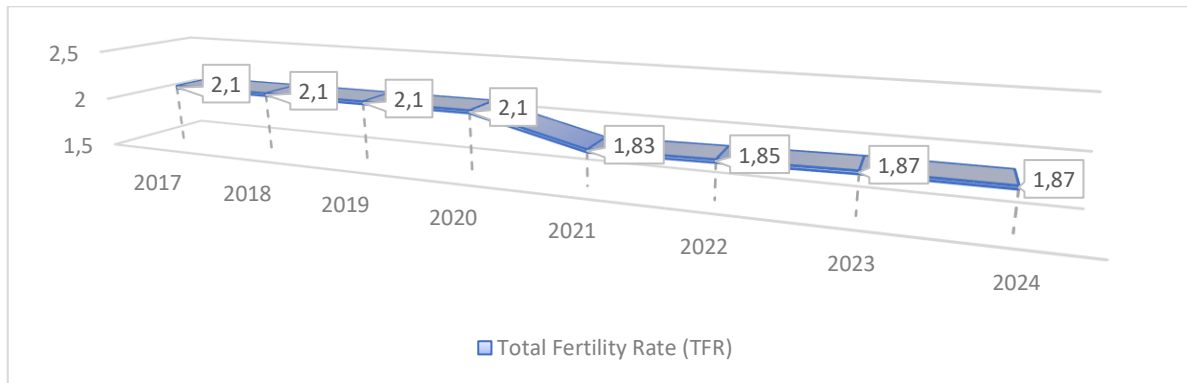
Berdasarkan Gambar 2.7, terlihat bahwa pada tahun 2021, persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*) mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 7,66 persen dan meningkat lagi sebesar 21,66 persen pada 2022. Tren kenaikan *unmetneed* menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan layanan keluarga berencana. Penyebab mungkin termasuk keterbatasan aksesibilitas terhadap jenis kontrasepsi yang diinginkan oleh pasangan usia subur atau kurangnya informasi yang memadai. Pada sisi lain, penyebab peningkatan angka *unmetneed* pada tahun tersebut adalah karena terdapat perbaikan pada sistem pencatatan dan pelaporan program KB, sehingga PUS yang berstatus *unmetneed* terdata dengan lebih baik dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya. Kendatipun begitu, persentase *unmetneed* mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024, namun masih berada pada angka yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka *unmetneed* ini, sehingga dapat dirumuskan intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Tingginya angka *unmetneed* di Kota Denpasar dalam beberapa tahun terakhir menekankan perlunya perbaikan strategi implementasi untuk memastikan bahwa layanan keluarga berencana dapat mencapai dan memenuhi harapan pasangan usia subur, seiring dengan tujuan pembangunan berkelanjutan terkait kesehatan reproduksi.

2.1.4 Total Fertility Rate (TFR)

Menurut Badan Pusat Statistik *Total Fertility Rate* (TFR) atau Angka Kelahiran Total adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Konsep TFR digunakan untuk mengevaluasi kecenderungan fertilitas dan memberikan gambaran tentang tingkat kesuburan dalam suatu masyarakat. Berdasarkan Gambar 2.9 menunjukkan bahwa TFR Kota Denpasar pada tahun 2021 mencapai angka 1,83 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh seorang perempuan di Kota Denpasar berada di bawah kondisi ideal pertumbuhan penduduk yang seimbang, dimana angka TFR yang dapat dikatakan ideal adalah sekitar 2,1 persen. Penurunan TFR di bawah ambang ideal 2,1 persen mencerminkan adanya kecenderungan untuk penduduk tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan skenario yang diinginkan untuk menjaga keseimbangan demografi. Meskipun TFR di Kota Denpasar masih relatif rendah, perlu dicermati

dinamika penyebab penurunan ini, termasuk peran dari berbagai faktor seperti aksesibilitas terhadap layanan keluarga berencana, tingkat pendidikan, dan faktor sosioekonomi lainnya.

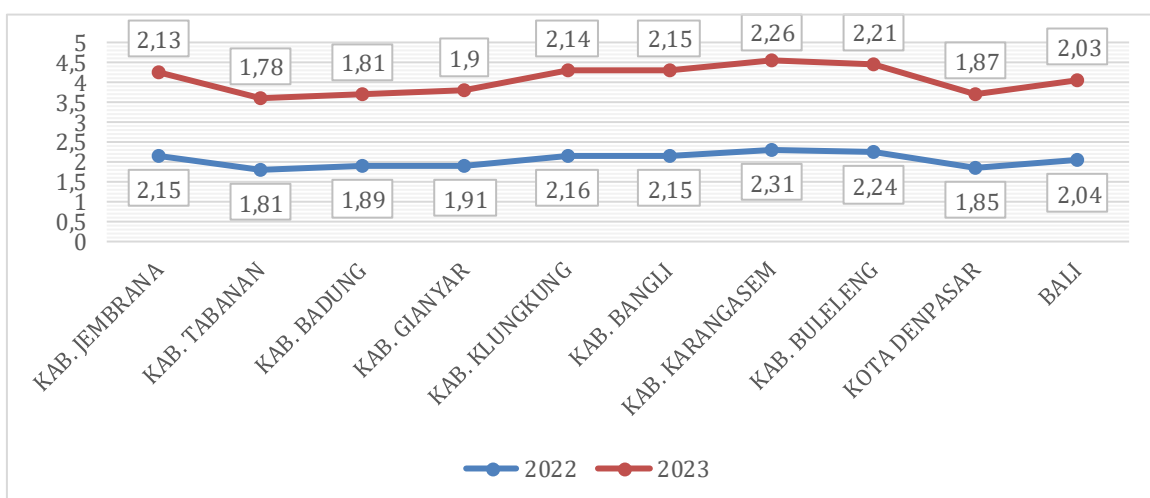
Gambar 2.9
Indikator Fertilitas Total/TFR di Kota Denpasar Tahun 2017 - 2024



Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Denpasar

Nilai TFR yang di bawah ambang ideal menegaskan perlunya analisis mendalam untuk memahami penyebab penurunan dan merumuskan kebijakan yang tepat guna mendukung keberlanjutan populasi yang seimbang. Evaluasi faktor-faktor yang memengaruhi TFR menjadi esensial untuk merancang intervensi yang lebih efektif dalam mendukung perencanaan keluarga dan pertumbuhan penduduk yang optimal.

Gambar 2.10
Indikator Fertilitas Total/TFR Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2022 – 2023



Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, 2023

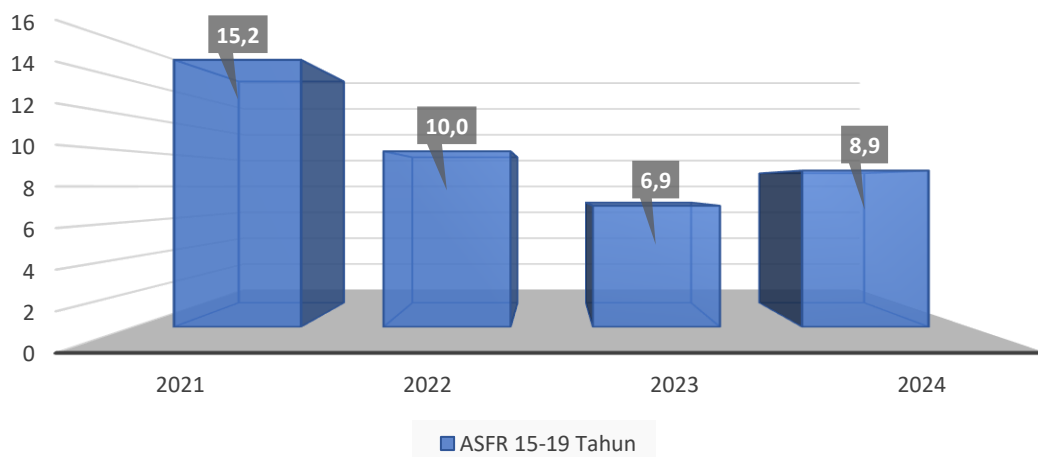
TFR Kota Denpasar mengalami penurunan yang relatif menjadi perhatian. Jika dibandingkan dengan kabupaten yang lain, nilai TFR di Kota Denpasar relatif menjadi yang paling kecil setelah Kabupaten Tabanan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.10. Secara umum delapan dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mengalami

penurunan TFR, pada tahun 2022 dan tahun 2023, kecuali Kabupaten Bangli yang TFR masih sama. Hal ini jika terjadi pada jangka panjang akan memberikan dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Bali maupun di Kota Denpasar. Dengan menurunnya TFR berarti bahwa di masa depan jumlah ketersediaan tenaga kerja pada pasar kerja akan semakin menurun, padahal pembangunan ekonomi tetap membutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu input yang diperlukan.

2.1.5 Age Specific Fertility Rate (ASFR) Kelompok Usia 15–19

Age Specific Fertility Rate (ASFR) kelompok usia 15–19 tahun mengukur jumlah kelahiran per 1.000 perempuan dalam kelompok usia tersebut pada periode tertentu. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam memantau tingkat kehamilan remaja yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan ekonomi perempuan muda (BKKBN, 2023).

Gambar 2.11
ASFR 15-19 Tahun Kota Denpasar Tahun 2021-2024



Sumber: Susenas 2021, Longform Sensus Penduduk 2020, Pemutakhiran PK BKKBN

Gambar di atas menunjukkan bahwa ASFR remaja di Kota Denpasar pada 2021 mencapai 15,2, yang tergolong cukup tinggi dibandingkan standar nasional. Angka ini menurun signifikan pada 2022 menjadi 10, kemudian terus menurun pada 2023 ke titik terendah 6,9. Namun, pada 2024 terjadi sedikit kenaikan menjadi 8,9. Penurunan signifikan antara 2021–2023 dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, antara lain peningkatan akses pendidikan kesehatan reproduksi, penguatan layanan konseling remaja di fasilitas kesehatan, serta kampanye pencegahan perkawinan anak yang semakin gencar di Bali. BKKBN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) (2022) menekankan bahwa edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif berperan besar dalam menurunkan angka kehamilan remaja.

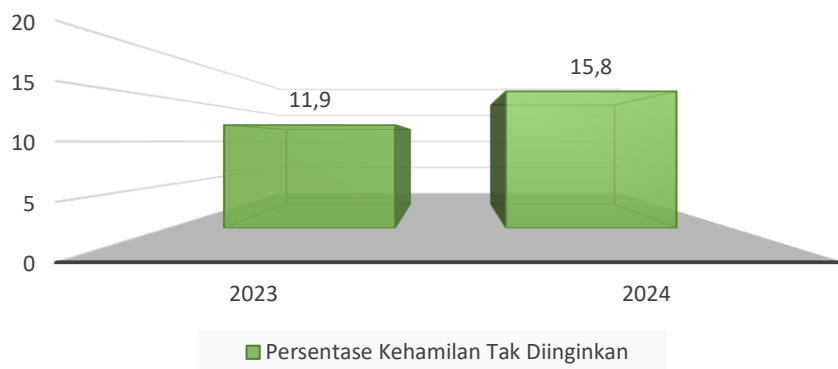
Kenaikan pada 2024, meskipun relatif kecil, bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti relaksasi pembatasan sosial pasca pandemi yang meningkatkan interaksi sosial remaja, atau menurunnya intensitas program intervensi pencegahan di beberapa wilayah. Fenomena ini juga sejalan dengan tren global, di mana banyak negara mengalami *rebound* kecil angka kehamilan remaja pasca pandemi (UNFPA, 2022). Secara global, WHO (2021) menempatkan kehamilan remaja sebagai isu kesehatan dan sosial yang serius. Kehamilan di usia muda meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, putus sekolah, dan keterbatasan akses ekonomi di masa depan. Dalam perspektif teori *Health Belief Model* (Rosenstock, 1974), keberhasilan penurunan ASFR bergantung pada persepsi remaja terhadap risiko kehamilan, pemahaman manfaat penundaan kehamilan, dan kemudahan akses terhadap kontrasepsi remaja yang aman. Kota Denpasar menunjukkan bahwa angka kehamilan remaja masih menjadi perhatian utama dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya target 3.7 (akses universal kesehatan seksual dan reproduksi) dan 5.3 (penghapusan perkawinan anak). Bagi Kota Denpasar, mempertahankan tren penurunan ASFR memerlukan strategi berkelanjutan seperti integrasi pendidikan kependudukan dan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum sekolah, memperkuat peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta memperluas layanan ramah remaja di seluruh puskesmas.

2.1.6 Kehamilan Tidak Diinginkan

Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) adalah kondisi ketika seorang perempuan mengalami kehamilan yang tidak diharapkan, baik karena belum menginginkan anak saat itu maupun karena memang tidak menginginkan anak sama sekali. Kehamilan jenis ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti tidak menggunakan alat kontrasepsi, kegagalan kontrasepsi, kurangnya edukasi dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, serta keterbatasan akses terhadap layanan Keluarga Berencana. Dalam beberapa kasus, KTD juga bisa disebabkan oleh hubungan seksual tanpa konsensus atau dalam situasi kekerasan. Dampaknya sangat luas, tidak hanya bagi kesehatan fisik ibu, tetapi juga kesehatan mental, kestabilan ekonomi, dan masa depan sosial perempuan, terutama jika terjadi pada usia remaja. KTD juga meningkatkan risiko terjadinya aborsi

tidak aman, yang dapat membahayakan nyawa perempuan. Oleh karena itu, upaya pencegahan seperti penyediaan layanan kontrasepsi yang berkualitas, edukasi seksual yang komprehensif, serta perlindungan terhadap hak dan kesehatan reproduksi sangat penting untuk mengurangi angka kehamilan tidak diinginkan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan.

Gambar 2.12
Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan di Kota Denpasar tahun 2023-2024



Sumber : BKKBN Provinsi Bali, 2024

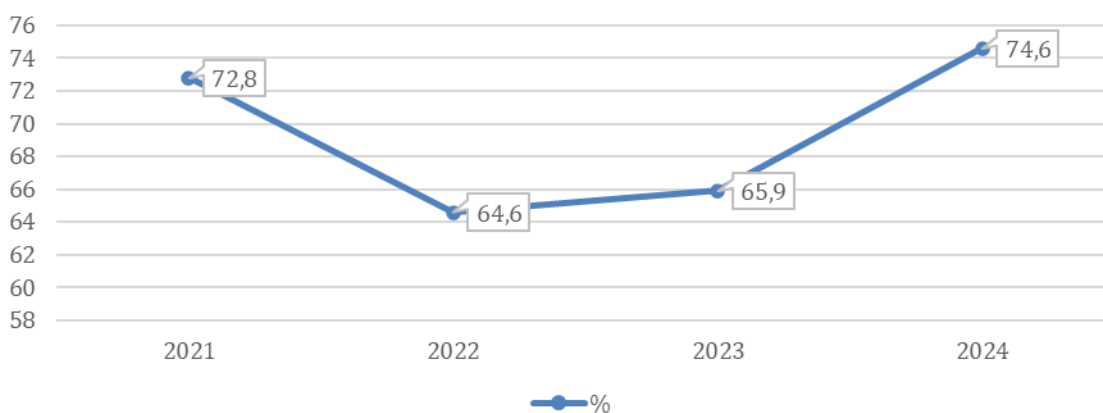
Gambar menunjukkan persentase kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada tahun 2023 dan 2024 di Kota Denpasar. Pada tahun 2023, persentase KTD tercatat sebesar 11,9%, yang mencerminkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan akses terhadap layanan Keluarga Berencana serta edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Namun, pada tahun 2024, angka ini meningkat tajam menjadi 15,8%, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah perempuan yang mengalami kehamilan di luar rencana atau kehamilan yang tidak diinginkan. Kenaikan ini dapat mengindikasikan penurunan efektivitas penggunaan kontrasepsi, lemahnya edukasi seksual, atau meningkatnya faktor risiko seperti hubungan tanpa konsensus atau tekanan sosial. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam pembangunan kependudukan, karena kehamilan tidak diinginkan dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu, kesejahteraan anak, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga. Oleh karena itu, peningkatan angka KTD ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih kuat dari pemerintah dan pemangku kebijakan untuk memperkuat akses terhadap layanan KB, meningkatkan kualitas edukasi reproduksi, serta memperluas jangkauan program perlindungan hak reproduksi perempuan.

2.1.7 Proporsi Kebutuhan ber-KB yang terpenuhi (*Demand Satisfied*)

Proporsi Kebutuhan Ber-KB yang Terpenuhi (*Demand Satisfied*) adalah indikator yang mengukur persentase pasangan usia subur yang memiliki kebutuhan ber-KB (baik untuk menunda maupun menghentikan kehamilan) dan berhasil mendapatkan layanan kontrasepsi. Indikator ini sangat penting untuk menilai keberhasilan program keluarga berencana dalam menjangkau sasaran (BKKBN, 2023). Data menunjukkan bahwa pada 2021, proporsi kebutuhan ber-KB yang terpenuhi di Kota Denpasar mencapai 72,8%, yang mencerminkan capaian layanan KB yang relatif tinggi. Namun, pada 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 64,6%, kemungkinan besar akibat dampak lanjutan pandemi COVID-19 yang masih menghambat akses layanan kesehatan reproduksi, gangguan distribusi alat kontrasepsi, dan keterbatasan tenaga kesehatan lapangan. Penurunan ini sejalan dengan laporan UNFPA (2021) yang mencatat adanya kemunduran akses KB di banyak negara berkembang akibat pandemi. Pada 2023, capaian ini mengalami sedikit perbaikan menjadi 65,9%, menandakan awal pemulihan akses layanan KB. Namun, angka ini masih belum kembali ke tingkat 2021. Peningkatan signifikan terjadi pada 2024, ketika proporsi kebutuhan ber-KB yang terpenuhi melonjak menjadi 74,6%, melampaui capaian pra-penurunan. Lonjakan ini dapat dikaitkan dengan penguatan kembali program lapangan seperti intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas, peningkatan stok alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan, kampanye publik serta pelaksanaan momentum pelayanan KB serentak yang lebih masif. Fenomena ini sejalan dengan teori *Access to Care Framework* (Penchansky & Thomas, 1981), yang menegaskan bahwa keterpenuhan layanan kesehatan dipengaruhi oleh lima dimensi: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), penerimaan sosial (*acceptability*), kemudahan dijangkau (*accessibility*), dan kesesuaian layanan dengan kebutuhan (*adequacy*). Pada 2022, beberapa dimensi ini mengalami gangguan, terutama *availability* dan *accessibility*, sementara pada 2024 perbaikannya terlihat nyata. Secara global, pencapaian proporsi kebutuhan ber-KB yang terpenuhi merupakan salah satu indikator utama *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya target 3.7 yang menargetkan akses universal ke layanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana, pada 2030. WHO (2021) menekankan bahwa capaian di atas 75% menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mampu menekan angka kehamilan tidak diinginkan secara signifikan.

Capaian 2024 menjadi momentum untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan angka ini. Strategi yang dapat dilakukan meliputi penguatan layanan KB berbasis komunitas, peningkatan layanan KB ramah remaja, pelatihan tenaga kesehatan di lini terdepan, serta integrasi layanan KB dengan program kesehatan ibu dan anak. Pendekatan ini akan membantu memastikan keberlanjutan pencapaian dan mengurangi risiko penurunan kembali di masa depan.

Gambar 2.13
Proporsi Kebutuhan ber-KB yang terpenuhi (*Demand Satisfied*)



Sumber : BKKBN Provinsi Bali, 2024

2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Pembahasan mengenai kualitas penduduk di Kota Denpasar memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi saat ini dalam beberapa aspek kunci kependudukan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Aspek-aspek ini melibatkan peningkatan kualitas penduduk dalam sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta pembangunan manusia dan kualitas gender. Pada sektor kesehatan, evaluasi mencakup indikator-indikator seperti tingkat harapan hidup, angka kematian, dan prevalensi penyakit. Faktor-faktor yang diperhitungkan termasuk aksesibilitas pelayanan kesehatan, partisipasi dalam program vaksinasi, dan tingkat gizi masyarakat. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap upaya pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan yang diadopsi oleh pemerintah daerah.

Peningkatan kualitas penduduk dalam sektor pendidikan tercermin melalui peningkatan tingkat melek huruf, partisipasi dalam pendidikan formal, dan aksesibilitas terhadap sarana pendidikan. Analisis melibatkan evaluasi penerapan kurikulum yang relevan, kehadiran guru yang berkualitas, serta program peningkatan keterampilan dan

literasi di berbagai kelompok usia. Disparitas pendidikan dan upaya untuk mengurangi kesenjangan juga menjadi fokus utama pembahasan. Pada sektor ekonomi, peningkatan kualitas penduduk melibatkan evaluasi tingkat pengangguran, partisipasi dalam sektor formal ekonomi, dan tingkat pendapatan serta kemiskinan. Pemahaman lebih lanjut tentang mobilitas sosial, peluang pekerjaan, serta keberlanjutan usaha mikro dan kecil menjadi bagian penting dari analisis. Dampak kebijakan ekonomi dan upaya pemberdayaan ekonomi juga menjadi aspek yang perlu dievaluasi. Pembangunan manusia dan kualitas gender mencakup indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat ketimpangan gender, dan partisipasi perempuan di berbagai sektor. Evaluasi ini melibatkan analisis kesetaraan gender, akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan manusia secara menyeluruh.

Evaluasi kualitas penduduk di Kota Denpasar dilakukan secara interdisipliner, menggabungkan data dan metode penelitian yang relevan dengan masing-masing sektor. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduknya.

2.2.1 Peningkatan Kualitas Bidang Kesehatan

Peningkatan status kesehatan suatu populasi dapat tercermin melalui sejumlah indikator kesehatan yang mencakup spektrum kondisi kesehatan. Indikator tersebut melibatkan sejumlah aspek kritis, termasuk penurunan angka kematian terutama pada ibu dan anak, peningkatan angka harapan hidup, perbaikan status gizi dan pengurangan stunting, peningkatan persentase pemberian ASI eksklusif, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.

Dalam konteks peningkatan kesehatan ibu dan anak, perhatian diberikan terhadap penurunan angka kematian maternal dan infantil sebagai indikator utama. Fokus pada pengembangan sistem kesehatan maternal dan perinatal menjadi krusial untuk memastikan pelayanan yang adekuat selama kehamilan, persalinan, dan pasca melahirkan. Angka harapan hidup, sebagai parameter utama, memberikan gambaran umum tentang tingkat kesejahteraan kesehatan populasi.

Pertumbuhan dan perkembangan anak tercermin dalam indikator status gizi dan tingkat stunting. Pemantauan dan upaya peningkatan terkait dengan ASI eksklusif mencerminkan komitmen terhadap kesehatan bayi dan balita. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular menjadi fokus utama dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan akses penduduk terhadap air bersih dan sanitasi menjadi penentu penting untuk memastikan lingkungan yang sehat. Praktik sanitasi yang baik dan pengelolaan air yang bersih mendukung pencegahan penyakit dan meningkatkan kesejahteraan umum. Pemantauan dan evaluasi terhadap indikator-indikator kesehatan ini diimplementasikan sebagai bagian dari strategi pembangunan kesehatan. Penekanan pada upaya preventif, intervensi yang tepat waktu, serta penguatan sistem kesehatan menjadi esensial dalam mencapai peningkatan kesehatan yang berkelanjutan dalam suatu komunitas atau populasi.

2.2.1.1 Penurunan Kematian dan Peningkatan Kualitas Hidup

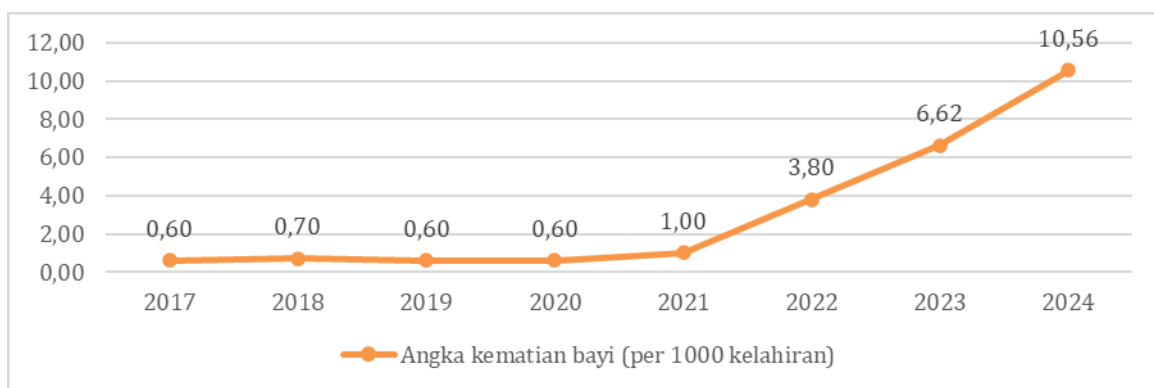
Penurunan angka kematian dan peningkatan kualitas hidup adalah dua indikator utama yang menunjukkan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Penurunan angka kematian, terutama pada kelompok bayi dan ibu melahirkan, mencerminkan adanya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, seperti perawatan ibu dan anak, imunisasi, serta upaya pencegahan penyakit menular dan penyakit kronis. Selain itu, faktor lain seperti perbaikan gizi, sanitasi, serta ketersediaan air bersih turut berkontribusi terhadap penurunan angka kematian. Bersamaan dengan upaya ini, peningkatan kualitas hidup dicapai melalui program-program yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, akses terhadap pekerjaan yang layak, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Data dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar yang ditunjukkan oleh Gambar 2.14, menunjukkan pada 2017, menunjukkan AKB di Kota Denpasar mencapai 0,6 per 1000 kelahiran hidup. Artinya, terdapat paling sedikit 1 bayi yang meninggal dari setiap 1000 kelahiran hidup di Kota Denpasar pada tahun tersebut. Tren AKB menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, angka AKB mencapai 3,8, walaupun dapat dikategorikan rendah.

Upaya pencegahan dan perawatan kesehatan maternal serta anak di bawah satu tahun di Kota Denpasar menjadi kunci keberhasilan dalam meraih pencapaian ini. Peningkatan peran fasilitas kesehatan, program imunisasi, serta edukasi bagi ibu-ibu muda dapat diidentifikasi sebagai faktor-faktor yang memberikan kontribusi positif

terhadap penurunan AKB. Kesenambungan dari inisiatif-inisiatif ini dapat menjadi landasan untuk terus meningkatkan kondisi kesehatan anak-anak dan kualitas hidup secara keseluruhan di Kota Denpasar.

Gambar berikut ini menampilkan jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran memiliki tren yang meningkat semenjak 2020 sampai dengan 2024 di Kota Denpasar. Terdapat berbagai macam faktor penyebab pasca terjadinya pandemi covid-19. Perlu penanganan yang baik dalam menangani kondisi ini di Kota Denpasar.

Gambar 2.14
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar Tahun 2017 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar (diolah), 2024

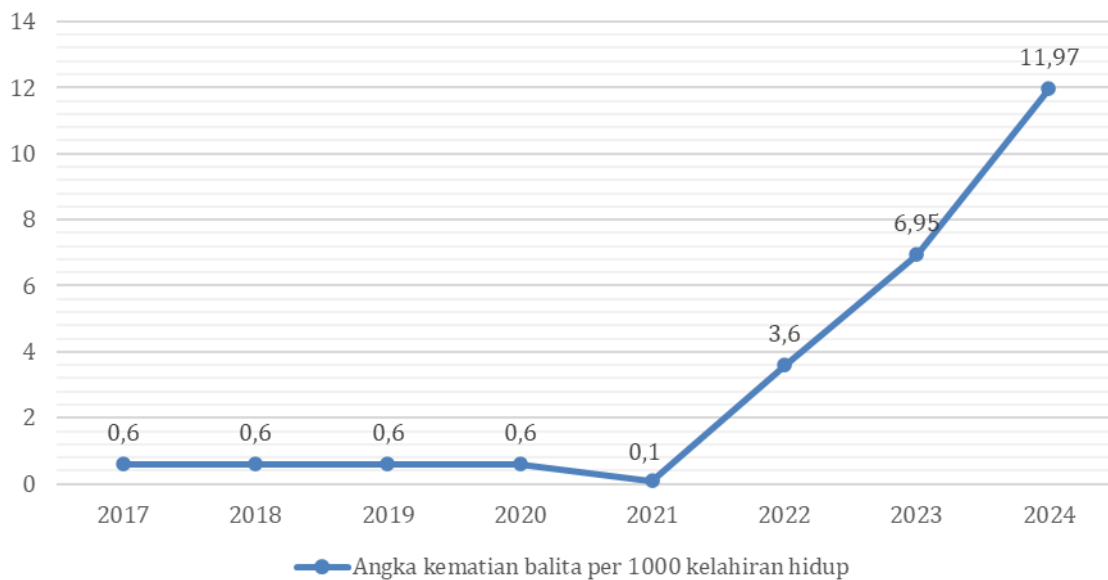
Gambar 2.15
Jumlah Kematian Bayi Absolut di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	43	48	48	38	33
Tabanan	44	43	43	38	46
Badung	25	26	26	32	24
Gianyar	79	60	60	58	45
Klungkung	22	19	19	12	15
Bangli	30	23	23	36	29
Karangasem	73	48	48	43	58
Buleleng	52	39	39	63	75
Denpasar	14	11	11	10	10

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021. Profil Kesehatan Provinsi Bali, 2021

Angka Kematian Balita (*Under-Five Mortality Rate*) adalah salah satu indikator penting untuk menilai kesehatan anak di suatu wilayah. Berdasarkan tren Angka Kematian Bayi pada gambar sebelumnya, dapat ditarik beberapa inferensi dan perkiraan terkait angka kematian balita. Namun, secara umum, Angka Kematian Balita biasanya lebih tinggi daripada IMR karena mencakup kematian anak-anak hingga usia lima tahun.

Gambar 2.16
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar
Tahun 2017 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar (diolah), 2024

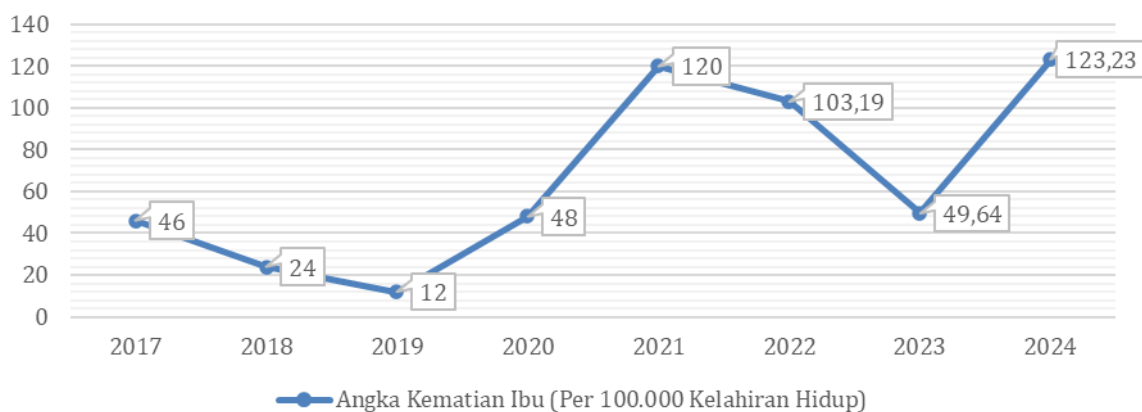
Gambar diatas menunjukkan jumlah kematian balita per 1.000 kelahiran hidup di Kota Denpasar dari tahun 2017 hingga 2024. Dari grafik ini, terlihat bahwa pada periode 2017 hingga 2020, angka kematian balita berada pada tingkat yang relatif stabil, yaitu sebesar 0,6 kematian per 1.000 kelahiran hidup setiap tahunnya. Stabilitas ini menunjukkan bahwa selama empat tahun tersebut, upaya-upaya yang dilakukan dalam bidang kesehatan anak di Kota Denpasar mampu mempertahankan angka kematian balita pada tingkat yang cukup rendah dan konstan. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan dalam angka kematian balita, yaitu menjadi 0,1 per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan ini bisa jadi mencerminkan peningkatan lebih lanjut dalam layanan kesehatan ibu dan anak, program imunisasi, serta perbaikan dalam gizi dan sanitasi yang mungkin telah diterapkan secara lebih efektif selama tahun tersebut. Pada tahun 2022, grafik menunjukkan lonjakan dalam angka kematian balita, naik menjadi 3,6 kematian per 1.000 kelahiran hidup dan terus meningkat menjadi 11,97 di tahun 2024.

Meningkatnya angka kematian bayi dan angka kematian balita pada tahun 2023 dan 2024 salah satunya disebabkan oleh peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan kasus kematian bayi di fasilitas pelayanan kesehatan, yang mengakibatkan lebih banyak kasus kematian yang dilaporkan melalui sistem pelaporan. Lonjakan angka kematian ini juga menjadi indikasi yang memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan

untuk menurunkan kembali angka kematian bayi dan balita di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan yang berkelanjutan dan intervensi yang tepat waktu untuk memastikan bahwa tren peningkatan kesehatan anak yang telah dicapai dalam beberapa tahun sebelumnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lebih lanjut.

Selain itu, Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi indikator kritis dalam penilaian kesehatan maternal di Kota Denpasar, mengukur jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau dalam 42 hari setelah terminasi kehamilan, tanpa memandang tempat dan lamanya persalinan, per 100.000 kelahiran hidup.

Gambar 2.17
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar
Tahun 2017-2024



Sumber: Dinas kesehatan Kota Denpasar (diolah), 2024

Pada periode 2017 hingga 2019 pada Gambar diatas menunjukkan kecenderungan positif dengan adanya penurunan AKI, mencerminkan peningkatan kesehatan maternal di wilayah tersebut. Namun, pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah kematian ibu di Kota Denpasar. Angka kematian ibu meningkat hingga 4 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menggambarkan dampak yang signifikan dari pandemi Covid-19. Kondisi ini terkait dengan peningkatan jumlah ibu hamil yang terinfeksi Covid-19, membawa implikasi serius terhadap kesehatan ibu dan bayi yang dikandung. Pandemi menghadirkan tantangan baru dalam upaya pencegahan dan penanganan kesehatan ibu, yang berkontribusi pada lonjakan kasus kematian ibu pada tahun tersebut. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2020 menyoroti urgensi perlunya perhatian khusus terhadap kesehatan ibu selama situasi darurat kesehatan seperti pandemi. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang cermat perlu terus diperkuat untuk melindungi ibu

hamil dan menyusui dari risiko kesehatan yang muncul akibat pandemi Covid-19. Mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2021 hingga 2023 dan meningkat tajam di tahun 2024. Peningkatan yang tajam pada tahun 2024 disebabkan karena adanya peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan kasus kematian ibu, sehingga lebih banyak kasus yang dapat dilaporkan pada sistem pelaporan. Selain itu, lonjakan ini menjadi sinyal serius bahwa masih tingginya kasus kematian ibu yang terjadi di Kota Denpasar. Kondisi ini memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih komprehensif untuk menurunkan angka kejadian kematian ibu di waktu yang akan datang.

Peningkatan kualitas hidup, khususnya dalam aspek kesehatan, dapat diukur melalui indikator usia harapan hidup. Usia harapan hidup menjadi cermin dari kondisi kesehatan dan kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada Gambar di bawah menunjukkan bahwa usia harapan hidup di Kota Denpasar mengalami peningkatan terus menerus dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, angka usia harapan hidup penduduk Kota Denpasar mencapai 74,82 tahun. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dilakukan dalam meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat, mengurangi angka kematian, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Usia harapan hidup yang terus meningkat memberikan indikasi positif bahwa kualitas hidup penduduk di Kota Denpasar telah mengalami perbaikan, menuju kondisi yang lebih baik. Peningkatan ini bisa menjadi hasil dari berbagai faktor, termasuk peningkatan dalam sistem kesehatan, program-program preventif, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat. Perbaikan hidup menjadi cermin dari komitmen dan keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan penduduk Kota Denpasar.

Berdasarkan Gambar di bawah, selama 6 tahun terakhir, angka Harapan Hidup Kota Denpasar telah menunjukkan tren yang positif dan jauh di atas rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi dan Angka Harapan Hidup Nasional. Nilai Angka Harapan Hidup Kota Denpasar pada tahun 2024 adalah 76,01 tahun, yang berarti penduduknya memiliki harapan hidup diatas 76 tahun.

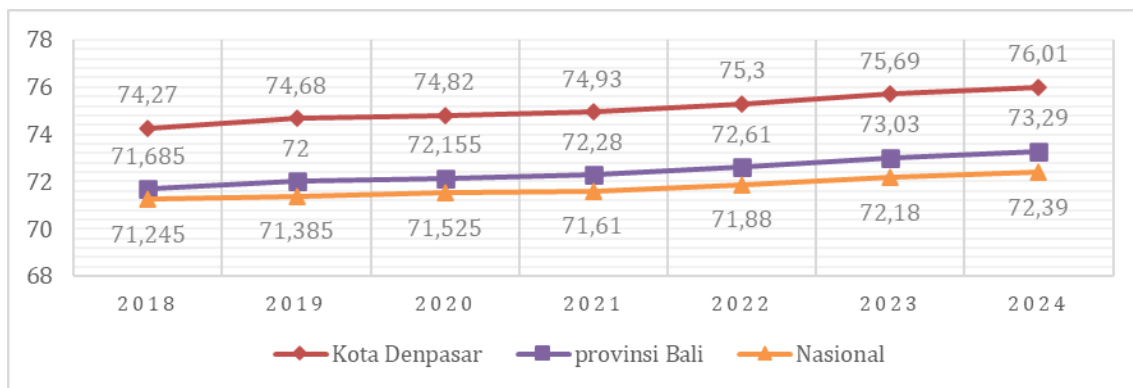
Gambar 2.18
Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar 2018 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2024

Secara umum, kinerja pembangunan di Kota Denpasar menjadi sangat baik, karena Kota Denpasar memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup pada level provinsi dan nasional. Kondisi fasilitas kesehatan, ekonomi, penunjang infrastruktur merupakan bagian tidak terpisahkan dalam memberikan dampak terhadap kualitas angka harapan hidup. Berikut merupakan gambaran perbandingan dari angka harapan hidup antara kota, provinsi dan nasional.

Gambar 2.19
Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional pada Tahun 2018 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2023
Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2023

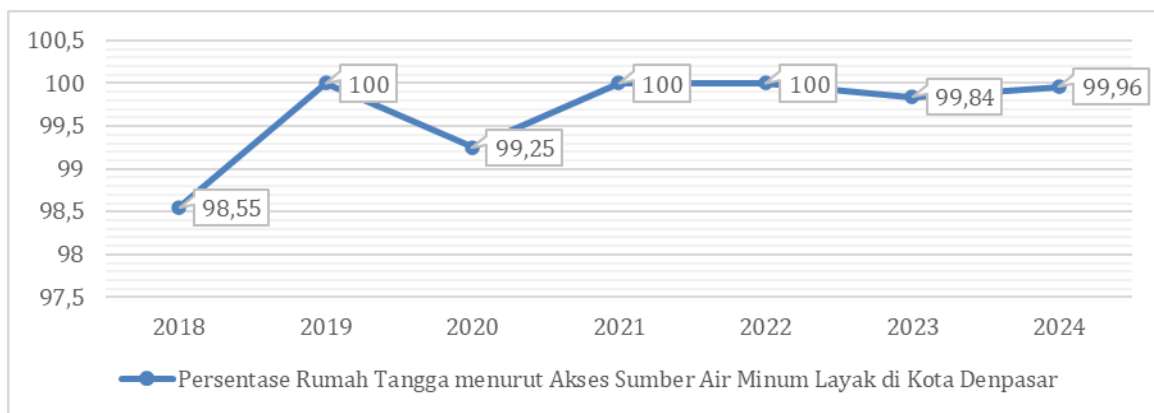
Bila dibandingkan secara kota, provinsi dan nasional, pada Gambar diatas terlihat bahwa angka harapan hidup di Kota Denpasar masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi, dimana Provinsi Bali juga masih berada di atas nasional. Menurut (Vellayanti dan Artidiatun, 2019) menunjukkan bahwa angka harapan hidup ditentukan oleh pendidikan, ketersediaan makanan, kecukupan gizi, pendapatan, kondisi lingkungan (emisi CO₂), imunisasi, dan tingkat urbanisasi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk

menciptakan angka harapan hidup yang tinggi dibutuhkan dukungan dari kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, serta kondisi lingkungan.

2.2.1.2 Peningkatan Status Gizi dan Persentase ASI Eksklusif

Peningkatan status gizi adalah proses dan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi gizi individu atau populasi dengan tujuan mencapai status gizi yang optimal. Ini melibatkan berbagai intervensi dan strategi yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap orang, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan anak-anak, menerima asupan nutrisi yang cukup dan seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.

Gambar 2.20
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Sumber Air Minum Layak di Kota Denpasar



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024

Salah satu indikator peningkatan status gizi adalah cakupan akses terhadap sarana air bersih. Selama periode 2018-2024, menunjukkan pencapaian cakupan akses terhadap sarana air bersih yang sangat positif, dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang memadai tetap stabil di atas 98 persen setiap tahunnya. Air minum yang memenuhi standar kesehatan dianggap sebagai air minum yang terlindungi, termasuk dari sumber seperti leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, serta air minum bermerk atau air isi ulang.

Gambar diatas menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat di Kota Denpasar telah terlayani dengan baik dalam hal akses terhadap air minum yang memenuhi standar kesehatan, yaitu mencapai rata-rata 99,2 persen selama tahun 2018-2024. Kriteria ini mencakup berbagai sumber air yang aman dan terlindungi, serta mencakup air minum yang berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang. Sumber

air untuk keperluan mandi, mencuci, dan lainnya juga tercakup dalam kriteria ini, dengan memastikan penggunaan leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan, serta penampungan akhir tinja yang memenuhi persyaratan. Pencapaian yang tinggi ini mencerminkan keseriusan dan efektivitas upaya pemerintah Kota Denpasar dalam memastikan ketersediaan akses air bersih yang memadai bagi seluruh penduduk. Peningkatan kualitas hidup melalui penyediaan air minum yang aman dan terlindungi menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan.

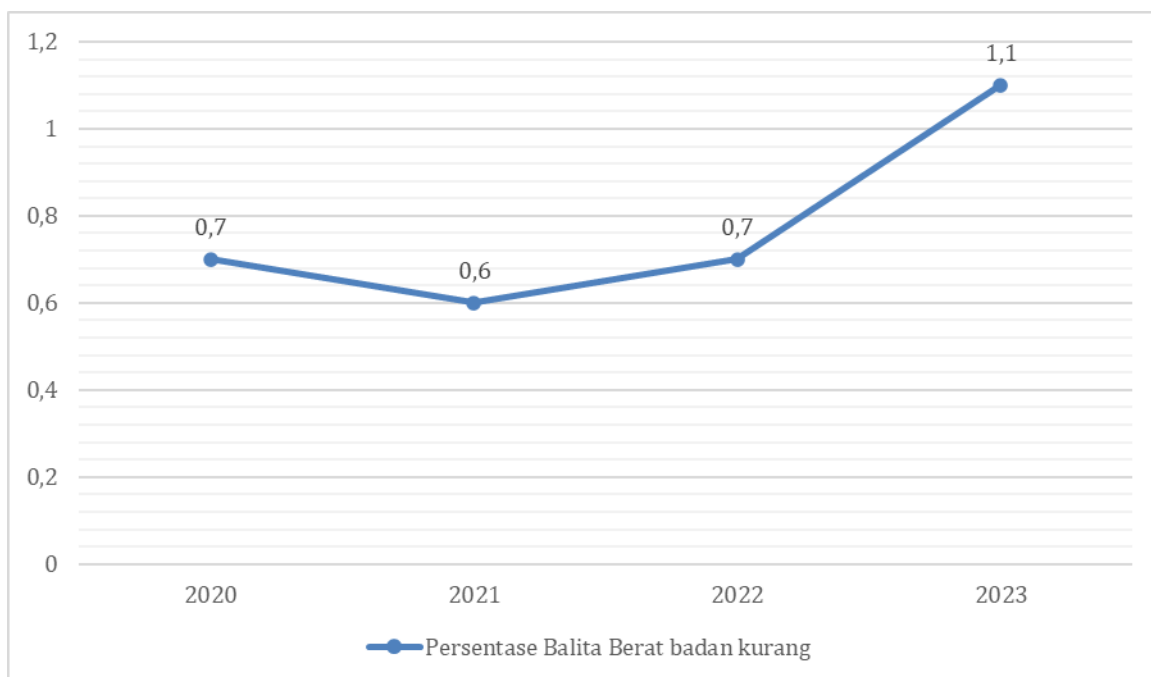
Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak mengalami peningkatan dari 2018 yaitu 98,55 persen menjadi 100 persen pada tahun 2022, kemudian 2023 menurun menjadi 99,84 persen. Pada tahun 2024 meningkat kembali mencapai 99,96 persen. Meskipun demikian, penurunan penyediaan air bersih perlu menjadi perhatian pemerintah agar kedepannya penyediaan air bersih dapat dirasakan oleh seluruh rumah tangga yaitu mencapai 100 persen. Penurunan akses sumber air minum layak ini, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu diteliti lebih lanjut, seperti mungkin disebabkan oleh pendapatan rumah tangga yang cenderung menurun atau harganya terhadap akses air minum layak yang semakin meningkat dan relatif mahal bagi penduduk yang berpenghasilan tidak tentu.

Sanitasi yang layak secara signifikan terkait dengan status gizi anak, terutama dalam hal penurunan prevalensi stunting. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal di rumah dengan sanitasi yang baik memiliki kemungkinan 29 persen lebih rendah untuk mengalami stunting dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di rumah dengan sanitasi yang buruk. Faktor-faktor lain yang dihitung termasuk usia dan jenis kelamin anak, pendidikan ibu, dan status kekayaan rumah tangga (Rah JH, 2020) . Dalam penelitian Nizaruddin dan M. Irsyad dari BPS Jakarta (2022), menunjukkan bahwa anak-anak yang minum air ledeng memiliki kemungkinan lebih rendah untuk stunting.

Gambar 2.21 menunjukkan persentase balita dengan berat badan kurang di Kota Denpasar pada tahun 2020, persentase balita dengan berat badan kurang adalah 0,7 persen, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 1,1 persen. Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi dalam persentase balita dengan berat

badan kurang di Kota Denpasar. Setelah penurunan pada tahun 2021, angka ini kembali meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2023.

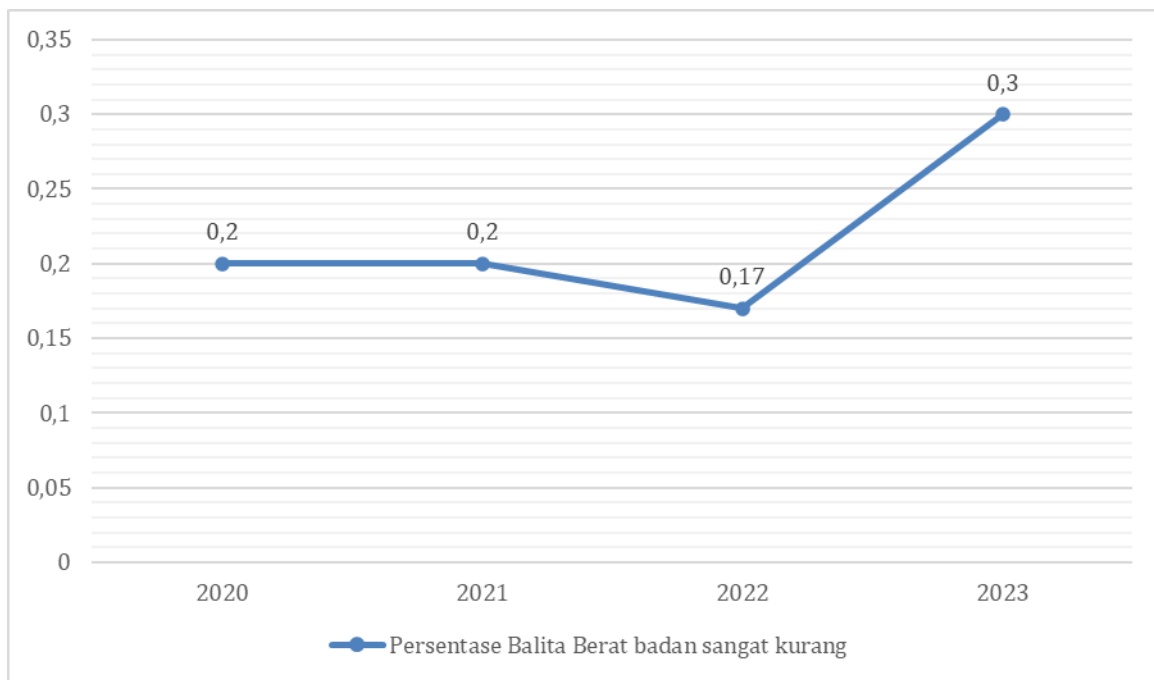
Gambar 2.21
Persentase Balita Berat Badan Kurang di Kota Denpasar tahun 2020 – 2023 (%)



Sumber: Dinas kesehatan Kota Denpasar (diolah), 2023

Jika dilihat dari persentase balita berat badan sangat rendah, gambar 2.21 menunjukkan persentase balita dengan berat badan sangat kurang di Kota Denpasar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2020 dan 2021, persentase menunjukkan nilai yang tetap atau stabil sebesar 0,2 persen. Pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 0,17 persen, namun tren penurunan ini tidak berlanjut, karena pada tahun 2023, persentase balita dengan berat badan sangat kurang meningkat tajam menjadi 0,3 persen. Peningkatan ini mungkin menunjukkan adanya masalah mendasar yang belum terselesaikan atau kondisi baru yang mempengaruhi kesehatan dan gizi balita. Faktor-faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, penurunan kualitas sanitasi, atau wabah penyakit bisa berkontribusi pada peningkatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam menurunkan angka balita dengan berat badan sangat kurang di Kota Denpasar.

Gambar 2.22
Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang di Kota Denpasar tahun 2020 - 2023



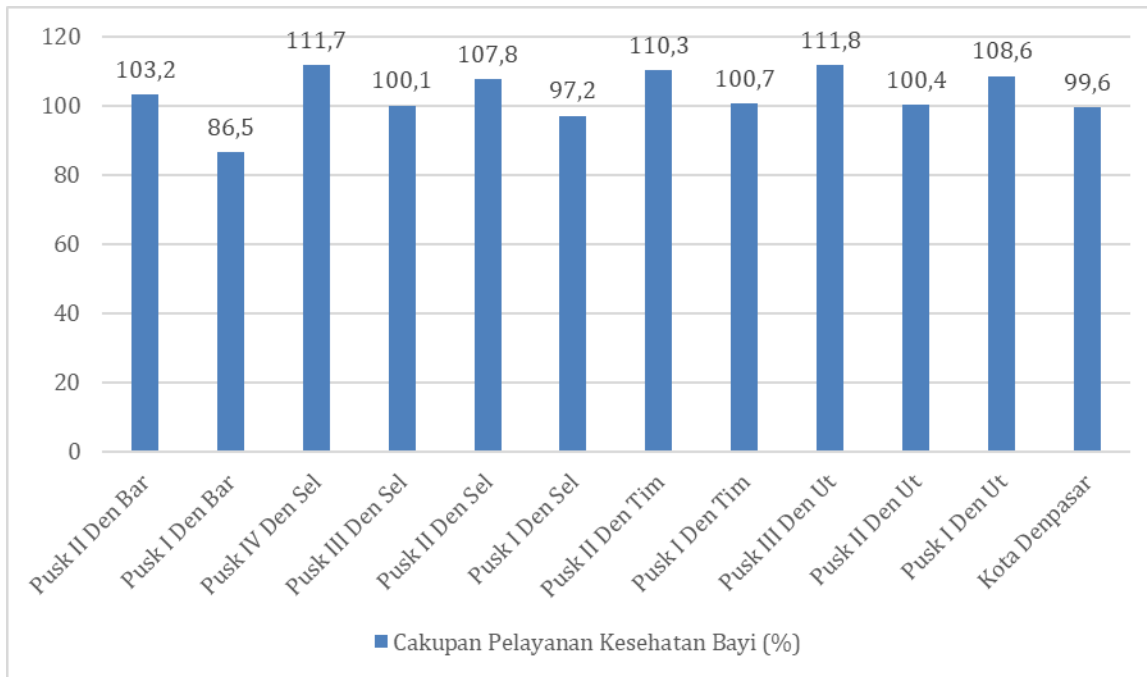
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar (diolah), 2023

Studi di Bangladesh (M. Hasan, 2023) menunjukkan bahwa akses ke fasilitas sanitasi dasar dan fasilitas cuci tangan yang memadai secara signifikan terkait dengan penurunan *odds* stunting dan *underweight* pada anak-anak. Misalnya, tidak adanya fasilitas sanitasi dasar dikaitkan dengan peningkatan 13 persen *odds* stunting dan 19 persen *odds underweight*. Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan paparan patogen feces yang dapat menyebabkan disfungsi enterik lingkungan (EED), gangguan kronis pada usus yang mengurangi penyerapan nutrisi dan menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi aktif secara kronis. Hal ini dapat mengakibatkan malnutrisi kronis dan stunting. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk juga dapat mengalihkan energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan menjadi energi untuk melawan infeksi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan anak.

2.2.1.3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

Pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar mencakup berbagai layanan kesehatan yang bertujuan untuk memastikan bayi mendapatkan perawatan yang optimal sejak lahir hingga usia satu tahun. Layanan ini meliputi imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian vitamin, dan pendidikan kesehatan bagi orang tua. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi angka kematian bayi, mencegah penyakit, dan memastikan pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat.

Gambar 2.23
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di Kota Denpasar tahun 2023 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2023

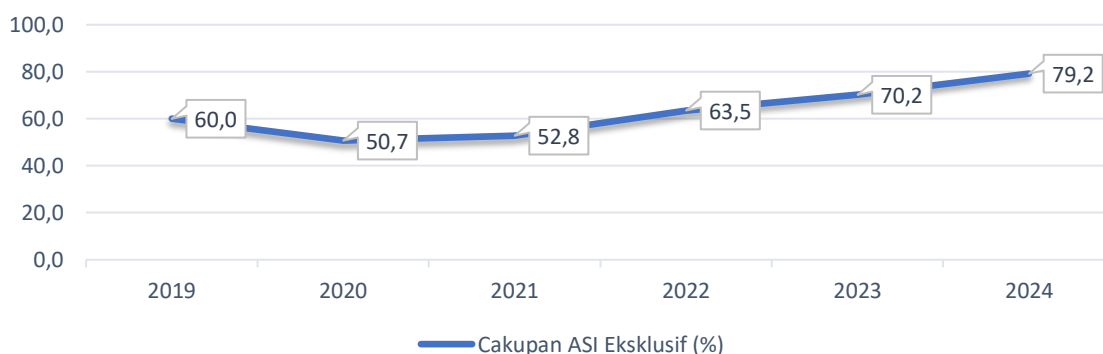
Berdasarkan gambar 2.23 cakupan pelayanan kesehatan bayi tahun 2023, Kota Denpasar menunjukkan cakupan yang cukup baik dengan rata-rata cakupan sebesar 99.6%. Namun, terdapat variasi cakupan antar puskesmas. Puskesmas I Denpasar Barat memiliki cakupan pelayanan kesehatan bayi terendah dengan angka 86.5%, menunjukkan adanya tantangan atau kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan di area tersebut. Di sisi lain, Puskesmas III Denpasar Utara memiliki cakupan tertinggi dengan angka 111.8%, diikuti oleh Puskesmas IV Denpasar Selatan (111.7%) dan Puskesmas II Denpasar Timur (110.3%). Angka di atas 100 persen mungkin mencerminkan adanya pelayanan yang melampaui target populasi atau cakupan layanan yang sangat efektif. Secara keseluruhan, mayoritas puskesmas memiliki cakupan di atas 100 persen, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Denpasar memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan bayi. Interpretasi ini menunjukkan bahwa Kota Denpasar secara umum telah berhasil dalam menyediakan layanan kesehatan bayi yang efektif dan luas. Namun, perhatian khusus mungkin perlu diberikan kepada area dengan cakupan lebih rendah untuk memastikan semua bayi mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang diperlukan.

2.2.1.4 Pemberian ASI Eksklusif

ASI eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) saja kepada bayi selama enam bulan pertama kehidupannya tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih. ASI eksklusif sangat penting karena mengandung semua nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal bayi. Selain itu, ASI mengandung antibodi yang membantu melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi. Pemberian ASI eksklusif juga berperan dalam memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi, serta dapat menurunkan risiko penyakit kronis pada ibu seperti kanker payudara dan ovarium. Dari gambar 2.24, dapat diketahui bahwa cakupan ASI eksklusif di Kota Denpasar antara tahun 2019 hingga 2023, terdapat fluktuasi dalam cakupan ASI eksklusif selama periode ini. Pada tahun 2019, cakupan ASI eksklusif berada pada angka 60,0 persen. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan menjadi 50,7 persen. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya edukasi tentang pentingnya ASI eksklusif atau adanya kendala dalam akses terhadap layanan kesehatan.

Pada tahun 2021, cakupan ASI eksklusif mengalami sedikit peningkatan menjadi 52,8 persen. Kenaikan ini berlanjut secara signifikan pada tahun 2022 dengan cakupan mencapai 63,5 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya promosi dan dukungan pemberian ASI eksklusif di masyarakat. Pada tahun 2024, cakupan ASI eksklusif mencapai angka tertinggi selama periode ini, yaitu 79,2 persen. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan efektivitas program-program kesehatan yang mendukung pemberian ASI eksklusif serta meningkatnya kesadaran ibu-ibu tentang pentingnya ASI eksklusif bagi kesehatan bayi mereka. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan cakupan ASI eksklusif agar lebih banyak bayi yang mendapatkan manfaat optimal dari ASI eksklusif.

Gambar 2.24
Cakupan ASI Eksklusif Kota Denpasar, 2019 – 2024 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2024

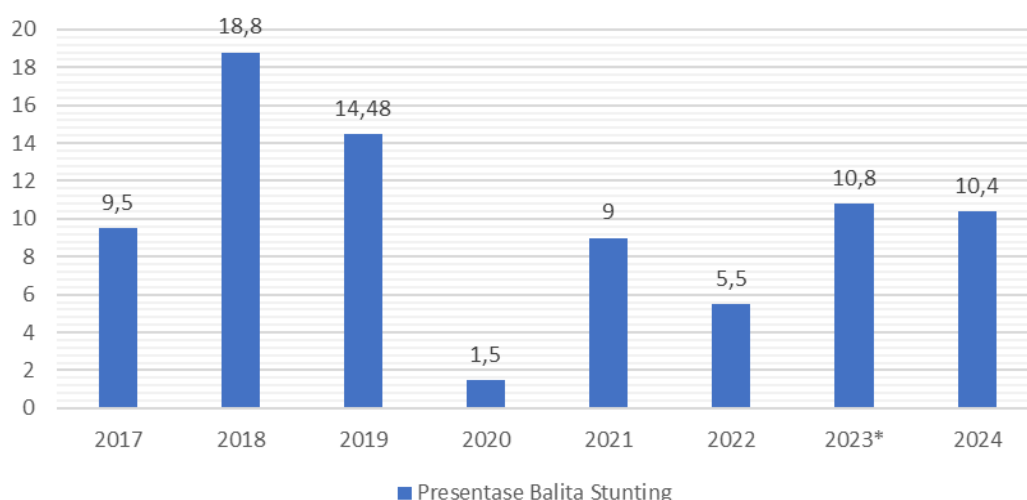
2.2.1.5 Stunting

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang bersifat *irreversible* yang diakibatkan oleh kurangnya nutrisi atau infeksi berulang/kronis pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Periode 1000 HPK adalah masa kritis dari kehamilan hingga anak berusia dua tahun, di mana pertumbuhan dan perkembangan otak serta tubuh anak sangat cepat dan menentukan kesehatan jangka panjang. Menurut *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2020, tinggi badan dijadikan sebagai salah satu indikator stunting. Anak dianggap stunting jika panjang atau tinggi badannya menurut usia kurang dari -2 standar deviasi (SD) dari kurva pertumbuhan WHO. Tinggi badan merupakan indikator penting karena mencerminkan status gizi jangka panjang dan kesehatan umum anak. Stunting tidak hanya mempengaruhi tinggi badan, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif, prestasi pendidikan, produktivitas ekonomi di masa depan, dan bahkan risiko penyakit kronis di kemudian hari. Oleh karena itu, pengukuran dan pemantauan tinggi badan anak secara rutin sangat penting untuk deteksi dini dan intervensi tepat waktu.

Gambar 2.25 menunjukkan persentase balita stunting di Kota Denpasar dari tahun 2017 hingga 2022. Stunting merupakan kondisi di mana balita memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Pada tahun 2017, persentase balita stunting di Kota Denpasar tercatat sebesar 9,5 persen. Angka ini meningkat tajam pada tahun 2018, mencapai 18,8 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah balita yang mengalami stunting. Kenaikan yang drastis ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi, penurunan kualitas sanitasi, atau masalah dalam distribusi dan akses terhadap makanan bergizi. Angka stunting mengalami penurunan menjadi 14,48 persen pada 2019. Meskipun masih tinggi, penurunan ini bisa menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam program kesehatan dan gizi yang mulai memberikan dampak positif. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan yang sangat drastis hingga mencapai 1,5 persen. Penurunan ini bisa disebabkan oleh intervensi besar-besaran atau program khusus yang sangat efektif dalam mengurangi angka stunting pada balita. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan kembali dengan angka stunting sebesar 9 persen. Peningkatan ini mungkin mengindikasikan bahwa kondisi yang menyebabkan penurunan drastis pada tahun 2020 tidak sepenuhnya berkelanjutan atau ada faktor lain yang menghambat keberlanjutan

penurunan stunting. Pada tahun 2022, persentase balita stunting kembali menurun menjadi 5,5 persen. Ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam menurunkan angka stunting, meskipun tidak secepat penurunan yang terjadi pada tahun 2020. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam persentase balita stunting di Kota Denpasar selama periode 2017 hingga 2022. Meskipun ada beberapa tahun di mana angka stunting berhasil diturunkan, peningkatan pada tahun-tahun lainnya menunjukkan perlunya upaya yang lebih konsisten dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah stunting. Intervensi yang lebih terarah, peningkatan akses terhadap makanan bergizi, serta perbaikan sanitasi dan layanan kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan penurunan angka stunting yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa mendatang.

Gambar 2.25
Persentase Balita Stunting di Kota Denpasar tahun 2017 - 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2024

Pada tahun 2023, prevalensi stunting mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 10,4% dari yang sebelumnya 10,8% di tahun 2023. Salah satu kemungkinan penyebab lonjakan pada tahun 2023 adalah bahwa penelitian mengenai stunting dilakukan di wilayah yang mencakup populasi penduduk non permanen. Kelompok penduduk ini kerap menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai, asupan gizi yang cukup, serta informasi penting tentang kesehatan anak. Kondisi ini sangat memengaruhi status gizi anak-anak dalam komunitas tersebut, karena penduduk non permanen sering kali tidak mendapatkan pemeriksaan dan

pemantauan kesehatan secara rutin, termasuk program pencegahan stunting di posyandu.

Mobilitas tinggi di antara penduduk non permanen menyebabkan mereka kurang mendapatkan manfaat dari berbagai program kesehatan yang sifatnya berkesinambungan dan terjadwal, seperti pemberian vitamin, pemantauan tumbuh kembang anak, serta edukasi gizi untuk ibu dan anak. Banyak keluarga non permanen yang berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti peluang pekerjaan, sehingga sulit bagi mereka untuk berpartisipasi dalam program kesehatan lokal yang memerlukan kehadiran rutin. Ketidakstabilan ini juga memperparah kondisi ekonomi dan sosial mereka, yang berpotensi membatasi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan gizi seimbang bagi anak-anak mereka. Akibatnya, kelompok ini menjadi lebih rentan terhadap kondisi stunting, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan angka stunting di wilayah tersebut. Upaya untuk menurunkan angka stunting pada penduduk non permanen memerlukan pendekatan khusus yang dapat menjangkau populasi ini dengan lebih fleksibel dan berkelanjutan, misalnya melalui layanan kesehatan yang mobile dan kebijakan yang mendukung akses terhadap gizi dan kesehatan bagi kelompok rentan ini.

Untuk menanggulangi kenaikan angka stunting, langkah yang diambil adalah dengan mengevaluasi kembali hasil pendataan yang dilakukan oleh Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Selain itu, dilakukan juga pelaksanaan posyandu serentak di seluruh Banjar di Kota Denpasar pada Juni 2024. Pelaksanaan posyandu serentak ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi balita, memastikan mereka mendapatkan pemantauan gizi yang rutin, imunisasi, serta pendidikan kesehatan bagi orang tua. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk yang berasal dari keluarga non permanen, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan. Hal ini diharapkan dapat membantu menurunkan angka stunting dengan memberikan intervensi gizi yang tepat waktu, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak. Dengan evaluasi yang tepat dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, diharapkan masalah stunting di Kota Denpasar dapat ditangani secara efektif.

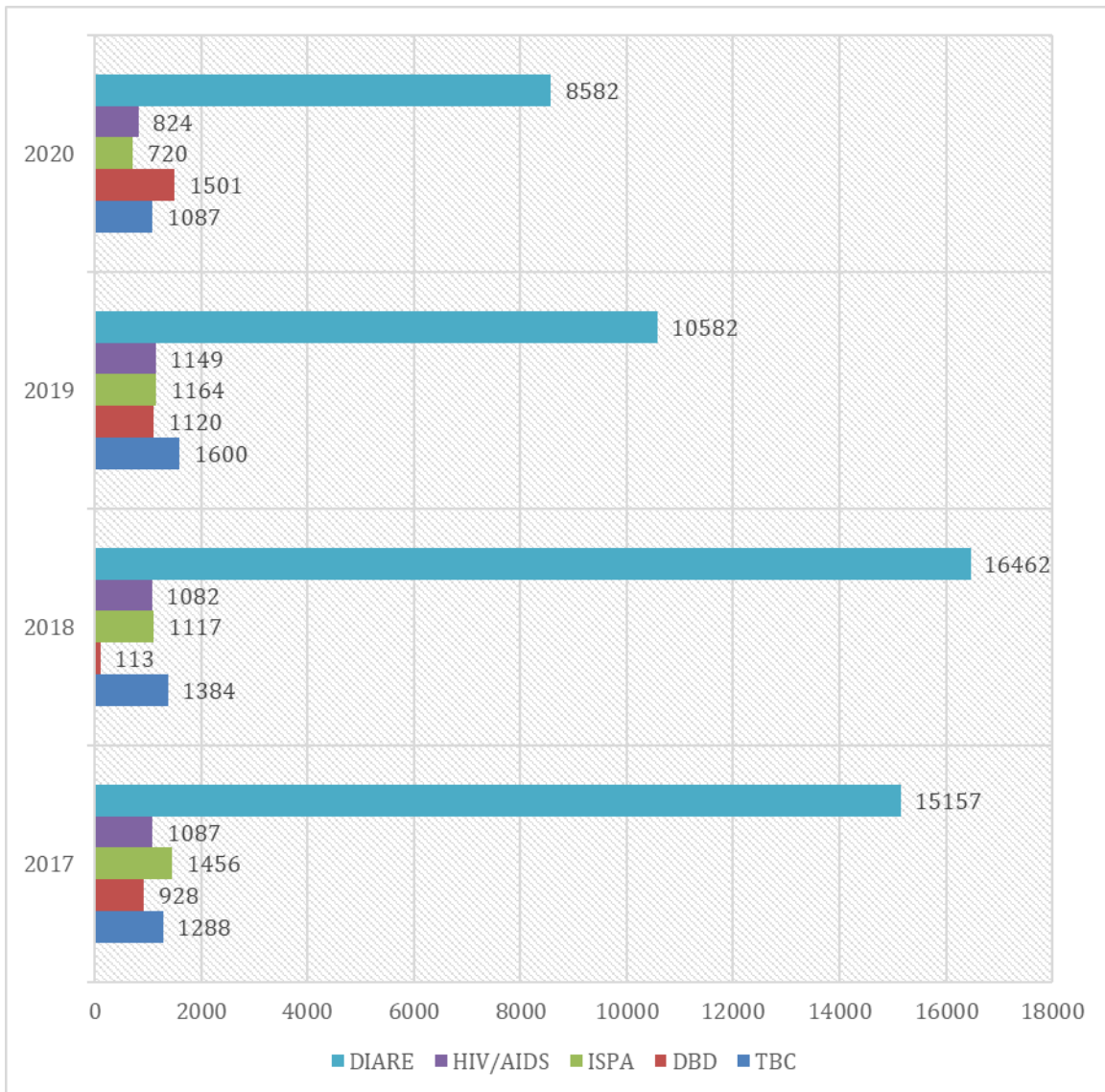
2.2.1.6 Kasus Penyakit Menular

Data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar melalui sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas menggambarkan tren angka kejadian beberapa penyakit menular di Kota Denpasar. Analisis data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penyakit menular, seperti Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan Diare, mengalami penurunan yang signifikan selama periode waktu yang diamati. Meskipun demikian, ada beberapa penyakit yang menunjukkan perkembangan fluktuatif, seperti Tuberkulosis (TBC), Demam Berdarah Dengue (DBD), dan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS). Fenomena fluktuatif ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian dan pemantauan terus diperlukan untuk mencegah potensi peningkatan kasus di masa yang akan datang.

Pentingnya pemantauan rutin terhadap penyakit-penyakit tersebut menegaskan komitmen pemerintah dan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Tren positif pada penyakit tertentu dapat mencerminkan keberhasilan intervensi kesehatan masyarakat, sementara fluktuasi pada penyakit lainnya menunjukkan kompleksitas dalam mengelola dan mengendalikan penyebaran penyakit menular di komunitas. Upaya-upaya pencegahan dan penanganan yang berkelanjutan perlu diperkuat untuk mencapai tujuan pengendalian penyakit dan meningkatkan status kesehatan masyarakat Kota Denpasar.

Gambar 2.26 menunjukkan selama tahun 2017-2020, kasus penyakit menular di Kota Denpasar telah mengalami penurunan, yaitu dari 19.916 total kasus pada tahun 2017 menjadi 12.714 total kasus pada 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan upaya serius untuk menyebarkan imunisasi pada anak-anak dalam rangka mencegah penyakit menular, serta telah melakukan berbagai upaya pencegahan untuk menurunkan kasus penyakit menular di Kota Denpasar. Dengan kata lain, taraf kesehatan di Kota Denpasar sudah mengalami peningkatan baik dari segi akses maupun pelayanan.

Gambar 2.26
Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kota Denpasar tahun 2017-2020



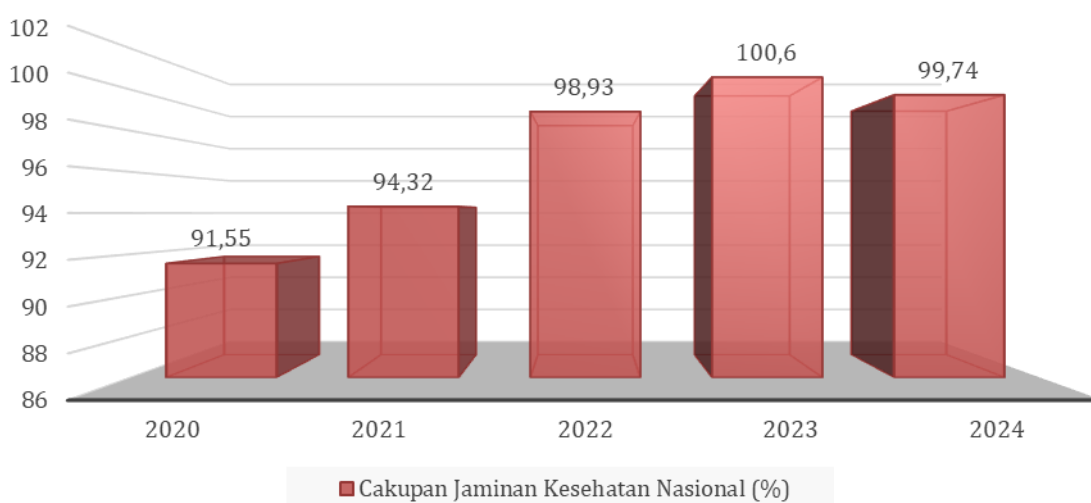
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2023

2.2.1.7 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk persentase menggambarkan proporsi penduduk yang telah menjadi peserta aktif dalam program JKN, baik melalui segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), maupun segmen lainnya. Persentase ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjamin secara finansial melalui sistem jaminan sosial. Semakin tinggi cakupan kepesertaan, maka semakin luas pula jangkauan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan tidak mampu. Peningkatan cakupan ini mencerminkan keberhasilan implementasi prinsip keadilan dan inklusivitas dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Sebaliknya, jika cakupan

masih rendah, berarti masih banyak penduduk yang berisiko tidak mendapatkan layanan kesehatan yang layak atau terhambat oleh beban biaya. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan cakupan JKN agar mendekati target *universal health coverage* (UHC), dengan memperluas sosialisasi, menyederhanakan pendaftaran, dan menjamin keberlanjutan pendanaan program.

Gambar 2.27
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Penduduk Kota Denpasar Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025

Gambar 2.27 menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada penduduk Kota Denpasar (KTP Denpasar) mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2020, cakupan JKN tercatat sebesar 91,55%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk Kota Denpasar sudah memiliki akses terhadap jaminan kesehatan. Selanjutnya cakupan JKN mengalami peningkatan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan capaian masing-masing 94,32%, 98,93%, dan 100,6%. Persentase tersebut mengalami sedikit penurunan yang tidak terlalu signifikan pada tahun 2024 menjadi 99,74%. Meskipun tren cakupan JKN mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir, namun secara umum cakupan kepesertaan JKN pada penduduk Kota Denpasar sudah mengalami peningkatan yang baik. Peningkatan cakupan ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga Denpasar kini telah memiliki perlindungan kesehatan yang lebih baik, sehingga risiko beban biaya kesehatan dapat ditekan dan akses terhadap layanan medis menjadi lebih merata. Upaya ini juga memperlihatkan keseriusan Kota Denpasar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

penduduknya melalui jaminan kesehatan yang inklusif. Atas capaian cakupan kepesertaan JKN yang sudah diatas 96%, Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2022 telah memperoleh penghargaan *Universal Health Coverage* (UHC) yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

2.2.2 Peningkatan Kualitas Bidang Pendidikan

Pemerintah Kota Denpasar menciptakan generasi muda yang kompetitif, unggul, dan siap bersaing. Upaya ini mencakup peningkatan akses pendidikan, pengembangan kemampuan tenaga pengajar, peningkatan kualitas fasilitas belajar, serta penerapan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Denpasar telah memperluas kesempatan bagi semua anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas, dengan menyediakan lebih banyak fasilitas pendidikan dan program bantuan bagi keluarga kurang mampu. Langkah ini tidak hanya memperluas akses tetapi juga mengurangi kesenjangan pendidikan di antara penduduk kota. Fokus utama pemerintah adalah pengembangan profesional guru melalui pelatihan berkala agar mereka dapat menguasai metode pengajaran modern dan teknologi pendidikan. Langkah ini diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga siswa didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Fasilitas sekolah juga diperbarui, mulai dari perbaikan infrastruktur fisik hingga penyediaan teknologi pendukung seperti komputer dan akses internet di sekolah-sekolah. Pemerintah turut mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum untuk membangun etika, tanggung jawab, dan kepedulian sosial pada siswa, serta memberikan pendidikan vokasional dan nonformal untuk keterampilan praktis bagi siswa yang tidak melanjutkan pendidikan formal, sehingga memperluas peluang mereka di dunia kerja.

Akses pendidikan diukur melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), yang menggambarkan sejauh mana penduduk terlibat dalam pendidikan formal pada berbagai jenjang. APK dan APM menjadi alat penting untuk memahami distribusi pendidikan dan mengidentifikasi kesenjangan gender dalam akses pendidikan. Dengan memahami data ini, pemerintah dapat menyusun kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, memastikan kesempatan yang setara bagi setiap anak, dan menciptakan sistem pendidikan yang mendukung pengembangan seluruh potensi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan di

Denpasar. Pemahaman mendalam mengenai akses pendidikan dan kesenjangan gender dalam pendidikan adalah kunci untuk merancang kebijakan yang berkelanjutan, mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi, dan memastikan bahwa setiap segmen masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki peluang yang setara dalam memperoleh pendidikan berkualitas di Kota Denpasar.

2.2.2.1 Akses Penduduk terhadap Pendidikan

Untuk melihat akses penduduk terhadap pendidikan dapat melihat salah satu indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah adalah persentase anak usia sekolah yang secara aktif berada di lembaga pendidikan pada tingkat pendidikan tertentu, dibandingkan dengan jumlah total anak usia sekolah dalam populasi pada periode waktu yang sama. Angka ini memberikan gambaran tentang sejauh mana anak-anak terlibat dalam sistem pendidikan selama periode waktu tersebut. Indikator APS yang diamati ada pada rentang tahun 2018 sampai dengan 2024. Selain itu juga akan dibahas indikator lain yakni rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah yang diamati ada pada rentang yang sama yaitu 2018 sampai dengan 2024. Berdasarkan Tabel 2.3 berikut ini, diketahui bahwa APS 7-12 tahun dan APS 13-15 tahun berada di bawah angka 100 persen pada tahun 2018 hingga 2024, namun angka tersebut masih cukup tinggi karena sudah mendekati 100 persen. APS pada rentang usia 16-18 tahun berada pada angka yang cukup rendah selama lima tahun berturut-turut jika dibandingkan dengan rentang umur dibawahnya. Rentang usia 16-18 tahun masuk dalam masa sekolah menengah atas, sehingga diharapkan muncul upaya lebih komprehensif untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah pada penduduk usia 16-18 tahun. Angka APS paling rendah berada pada kelompok usia 19-24 tahun yang merupakan masa pendidikan di perguruan tinggi, dengan angka APS setiap tahun dibawah 50 persen pada periode 2018 – 2024.

Tabel 2.3
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Denpasar tahun 2018 - 2024

Rentang Usia	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Denpasar (%)						
	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*
7-12 Tahun	99.62	100.00	99.51	99.84	99.37	99.12	99,18
13-15 Tahun	99.17	98.42	99.23	98.98	98.84	98.50	98,79
16-18 Tahun	73.10	73.74	75.47	80.40	80.80	83.63	82,29
19-24 Tahun	34.24	-	39.06	39.53	39.92	41.06	41,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2024

Badan Pusat Statistik .Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018-2020

Tren harapan lama sekolah di Kota Denpasar menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga 2024 pada Tabel 2.4 menunjukkan pada tahun 2018, angka harapan lama sekolah di kota ini mencapai 13,98 tahun, dan kemudian terus mengalami kenaikan menjadi 14,13 tahun pada tahun 2024. Capaian ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, anak-anak yang memulai pendidikan formal di usia 7 tahun pada tahun 2024 memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan mereka dalam kurun waktu 14 tahun. Lebih lanjut, pencapaian angka harapan lama sekolah di Kota Denpasar selalu berada di atas rata-rata angka Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Denpasar, yang dapat memiliki dampak positif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat di masa depan.

Tabel 2.4
Harapan Lama Sekolah di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2018 - 2024

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Denpasar	13,98	13,99	14,00	14,09	14,10	14,11	14,13
Provinsi Bali	13,23	13,27	13,33	13,40	13,48	13,58	13,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024

Bila diamati pada Tabel 2.4, harapan lama sekolah di Kota Denpasar sudah lebih tinggi dibandingkan dengan level Provinsi. Selain itu, harapan lama sekolah di Kota Denpasar juga mengalami peningkatan, yang artinya semakin banyak penduduk sadar bahwa Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan dengan harapan lama sekolah di atas 14 dimana angka ini melebihi capaian Provinsi. Namun, jika dilihat dari tabel 2.5, tabel tersebut menggambarkan perkembangan rata-rata lama sekolah di Kota Denpasar dan Provinsi Bali selama periode 2018 hingga 2024. Data tersebut menunjukkan peningkatan konsisten dalam harapan lama sekolah di kedua wilayah tersebut. Di Kota Denpasar, harapan lama sekolah meningkat dari 11,16 tahun pada tahun 2018 menjadi 11,53 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Kota Denpasar dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi warganya. Selama enam tahun tersebut, terdapat peningkatan sebesar 0,36 tahun. Harapan lama sekolah di Provinsi Bali, juga menunjukkan tren peningkatan dari 8,65 tahun pada tahun 2018 menjadi 9,54 tahun pada tahun 2024. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Kota Denpasar, kenaikan sebesar 0,80 tahun mencerminkan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan di seluruh provinsi.

Perbandingan antara kedua wilayah menunjukkan bahwa Kota Denpasar memiliki harapan lama sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Hal ini mungkin mencerminkan perbedaan dalam aksesibilitas dan kualitas pendidikan antara ibu kota provinsi dan daerah lainnya di Bali. Namun, tren peningkatan yang konsisten di kedua wilayah mengindikasikan kemajuan yang positif dalam sektor pendidikan di Bali selama periode tersebut.

Tabel 2.5
Rata – Rata Lama Sekolah di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2018 - 2024

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Denpasar	11,16	11,23	11,47	11,48	11,50	11,52	11,53
Provinsi Bali	8,65	8,84	8,95	9,06	9,39	9,45	9,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024

2.2.2.2 Pendidikan Menurut Gender

Pendidikan menurut gender adalah aspek penting dalam memahami distribusi dan akses pendidikan di suatu wilayah, termasuk di Kota Denpasar. Dengan melihat data pendidikan berdasarkan jenis kelamin, pemerintah dan pemangku kebijakan dapat mengidentifikasi apakah terdapat kesenjangan dalam partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan di berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pemahaman ini berperan penting dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, yang memastikan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan menurut gender juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program-program pendidikan yang ada dalam mengurangi disparitas gender. Di banyak wilayah, terdapat kesenjangan gender yang berdampak pada kualitas dan lama pendidikan yang ditempuh oleh laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor seperti akses ke fasilitas pendidikan, norma sosial, serta beban ekonomi sering kali memengaruhi partisipasi gender dalam pendidikan. Dengan menganalisis indikator seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut gender, dapat terlihat tren dan pola yang memberikan wawasan mendalam tentang area yang perlu perhatian khusus.

Upaya untuk memperkecil kesenjangan pendidikan menurut gender di Denpasar mencakup program-program pendukung bagi anak perempuan, pemberian beasiswa, serta peningkatan fasilitas dan keamanan di sekolah, sehingga semua siswa, tanpa memandang jenis kelamin, merasa didukung untuk melanjutkan pendidikan mereka. Dengan demikian, pendidikan menurut gender tidak hanya tentang angka atau statistik, tetapi juga tentang mendorong setiap individu untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi secara aktif dalam masyarakat, yang pada akhirnya menciptakan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Gambaran mengenai prestasi pendidikan yang diukur melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin. Dengan adanya indikator ini, diharapkan dapat mencerminkan tingkat kesetaraan dan keadilan gender dalam sektor pendidikan. Analisis berdasarkan Tabel 2.6 menunjukkan bahwa capaian nilai APS tidak menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara gender. Hal ini menandakan bahwa partisipasi sekolah penduduk perempuan di Kota Denpasar cukup tinggi dan tidak jauh berbeda dengan partisipasi sekolah penduduk laki-laki.

Tabel 2.6
Angka Partisipasi Sekolah Kota Denpasar menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin tahun 2017 - 2022

Rentang Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Tahun (%)					
		2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*
7-12	Laki - Laki	99,49	99,26	100	99,10	99,69	98,79
	Perempuan	98,29	100	100	100	100	100
13-15	Laki - Laki	98,66	100	100	98,48	98,10	98,38
	Perempuan	98,49	98,38	96,61	100	100	99,33
16-18	Laki - Laki	73,83	70,39	73,37	83,29	82,01	75,04
	Perempuan	86,40	75,86	74,10	68,92	79,07	87,70

Sumber: Badan Pusat Statistik. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)*;
*Profil Statistik Gender, 2023

Pencapaian ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan akses pendidikan yang setara dan merata bagi semua warga, tanpa memandang jenis kelamin. Selain itu, juga perlu ditekankan bahwa pendidikan bagi anak perempuan lebih dari sekedar menyekolahkan anak perempuan, namun juga memastikan bahwa anak perempuan belajar dan merasa aman selama berada di sekolah, mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan semua tingkat pendidikan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bersaing di pasar kerja, memperoleh keterampilan sosial, emosional, dan hidup yang diperlukan untuk menavigasi dan beradaptasi dengan dunia yang terus

berubah, membuat keputusan untuk kehidupan mereka sendiri, dan pada akhirnya dapat berkontribusi pada komunitas mereka dan dunia. Adanya tingkat partisipasi sekolah yang seimbang antara perempuan dan laki-laki diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Denpasar. Worldbank (2023) menyebutkan bahwa perempuan yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak informasi mengenai gizi, layanan kesehatan, memiliki lebih sedikit anak, menikah pada usia lebih matang, dan anak-anak mereka lebih sehat jika perempuan tersebut memilih untuk menjadi ibu.

2.2.3 Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi

Kualitas penduduk dalam aspek ekonomi dapat diukur melalui sejumlah indikator, termasuk PDRB, ketenagakerjaan, dan aspek kemiskinan, kesejahteraan, serta ketimpangan. Indikator PDRB yang menjadi fokus adalah PDRB Kota Denpasar secara agregat dan PDRB Per Kapita. Dari segi ketenagakerjaan, analisis mencakup jumlah angkatan kerja yang terbagi menjadi penduduk yang bekerja, penganggur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan tingkat kesempatan kerja di Kota Denpasar. Pada sisi kemiskinan, kesejahteraan, dan ketimpangan, evaluasi mencakup persentase penduduk miskin, persentase keluarga miskin, cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan bantuan, dan indeks Gini sebagai ukuran ketidaksetaraan ekonomi di Kota Denpasar. Melalui analisis menyeluruh terhadap indikator tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi penduduk Kota Denpasar serta memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan di masyarakat.

2.2.3.1 PDRB Kota Denpasar

Perkembangan nilai PDRB Kota Denpasar menurut harga berlaku dan jenis pengeluaran pada periode 2019-2023 mencerminkan pola khusus. Data yang terdokumentasi dalam tabel menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, terjadi fluktuasi nilai PDRB. Hal ini disebabkan oleh karena pada tahun 2020, terjadi perubahan signifikan dimana nilai PDRB mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dapat dijelaskan sebagai dampak dari pandemi

COVID-19, yang mempengaruhi hampir semua sektor usaha, mengakibatkan perlambatan ekonomi secara umum. Satu-satunya sektor yang mencatatkan peningkatan nilai PDRB pada tahun 2020 adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, yang meningkat sebagai respons terhadap penanggulangan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Analisis ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan dinamika ekonomi Kota Denpasar selama periode tersebut.

Tabel 2.7
Nilai PDRB Atas Harga Berlaku di Kota Denpasar (Juta Rupiah) tahun 2019 - 2023

Jenis Pengeluaran PDRB	PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga / <i>Households Consumption Expenditure</i>	25.855.846	25.212.939	25.581.390	27.947.555	30.704.585
Pengeluaran Konsumsi LNPRT / NPISHs <i>Consumption Expenditure</i>	814.211	795.296	821.093	955.055	1.135.019
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption Expenditure</i>	7.864.038	8.396.252	8.036.774	8.102.755	8.340.083
Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	19.017.842	16.037.899	16.412.765	17.789.851	19.066.386
Perubahan Inventori / <i>Changes in Inventories</i>	129.729	92.427	103.970	114.636	40.101
Net Ekspor Barang / Jasa / <i>Net Export of Goods and Services</i>	1.774.377	(927.352)	(1.269.365)	(276.026)	814.128
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	55.456.044	49.607.462	49.686.627	54.633.827	60.100.302

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2023

Tren penurunan PDRB pada tahun 2020 di Kota Denpasar dapat dipahami lebih rinci dengan melihat variasi dampak pandemi COVID-19 pada berbagai jenis lapangan usaha melalui data laju PDRB per sektor di Kota Denpasar yang disajikan pada Tabel 2.7 berikut ini. Data menunjukkan bahwa hampir seluruh sektor usaha terpengaruh oleh kondisi ini. Namun, beberapa sektor lebih terdampak dibandingkan yang lain, menciptakan dinamika ekonomi yang kompleks.

Salah satu sektor yang mengalami dampak paling signifikan adalah sektor transportasi dan pergudangan. Pembatasan perjalanan dan penurunan aktivitas ekonomi menyebabkan penurunan signifikan dalam PDRB sektor ini. Hal yang serupa juga dialami oleh sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, di mana pembatasan perjalanan dan penutupan tempat-tempat umum berdampak pada penurunan konsumsi dan aktivitas ekonomi di sektor ini.

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan di Kota Denpasar tahun 2019 - 2023

Nama Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.74	-3.57	3.15	-0.17	-0.14
B. Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C. Industri Pengolahan	5.82	-7.09	0.69	6.29	2.39
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3.72	-10.29	-6.47	17.57	16.26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.91	-1.68	1.21	-2.17	-0.55
F. Konstruksi	9.15	-3.63	5.77	4.24	0.91
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.87	-7.26	-1.41	6.28	6.78
H. Transportasi dan Pergudangan	6.44	-19.99	-9.21	9.83	14.19
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.57	-29.84	-10.45	14.85	17.28
J. Informasi dan Komunikasi	9.08	6.30	3.46	-0.95	1.36
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.89	-4.19	-3.69	7.17	13.16
L. Real Estate	4.41	0.13	0.99	2.20	0.54
M,N. Jasa Perusahaan	4.18	-4.76	-3.16	9.33	7.21
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.36	0.01	1.92	-3.36	-2.14
P. Jasa Pendidikan	5.27	-0.77	1.80	0.33	-0.16
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.65	3.78	6.17	1.31	2.68
R,S,T,U. Jasa Lainnya	7.22	-6.10	-1.51	9.64	8.64
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5.82	-9.44	-0.92	5.02	5.69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2023

Di sisi lain, beberapa sektor mampu beradaptasi dengan kondisi baru dan bahkan mengalami pertumbuhan positif. Sektor informasi dan komunikasi menjadi salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar selama pandemi. Perubahan perilaku masyarakat yang cenderung beralih ke kegiatan online dan peningkatan kebutuhan akan teknologi informasi menyebabkan pertumbuhan sektor

ini. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga mencatat pertumbuhan positif, mengingat peningkatan kesadaran akan kesehatan selama pandemi. Permintaan akan produk kesehatan dan pelayanan medis meningkat, memberikan kontribusi positif terhadap PDRB sektor ini. Sementara itu, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial turut memberikan kontribusi positif selama pandemi, hal ini mungkin terkait dengan respons pemerintah dalam mengelola krisis kesehatan namun pada tahun 2022 dan 2023 sebaliknya memberikan kontribusi yang negatif.

2.2.3.2 PDRB Per Kapita

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat memberikan gambaran yang signifikan mengenai tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan secara masyarakat secara individu. PDRB per kapita diukur menggunakan dua parameter, yaitu atas dasar harga konstan dan atas harga berlaku. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDRB yang dihasilkan per kepala atau per individu penduduk yang perkembangannya selama tahun 2018-2024 akan ditunjukkan pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9
PDRB Per Kapita di Kota Denpasar Tahun 2018-2024

PDRB	PDRB Perkapita di Kota Denpasar (Ribu Rupiah)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah)	55.204,95	57.897,95	68.298,89	68.383,22	75.192,39	80.305,00	86.425,33
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ribu rupiah)	34.166,45	36.154,42	32.740,22	32.439,61	34.066,71	36.004,30	38.001,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa baik menggunakan harga konstan maupun harga berlaku, PDRB per kapita Kota Denpasar menunjukkan pola yang serupa pada periode 2018-2024, yaitu mengalami tren kenaikan yang positif. Meskipun tahun 2020 menjadi tahun penuh tantangan akibat dampak Pandemi COVID-19 yang signifikan terhadap sektor ekonomi, termasuk di Kota Denpasar, angka PDRB per kapita menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas yang luar biasa. Pada tahun tersebut, kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2019 mencerminkan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dan sektor swasta dalam merespons krisis. Tidak hanya

itu, tren positif ini berlanjut hingga tahun 2021 dan 2024, menciptakan gambaran yang lebih luas tentang keberlanjutan dan ketangguhan pemulihan ekonomi Kota Denpasar. Kenaikan yang berkelanjutan ini mungkin menjadi hasil dari implementasi kebijakan-kebijakan khusus, investasi strategis, atau adaptasi sektor-sektor tertentu terhadap perubahan dalam pola konsumsi dan perilaku bisnis. Hal ini mencerminkan terdapat faktor-faktor spesifik yang menyebabkan kenaikan PDRB per kapita di tengah situasi sulit, seperti diversifikasi ekonomi, efisiensi operasional, atau inovasi bisnis, akan memberikan wawasan yang lebih kaya. Referensi dari sumber-sumber ilmiah, laporan ekonomi resmi, atau studi kasus yang relevan dapat memberikan dukungan pada analisis ini.

2.2.3.3 Angkatan Kerja

Angkatan kerja di Kota Denpasar adalah komponen utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi kota sekaligus menjadi indikator kunci dalam mengukur keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan populasi usia produktif yang terdiri dari penduduk berusia 15 hingga 64 tahun, angkatan kerja ini berperan besar dalam sektor formal maupun informal, khususnya dalam bidang pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan layanan. Sebagai pusat ekonomi dan budaya di Bali, Denpasar menjadi magnet bagi tenaga kerja dari berbagai daerah, menjadikan komposisi angkatan kerjanya beragam dan dinamis. Tingginya tingkat urbanisasi dan daya tarik ekonomi Denpasar juga meningkatkan jumlah tenaga kerja migran yang turut memperkuat kontribusi di berbagai sektor ekonomi.

Pemerintah Kota Denpasar menyadari pentingnya meningkatkan kualitas angkatan kerja sebagai pilar keberlanjutan ekonomi. Melalui program pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan, seperti pelatihan teknologi digital, bahasa asing, serta keterampilan praktis lainnya, pemerintah berupaya membekali tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan daya saing di pasar kerja lokal, tetapi juga memperkuat potensi angkatan kerja Denpasar dalam menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, angkatan kerja Denpasar tidak hanya berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian, tetapi juga mencerminkan potensi sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi serta kesejahteraan penduduk secara berkelanjutan.

Data pada tabel 2.10 menunjukkan tren cenderung positif pertumbuhan jumlah angkatan kerja selama periode 2017-2022 di Kota Denpasar. Namun, terdapat dinamika yang menarik perhatian pada tahun 2020. Meskipun jumlah angkatan kerja meningkat, terjadi peningkatan jumlah pengangguran, sementara jumlah angkatan kerja yang benar-benar bekerja mengalami penurunan. Fenomena ini memberikan gambaran terhadap tantangan yang dihadapi di sektor ketenagakerjaan. Pada tahun 2020, angkatan kerja menunjukkan angka sebanyak 542.477 orang dimana pada tahun 2020 tingkat pengangguran meningkat cukup signifikan sebanyak 41.334 orang atau meningkat 3,5 kali lipat dari tahun 2019. Jumlah ini seharusnya dapat menjadi aset berharga dalam memacu perkembangan ekonomi lokal.

Penting untuk dicatat bahwa situasi ini secara langsung terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang melanda. Penurunan pekerjaan dan peningkatan pengangguran menjadi cerminan dari krisis ekonomi yang dihadapi pada tahun 2020. Seiring dengan tren global, Kota Denpasar tidak luput dari perubahan signifikan dalam pasar tenaga kerja. identifikasi sektor-sektor yang paling terdampak. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan kebijakan pemulihan yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Referensi dari laporan ekonomi resmi, analisis kebijakan, atau penelitian pasar tenaga kerja akan memberikan wawasan yang lebih kaya dan relevan untuk mendukung pembahasan ini.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kota Denpasar tahun 2017 – 2022

Tahun	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja			Penduduk Usia Kerja	
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya		Jumlah
2017	501.909	13.556	515.465	78.336	89.567	14.067	181.970	697.435
2018	516.642	9.563	526.205	77.339	99.982	9.950	187.271	713.476
2019	511.072	11.589	522.661	76.562	118.518	11.109	206.189	728.850
2020	501.143	41.334	542.477	84.519	123.088	14.960	222.567	765.044
2021	499.900	37.716	537.616	85.796	137.535	21.980	245.311	782.927
2022	550.214	29.429	579.643	83.135	117.162	21.003	221.300	800.943

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kota Denpasar, 2023

Jumlah Penduduk usia kerja 15 tahun keatas mengalami peningkatan siring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar. Besaran penduduk usia kerja merupakan sebuah potensi untuk pembangunan di Kota Denpasar. Hal ini

menyebabkan posisi optimis untuk meningkatkan produktivitas. Jika dilihat selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, terjadi fluktuasi tingkat partisipasi angkatan kerja hanya pada tahun 2021 saat pandemi mulai mengalami peningkatan yang relatif tinggi. Pada tahun 2021 merupakan posisi partisipasi angkatan kerja yang relatif rendah dibandingkan tahun sebelumnya atau sesudahnya yakni sebesar 68,67 persen. Perbaikan partisipasi relatif signifikan terjadi pada tahun 2022 menjadi 72,37 persen kendati itupun belum mampu mencapai partisipasi seperti tahun 2017 yang paling tinggi antara 2017-2022.

Secara teoretis, tren ini sejalan dengan model *Labour Force Participation* (Mincer, 1962) yang menekankan bahwa partisipasi kerja dipengaruhi oleh faktor upah riil, peluang kerja, serta norma sosial. Dalam konteks Denpasar, norma sosial yang membatasi peran perempuan di pasar kerja, keterbatasan dukungan fasilitas pengasuhan anak, serta perbedaan konsentrasi sektor pekerjaan antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama yang membentuk kesenjangan TPAK.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk dan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2017 - 2022
di Kota Denpasar

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk (jiwa)	914.300	930.600	947.100	725.314	726.599	726.800
2	Penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih (jiwa)	697.435	713.476	728.850	765.044	782.927	800.943
	a. Angkatan kerja (jiwa)	515.465	526.205	522.661	542.477	537.616	579.643
	- Bekerja (jiwa)	501.909	516.642	511.072	501.143	499.900	550.214
	- Penganggur (jiwa)	13.556	9.563	11.589	41.334	37.716	579.643
	b. Bukan angkatan kerja (jiwa)	181.970	187.271	206.189	222.567	245.311	221.300
	- Sekolah (jiwa)	78.336	77.339	76.562	84.519	85.796	83.135
	- Mengurus rumah tangga (jiwa)	89.567	99.982	118.518	123.088	137.535	117.162
	- Lainnya	14.067	9.950	11.109	14.980	21.980	21.003
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)	73,91	73,75	71,71	70,91	68,67	72,37

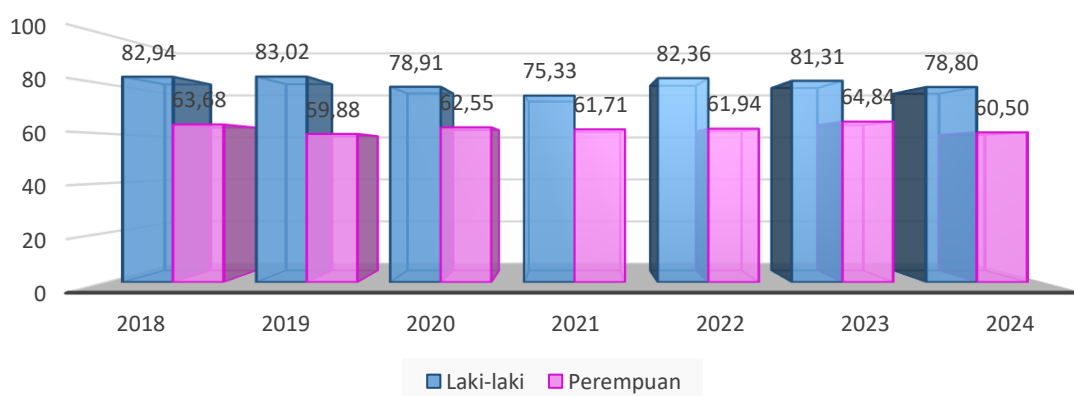
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2022

Pentingnya mengukur jumlah angkatan kerja di Kota Denpasar tergambar melalui perhitungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Melalui data pada Tabel 2.11, TPAK di Kota Denpasar pada tahun 2020 mencapai 70,91 persen. Artinya, dari setiap 100

penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 70 penduduknya termasuk dalam angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), semakin tinggi TPAK, semakin besar pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk berkontribusi dalam produksi barang dan jasa dalam perekonomian suatu wilayah. Pada Tabel 2.10 di atas juga menunjukkan tren menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Denpasar sejak tahun 2017 hingga 2022. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius bersama, mengingat penurunan ini dapat berdampak signifikan pada perekonomian Kota Denpasar. Jika tidak segera ditangani, penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat merugikan produksi dan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar.

Data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Denpasar dapat dilihat pada Gambar 2.28 berikut ini. Sebagaimana yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, TPT mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020. Pada tahun sebelumnya, persentase pengangguran terbuka hanya sebesar 2,29 persen, namun mengalami lonjakan yang drastis pada tahun 2020 menjadi 7,62 persen. Peningkatan yang cukup tajam ini dapat dijelaskan sebagai dampak langsung dari pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun tersebut. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga menyebabkan guncangan ekonomi global. Sebagai akibatnya, banyak perusahaan mengalami kesulitan, mengurangi produksi atau bahkan tutup, dan sejumlah besar pekerja kehilangan pekerjaan mereka. Kondisi ini tercermin dengan jelas dalam data tingkat pengangguran terbuka yang naik drastis.

Gambar 2.28
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
di Kota Denpasar tahun 2018-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2024

Gambar menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin di Kota Denpasar dari tahun 2018 hingga 2024. Secara umum, terlihat bahwa

partisipasi angkatan kerja laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2018 dan 2019, TPAK laki-laki berada di angka stabil, yaitu 82,94% dan 83,02%, sementara perempuan masing-masing berada di angka 63,68% dan 59,88%. Pada tahun 2020, terjadi penurunan partisipasi pada kedua jenis kelamin, terutama akibat dampak pandemi COVID-19. TPAK laki-laki turun ke 78,91% dan perempuan ke 62,55%. Tren penurunan berlanjut pada 2021, di mana laki-laki turun lagi ke 75,33% dan perempuan ke 61,71%. Namun, mulai 2022 terlihat pemulihan: TPAK laki-laki naik ke 82,36% dan perempuan sedikit meningkat menjadi 61,94%. Tahun 2023 mencatat angka partisipasi tertinggi bagi perempuan sepanjang periode, yakni 64,84%, sementara laki-laki berada di 81,31%. Namun, pada 2024, angka partisipasi mengalami penurunan lagi, terutama pada kelompok perempuan yang turun ke 60,50%, dan laki-laki menjadi 78,80%. Perbedaan partisipasi antara laki-laki dan perempuan tetap mencolok, menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dalam pasar kerja. Meskipun terdapat peningkatan partisipasi perempuan pada tahun-tahun tertentu, tren ini belum cukup stabil. Hal ini menandakan perlunya intervensi kebijakan yang mendorong kesetaraan akses kerja, dukungan bagi pekerja perempuan (seperti pengasuhan anak, pelatihan keterampilan), serta penguatan ekonomi inklusif di Kota Denpasar.

Gambar 2.29
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar Tahun 2017 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2022

Menghadapi tantangan berat akibat pandemi Covid-19, Kota Denpasar menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, angka pengangguran terbuka melonjak dari 2,29 persen pada tahun 2019 menjadi 7,62 persen pada 2020, serta cenderung meningkat setelah pandemi covid-19 pada tahun 2021 sebesar 7,02 dan pada

2022 sebesar 5,08. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 dan 2024 menjadi masing-masing 2,85 persen dan 2,11 persen. Hal ini menunjukkan sektor ekonomi di Kota Denpasar mulai tergerak kembali pasca pandemi Covid-19, serta telah berhasil menciptakan lapangan kerja baru bagi para penduduk yang kehilangan pekerjaan selama masa pandemi. Meskipun mengalami penurunan sejak tahun 2022 hingga 2024, tingkat pengangguran di Kota Denpasar masih perlu untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Denpasar, mengingat tingkat pengangguran Kota Denpasar lebih tinggi dari tingkat pengangguran Provinsi Bali pada tahun 2024 yang sebesar 1,79%. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan baru pada berbagai sektor yang dapat diakses oleh penduduk Kota Denpasar.

Gambar 2.30
Persentase Kesempatan Kerja di Kota Denpasar tahun 2017-2022



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2022

Kesempatan kerja merujuk pada peluang atau kesempatan yang tersedia bagi individu untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, pendidikan, dan minat mereka. Tingginya kesempatan kerja biasanya menunjukkan bahwa ekonomi suatu daerah tumbuh dan sehat, serta mampu menyediakan lapangan kerja bagi warganya.

Gambar 2.30 menunjukkan persentase kesempatan kerja di Kota Denpasar dari tahun 2017 hingga 2022. Pada tahun 2017, persentase kesempatan kerja di Kota Denpasar mencapai 7,13 persen, menandakan tahun tersebut memiliki kesempatan kerja yang cukup baik. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 4,9 persen, yang menunjukkan adanya penurunan dalam ketersediaan lapangan kerja dibandingkan

tahun sebelumnya. Kondisi semakin memburuk pada tahun 2019 dengan persentase kesempatan kerja turun drastis menjadi -0,56 persen, mengindikasikan peningkatan pengangguran atau berkurangnya lapangan kerja.

Tahun 2020 menjadi tahun dengan dampak terburuk terhadap kesempatan kerja di Kota Denpasar, dengan persentase mencapai -4,28 persen. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak perusahaan menutup atau mengurangi jumlah pekerja. Pada tahun 2021, kondisi sedikit membaik dengan persentase kesempatan kerja menjadi -0,25 persen, menunjukkan ada sedikit pemulihan dalam pasar kerja. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022, dengan persentase kesempatan kerja melonjak menjadi 10,06 persen. Ini menandakan pemulihan ekonomi yang kuat dan peningkatan dalam ketersediaan lapangan kerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan perjalanan ekonomi Kota Denpasar dari periode pertumbuhan, penurunan drastis, hingga pemulihan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu indikator untuk menilai kesehatan pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan adalah tingkat kesempatan kerja. Tingkat Kesempatan kerja merupakan indikator ekonomi yang mengukur persentase populasi usia kerja yang sedang bekerja dalam suatu periode waktu tertentu. Formulasi ini merupakan metode untuk menghitung tingkat kesempatan kerja berdasarkan data populasi usia kerja dan jumlah pekerja yang aktif. Tingkat kesempatan kerja dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Kesempatan Kerja} = \frac{\text{jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100$$

Tabel 2.12
Penduduk yang Bekerja di Kota Denpasar dan Provinsi Bali
tahun 2018 – 2023 (jiwa)

Tahun	Kota Denpasar	Provinsi Bali
2018	526,484	2,525,707
2019	523,524	2,469,006
2020	501,143	2,423,419
2021	499,900	2,441,854
2022	550,214	2,607,070
2023	422,382	2,617,816

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2023

Tabel 2.12 menunjukkan data jumlah penduduk usia kerja di Kota Denpasar dan Provinsi Bali dari tahun 2018 hingga 2023. Data ini disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan jumlah orang usia kerja di kedua wilayah tersebut setiap tahunnya.

Tabel 2.13
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Formal-Informal di Kota Denpasar tahun 2017-2024

Tahun	Jenis Kelamin			
	Laki-Laki		Perempuan	
	Formal	Informal	Formal	Informal
2017	76,22	23,78	66,07	33,93
2018	81,70	18,30	65,66	34,34
2019	68,51	31,49	63,08	36,92
2020	66,10	33,90	56,62	43,38
2021	65,31	33,69	55,13	44,87
2022	66,50	33,50	60,23	39,77
2023	69,45	30,55	60,61	39,39
2024	62,23	37,77	61,30	38,70

Sumber : BPS Kota Denpasar (Publikasi Statistik Ketenagakerjaan), 2024

Tabel tersebut menggambarkan distribusi pekerja laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar menurut jenis pekerjaan formal dan informal selama periode 2017 hingga 2024. Secara umum, proporsi pekerja laki-laki yang bekerja di sektor formal selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2017 dan 2018, sebagian besar laki-laki bekerja di sektor formal, yakni sebesar 76,22% dan 81,70%, sementara pekerja informal hanya sekitar 18–24%. Namun sejak 2019, terjadi penurunan yang cukup tajam pada pekerja formal laki-laki dan peningkatan di sektor informal, dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang memuncak pada tahun 2021 dengan 33,69% laki-laki bekerja di sektor informal. Meskipun pada tahun 2023 terlihat ada pemulihan dengan meningkatnya proporsi pekerja formal laki-laki menjadi 69,45%, angka ini belum kembali ke tingkat tertinggi sebelum pandemi. Sementara itu, pekerja perempuan menunjukkan tren yang lebih rentan. Sejak awal, proporsi perempuan yang bekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2020 hingga 2021, persentase perempuan yang bekerja di sektor informal mencapai angka tertinggi, yakni 44,87%, sementara sektor formal hanya menyerap sekitar 55% dari total pekerja perempuan. Meskipun pada tahun 2023 terjadi peningkatan partisipasi perempuan di sektor formal menjadi 60,61%, perempuan tetap lebih banyak terserap di sektor informal dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang konsisten dalam

struktur pekerjaan berdasarkan gender, serta perlunya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan responsif gender untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam sektor kerja formal yang lebih stabil dan terlindungi. Pada 2024, angka ini sedikit naik menjadi 61,3%, namun belum signifikan dalam mengurangi dominasi sektor informal bagi perempuan.

Fenomena ini konsisten dengan *Dual Labour Market Theory* (Doeringer & Piore, 1971), yang membagi pasar tenaga kerja menjadi sektor primer (formal) dengan perlindungan dan gaji tinggi, dan sektor sekunder (informal) yang fleksibel namun rentan. Krisis ekonomi, seperti pandemi, cenderung mendorong perpindahan tenaga kerja dari sektor formal ke informal karena sektor informal memiliki hambatan masuk yang lebih rendah. Selain itu, *Gender Role Theory* (Eagly, 1987) menjelaskan bahwa norma sosial tradisional dapat membatasi peran perempuan di sektor formal, memperbesar peluang mereka berada di sektor informal. Kebijakan strategis yang diperlukan meliputi perluasan akses pelatihan keterampilan kerja untuk perempuan, pemberdayaan usaha kecil berbasis formalitas hukum, penguatan perlindungan tenaga kerja informal, serta penyediaan fasilitas pendukung kerja yang ramah keluarga. Dengan langkah ini, diharapkan kesenjangan formal-informal antar gender dapat diperkecil, dan struktur ketenagakerjaan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.14
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Formal-Informal

Tahun	Status Pekerjaan	
	Formal	Informal
2017	71,85	28,15
2018	74,83	25,17
2019	66,29	33,71
2020	61,95	38,05
2021	60,9	39,1
2022	63,87	36,13
2023	65,52	34,48
2024	61,83	38,17

Sumber : BPS Kota Denpasar

Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Formal-Informal di Kota Denpasar menggambarkan proporsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor formal dengan perlindungan dan regulasi ketenagakerjaan dibandingkan sektor

informal yang lebih fleksibel tetapi umumnya tanpa jaminan kerja. Indikator ini mencerminkan kualitas struktur pasar tenaga kerja dan stabilitas ekonomi (BPS, 2024). Pada 2017, pekerja formal mendominasi pasar kerja Denpasar dengan persentase 71,85%, sementara pekerja informal hanya 28,15%. Capaian ini meningkat pada 2018 menjadi 74,83% formal dan 25,17% informal, menunjukkan kondisi pasar kerja yang relatif stabil dengan dominasi sektor formal. Namun, tren tersebut mulai berubah pada 2019 ketika pekerja formal menurun signifikan menjadi 66,29% dan informal meningkat ke 33,71%. Penurunan tajam berlanjut pada 2020, dengan pekerja formal hanya 61,95% dan informal meningkat ke 38,05%, seiring dampak pandemi COVID-19 yang menghantam sektor formal secara global, terutama di industri pariwisata, perhotelan, dan perdagangan – sektor utama perekonomian Bali. Tahun 2021 mencatat titik terendah dalam periode ini, dengan formal 60,9% dan informal 39,1%, mencerminkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan peralihan ke pekerjaan informal untuk bertahan hidup (ILO, 2021). Sejak 2022, terjadi tanda-tanda pemulihan. Persentase pekerja formal meningkat ke 63,87% dan informal menurun ke 36,13%. Tren positif ini berlanjut di 2023 dengan pekerja formal 65,52%, tetapi pada 2024 kembali melemah ke 61,83%, sementara pekerja informal naik menjadi 38,17%. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa pemulihan sektor formal belum sepenuhnya stabil, dan sebagian pekerja tetap memilih sektor informal karena fleksibilitas atau keterbatasan peluang kerja formal.

Fenomena ini konsisten dengan *Dual Labour Market Theory* (Doeringer & Piore, 1971), yang membedakan sektor primer (formal) dengan gaji stabil, jaminan sosial, dan prospek karier, dari sektor sekunder (informal) yang berisiko tinggi, upah rendah, dan tanpa perlindungan kerja. Krisis ekonomi cenderung memaksa pergeseran tenaga kerja dari sektor primer ke sekunder karena hambatan masuk ke sektor formal semakin tinggi.

Selain itu, *Precarious Work Theory* (Kalleberg, 2009) menyoroti bahwa pekerjaan informal atau kontrak jangka pendek cenderung meningkat saat terjadi ketidakpastian ekonomi, karena pemberi kerja menghindari komitmen jangka panjang. Fenomena ini terjadi di banyak negara pascapandemi, termasuk di Indonesia.

Dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya target 8.5 (pencapaian pekerjaan layak untuk semua) dan 8.3 (promosi kebijakan yang mendukung formalitas usaha), peningkatan proporsi pekerja formal menjadi indikator penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Negara-negara

dengan proporsi pekerja formal tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan perlindungan sosial yang lebih baik bagi warganya (OECD, 2021). Upaya strategis untuk memperkuat sektor formal meliputi: (1) memperluas pelatihan keterampilan kerja sesuai kebutuhan industri, (2) memberikan insentif bagi perusahaan yang membuka lapangan kerja formal, (3) memperkuat regulasi ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja, dan (4) mendorong transformasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari informal ke formal melalui kemudahan perizinan dan akses pembiayaan.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Usia Kerja Kota Denpasar dan Provinsi Bali
tahun 2018 – 2023 (jiwa)

Tahun	Kota Denpasar	Provinsi Bali
2018	729,687	3,345,902
2019	747,253	3,400,208
2020	765,044	3,455,127
2021	782,927	3,509,090
2022	800,943	3,563,142
2023	594,512	3,490,205

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2023

Kedua tabel tersebut menyediakan informasi yang memungkinkan kita untuk menghitung tingkat kesempatan kerja di Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Dengan membandingkan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk usia kerja, kita dapat menentukan persentase penduduk usia kerja yang benar-benar bekerja setiap tahunnya. Dari perhitungan tersebut, kita melihat tren fluktuasi tingkat kesempatan kerja yang menggambarkan bagaimana kondisi pasar tenaga kerja berubah dari tahun ke tahun, termasuk dampak dari peristiwa besar seperti pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi setelahnya. Data ini penting untuk analisis ekonomi dan perencanaan kebijakan untuk meningkatkan lapangan kerja di wilayah tersebut.

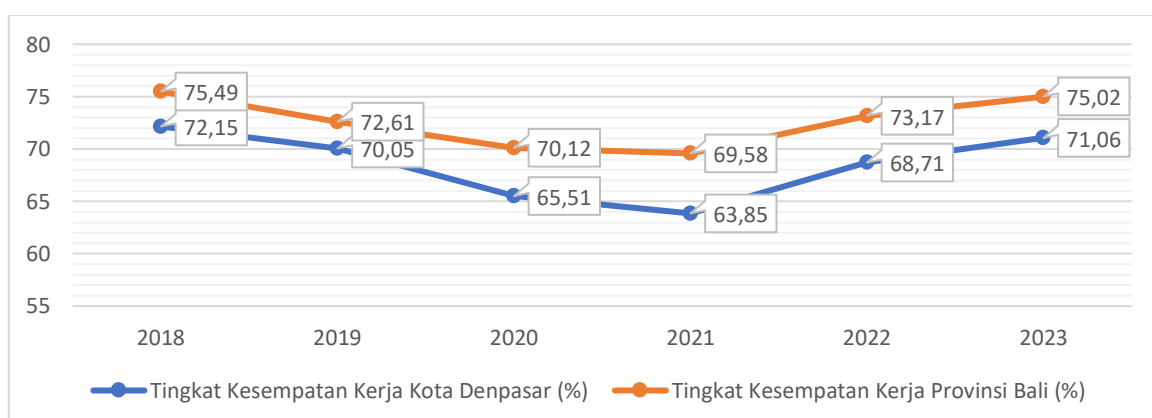
Berdasarkan Gambar 2.32, menunjukkan data tingkat kesempatan kerja di Kota Denpasar dan Provinsi Bali dari tahun 2018 hingga 2023, kita dapat melihat beberapa tren penting yang terjadi selama periode ini. Pada tahun 2018, tingkat kesempatan kerja di Kota Denpasar tercatat sebesar 72,15 persen, sementara di Provinsi Bali mencapai 75,49 persen. Namun, mulai tahun 2019 hingga 2021, terjadi penurunan bertahap di kedua wilayah. Tingkat kesempatan kerja di Kota Denpasar turun dari 70,05 persen pada tahun 2019 menjadi 63,85 persen pada tahun 2021, sementara di Provinsi Bali, angka ini

menurun dari 72,61 persen pada tahun 2019 menjadi 69,58 persen pada tahun 2021. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak signifikan dari pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020, yang mengakibatkan peningkatan pengangguran dan penurunan aktivitas ekonomi.

Pada tahun 2022, data menunjukkan adanya pemulihan yang signifikan. Tingkat kesempatan kerja di Kota Denpasar meningkat menjadi 68,71 persen, dan di Provinsi Bali meningkat menjadi 73,17 persen. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, di mana banyak sektor bisnis mulai kembali beroperasi normal, dan aktivitas ekonomi mulai pulih. Pada tahun 2023, tingkat kesempatan kerja di Kota Denpasar dan Provinsi Bali terus menunjukkan stabilitas dengan angka masing-masing sebesar 71,06 persen dan 75,02 persen. Meskipun Kota Denpasar belum sepenuhnya kembali ke tingkat kesempatan kerja sebelum pandemi, peningkatan yang terjadi menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang jelas. Sebaliknya, Provinsi Bali secara keseluruhan hampir mencapai kembali tingkat kesempatan kerja tahun 2018, menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat di wilayah tersebut.

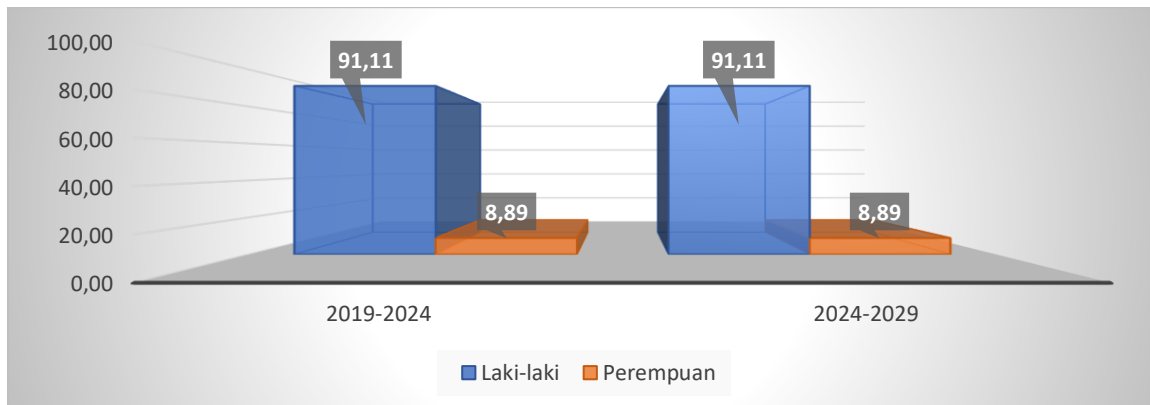
Selama periode 2018 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam tingkat kesempatan kerja di Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Penurunan yang terjadi dari 2018 hingga 2021, diikuti oleh pemulihan yang kuat pada tahun 2022 dan stabilitas pada tahun 2023, mencerminkan dampak dan pemulihan dari pandemi COVID-19 serta upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kondisi pasar tenaga kerja di kedua wilayah tersebut.

Gambar 2.31
Tingkat Kesempatan Kerja Kota Denpasar dan Provinsi Bali tahun 2018 - 2023



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kota Denpasar, 2023

Gambar 2. 32
Jumlah Anggota DPRD Kota Denpasar Berdasarkan Jenis Kelamin
Kota Denpasar (%)



Sumber: Pemerintah Kota Denpasar

Jumlah Anggota DPRD Kota Denpasar Berdasarkan Jenis Kelamin pada periode 2019–2024 dan 2024–2029 menunjukkan komposisi yang sama, yaitu 41 anggota laki-laki dan hanya 4 anggota perempuan dari total 45 anggota DPRD. Persentase keterwakilan perempuan tetap berada di 9,76%, jauh di bawah target keterwakilan perempuan sebesar 30% yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu dan berbagai kebijakan afirmasi gender di Indonesia (BPS Kota Denpasar, 2024; KPU, 2017). Secara nasional, rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif merupakan fenomena yang sudah lama menjadi perhatian. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2019), persentase perempuan di DPR RI pada periode 2019–2024 hanya 20,9%, dan di banyak DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota angkanya bahkan lebih rendah. Dalam konteks Denpasar, capaian 9,76% menempatkan kota ini pada posisi rendah dalam hal representasi gender di legislatif daerah.

Dari perspektif global, data *Inter-Parliamentary Union* (IPU, 2023) menunjukkan rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen dunia pada awal 2023 mencapai 26,5%. Artinya, capaian Denpasar tidak hanya tertinggal dari target nasional, tetapi juga dari rata-rata global. Faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif sering dikaitkan dengan hambatan struktural seperti sistem politik yang kompetitif dan berbiaya tinggi, budaya patriarki yang masih kuat, keterbatasan dukungan partai politik terhadap calon perempuan, serta beban ganda perempuan yang menggabungkan peran publik dan domestik (Rai, 2002; IPU, 2021).

Fenomena ini sejalan dengan konsep *political opportunity structure* (Tarrow, 1998), yang menjelaskan bahwa akses kelompok tertentu ke arena politik sangat dipengaruhi oleh konfigurasi peluang politik yang tersedia. Dalam konteks keterwakilan perempuan,

lemahnya dukungan institusional dan sosial membatasi peluang mereka untuk menembus arena politik formal. Sementara itu, *Critical Mass Theory* (Kanter, 1977) menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di bawah ambang 30% sulit untuk menghasilkan perubahan signifikan dalam kebijakan yang responsif gender. Dengan capaian Denpasar yang stagnan di 9,76% selama dua periode berturut-turut, jelas diperlukan strategi afirmasi yang lebih kuat, seperti penguatan regulasi kuota, pembinaan calon legislatif perempuan, dan kampanye publik untuk mengurangi bias gender dalam politik.

Tanpa intervensi yang signifikan, representasi perempuan di DPRD Denpasar akan sulit memenuhi ambang batas critical mass yang memungkinkan terciptanya kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, partai politik, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memperbaiki representasi politik yang setara di masa depan.

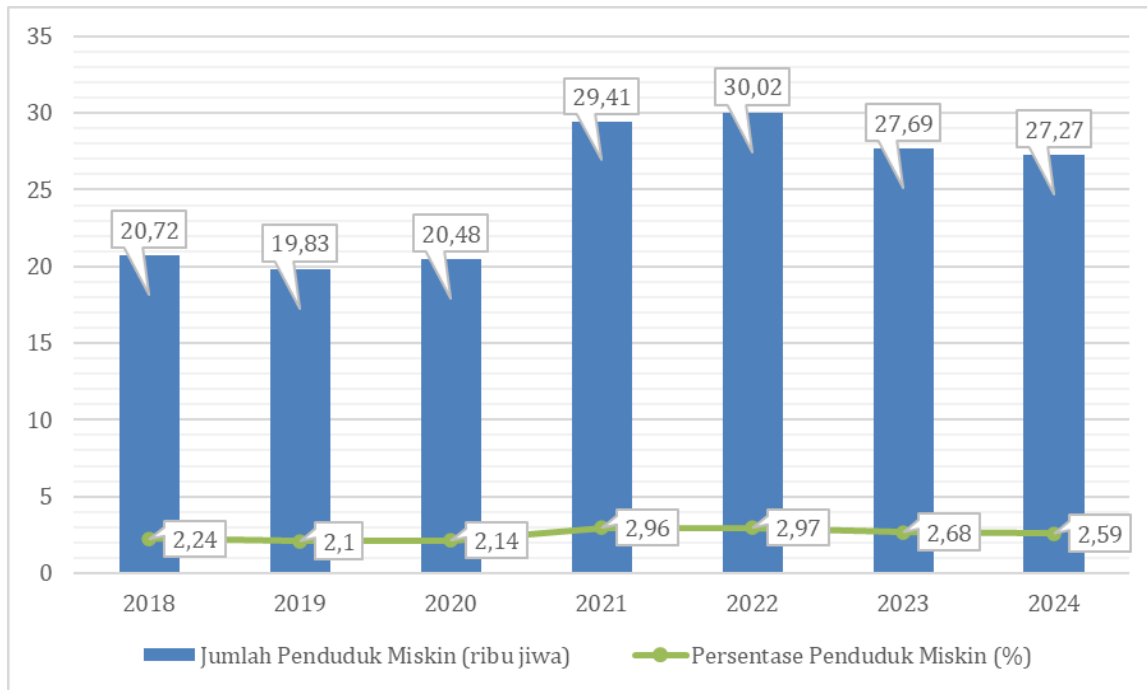
2.2.3.4 Kemiskinan, Kesejahteraan dan Ketimpangan

Keterkaitan kapabilitas seseorang dalam ranah ekonomi sering kali menjadi korban dari kendala miskin. Uang, sebagai suatu bentuk aset, memiliki peran krusial dalam memperluas rentang pilihan dan memengaruhi ke berbagai aspek kehidupan. Miskin, dalam konteks ini, dapat menjadi penghambat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Kedua aspek tersebut memegang peranan kunci sebagai kapabilitas dasar dalam perkembangan manusia. Mengatasi kemiskinan bukanlah tugas yang mudah, karena melibatkan sejumlah dimensi kehidupan yang saling berpengaruh. Pendekatan holistik yang mempertimbangkan hubungan antar berbagai aspek kehidupan menjadi kunci untuk merancang solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Gambar 2.33 menunjukkan selama rentang waktu 2018 hingga 2024, terjadi fluktuasi dalam jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar. Sepanjang tahun 2018 jumlah penduduk miskin Kota Denpasar mengalami peningkatan yang kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dan kembali menurun di tahun 2024. Meskipun secara persentase, tingkat kemiskinan di Kota Denpasar selalu berada di bawah angka 3 persen, peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 secara signifikan dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19. Situasi pandemi menyebabkan

banyak masyarakat mengalami penurunan pendapatan dan bahkan kehilangan pekerjaan, yang pada gilirannya menyebabkan sebagian dari mereka yang sebelumnya berada di atas garis kemiskinan menjadi terdorong di bawahnya.

Gambar 2.33
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Denpasar tahun 2018 – 2024 (Ribuk Jiwa)



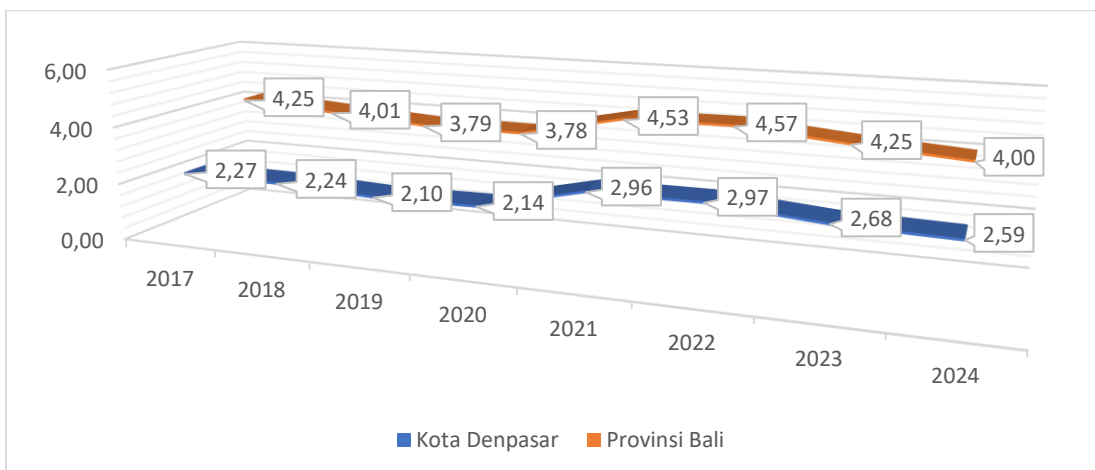
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2024

Persentase penduduk miskin di Kota Denpasar dan Provinsi Bali dari tahun 2017 hingga 2022 ditunjukkan pada Gambar 2.34. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat tren yang menarik dalam distribusi penduduk miskin di kedua wilayah tersebut. Kota Denpasar menunjukkan kestabilan atau penurunan yang konsisten dalam persentase penduduk miskin, dengan angka tertinggi pada tahun 2021 dan 2022, tetapi tetap berada pada kisaran yang relatif rendah. Sementara itu, Provinsi Bali mengalami fluktuasi yang lebih signifikan, dengan penurunan dari tahun 2017 hingga 2019, namun mengalami peningkatan kembali setelahnya. Salah satu asumsi yang mungkin menjadi penyebab perbedaan ini adalah faktor ekonomi dan infrastruktur. Kota Denpasar, sebagai pusat urban utama di Bali, mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap lapangan kerja, layanan kesehatan, dan pendidikan, yang dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Sementara itu, di tingkat provinsi, fluktuasi tersebut mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti gejolak ekonomi global, pariwisata yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Bali, serta keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan di wilayah tersebut. Selain itu, kebijakan pemerintah, baik di tingkat kota maupun provinsi, juga dapat memengaruhi kecenderungan ini melalui

program-program kesejahteraan sosial, investasi infrastruktur, dan upaya peningkatan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Selama periode 2017 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang jelas dalam tingkat kemiskinan di Kota Denpasar dan Provinsi Bali, dengan dampak signifikan dari pandemi yang terlihat pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun ada tanda-tanda pemulihan pada tahun 2023 dan 2024 yang ditandai dengan penurunan persentase tingkat kemiskinan, namun kondisi tersebut belum kembali ke kondisi awal sebelum pandemi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi masih memerlukan waktu dan upaya lebih lanjut. Denpasar dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi menunjukkan bahwa Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali serta pusat perekonomian dan pemerintahan memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang lebih baik pasca pandemi.

Gambar 2.34
Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar (%) Tahun 2017-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan pada gambar 2.35 mengukur sejauh mana rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin dalam tingkat kemiskinan yang dialami oleh penduduk. Data dari Kota Denpasar dan Provinsi Bali selama periode 2018 hingga 2023 menunjukkan berbagai tren yang menggambarkan kondisi kemiskinan di kedua wilayah ini.

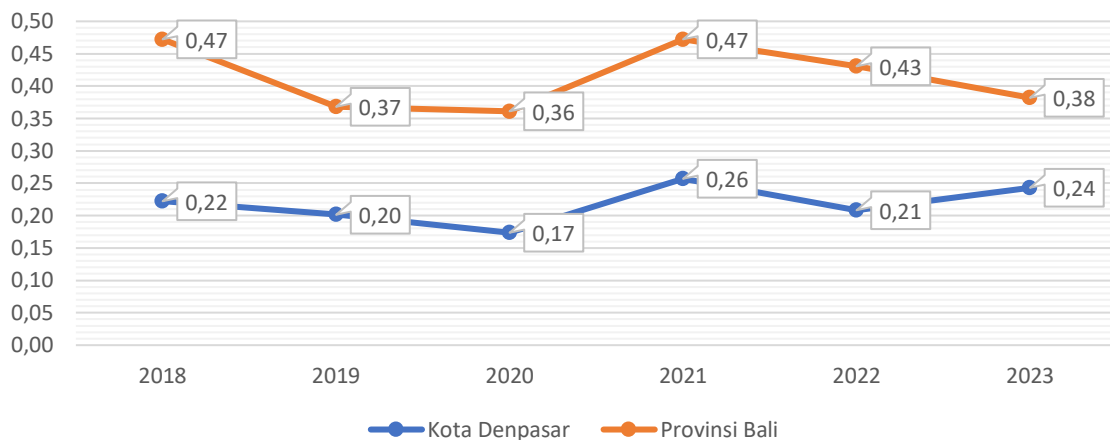
Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Denpasar dan Provinsi Bali dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan dampak signifikan dari pandemi COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan di kedua wilayah tersebut. Pada tahun 2018 dan 2019, Provinsi Bali mencatat penurunan dalam indeks kedalaman kemiskinan dari 0,47 menjadi 0,37, dan kemudian sedikit lagi menjadi 0,36 pada tahun 2020, awal masa

pandemi. Namun, pada tahun 2021, yang mencakup periode puncak pandemi dan berbagai pembatasan sosial serta penurunan drastis dalam pariwisata, indeks ini melonjak kembali ke 0,47. Hal ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam kedalaman kemiskinan, menunjukkan bahwa banyak penduduk mengalami penurunan ekonomi yang parah. Pada tahun 2022, indeks menurun sedikit ke 0,43 dan lebih jauh lagi ke 0,38 pada tahun 2023, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian dan peningkatan pariwisata serta bantuan pemerintah.

Di Kota Denpasar, dampak pandemi juga terlihat jelas. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan penurunan stabil dari 0,22 pada tahun 2018 menjadi 0,17 pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, ketika dampak pandemi sangat dirasakan, indeks meningkat tajam ke 0,26. Tahun berikutnya, 2022, indeks menurun kembali ke 0,21, menunjukkan pemulihan awal. Pada tahun 2023, indeks sedikit naik ke 0,24, mencerminkan bahwa meskipun ada pemulihan, dampak pandemi masih terasa. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada tingkat kedalaman kemiskinan baik di Provinsi Bali maupun Kota Denpasar. Lonjakan indeks pada tahun 2021 di kedua wilayah menunjukkan bahwa pandemi menyebabkan banyak penduduk jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam. Meskipun terdapat tanda-tanda pemulihan pada tahun 2022 dan 2023, indeks kedalaman kemiskinan belum kembali ke tingkat sebelum pandemi, menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi masih berlangsung dan memerlukan waktu serta upaya lebih lanjut. Program bantuan ekonomi, penguatan sektor pariwisata, dan upaya pemulihan lainnya sangat penting untuk mempercepat pemulihan dan mengurangi dampak kemiskinan di masa mendatang.

Kota Denpasar secara konsisten menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Bali, menunjukkan bahwa penduduk miskin di Denpasar berada lebih dekat dengan garis kemiskinan dibandingkan dengan penduduk miskin di seluruh provinsi. Meskipun ada fluktuasi, terutama pada masa pandemi, tren jangka panjang menunjukkan adanya perbaikan dan upaya berkelanjutan untuk mengurangi kedalaman kemiskinan di kedua wilayah. Upaya ini perlu terus ditingkatkan untuk memastikan penurunan yang stabil dan berkelanjutan dalam tingkat kemiskinan di masa depan.

Gambar 2.35
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Denpasar dan Provinsi Bali 2018 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2023

Meskipun terjadi peningkatan kemiskinan di Kota Denpasar selama periode 2018-2022, ketimpangan pengeluaran penduduk juga mengalami fluktuasi. Meskipun angka Gini rasio selalu berada di bawah ambang 0,4 yang ditunjukkan oleh Gambar 2.40, mencapai tingkat ketimpangan tertinggi pada tahun 2021, tahun 2024 menunjukkan penurunan Gini rasio dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kemiskinan dan penurunan ketimpangan ini menunjukkan kompleksitas dampak Pandemi Covid-19 terhadap struktur ekonomi dan sosial Kota Denpasar. Meskipun masyarakat menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, penurunan ketimpangan menunjukkan distribusi pengeluaran yang relatif lebih merata di kalangan penduduk, yang dapat disebabkan oleh upaya kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi dan melindungi kelompok rentan.

Gambar 2.36
Gini Rasio Kota Denpasar tahun 2018 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2024

Hubungan antara kemiskinan, Gini rasio, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial adalah hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan

menciptakan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penanganan masalah kesejahteraan sosial harus mencakup kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan tetapi juga pada peningkatan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, dan kesempatan kerja. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, diharapkan kemiskinan dapat dikurangi dan kesejahteraan sosial dapat meningkat secara keseluruhan. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disajikan pada tabel 2.16.

Tabel 2.16
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tertangani di Kota Denpasar tahun 2014 - 2020

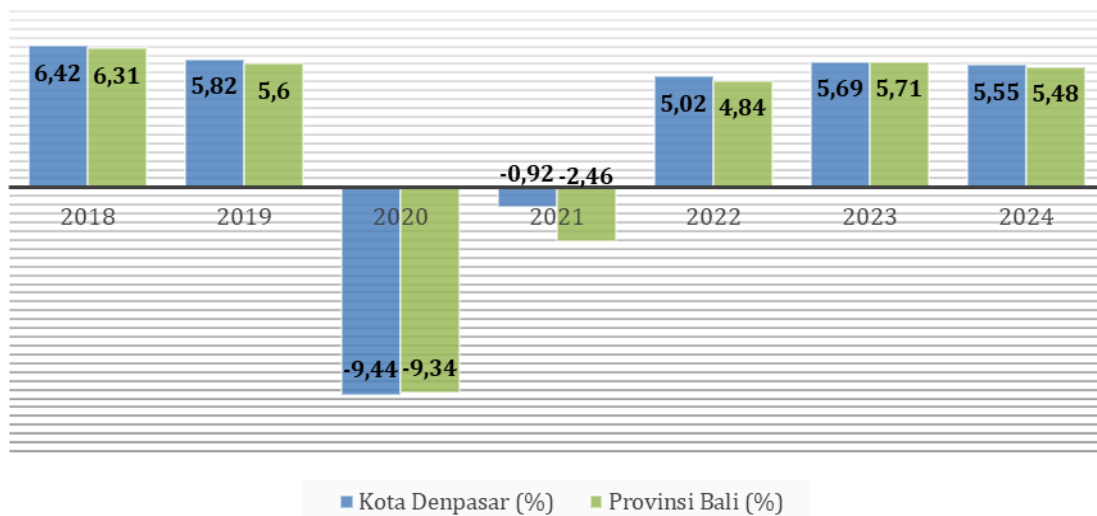
Uraian	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PMKS yang tertangani	15	35	51	100	100	100	100

Sumber: Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2012-2022

Data dalam tabel 2.16 menunjukkan persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dari tahun 2014 hingga 2020. Pada tahun 2014, hanya 15 persen PMKS yang berhasil ditangani. Angka ini meningkat signifikan menjadi 35 persen pada tahun 2015, dan lebih lanjut meningkat menjadi 51 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017, terjadi lonjakan yang sangat besar di mana 100 persen PMKS berhasil tertangani, dan kondisi ini tetap konsisten hingga tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa mulai tahun 2017, upaya penanganan PMKS telah mencapai titik maksimal di mana seluruh kasus yang ada berhasil ditangani sepenuhnya setiap tahunnya. Peningkatan yang signifikan dan konsisten ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang diterapkan selama periode tersebut.

Data yang menunjukkan peningkatan persentase PMKS yang tertangani mengindikasikan bahwa kebijakan sosial yang efektif dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan melalui intervensi yang tepat tidak hanya meningkatkan kesejahteraan sosial tetapi juga menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, upaya untuk menangani masalah kesejahteraan sosial harus terus didorong sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi.

Gambar 2.37
Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar dan Provinsi Bali tahun 2018 – 2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024

Data yang disajikan pada gambar di atas menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar dan Provinsi Bali dari tahun 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar mencapai 6,42 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bali yang berada pada angka 6,31 persen. Tahun berikutnya, 2019, terjadi sedikit penurunan di kedua wilayah, dengan Kota Denpasar tumbuh sebesar 5,82 persen dan Provinsi Bali 5,60 persen. Tahun 2020 menjadi tahun yang paling menantang, dengan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi besar akibat dampak pandemi COVID-19. Kota Denpasar mengalami penurunan sebesar -9,44 persen, sedangkan Provinsi Bali turun -9,34 persen. Penurunan ini mencerminkan dampak signifikan dari pandemi terhadap ekonomi yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Pada tahun 2021, meskipun masih berada di zona negatif, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kota Denpasar mencatatkan pertumbuhan -0,92 persen, sementara Provinsi Bali mengalami sedikit penurunan dengan angka -2,46 persen.

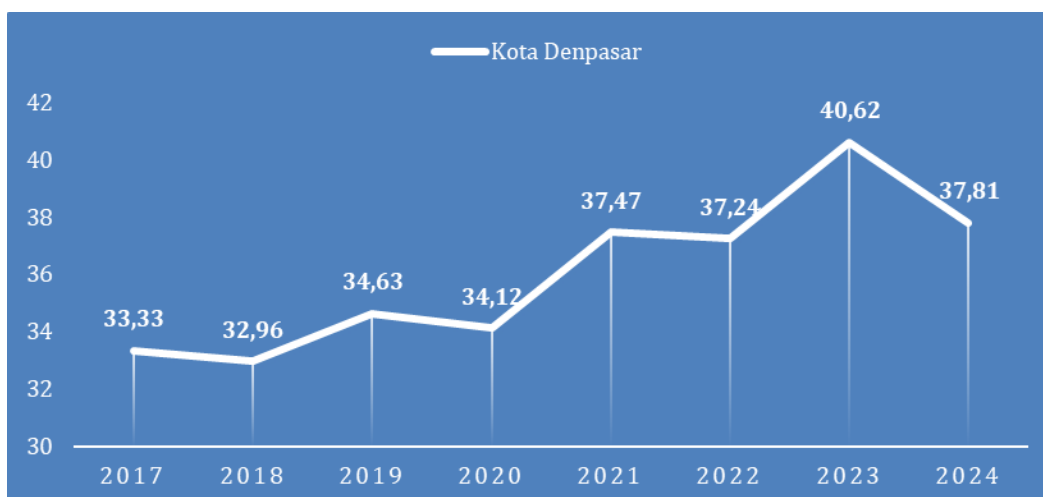
Pemulihan ekonomi lebih jelas terlihat pada tahun 2022, di mana Kota Denpasar berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,02 persen dan Provinsi Bali tumbuh sebesar 4,84 persen. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2023, dengan Kota Denpasar mencapai pertumbuhan 5,69 persen dan Provinsi Bali mencatatkan angka 5,71 persen dan mengalami sedikit penurunan menjadi 5,55 di Kota Denpasar dan 5,48 di Provinsi Bali pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa kedua wilayah telah berhasil pulih dari dampak pandemi dan kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang positif.

2.2.3.5 Rasio Ketergantungan

Angka atau Rasio Ketergantungan adalah indikator demografi yang menggambarkan beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, yaitu mereka yang berusia 15 hingga 64 tahun, untuk mendukung penduduk yang tidak produktif, yaitu anak-anak di bawah 15 tahun dan lansia di atas 65 tahun. Konsep ini penting untuk memahami struktur demografis suatu populasi dan dampaknya terhadap ekonomi serta perencanaan sosial. Angka ketergantungan dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif, kemudian dikalikan 100. Angka ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia produktif harus mendukung penduduk usia tidak produktif, yang bisa menjadi beban ekonomi yang signifikan. Sebaliknya, angka ketergantungan yang rendah menunjukkan beban yang lebih ringan bagi penduduk usia produktif. Implikasi dari angka ketergantungan meliputi aspek ekonomi, di mana lebih banyak sumber daya harus dialokasikan untuk perawatan anak-anak dan lansia, serta kebijakan sosial yang perlu mendukung penduduk usia tidak produktif melalui pendidikan dan layanan kesehatan. Data ini juga penting untuk perencanaan pembangunan jangka panjang, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Memahami angka ketergantungan membantu pemerintah dan pembuat kebijakan merancang program dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar berikut menggambarkan rasio ketergantungan di Kota Denpasar dari tahun 2017 hingga 2024. Pada tahun 2017, angka ketergantungan berada di angka 33,33, kemudian mengalami penurunan menjadi 32,96 pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019, angka ketergantungan kembali meningkat menjadi 34,63 dan sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi 34,12. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai angka 37,47, yang merupakan puncak tertinggi dalam periode yang diamati. Tahun berikutnya, 2022, angka ketergantungan sedikit menurun menjadi 37,24. Tahun berikutnya pada 2023 kembali meningkat menjadi 30,61, dan menurun menjadi 37,81 di tahun 2024. Fluktuasi angka ketergantungan ini menunjukkan adanya dinamika perubahan dalam proporsi penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk usia produktif di Kota Denpasar selama periode lima tahun tersebut. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Denpasar.

Gambar 2.38
Rasio Ketergantungan Penduduk Total Kota Denpasar tahun 2017 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2024

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia dan Kualitas Gender

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai tolok ukur penting dalam mengukur capaian pembangunan manusia, merangkum sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui tiga dimensi utama, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Analisis data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menunjukkan bahwa IPM di Kota Denpasar selama periode 2017 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan IPM menunjukkan tren positif, dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun mencapai 0,6. Periode dengan pertumbuhan IPM tertinggi adalah tahun 2025, mencapai 0,64. Dari hasil analisis pada Tabel 2.17, dapat disimpulkan bahwa tren angka IPM di Kota Denpasar mencerminkan kondisi yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kota Denpasar menikmati kualitas hidup yang baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2.17
Indeks Pembangunan Manusia di Kota Denpasar tahun 2017 – 2024

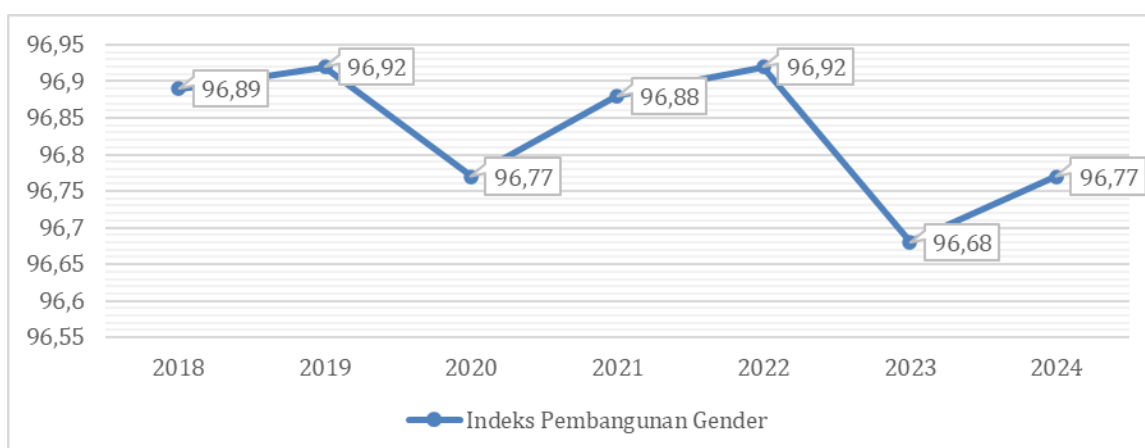
Kota Denpasar	Tahun							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia	83,01	83,30	83,68	83,93	84,04	84,39	84,68	85,22
Laju Pertumbuhan IPM	0,52	0,35	0,46	0,30	0,13	0,42	0,34	0,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024

Perbincangan mengenai kesetaraan gender telah menjadi isu yang meresap dalam perjalanan waktu. Kesetaraan gender tidak hanya merujuk pada kesenjangan sosial ekonomi antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga mencakup keterbatasan kesempatan dan hak yang sama, yang pada gilirannya dapat memperlebar jurang antara kedua jenis kelamin. Isu kesetaraan gender telah menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan global, terutama melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations/UN). Dalam Goal kelima SDGs, UN dengan tekad kuat berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, mencerminkan urgensi dan pentingnya upaya bersama untuk menyelesaikan tantangan kesetaraan gender secara menyeluruh.

Disparitas atau kesenjangan pembangunan manusia berdasarkan gender dapat diketahui melalui indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang ditunjukkan oleh Gambar 2.37 berikut ini. Semakin mendekati nilai 100, IPG mencerminkan berkurangnya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Jika nilai melebihi 100, capaian pembangunan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, dan sebaliknya. Pada tahun 2020, IPG Kota Denpasar mencapai 96,77. Ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia pada laki-laki lebih tinggi, meskipun selisih antara laki-laki dan perempuan tidak signifikan. Sejak tahun 2017, angka IPG di Kota Denpasar selalu berada di atas 96, menandakan bahwa ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di kota ini relatif kecil.

Gambar 2.39
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Denpasar tahun 2018 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024

2.3 Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga menjadi semakin penting di tengah dinamika sosial dan budaya yang terus berubah. Keluarga merupakan unit dasar dalam suatu masyarakat, dan kualitasnya memengaruhi secara langsung kesejahteraan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi yang terus berlangsung, keluarga dihadapkan pada berbagai tantangan baru, mulai dari tekanan ekonomi hingga perubahan nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, pembangunan keluarga menjadi prioritas dalam upaya menjaga keutuhan dan keseimbangan sosial. Pembangunan keluarga tidak hanya mencakup aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek-aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Keluarga yang berkualitas diharapkan mampu memberikan lingkungan yang aman, mendukung, dan memberdayakan anggotanya untuk berkembang secara optimal. Selain itu, peran keluarga dalam mendidik generasi muda, menjaga nilai-nilai moral, dan memperkuat jaringan sosial dalam masyarakat juga menjadi fokus utama dalam pembangunan keluarga.

Salah satu aspek yang akan dibahas adalah jumlah perkawinan dan perceraian, yang menjadi cermin dari kestabilan dan keharmonisan dalam sebuah keluarga. Selain itu, angka partisipasi keluarga dalam program Keluarga Berencana juga menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab keluarga terhadap perencanaan keberlanjutan keluarga. Melalui analisis terhadap kondisi aktual dari aspek-aspek tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembangunan keluarga. Selanjutnya, pembahasan akan menyoroti aspek vital dalam kondisi perkembangan indeks ketahanan keluarga, yang menjadi penilaian terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Adanya perhatian khusus akan diberikan pada pengembangan indeks ketahanan keluarga sebagai alat untuk mengukur kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Indeks ini mencakup berbagai aspek penting seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, yang secara bersama-sama membentuk fondasi yang kuat bagi keluarga dalam menghadapi tantangan dan perubahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, serta Sistem Informasi Keluarga, menegaskan tujuan kebijakan nasional untuk memberdayakan

keluarga agar mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara optimal. Terdapat delapan fungsi yang diberikan kepada keluarga sebagai bagian integral dari proses pembangunan keluarga, yang meliputi:

- 1) **Fungsi Reproduksi:** Keluarga menjadi tempat mengembangkan fungsi reproduksi secara menyeluruh, termasuk seksualitas yang sehat dan berkualitas, dan pendidikan seksualitas bagi anak. Keluarga memiliki peran penting dalam melanjutkan eksistensi manusia melalui proses reproduksi, dengan tujuan mempertahankan garis keturunan dan kesinambungan generasi.
- 2) **Fungsi Sosial Budaya:** Keluarga adalah wahana utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya yang selama ini menjadi panutan dalam tata kehidupan, serta memberikan kesempatan bagi anggota keluarga untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa.
- 3) **Fungsi Ekonomi:** Keluarga adalah sebagai tempat utama dalam membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan ekonomi bagi anggotanya melalui manajemen sumber daya dan memberikan dukungan finansial.
- 4) **Fungsi Perlindungan:** Keluarga adalah tempat bernaung atau berlindung bagi seluruh anggotanya, dan tempat untuk menumbuhkan rasa kehangatan dan rasa aman secara fisik maupun emosional.
- 5) **Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan:** Keluarga sebagai tempat utama dan pertama memberikan pendidikan kepada semua anak untuk bekal masa depan. Keluarga bertanggung jawab dalam membentuk kepribadian, norma, dan nilai-nilai moral anggotanya agar dapat berinteraksi positif dalam masyarakat.
- 6) **Fungsi Pembinaan Lingkungan:** Keluarga memiliki peran mengelola kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Keluarga berperan untuk membina lingkungan masyarakat dan lingkungan alam sekitar.

- 7) **Fungsi Cinta Kasih:** Keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi cinta kasih dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
- 8) **Fungsi Keagamaan:** Keluarga mengajarkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menanamkan nilai toleransi antar umat beragama.

Tabel 2.18

Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2024
Kota Denpasar

No	Kecamatan	Klasifikasi				Total
		Dasar	Berkembang	Mandiri	Berkelanjutan	
1	Denpasar Selatan	1	0	1	2	4
2	Denpasar Timur	4	1	1	1	7
3	Denpasar Barat	6	1	0	1	8
4	Denpasar Utara	6	0	1	1	8
Total		17	2	3	5	27

Sumber: Pemerintah Kota Denpasar

Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Denpasar tahun 2024 terbagi dalam empat kategori: Dasar, Berkembang, Mandiri, dan Berkelanjutan, yang menggambarkan tingkat capaian pembangunan keluarga di tingkat kampung. Data menunjukkan bahwa dari total 27 kampung, sebagian besar masih berada pada kategori Dasar dengan jumlah 17 kampung atau sekitar 62,96%. Kategori Berkembang mencatat 2 kampung (7,4%), kategori Mandiri 3 kampung (11,1%), dan kategori Berkelanjutan 5 kampung (18,5%). Dilihat per kecamatan, Denpasar Selatan memiliki 4 kampung keluarga berkualitas yang sebagian besar berada pada kategori Dasar (1 kampung) dan Berkelanjutan (2 kampung), sedangkan kategori Mandiri hanya 1 kampung. Denpasar Timur memiliki 7 kampung, dengan komposisi mayoritas kategori Dasar (4 kampung), sementara sisanya terbagi antara Berkembang, Mandiri, dan Berkelanjutan. Denpasar Barat dan Denpasar Utara masing-masing memiliki 8 kampung, namun mayoritasnya

juga berada di kategori Dasar (6 kampung pada masing-masing kecamatan), dengan sedikit yang sudah mencapai kategori Mandiri dan Berkelanjutan.

Tingginya proporsi kampung kategori Dasar menunjukkan bahwa meskipun program Kampung Keluarga Berkualitas telah berjalan, sebagian besar kampung masih berada pada tahap awal pengembangan. Hal ini sejalan dengan temuan nasional bahwa kesenjangan kualitas pembangunan keluarga antarwilayah di Indonesia masih cukup lebar (BKKBN, 2023). Salah satu tantangan yang umum adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun kapasitas kelembagaan, yang berpengaruh pada lambatnya transisi menuju kategori Mandiri dan Berkelanjutan. Fenomena ini juga relevan dengan konsep *community capacity building* (Labonte & Laverack, 2001), yang menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat bergantung pada kombinasi modal sosial, kapasitas organisasi lokal, dan dukungan kebijakan. Kampung yang sudah berada pada kategori Berkelanjutan umumnya memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat, partisipasi aktif warga, dan dukungan program lintas sektor yang memadai.

Pendekatan *family-centered community development* yang menjadi dasar Kampung Keluarga Berkualitas selaras dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya target 1.2 (mengurangi kemiskinan dalam segala bentuk), 3.7 (akses layanan kesehatan reproduksi), dan 5.4 (pengakuan peran keluarga dan rumah tangga dalam pembangunan). Negara-negara seperti Filipina dan Thailand telah menunjukkan bahwa integrasi program keluarga dengan pemberdayaan ekonomi lokal mampu mempercepat transisi dari kategori dasar ke kategori mandiri dalam waktu yang relatif singkat (UNFPA, 2020).

Bagi Denpasar, tantangan ke depan adalah mempercepat peningkatan kualitas kampung agar proporsi kategori Mandiri dan Berkelanjutan bertambah signifikan. Strategi yang dapat diterapkan mencakup peningkatan kapasitas kader kampung KB, integrasi program lintas OPD, dukungan anggaran berbasis kinerja, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan capaian indikator keluarga berkualitas. Pendekatan ini akan membantu mengurangi disparitas kualitas antar kampung dan memastikan bahwa pembangunan keluarga berjalan inklusif dan berkelanjutan.

2.3.1 Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dijelaskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, yang menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan hukum semata, melainkan juga merupakan momen penting yang memiliki dampak besar dalam mempersatukan dua individu yang berbeda. Peristiwa perkawinan bukan sekadar perubahan status hukum, tetapi juga menciptakan transformasi yang signifikan dalam kehidupan kedua pasangan. Momen ini menandai awal dari sebuah perjalanan bersama, di mana keduanya berkomitmen untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, perkawinan seringkali membawa dampak positif terhadap kesejahteraan pasangan, karena memungkinkan untuk berbagi beban kehidupan, termasuk tanggung jawab keuangan. Pasangan dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan ekonomi bersama, seperti kepemilikan rumah, investasi, dan pengelolaan keuangan keluarga.

Selain aspek ekonomi, perkawinan juga memiliki dampak yang signifikan dalam dimensi sosial. Hubungan sosial antara pasangan yang terjalin melalui perkawinan membawa kontribusi besar terhadap kesejahteraan psikologis dan emosional mereka. Pasangan dalam perkawinan saling memberikan dukungan, pengertian, dan rasa aman satu sama lain, menciptakan lingkungan yang stabil dan harmonis untuk tumbuh dan berkembang bersama. Selain itu, perkawinan juga berperan sebagai landasan bagi pembentukan keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat. Keluarga yang stabil dan bahagia cenderung menjadi pilar yang kuat dalam membangun komunitas yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memahami dan mendukung institusi perkawinan sebagai salah satu fondasi utama dari struktur sosial yang berkelanjutan.

Gambar 2.40
Jumlah Perkawinan Kota Denpasar Tahun 2017 - 2022



Sumber: Data DKB Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2023
Aplikasi Pelayanan Daerah, 2023

Gambar di atas menunjukkan fluktuasi jumlah perkawinan di Kota Denpasar selama periode 2019 hingga 2023, yang mencerminkan dampak berbagai faktor, terutama pandemi COVID-19, terhadap tren pernikahan. Pada tahun 2019, jumlah perkawinan mencapai 3.591, angka yang relatif tinggi dan mencerminkan kondisi normal sebelum pandemi. Namun, pada tahun 2020, jumlah perkawinan turun drastis menjadi 2.968. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh pembatasan sosial yang ketat, penutupan tempat ibadah, dan aturan terkait kerumunan yang diterapkan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus. Banyak pasangan menunda pernikahan mereka karena adanya ketidakpastian, pembatasan tamu, dan kesulitan dalam mengatur acara besar. Selain itu, faktor ekonomi yang terdampak oleh pandemi juga berperan, mengingat banyak keluarga yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga menunda rencana pernikahan mereka. Pada tahun 2021, terdapat peningkatan jumlah perkawinan yang tercatat, mencapai 3.495, yang mungkin disebabkan oleh pelonggaran beberapa kebijakan pembatasan serta adanya vaksinasi massal yang mulai diterapkan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk kembali melangsungkan pernikahan dengan lebih banyak fleksibilitas, meskipun acara-acara pernikahan mungkin masih terbatas dalam skala dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Namun, tahun 2022 menunjukkan penurunan yang sangat tajam dengan hanya 1.200 perkawinan yang tercatat. Penurunan drastis ini bisa disebabkan oleh ketidakpastian yang berkepanjangan dan dampak ekonomi dari pandemi yang masih dirasakan oleh banyak keluarga, termasuk meningkatnya biaya pernikahan dan perubahan prioritas bagi pasangan yang memilih untuk menunda pernikahan demi stabilitas keuangan. Pada

tahun 2023, jumlah perkawinan kembali meningkat menjadi 3.109. Ini menandakan bahwa situasi mulai berangsur pulih, dengan masyarakat kembali menggelar acara pernikahan dengan lebih leluasa. Peningkatan ini kemungkinan juga didorong oleh keinginan untuk mengejar rencana pernikahan yang tertunda selama beberapa tahun terakhir akibat pandemi, serta pemulihan ekonomi yang mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat. Secara keseluruhan, fluktuasi ini mencerminkan betapa besar dampak sosial dan ekonomi pandemi COVID-19 terhadap institusi pernikahan, terutama di wilayah perkotaan seperti Denpasar.

2.3.2 Tingkat Perceraian

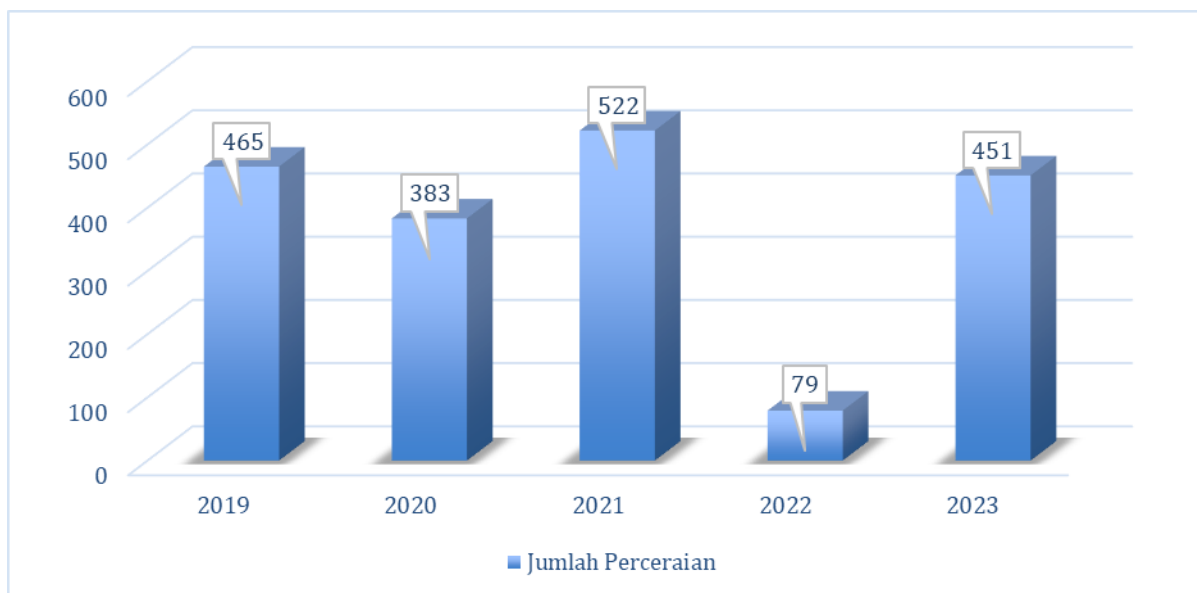
Perceraian merupakan fenomena kompleks yang menjadi fokus perhatian dalam proses mendalami mengenai dinamika keluarga. Sebagai proses penghapusan perkawinan yang diputuskan oleh hakim, perceraian terjadi atas dasar tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, dengan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam konteks Kota Denpasar, tren perceraian mencerminkan realitas kompleksitas hubungan perkawinan di tengah masyarakat. Jumlah kasus perceraian di Kota Denpasar selama tahun 2019 sampai 2023 ditunjukkan pada Gambar 2.41. Gambar tersebut menunjukkan jumlah kasus perceraian di Kota Denpasar selama periode 2019 hingga 2023. Terlihat bahwa angka perceraian mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, tercatat 465 kasus perceraian, menurun menjadi 383 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, terjadi lonjakan tajam hingga 522 kasus, namun angka ini menurun drastis pada tahun 2022 menjadi hanya 79 kasus. Kemudian, pada tahun 2023, jumlah perceraian kembali naik menjadi 451 kasus.

Penurunan signifikan pada tahun 2022 dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kemungkinan kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19, yang mungkin mempengaruhi dinamika keluarga dan perceraian. Pada tahun 2020 dan 2021, pembatasan aktivitas sosial serta stres ekonomi akibat pandemi bisa saja meningkatkan konflik rumah tangga, yang tercermin dari lonjakan kasus perceraian pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, dengan berbagai upaya adaptasi, intervensi sosial, atau program mediasi keluarga yang mungkin diterapkan, angka perceraian bisa menurun secara drastis. Penurunan ini juga dapat dihubungkan dengan berbagai upaya dari pemerintah lokal atau organisasi non-pemerintah untuk memberikan layanan konseling dan mediasi bagi pasangan yang bermasalah, sehingga berhasil menekan

angka perceraian. Pemulihan pasca-pandemi pada tahun 2023 mungkin berkontribusi pada meningkatnya kembali kasus perceraian, di mana tekanan ekonomi dan sosial berlanjut memengaruhi stabilitas rumah tangga.

Data dari Pengadilan Agama menunjukkan bahwa perceraian di Kota Denpasar melibatkan sejumlah faktor yang kompleks, termasuk aspek ekonomi, ketidakcocokan pasangan, perbedaan nilai dan budaya, serta tekanan sosial. Budaya dan adat yang kuat di Bali juga memainkan peran dalam dinamika perceraian di wilayah ini, di mana ekspektasi sosial dan norma-norma budaya dapat memberikan tekanan tambahan pada perkawinan. Selain itu, migrasi dan modernisasi yang cepat di Kota Denpasar juga mempengaruhi pola hubungan keluarga. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih dalam penyebab perceraian di Kota Denpasar dan dampaknya terhadap dinamika keluarga.

Gambar 2.41
Jumlah Kasus Perceraian di Kota Denpasar Tahun 2017-2023



Sumber: Data DKB Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2023
Aplikasi Pelayanan Daerah, 2023

2.3.3 Indeks Pembangunan Keluarga

Berdasarkan gambar 2.42 dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Keluarga Kota Denpasar mengalami kenaikan dari sebelumnya 59,69 pada tahun 2022 menjadi 67,95 pada tahun 2023. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan dan kesejahteraan keluarga. iBangga menggambarkan kondisi atau status suatu keluarga berdasarkan beberapa aspek atau dimensi, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan,

keamanan, dan keharmonisan keluarga. Nilai iBangga biasanya digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan keberhasilan suatu program atau kebijakan pembangunan keluarga. Semakin tinggi nilai iBangga, semakin baik pula kondisi dan kesejahteraan keluarga tersebut.

Indeks Pembangunan Keluarga menilai program pembangunan keluarga dengan 17 variabel yang menentukan peran dan fungsi keluarga serta dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. iBangga memiliki skala 0 hingga 100, dan terbagi menjadi kategori berikut: a. iBangga yang kurang baik (rentan) jika nilainya di bawah 40; b. iBangga yang cukup baik (berkembang) jika nilainya antara 40 dan 70; dan c. iBangga yang baik (tangguh) jika nilainya di atas 70. Nilai 67,95 pada iBangga Kota Denpasar mencerminkan kondisi "cukup baik" atau "berkembang". Hal ini menunjukkan bahwa kondisi iBangga Kota Denpasar mengalami peningkatan atau kemajuan dalam kondisi keluarga.

Gambar 2.42
Indeks Pembangunan Keluarga Kota Denpasar tahun 2021 – 2024



Sumber: BKKBN, 2024. SiPerindu

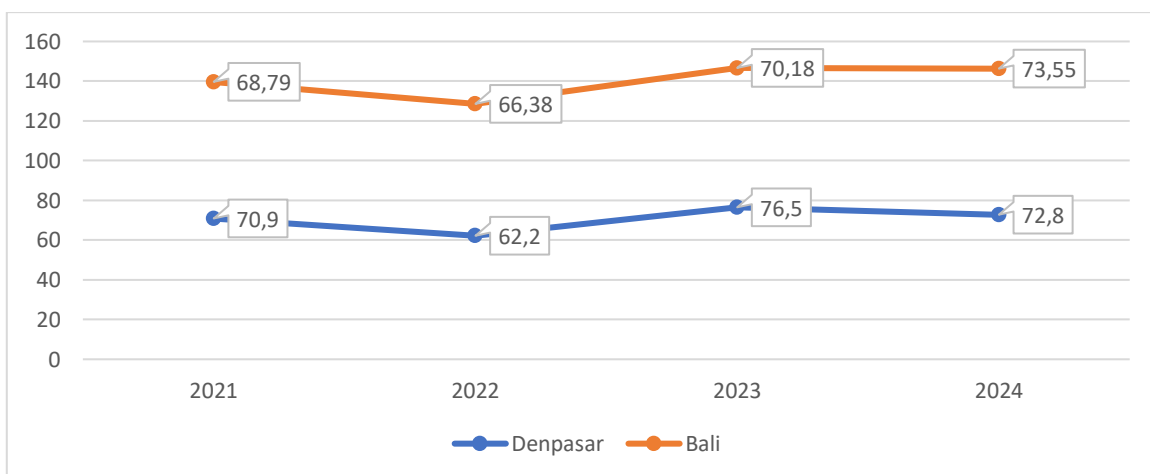
2.3.4 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Tidak hanya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang penting untuk diperhatikan, tetapi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) juga menjadi instrumen yang perlu kita ketahui nilainya. IPBK merupakan indikator komposit yang dirancang untuk mengukur keberhasilan pembangunan dengan memperhitungkan berbagai aspek kependudukan secara lebih menyeluruh. Indeks ini mencakup beberapa dimensi penting, antara lain kualitas hidup penduduk, yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan; pemerataan hasil pembangunan, yang menekankan pada akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat; serta

pengendalian dinamika kependudukan, seperti pertumbuhan penduduk, distribusi, dan mobilitas yang berkelanjutan.

Kehadiran IPBK menjadi sangat strategis karena mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai sejauh mana pembangunan benar-benar menempatkan penduduk sebagai pusat sekaligus tujuan utama pembangunan. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan berorientasi pada manusia (*people-centered development*), sebagaimana ditegaskan oleh Todaro & Smith (2020), yang menekankan bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, IPBK dapat dijadikan alat evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa proses pembangunan berjalan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Gambar 2.43
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)



Sumber : Perwakilan BKKBN Provinsi Bali

Data menunjukkan bahwa IPBK Kota Denpasar mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2021–2024. Pada 2021, IPBK Denpasar tercatat sebesar 70,9, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bali (68,79). Namun, pada 2022 terjadi penurunan tajam menjadi 62,2, yang berarti Denpasar berada di bawah capaian Bali (66,38). Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperlambat pemulihan ekonomi, menekan kualitas lapangan kerja, dan membatasi akses sebagian penduduk terhadap layanan dasar. Kondisi ini berubah drastis pada 2023 ketika IPBK Denpasar melonjak menjadi 76,5, kembali berada di atas capaian provinsi (70,18). Lonjakan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari pemulihan ekonomi yang lebih cepat di Kota Denpasar, terutama karena dominasi

sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa yang pulih setelah pembukaan kembali sektor pariwisata pascapandemi. Meski demikian, pada 2024 IPBK Denpasar kembali turun menjadi 72,8, meskipun masih berada di atas rata-rata Bali (73,55) dengan selisih tipis. Penurunan ini kemungkinan terkait dengan tantangan struktural seperti meningkatnya ketimpangan pendapatan, urbanisasi yang cepat, serta tekanan pada infrastruktur perkotaan akibat pertumbuhan penduduk.

2.3.5 Indeks Perlindungan Anak

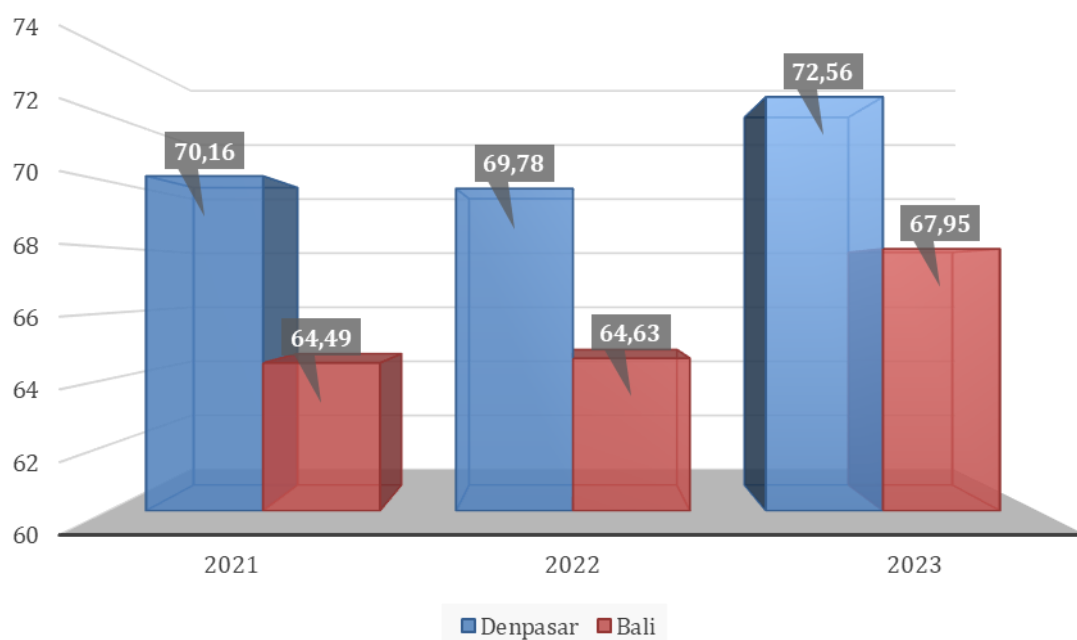
Indeks Perlindungan Anak (IPA) menjadi salah satu indikator yang tidak dapat diabaikan dalam konteks pembangunan keluarga. IPA merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana hak-hak anak terpenuhi, termasuk hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Dimensi-dimensi tersebut pada dasarnya merupakan bagian integral dari kualitas hidup penduduk, yang menjadi salah satu komponen utama dalam penghitungan IPBK. Dengan kata lain, capaian perlindungan anak yang baik akan berkontribusi langsung pada peningkatan IPBK karena anak merupakan kelompok penduduk yang menentukan kualitas pembangunan di masa depan. IPBK dan IPA dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jika IPBK menunjukkan pencapaian pembangunan dengan memperhatikan aspek kependudukan secara umum, maka IPA menyoroti secara khusus kerentanan dan kebutuhan spesifik kelompok anak. Keduanya saling melengkapi: IPBK menekankan pembangunan yang inklusif bagi seluruh penduduk, sementara IPA memastikan bahwa anak-anak sebagai generasi penerus bangsa terlindungi dan mendapat kesempatan optimal untuk berkembang. Dengan demikian, penggunaan kedua indeks ini secara bersamaan akan membantu perumusan kebijakan yang lebih holistik, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan seluruh penduduk, termasuk anak-anak.

Data menunjukkan bahwa IPA Kota Denpasar pada tahun 2021 berada di angka 70,16, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bali (64,49). Angka ini menandakan bahwa Denpasar telah memiliki kebijakan dan infrastruktur perlindungan anak yang relatif lebih maju dibandingkan rata-rata provinsi, meskipun tantangan seperti kekerasan berbasis gender terhadap anak, pernikahan anak, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental anak masih menjadi isu penting.

Pada 2022, IPA Denpasar mengalami sedikit penurunan menjadi 69,78, walaupun masih di atas rata-rata Bali (64,63). Penurunan ini dapat dikaitkan dengan dampak jangka panjang pandemi COVID-19 yang memengaruhi kesejahteraan anak, termasuk meningkatnya kerentanan terhadap eksploitasi daring, berkurangnya interaksi sosial, dan tekanan pada kesehatan mental anak. Laporan UNICEF (2022) menggarisbawahi bahwa pandemi memberikan dampak yang tidak proporsional pada anak-anak, terutama dalam hal keamanan, pendidikan, dan kesehatan psikologis.

Namun, pada 2023 IPA Denpasar kembali meningkat signifikan menjadi 72,56, sementara Bali mencapai 67,95. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan upaya pemulihan yang dilakukan melalui penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas lembaga layanan, serta kampanye publik terkait hak-hak anak. Implementasi program seperti Kota Layak Anak (KLA) dan integrasi perlindungan anak dalam perencanaan pembangunan daerah berkontribusi pada perbaikan indikator ini.

Gambar 2.44
Indeks Perlindungan Anak



Sumber: Kementerian PPPA, 2023

Fenomena tren IPA selama tahun 2021 hingga 2023 sejalan dengan *Child Rights-Based Approach* (CRBA) yang menekankan bahwa kebijakan publik harus berlandaskan pada Konvensi Hak Anak (CRC), di mana setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, serta

diskriminasi. IPA Denpasar yang konsisten di atas rata-rata Bali menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah kota dalam mengarusutamakan perlindungan anak dalam kebijakan pembangunan daerah. Keberlanjutan capaian ini memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pendamping anak, serta inovasi kebijakan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi yang memengaruhi kehidupan anak.

2.3.6 Partisipasi Masyarakat dalam Bina Keluarga

Partisipasi masyarakat dalam upaya membangun keluarga yang sejahtera merupakan kunci penting dalam mencapai tujuan kebijakan program Keluarga Berencana (KB) yang digagas oleh pemerintah. KB tidak sekadar mengatur jumlah penduduk, tetapi juga mendorong terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Dengan memberikan akses dan informasi terkait perencanaan keluarga, pemerintah bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab terkait jumlah dan jarak kelahiran anak. Salah satu strategi yang digunakan adalah melalui partisipasi aktif kelompok Bina Keluarga Sejahtera. Kelompok ini menjadi bagian integral dalam membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta mendukung implementasi program KB.

Partisipasi aktif dari kelompok Bina Keluarga tidak hanya memberikan dukungan logistik, tetapi juga memberdayakan masyarakat dalam hal pengetahuan dan keterampilan terkait perencanaan keluarga. Dengan adanya pelatihan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelompok ini, masyarakat dapat memahami pentingnya perencanaan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengoptimalkan fungsi-fungsi keluarga dalam pembangunan nasional. Selain itu, partisipasi masyarakat juga mencakup pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program KB di tingkat lokal. Dengan memantau secara aktif pelaksanaan program, masyarakat dapat memberikan masukan dan umpan balik kepada pemerintah terkait efektivitas dan efisiensi program tersebut. Hal ini memungkinkan adanya perbaikan dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat dalam bina keluarga bukan hanya sekadar sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra dalam mencapai tujuan pembangunan keluarga yang berkualitas dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui program KB menegaskan komitmen bersama untuk

mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh, sesuai dengan visi pembangunan nasional.

2.3.6.1 Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)

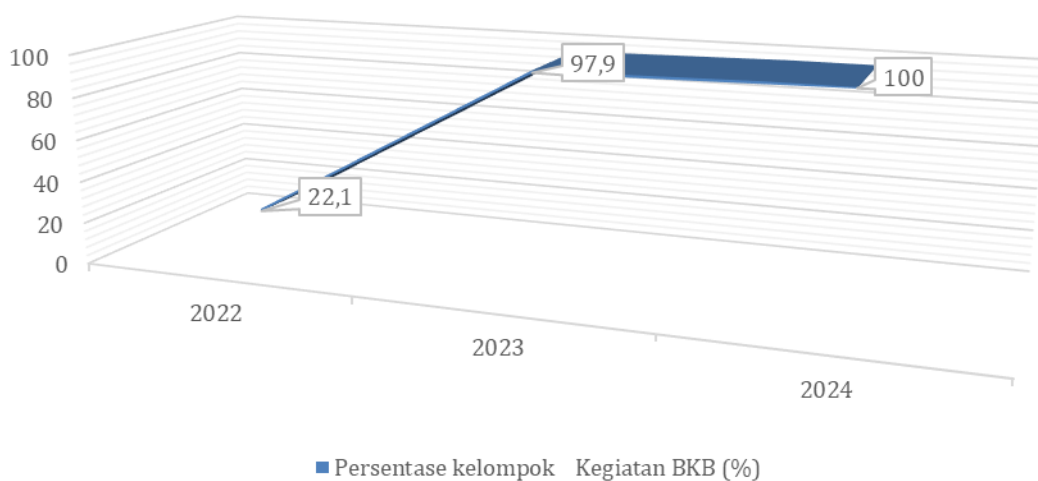
Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan sebuah inisiatif yang berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan keluarga yang memiliki balita. BKB hadir sebagai poktan yang bertujuan utama untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, terutama bagi orang tua dan keluarga yang memiliki anak balita. Program ini didasarkan pada pendekatan pemberdayaan, di mana orang tua dan keluarga diberikan pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk merawat dan mendukung tumbuh kembang optimal anak balita. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, seperti penyuluhan kesehatan, pendidikan anak, dan bimbingan bagi orang tua, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang tangguh, terinformasi, dan mampu memberikan perhatian maksimal kepada anak balita. Sebagai salah satu program unggulan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BKB memiliki fokus yang jelas dalam pembinaan tumbuh kembang anak balita untuk meningkatkan kualitas keluarga secara menyeluruh. Dengan melibatkan orang tua dalam berbagai kegiatan, BKB bertujuan memberikan pemahaman, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan untuk optimalnya tumbuh kembang anak balita. Selain berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, program ini juga turut berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional terkait pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas.

Program BKB juga menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat hubungan antara orang tua dan anak balita. Melalui kegiatan-kegiatan interaktif seperti bermain, belajar, dan berbagi pengalaman, orang tua dapat memahami lebih dalam tentang kebutuhan dan perkembangan anak mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan keluarga, tetapi juga memberikan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan anak dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan. Selain itu, BKB juga berperan penting dalam menciptakan jaringan sosial antar-ibu balita, yang memungkinkan pertukaran informasi, dukungan emosional, dan kolaborasi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para orang tua.

Berdasarkan Gambar 2.45, jumlah kelompok kegiatan BKB di Kota Denpasar mencerminkan komitmen dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembinaan tumbuh kembang anak balita serta peningkatan kualitas keluarga. Dengan

adanya sejumlah kelompok BKB yang tersebar di berbagai wilayah, program ini memberikan dampak positif dalam upaya pemberdayaan orang tua dan keluarga. Dengan melibatkan banyak keluarga, BKB tidak hanya menjadi wahana pembelajaran dan pelatihan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat ikatan keluarga dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peran orang tua dalam membentuk masa depan generasi muda.

Gambar 2.45
Persentase Kelompok Kegiatan BKB di Kota Denpasar yang Berkegiatan tahun 2022 - 2024



Sumber: DP3AP2KB Kota Denpasar, 2024

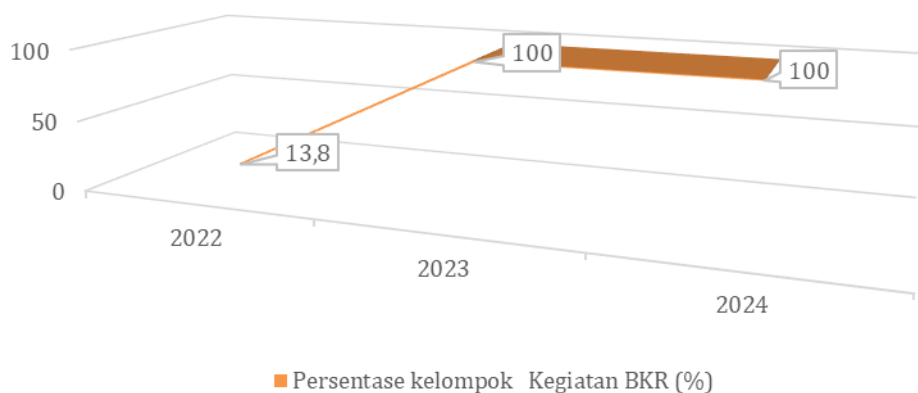
2.3.6.2 Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan fokus utama meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan orang tua dan keluarga yang memiliki remaja. Program ini merupakan respons terhadap pentingnya memahami serta mengakomodasi perkembangan remaja dalam konteks keluarga. Dengan memfasilitasi orang tua dan keluarga dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang muncul selama masa remaja, BKR memberikan wadah bagi mereka untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan. Hal ini tidak hanya memperkuat pemahaman tentang perkembangan remaja, tetapi juga memperkuat hubungan antar anggota keluarga.

Jumlah kelompok kegiatan BKR di Kota Denpasar menunjukkan komitmen terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh melalui pendekatan yang melibatkan seluruh keluarga. dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Pada gambar 2.46 dapat diketahui bahwa

persentase kelompok kegiatan BKR di Kota Denpasar yang berkegiatan mengalami tren yang meningkat secara signifikan selama 2022 sampai dengan 2024.

Gambar 2.46
Persentase Kelompok Kegiatan BKR di Kota Denpasar yang Berkegiatan
tahun 2022 - 2024



Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, 2024

Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja merupakan indikator yang mengukur kualitas praktik pengasuhan orang tua atau keluarga terhadap anak remaja, yang mencakup aspek dukungan emosional, bimbingan moral, pengawasan perilaku, komunikasi terbuka, serta pemberian teladan yang positif (BKKBN, 2023). Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pengasuhan yang dilakukan keluarga memenuhi standar ideal untuk mendukung perkembangan remaja secara holistik.

Tabel 2.19
Indeks Pengasuhan Keluarga Yang Memiliki Remaja

Tahun	Denpasar	Bali
2024	91,9	88,53

Sumber : Pemutakhiran Pendataan Keluarga BKKBN

Pada tahun 2024, Kota Denpasar mencatat nilai indeks sebesar 91,9, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bali yang berada pada 88,53. Capaian ini mengindikasikan bahwa keluarga di Denpasar relatif lebih siap dan mampu memberikan pengasuhan berkualitas kepada remaja mereka. Perbedaan positif ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk tingkat pendidikan orang tua yang relatif tinggi di kawasan perkotaan, ketersediaan layanan pendukung pengasuhan seperti konseling keluarga dan program parenting, serta lingkungan sosial yang lebih terbuka terhadap isu perkembangan remaja. Tingginya nilai indeks di Denpasar sejalan dengan prinsip *Positive Parenting* yang direkomendasikan oleh UNICEF (2017), yang

menekankan pentingnya kasih sayang, komunikasi terbuka, disiplin positif, dan keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan anak. Pengasuhan yang berkualitas terbukti memiliki dampak langsung terhadap perkembangan keterampilan sosial-emosional, prestasi akademik, serta ketahanan mental remaja (WHO, 2020).

Peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan remaja menjadi semakin penting di tengah tantangan kontemporer seperti paparan media digital, risiko perilaku berisiko, dan tekanan akademik. Laporan UNESCO (2022) menekankan bahwa remaja yang dibesarkan dalam keluarga dengan pengasuhan positif memiliki resiliensi lebih tinggi dan cenderung membuat keputusan hidup yang lebih sehat.

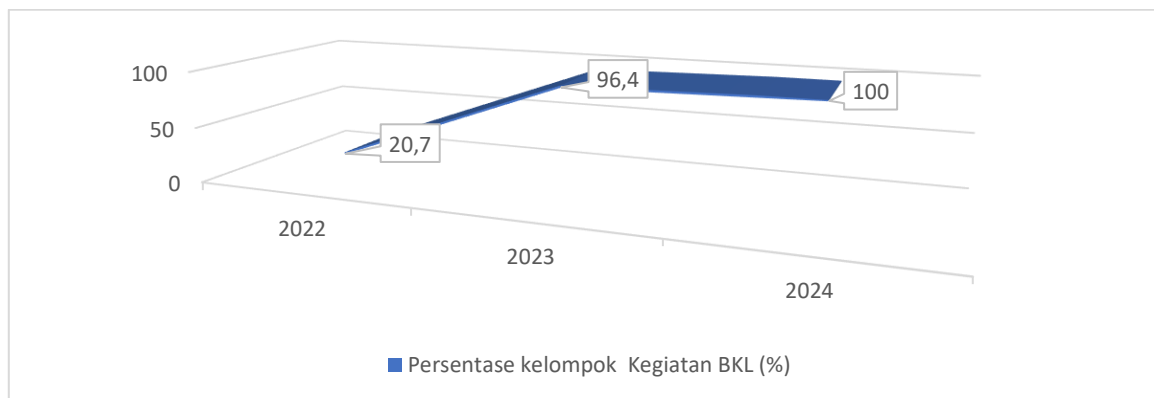
Meskipun capaian Denpasar tergolong tinggi, tantangan tetap ada. Perubahan gaya hidup, kesibukan orang tua, dan kurangnya literasi digital dalam keluarga dapat mengurangi kualitas interaksi antara orang tua dan remaja. Oleh karena itu, mempertahankan dan meningkatkan nilai indeks ini memerlukan strategi yang berkelanjutan, termasuk penguatan pendidikan *parenting* berbasis komunitas, peningkatan layanan konseling keluarga, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendukung keluarga dalam menghadapi tantangan pengasuhan modern.

2.3.6.3 Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)

Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan sebuah program yang menawarkan solusi terhadap kebutuhan khusus keluarga yang memiliki anggota lansia. Fokus utamanya adalah pada pemberdayaan lansia dan keluarganya, dengan tujuan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Program ini didesain untuk memastikan bahwa lansia tetap aktif, sehat, dan memiliki peran yang berarti dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu aspek penting dari BKL adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada keluarga dalam merawat dan memastikan kesejahteraan lansia di lingkungan keluarga. Namun, lebih dari sekadar pemberdayaan individu lansia, BKL juga berupaya menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung dan ramah terhadap kebutuhan lansia. Dengan menekankan pentingnya dukungan psikososial, program ini bertujuan untuk membantu lansia mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan holistik seperti ini, diharapkan bahwa BKL mampu memberikan dampak

positif pada kualitas hidup lansia serta menciptakan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan keluarga secara menyeluruh.

Gambar 2.47
Persentase Kelompok Kegiatan BKL di Kota Denpasar yang Berkegiatan tahun 2022 - 2024



Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, 2024

Pada Gambar 2.47 terlihat bahwa persentase jumlah kelompok kegiatan BKL yang berkegiatan di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat terhadap kegiatan BKL dari tahun ke tahun cenderung meningkat perhatiannya terhadap pemberdayaan lansia.

Indeks Lansia Berdaya mengukur tingkat kemandirian, partisipasi sosial, dan kemampuan lansia untuk tetap produktif serta berperan aktif dalam masyarakat. Indeks ini mencakup dimensi kesehatan fisik dan mental, akses terhadap layanan sosial, keterlibatan dalam kegiatan komunitas, serta dukungan keluarga dan lingkungan (BKKBN, 2023). Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lansia memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menjalani kehidupan yang sehat, mandiri, dan bermakna di usia lanjut.

Tabel 2.20 Indeks Lansia Berdaya

Tahun	Denpasar	Bali
2024	63,9	64,41

Sumber : Pemutakhiran Pendataan Keluarga BKKBN

Pada tahun 2024, Kota Denpasar mencatat nilai Indeks Lansia Berdaya sebesar 63,9, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Bali yang berada di angka 64,41. Perbedaan ini relatif kecil, namun tetap menjadi indikator bahwa meskipun kualitas hidup lansia di Denpasar sudah berada pada kategori cukup baik, masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan

partisipasi sosial lansia. Capaian Denpasar ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Pertama, sebagai wilayah perkotaan, Denpasar memiliki akses yang relatif baik terhadap fasilitas kesehatan, layanan sosial, dan kegiatan komunitas. Namun, dinamika kehidupan kota juga dapat memunculkan tantangan seperti keterbatasan ruang publik ramah lansia dan potensi isolasi sosial pada lansia yang tinggal sendiri. Kedua, meskipun angka harapan hidup di Denpasar cukup tinggi, kualitas hidup lansia tidak selalu sejalan dengan lamanya usia, mengingat masih adanya beban penyakit kronis dan keterbatasan akses pada program pemberdayaan ekonomi lansia.

Tren penuaan penduduk menjadi tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan. Laporan *World Population Aging* (United Nations, 2020) menegaskan bahwa populasi lansia akan terus meningkat, sehingga pemberdayaan lansia menjadi prioritas strategis untuk mencegah marginalisasi sosial dan ekonomi kelompok ini. Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-3 tentang kesehatan dan kesejahteraan serta tujuan ke-10 tentang pengurangan kesenjangan, peningkatan Indeks Lansia Berdaya di Denpasar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target-target tersebut.

Dengan demikian, meskipun nilai indeks lansia berdaya Denpasar sudah tergolong baik, diperlukan strategi terpadu untuk meningkatkannya, seperti pengembangan komunitas ramah lansia, pelatihan keterampilan baru, peningkatan akses pada layanan kesehatan preventif, serta program penguatan peran keluarga dalam mendukung lansia untuk tetap aktif dan mandiri.

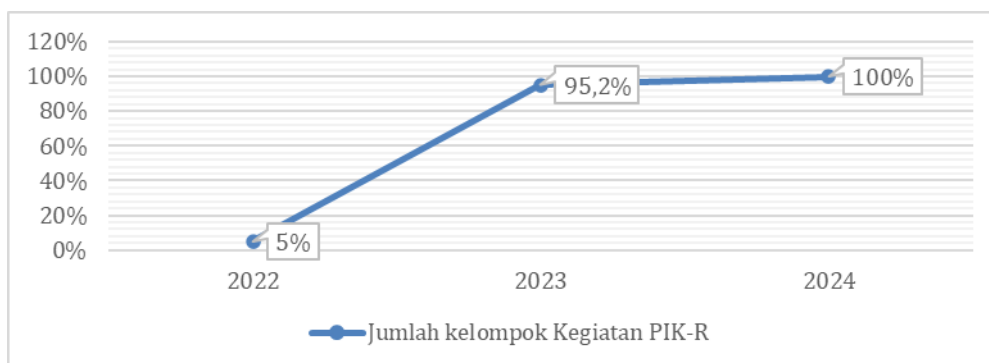
2.3.6.4 Kelompok Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) adalah sebuah kelompok yang signifikan dalam usaha meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, terutama bagi kalangan remaja. Sebagai bagian integral dari program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR), PIK-R memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi dan layanan konseling kepada remaja. Fokusnya bukan hanya pada aspek edukasi, tetapi juga pada pembangunan pribadi dan sosial remaja untuk mempersiapkan mereka menghadapi peran dan tanggung jawab dalam konteks pembangunan keluarga.

PIK-R bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada remaja mengenai berbagai aspek penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan menyediakan

wadah untuk mendiskusikan isu-isu yang relevan dan memberikan bimbingan yang dibutuhkan, PIK-R memainkan peran penting dalam membekali remaja dengan pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk membangun keluarga yang kokoh di masa depan. Dengan demikian, PIK-R bukan hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga tempat untuk memperoleh dukungan dan panduan dalam memahami peran mereka dalam membangun hubungan keluarga yang sehat dan berkelanjutan.

Gambar 2.48
Persentase Kelompok PIK-R yang berkegiatan di Kota Denpasar tahun 2022 - 2024



Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, 2024

Gambar 2.48 menunjukkan persentase jumlah kelompok kegiatan PIK-R berkegiatan di Kota Denpasar. Jumlah kegiatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun selama 2022 - 2024. Dengan meningkatnya Kegiatan PIK-R diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan keluarga yang berkualitas di masa depan.

2.3.6.5 Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) mencerminkan kelompok kegiatan yang secara khusus difokuskan pada ketahanan dan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui upaya pengembangan usaha ekonomi produktif. Program ini merupakan inisiatif dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan tujuan strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberdayakan ekonomi keluarga. Melalui UPPKA, BKKBN berupaya memberikan dukungan dan bimbingan kepada keluarga akseptor agar dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui usaha ekonomi yang produktif. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Tabel 2.21 menyajikan persentase kelompok UPPKA yang berkegiatan di Kota Denpasar tahun 2022 - 2024. Data tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan persentase

kelompok UPPKA yang berkegiatan yang cukup signifikan dari tahun 2022 yang semula 0 persen menjadi 100 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.21
Persentase Kelompok UPPKA Berkegiatan di Kota Denpasar tahun 2022 - 2024

Keterangan	2022	2023	2024
Persentase kelompok UPPKA berkegiatan	0,0	90,9	100

Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, 2024

2.3.7 Indeks Ketahanan Keluarga

Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) merupakan sebuah indikator penting yang memungkinkan pengukuran secara sistematis tentang kemampuan suatu keluarga untuk bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan kehidupan. Ketahanan keluarga, sebagai cermin dari harmoni dan kesejahteraan, menjadi fokus dalam mengevaluasi bagaimana sebuah keluarga mampu melindungi dirinya dari berbagai masalah, baik yang timbul dari dalam keluarga maupun dari faktor-faktor eksternal. Indeks ketahanan keluarga diukur dengan menggunakan lima indikator utama, seperti kepemilikan rumah, kondisi sosial ekonomi, kasus perceraian, serta ketersediaan perawatan untuk anak dan lansia. Hasil penelitian tahun 2020 menunjukkan bahwa nilai indeks ketahanan keluarga Kota Denpasar mencapai 72,39, mencerminkan tingkat ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang relatif tinggi. Prestasi ini memberikan gambaran tentang keberhasilan pembangunan keluarga di Kota Denpasar, yang secara keseluruhan mampu mengatasi berbagai tantangan dan menjaga kualitas hidup mereka. Dampak positif ini, sebagaimana terlihat dari peningkatan nilai IKK, mungkin menjadi hasil dari kebijakan dan program pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan serta partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat hubungan dan kualitas hidup di lingkup keluarga.

2.3.8 Anak Terlantar

Masalah anak terlantar merupakan fenomena yang memiliki implikasi yang kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan anak, terutama terkait dengan kondisi ekonomi, kesehatan, dan kurangnya perhatian dari lingkungan terdekat seperti orang tua. Anak-anak yang mengalami situasi terlantar rentan terhadap dampak negatif, baik secara fisik maupun mental, yang dapat menghambat perkembangan dan masa depan

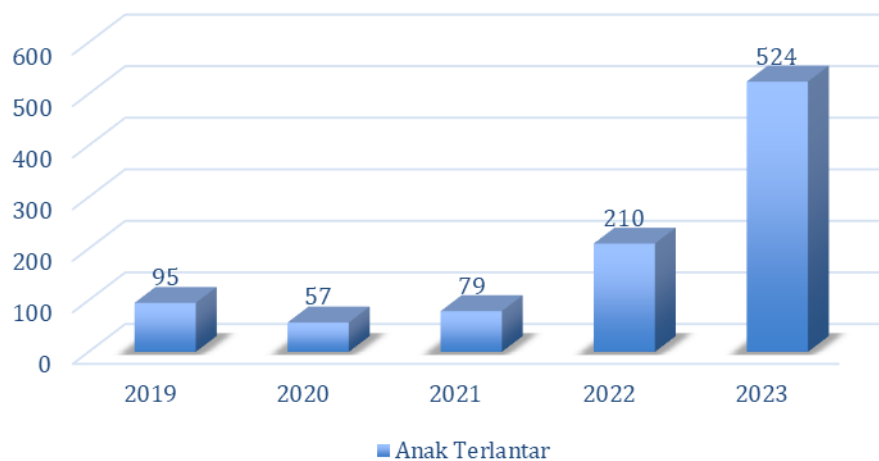
mereka. Kurangnya dukungan dan perhatian dapat menghambat pertumbuhan fisik yang optimal serta perkembangan emosional dan sosial anak-anak tersebut. Oleh karena itu, upaya penanggulangan permasalahan anak terlantar menjadi penting, sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat 1 UUD RI Tahun 1945 yang menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial bagi anak-anak yang terlantar.

Gambar 2.49 memperlihatkan tren jumlah anak terlantar di Kota Denpasar dari tahun 2019 hingga 2023. Selama periode lima tahun ini, gambar tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus anak terlantar, dengan lonjakan yang sangat tajam pada tahun 2023. Pada awal periode, yaitu tahun 2019, jumlah kasus yang tercatat adalah 95. Angka ini kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020, hanya mencapai 57 kasus, yang mungkin mencerminkan keberhasilan sementara dalam penanganan atau intervensi sosial pada tahun tersebut. Namun, di tahun 2021, angka tersebut kembali meningkat menjadi 79 kasus, memperlihatkan adanya tantangan baru yang mungkin muncul dalam menjaga stabilitas kesejahteraan kelompok rentan. Peningkatan yang lebih drastis terlihat pada tahun 2022, dengan jumlah kasus yang melonjak hingga 210, dan lebih jauh lagi mencapai 524 kasus pada periode akhir tahun yang sama atau awal tahun 2023.

Lonjakan ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, seperti memburuknya kondisi ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak dan lansia. Pandemi juga dapat menyebabkan penurunan dukungan sosial akibat keterbatasan anggaran pemerintah atau berubahnya prioritas dalam alokasi sumber daya. Selain itu, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi mungkin tidak mampu lagi menyediakan kebutuhan dasar untuk anggota keluarga mereka yang rentan, sehingga meningkatkan angka keterlantaran. Fenomena peningkatan tajam ini menunjukkan urgensi bagi pihak pemerintah dan lembaga sosial untuk melakukan intervensi yang lebih terarah. Hal ini bisa meliputi peningkatan alokasi bantuan sosial, penguatan jaringan dukungan komunitas, serta peningkatan layanan kesehatan dan perlindungan yang langsung menjangkau anak-anak dan lansia terlantar. Penanganan yang komprehensif juga perlu melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat agar upaya penanganan dapat lebih berkelanjutan dan tepat sasaran. Selain

itu, perlu diadakan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah berjalan untuk memastikan efektivitasnya, serta identifikasi faktor risiko yang perlu segera diatasi agar kasus keterlantaran tidak terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

Gambar 2.49
Jumlah Anak Terlantar Kota Denpasar Tahun 2019 – 2023



Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2023

2.3.9 Lanjut Usia Terlantar

Perlindungan dan perhatian terhadap kelompok lanjut usia (lansia) merupakan suatu keharusan, terutama dalam kerangka program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, terutama dalam rangka menjalankan ketentuan UU No. 11 Tahun 2009 yang menekankan perlunya jaminan dan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 juga menyoroti kebijakan mengenai lanjut usia, menuntut pemenuhan hak dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok lansia. Upaya ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menghormati dan melindungi hak-hak warga lanjut usia.

Lanjut usia terlantar adalah kelompok orang tua atau lansia yang tidak memiliki dukungan dari keluarga, lingkungan, maupun sumber daya ekonomi yang memadai, sehingga mereka berada dalam kondisi rentan atau kurang terurus. Lansia terlantar biasanya menghadapi berbagai keterbatasan, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, perawatan kesehatan, dan perlindungan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kehilangan keluarga yang mendukung, isolasi sosial, kemiskinan, serta gangguan kesehatan yang membatasi kemampuan mereka untuk hidup mandiri. Lansia terlantar membutuhkan perhatian khusus dari

pemerintah dan lembaga sosial melalui program bantuan dan layanan dukungan, seperti fasilitas perawatan lansia, bantuan keuangan, serta program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tanpa intervensi yang memadai, kelompok ini sangat rentan terhadap penurunan kualitas hidup yang drastis, masalah kesehatan, dan bahkan risiko eksploitasi atau kekerasan. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kelompok lansia terlantar mendapatkan perlindungan yang layak dan kehidupan yang bermartabat. Adapun jumlah lansia terlantar ditunjukkan oleh Gambar 2.50.

Gambar 2.50
Jumlah Lansia terlantar di Kota Denpasar Tahun 2019 - 2023



Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2023

Gambar di atas memberikan gambaran tentang tren jumlah lansia terlantar di Kota Denpasar dari tahun 2019 hingga 2023, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar pada tahun 2023. Dalam periode lima tahun ini, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah lansia terlantar, yang mengindikasikan bahwa isu keterlantaran lansia menjadi masalah sosial yang semakin mendesak. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 126 lansia yang terlantar. Angka ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020, menjadi 116 lansia terlantar, yang mungkin mencerminkan adanya upaya awal untuk menangani masalah ini. Namun, tren tersebut berubah drastis di tahun 2021, di mana jumlah lansia terlantar hampir dua kali lipat, melonjak ke angka 256 orang. Lonjakan tajam ini bisa saja dipicu oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak lansia menjadi semakin rentan akibat isolasi sosial, penurunan dukungan keluarga, atau bahkan krisis ekonomi yang memengaruhi kemampuan keluarga untuk merawat mereka.

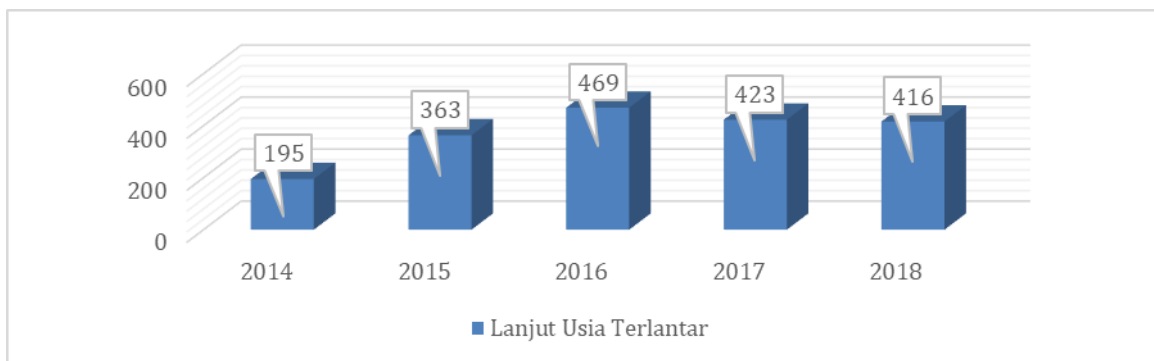
Pada tahun 2022, jumlah lansia terlantar semakin meningkat hingga mencapai 351 orang, menunjukkan adanya peningkatan sebesar hampir 100 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini merupakan puncak tertinggi dalam periode lima tahun tersebut, dan mengindikasikan bahwa situasi keterlantaran lansia di Kota Denpasar menjadi semakin kritis. Peningkatan ini bisa dihubungkan dengan berbagai faktor, termasuk semakin terbatasnya sumber daya sosial dan ekonomi untuk mendukung kelompok lansia, serta mungkin adanya penurunan perhatian dari lingkungan sekitar akibat meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi di masa pasca-pandemi. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 312 lansia terlantar, angka ini tetap menunjukkan masalah yang signifikan, karena masih jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum tahun 2021.

Penurunan pada tahun 2023, mencerminkan adanya intervensi atau program dari pihak pemerintah dan lembaga sosial yang mulai menunjukkan hasil. Program seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendirian fasilitas bagi lansia terlantar kemungkinan berkontribusi pada penurunan tersebut. Namun, fakta bahwa jumlah lansia terlantar tetap tinggi menandakan bahwa upaya ini belum cukup untuk sepenuhnya mengatasi masalah tersebut. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan upaya lebih intensif dan berkelanjutan, termasuk memperkuat jaminan sosial bagi lansia, meningkatkan peran komunitas dalam mendukung para lansia, dan menyediakan fasilitas pelayanan lansia yang lebih komprehensif. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kelompok lansia terlantar di Denpasar dapat hidup dengan layak dan bermartabat. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan lansia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lansia di Indonesia, untuk memastikan bahwa setiap lansia terlantar mendapatkan hak-hak dasar mereka dan tidak terabaikan di usia senja.

Gambar di bawah ini menunjukkan kondisi penduduk lanjut usia terlantar di Kota Denpasar selama tahun 2014-2018. Jumlah lansia terlantar mengalami fluktuasi selama periode 2014-2018, dengan penurunan keseluruhan namun tetap menjadi perhatian serius. Pada tahun 2014, terdapat 195 lansia terlantar, namun jumlah ini meningkat tajam pada tahun 2015 menjadi 363 orang. Tren ini berlanjut pada tahun 2016, di mana angka lansia terlantar mencapai puncaknya pada 469 orang.

Setelah itu, pada tahun 2017, terjadi penurunan jumlah lansia terlantar menjadi 423 orang, dan penurunan ini berlanjut pada tahun 2018, meskipun sedikit, menjadi 416 orang. Penurunan pada dua tahun terakhir bisa jadi merupakan hasil dari upaya pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan program kesejahteraan sosial untuk lansia, seperti bantuan sosial, peningkatan akses kesehatan, dan program dukungan komunitas. Meskipun sempat mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2016, angka lansia terlantar menurun secara bertahap pada dua tahun terakhir periode ini. Data ini memberikan gambaran penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk terus memperkuat upaya dalam mendukung kesejahteraan lansia di Kota Denpasar. Lansia yang mengalami kondisi terlantar, menggambarkan tantangan sosial dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan mereka di wilayah tersebut. Meningkatkan kualitas hidup dan memberikan dukungan yang memadai bagi lansia terlantar menjadi esensial dalam konteks pembangunan keluarga dan perlindungan kelompok rentan. Lansia terlantar memiliki risiko sosial kompleks yang memerlukan peningkatan program pelayanan sosial khusus guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Hal ini mencerminkan tanggung jawab sosial dan kemanusiaan dalam menjaga dan melindungi kelompok rentan, seperti lansia, dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.

Gambar 2.51
Lanjut Usia Terlantar di Kota Denpasar tahun 2014 – 2018



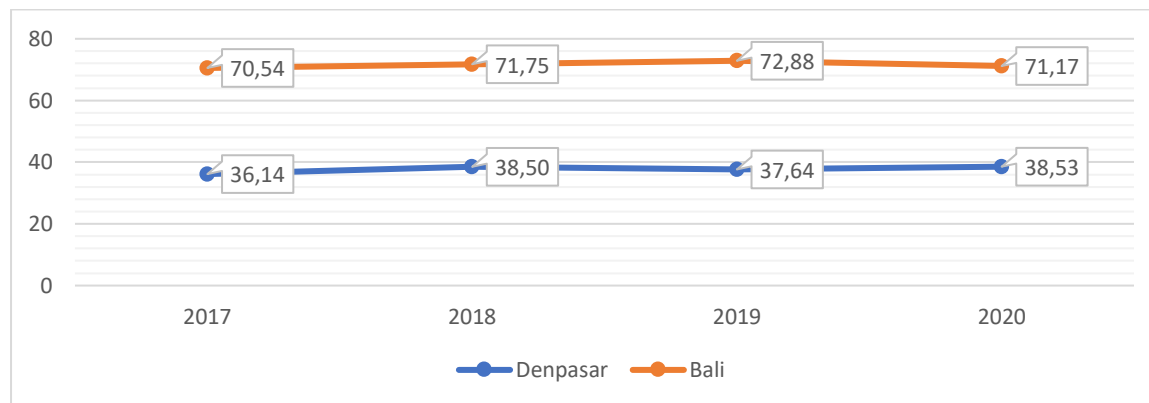
Sumber: Satu Data Denpasar (Dinas Sosial Kota Denpasar), 2023

2.3.10 Keluarga dengan Kepemilikan Rumah Sendiri

Kepemilikan rumah sendiri menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur stabilitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Rumah merupakan aset yang bernilai, dan memiliki rumah sendiri dapat memberikan keamanan finansial dan stabilitas tempat tinggal bagi keluarga. Ini juga mencerminkan tingkat kemandirian finansial dan kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif. Penting untuk mencatat bahwa dalam konteks kepemilikan tempat tinggal di Kota Denpasar, rumah

dianggap sebagai milik sendiri apabila dimiliki oleh kepala rumah tangga atau salah satu anggota rumah tangga. Kriteria ini mencakup rumah yang diperoleh melalui pembelian secara angsuran melalui kredit bank atau melalui skema sewa beli.

Gambar 2.52
Persentase Rumah Tangga di Kota Denpasar dan Provinsi menurut Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri, 2017-2020 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 2.52, pada tahun 2017, sekitar 36,14 persen dari rumah di Kota Denpasar memiliki status kepemilikan tempat tinggal milik sendiri. Angka ini mencerminkan proporsi rumah yang dimiliki oleh kepala rumah tangga atau salah satu anggota rumah tangga. Penting untuk dicatat bahwa kepemilikan tempat tinggal dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari pembelian melalui kredit bank hingga skema sewa beli. Meskipun persentase ini memberikan gambaran awal, fluktuasi dalam angka ini dari tahun 2017 hingga tahun 2020 menunjukkan adanya dinamika dalam kepemilikan rumah di Kota Denpasar selama periode tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa angka ini mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Penilaian jumlah rumah kepemilikan sendiri didapatkan melalui pendataan Badan Pusat Statistik yang menjumlahkan keluarga yang memiliki rumah sendiri pada setiap tahunnya.

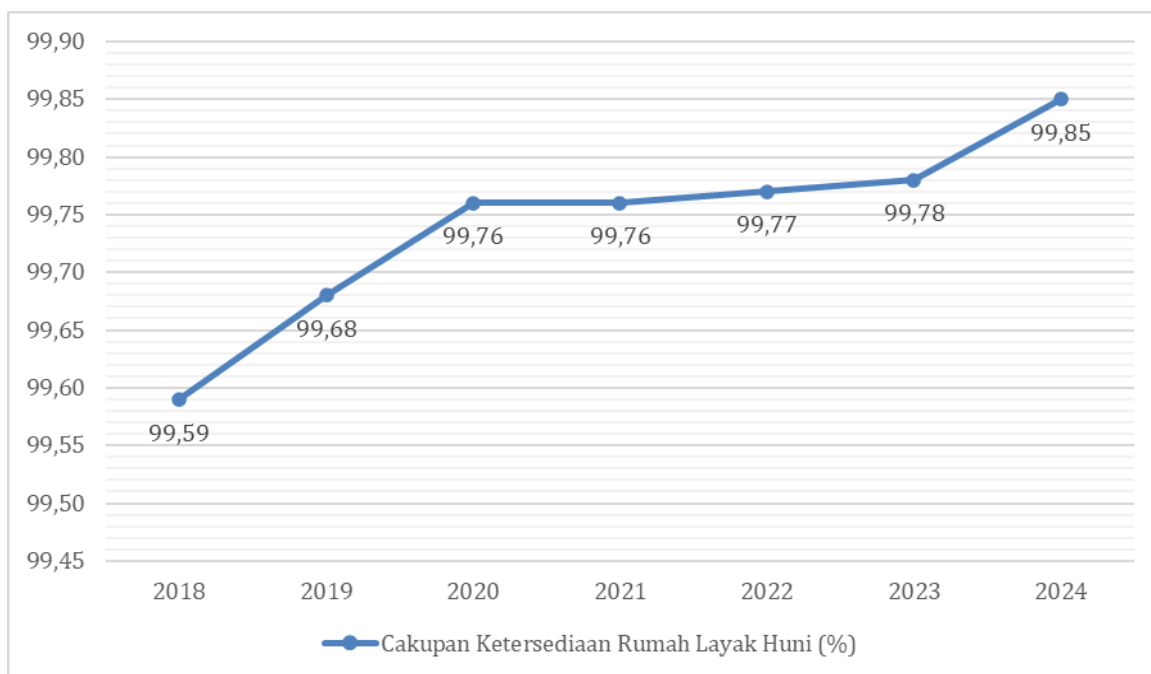
2.3.11 Rumah Layak Huni

Jika dilihat dari definisinya, rumah layak huni dapat diartikan sebagai hunian yang memenuhi standar kualitas tertentu sehingga menyediakan lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya. Standar ini mencakup aspek struktural, sanitasi, ventilasi, pencahayaan, dan akses terhadap air bersih serta fasilitas dasar lainnya. Rumah layak huni juga harus bebas dari kondisi yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan penghuni, seperti kelembapan berlebihan, kerusakan

struktural, atau investasi hama. Persentase ketersediaan rumah layak huni yang ditampilkan dalam grafik menunjukkan proporsi rumah yang memenuhi kriteria tersebut di Kota Denpasar, yang merupakan indikator penting dari kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Pada gambar 2.53 menunjukkan persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Denpasar dari tahun 2018 hingga 2024. Secara umum, persentase ketersediaan rumah layak huni di Kota Denpasar berada pada angka yang cukup tinggi yaitu diatas 99% setiap tahun. Pada tahun 2018 ketersediaan rumah layak huni mencapai 99,59%, mengalami peningkatan setiap tahun hingga pada tahun 2024 mencapai angka 99,85%. Berdasarkan cakupan yang disajikan pada gambar 2.58, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas perumahan di Kota Denpasar. Peningkatan ini mencerminkan komitmen yang berkelanjutan untuk memastikan hunian yang layak bagi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk maupun keluarga di Kota Denpasar.

Gambar 2.53
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni tahun 2018 - 2024



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, 2024

Ketersediaan hunian layak terkait erat dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-11 tentang kota dan permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Meskipun capaian Denpasar pada 2023 dan 2024 tergolong tinggi, keberlanjutan tren positif ini memerlukan kebijakan terpadu yang

mencakup pengendalian harga tanah, penyediaan rumah terjangkau, serta integrasi perumahan dengan akses transportasi dan fasilitas publik.

Tabel 2.22
Rasio Rumah Layak Huni di Kota Denpasar tahun 2018 – 2024

Tahun	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah Penduduk	Rasio Rumah Layak huni
2018	160.142	788.588	0,203
2019	160.288	947.100	0,169
2020	188.288	725.314	0,260
2021	190.428	727.293	0,262
2022	190.446	656.405	0,290
2023	190.803	665.328	0,287
2024	190.702	755.568	0,252

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, 2024

Gambar diatas menunjukkan Rasio Rumah Layak Huni (RRLH) di Kota Denpasar selama periode 2018–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif, mencerminkan interaksi antara jumlah rumah layak huni dan jumlah penduduk. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk. Nilai rasio yang lebih tinggi menunjukkan ketersediaan rumah layak huni yang relatif lebih memadai terhadap jumlah penduduk yang membutuhkan hunian (BPS Kota Denpasar, 2024).

Pada 2018, jumlah rumah layak huni mencapai 160.142 unit dengan jumlah penduduk 788.588 jiwa, menghasilkan rasio 0,203. Angka ini turun signifikan pada 2019 menjadi 0,169, meskipun jumlah rumah layak huni sedikit meningkat menjadi 160.288 unit. Penurunan ini kemungkinan dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah rumah layak huni, di mana jumlah penduduk melonjak menjadi 947.100 jiwa pada tahun tersebut. Fenomena ini sejalan dengan tantangan urbanisasi cepat di kota-kota besar Indonesia, yang menyebabkan permintaan rumah layak huni meningkat drastis (UN-Habitat, 2020). Tahun 2020 menjadi titik balik dengan peningkatan rasio menjadi 0,260. Jumlah rumah layak huni melonjak ke 188.288 unit sementara jumlah penduduk turun menjadi 725.314 jiwa. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh penyesuaian data demografi, perlambatan migrasi masuk akibat pandemi COVID-19, dan dorongan pemerintah dalam pembangunan perumahan melalui program seperti Sejuta Rumah yang digalakkan Kementerian PUPR (2020). Pada

2021, rasio naik tipis menjadi 0,262, dengan jumlah rumah layak huni mencapai 190.428 unit. Lonjakan signifikan kembali terlihat pada 2022, ketika rasio mencapai 0,290, tertinggi selama periode pengamatan. Jumlah rumah layak huni pada tahun tersebut mencapai 190.446 unit dengan jumlah penduduk menurun menjadi 656.405 jiwa. Kenaikan ini selaras dengan tren global pemulihan ekonomi pasca pandemi, di mana beberapa negara meningkatkan investasi infrastruktur perumahan sebagai stimulus ekonomi (World Bank, 2021). Meski demikian, pada 2023 rasio sedikit turun menjadi 0,287 dan pada 2024 turun lebih jauh menjadi 0,252. Penurunan ini meskipun jumlah rumah layak huni relatif stabil di kisaran 190 ribuan unit, mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk kembali menekan rasio ketersediaan rumah layak huni. Kenaikan jumlah penduduk pada 2024 menjadi 755.568 jiwa menegaskan tantangan kota-kota di Indonesia dalam mempertahankan rasio hunian layak di tengah pertumbuhan populasi yang berkelanjutan.

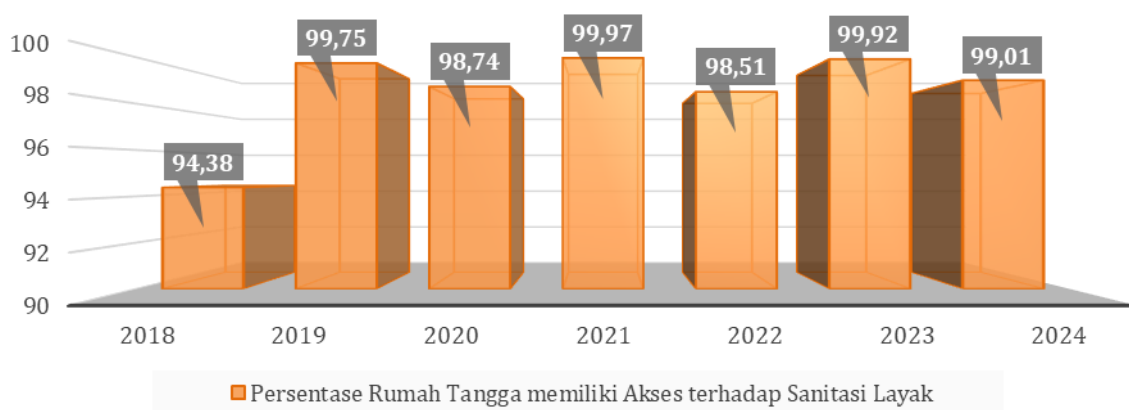
Secara teoritis, dinamika ini sejalan dengan konsep *Housing Affordability and Availability* (Stone, 2006), yang menjelaskan bahwa kecukupan perumahan tidak hanya ditentukan oleh jumlah rumah layak huni yang dibangun, tetapi juga oleh keseimbangan antara ketersediaan hunian dan pertumbuhan penduduk. Dalam konteks global, PBB melalui SDG 11.1 menegaskan target untuk memastikan akses universal terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau pada 2030 (United Nations, 2015). Kota seperti Denpasar yang mengalami tekanan urbanisasi memerlukan strategi perumahan yang terintegrasi dengan pengendalian tata ruang, pengendalian harga tanah, serta penyediaan hunian terjangkau bagi kelompok rentan. Tantangan ke depan adalah mempertahankan tren positif rasio rumah layak huni yang pernah dicapai pada 2022, sekaligus mengantisipasi lonjakan permintaan akibat pertumbuhan penduduk dan migrasi masuk. Pendekatan berkelanjutan yang menggabungkan perencanaan kota, kebijakan perumahan inklusif, serta dukungan terhadap pembiayaan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi kunci keberhasilan Denpasar dalam menjaga keberlanjutan hunian layak huni di masa depan.

2.3.12 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak

Pada periode tahun 2018 hingga 2024, persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di Kota Denpasar mengalami peningkatan yang signifikan, seperti terlihat pada gambar di bawah. Sanitasi layak didefinisikan sebagai

kondisi fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, termasuk sistem pembuangan air limbah yang efektif dan aman. Pada tahun 2018 total Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 94,38 persen. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) secara umum menunjukkan bahwa setiap tahun, persentase rumah tangga di Kota Denpasar yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami peningkatan dan pada 2023 sudah mencapai 99,92 persen. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur sanitasi di wilayah tersebut, termasuk pembangunan sistem pembuangan air limbah yang lebih efisien dan aman bagi kesehatan masyarakat. Kemudian sedikit mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 99,01 persen.

Gambar 2.54
Persentase Rumah Tangga memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di Kota Denpasar tahun 2018 – 2024



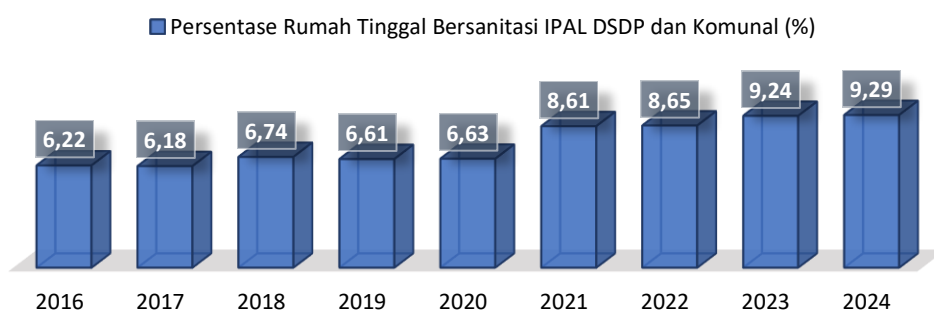
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024

2.3.13 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sanitasi yang aman dan layak menjadi sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, mengurangi risiko penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup. Sanitasi menjadi bagian penting indikator kesehatan dan kesejahteraan. Semakin baik kondisi sanitasi, maka kondisi kesehatan sangat baik. Sanitasi yang buruk akan mempermudah penyakit muncul dan menyebar melalui pembuangan yang tidak sempurna. Kesehatan yang buruk akan menghasilkan biaya tambahan bagi perekonomian dan masyarakat. Hal ini membutuhkan sebuah jalan keluar yang telah didukung oleh pemerintah kota melalui berbagai program seperti pembangunan IPAL DSDP dan penyediaan sanitasi komunal. Rumah tangga yang telah bersanitasi IPAL DSDP dan komunal dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah bersanitasi aman.

Gambar 2.55 di bawah menunjukkan pada tahun 2016, persentase rumah tinggal bersanitasi IPAL DSDP dan komunal di Kota Denpasar tercatat sebesar 6,22 persen. Ini menandakan titik awal yang cukup baik dalam hal sanitasi rumah tinggal. Namun, pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan menjadi 6,18 persen, yang mungkin menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi atau pemeliharaan sistem sanitasi yang ada. Tahun 2018 mencatat peningkatan signifikan dengan persentase mencapai 6,74 persen, menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam memperbaiki dan memperluas akses ke sanitasi yang lebih baik. Meskipun demikian, pada tahun 2019, persentase ini sedikit menurun ke 6,61 persen, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan populasi, masalah dalam pemeliharaan, atau faktor ekonomi yang mempengaruhi investasi dalam infrastruktur sanitasi. Pada tahun 2023 dan 2024, persentase ini sedikit meningkat kembali menjadi 9,24 persen dan 9,29 persen, menunjukkan adanya stabilisasi dan mungkin peningkatan dalam program sanitasi. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan sanitasi rumah tinggal di Kota Denpasar, dengan beberapa fluktuasi yang mencerminkan tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai dan mempertahankan tingkat sanitasi yang lebih tinggi.

Gambar 2.55
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi IPAL DSDP dan Komunal di Kota Denpasar tahun 2016 – 2024 (%)



Sumber: Pemerintah Kota Denpasar, 2016-2024 (diolah)

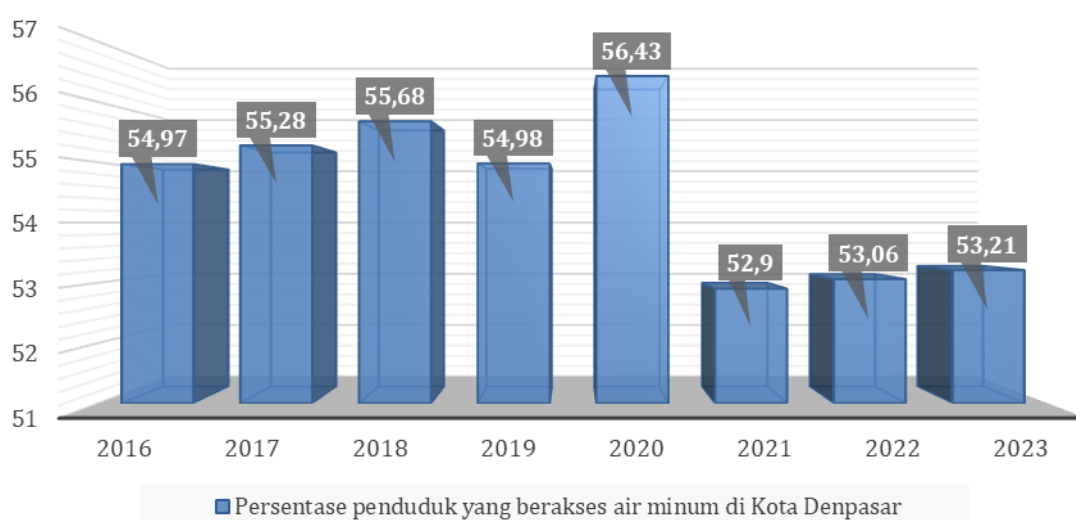
2.3.14 Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak

Akses terhadap air minum yang layak dan aman merupakan salah satu hak dasar manusia serta komponen penting dalam menciptakan kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Ketersediaan sarana prasarana air minum yang terakses secara merata menjadi tantangan sekaligus prioritas bagi pemerintah. Bab ini akan mengulas berbagai aspek terkait sarana dan prasarana air minum yang terakses, mulai dari kondisi

eksisting, tantangan yang dihadapi, hingga rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Salah satu aspek penting dalam penyediaan air minum adalah infrastruktur jaringan distribusi yang memadai. Infrastruktur ini mencakup jaringan perpipaan, instalasi pengolahan air minum (IPA), reservoir, serta alat-alat distribusi lainnya yang menjamin air bersih dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Di banyak wilayah, pembangunan infrastruktur air minum sering kali masih terkonsentrasi di daerah perkotaan, sehingga menimbulkan ketimpangan akses bagi masyarakat pedesaan dan daerah terpencil. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan perencanaan yang lebih inklusif dalam penyediaan sarana prasarana air minum.

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 88,75 persen. Jumlah penduduk Provinsi Bali sebanyak 4.214.956 orang. Dari jumlah tersebut, berakses air minum aman sebanyak 3.551.943 orang. Tingkat capaian dari indikator persentase cakupan layanan air minum aman di Provinsi Bali adalah sebesar 70,33 persen atau sebesar 79,25 dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 dengan indikator yang sama, dimana target sebesar 87,00 persen dan realisasi sebesar 85,00 persen sehingga capaiannya sebesar 97,70 persen, Dengan demikian capaian tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2019.

Gambar 2.56
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak di Kota Denpasar tahun 2016 - 2023



Sumber: Pemerintah Kota Denpasar, 2012-2022

Gambar diatas menunjukkan grafik persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum di Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga 2023. Angka pada grafik di atas dihitung berdasarkan persentase penduduk yang terakses dan menggunakan jaringan PDAM yang merupakan sumber air minum aman dan terlindungi. Pada tahun 2016, persentase penduduk dengan akses air minum layak tercatat sebesar 54,97 persen. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2017, naik menjadi 55,28 persen. Tren peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2018, dengan persentase mencapai 55,68 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam rentang waktu yang ditampilkan hingga saat itu.

Namun, pada tahun 2019, terjadi penurunan persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum, turun menjadi 54,98 persen. Meskipun demikian, penurunan ini hanya bersifat sementara, karena pada tahun 2020, persentase tersebut kembali meningkat signifikan menjadi 56,43 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam periode yang diamati, menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan akses terhadap air minum di Kota Denpasar. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 52,9, meskipun tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan kembali. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi setiap tahun, data menunjukkan tren umum peningkatan akses air minum layak bagi penduduk Kota Denpasar, mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki infrastruktur air dan meningkatkan distribusi air kepada masyarakat.

2.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah sebuah konsep yang penting dalam pembangunan kota modern. Hal ini melibatkan upaya untuk mengelola bagaimana penduduk bergerak dan tersebar di dalam suatu wilayah, serta bagaimana arah mobilitas mereka dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kota Denpasar, sebuah pusat pendidikan dan kebudayaan, tantangan signifikan terkait dengan persebaran dan mobilitas penduduk menjadi sangat relevan. Ketidaksetaraan antar wilayah menjadi salah satu penyebab utama, dimana pola, arah, dan tren mobilitas penduduk seringkali mengikuti pola pembangunan di masing-masing wilayah. Perkembangan pesat dalam sektor-

sektor seperti transportasi, industri, komunikasi, dan ekonomi di suatu wilayah akan langsung mempengaruhi tingkat mobilitas penduduk.

Faktor-faktor seperti adanya fasilitas transportasi yang memadai, pertumbuhan industri yang pesat, kemajuan dalam sektor komunikasi, dan perkembangan ekonomi yang signifikan, semuanya berkontribusi pada menciptakan lingkungan yang mendukung mobilitas yang lebih tinggi di antara penduduk. Dengan peningkatan aksesibilitas dan peluang pekerjaan, penduduk akan cenderung lebih aktif bergerak dan bermigrasi demi meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, ada pula faktor-faktor yang dapat memperlambat mobilitas penduduk. Salah satunya adalah kebijakan pembatasan yang diterapkan karena pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Kebijakan ini secara signifikan memperlambat laju mobilitas penduduk di Kota Denpasar, mengingat adanya pembatasan pergerakan dan aktivitas sosial.

2.4.1 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pemerataan penduduk. Tabel 2.23 memberikan ilustrasi tentang kepadatan penduduk di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2020. Data tersebut merefleksikan distribusi penduduk dalam suatu wilayah dan memberikan gambaran mengenai intensitas jumlah penduduk per unit luas wilayah, yang dapat menjadi indikator penting untuk memahami tekanan dan dinamika populasi di setiap daerah. Jumlah penduduk Denpasar yang cukup tinggi dan luas wilayah yang kecil menjadikan Denpasar sebagai daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Bali, yaitu tercatat sebesar 5.676,27 jiwa/km². Hal ini menggambarkan bahwa secara rata-rata pada setiap 1 km² terdapat sekitar 5 ribuan jiwa yang tinggal di Kota Denpasar.

Tabel 2.23
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali
tahun 2022 (jiwa/km²)

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
Jembrana	849,13	327,9	386
Tabanan	849,31	469,3	553
Badung	398,75	549,5	1.378
Gianyar	364,36	524,0	1.438
Klungkung	313,96	214,0	682
Bangli	526,76	267,1	507

Karangasem	839,32	511,3	609
Buleleng	1.322,68	825,1	624
Denpasar	125,87	726,8	5.774
BALI	5.590,15	4.415,1	790

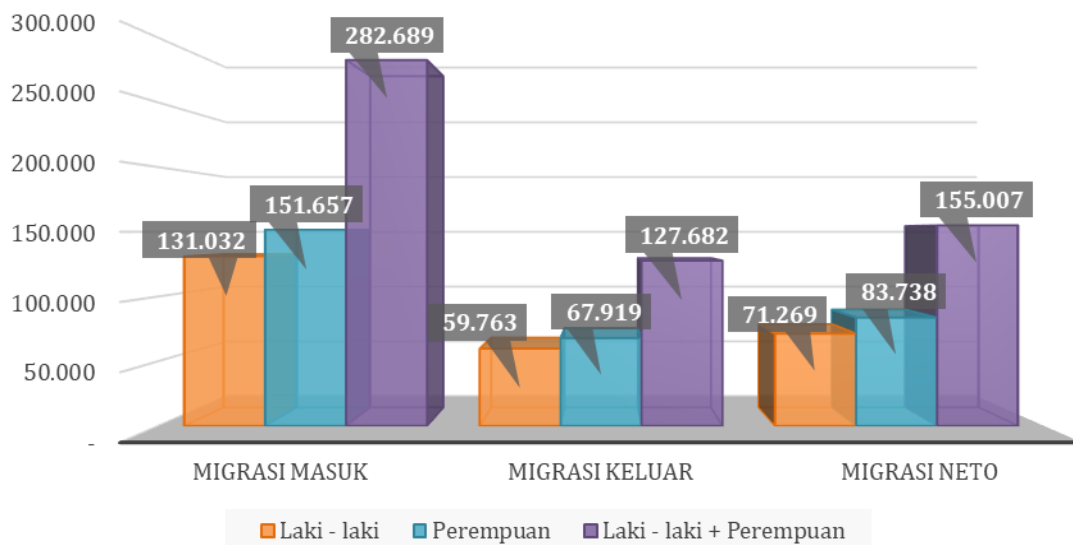
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022

2.4.2 Migrasi

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk merupakan aspek penting dalam studi tentang migrasi dan perkembangan regional. Migrasi adalah fenomena sosial di mana individu atau kelompok melakukan perpindahan tempat tinggal melintasi batas administrasi maupun geografis. Ini tidak hanya berarti perpindahan fisik, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan distribusi sumber daya dan peluang ekonomi antar-daerah. Dalam konteks penataan persebaran, penting untuk memahami pola migrasi penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Data mengenai migrasi masuk dan keluar memberikan gambaran tentang distribusi sumber daya dan peluang ekonomi antar-daerah. Misalnya, jika terjadi migrasi masuk yang signifikan ke suatu wilayah, hal itu mungkin menunjukkan adanya peluang ekonomi yang menarik di wilayah tersebut. Sebaliknya, migrasi keluar yang tinggi dari suatu wilayah dapat menandakan kurangnya peluang ekonomi atau masalah lain yang memengaruhi daya tarik wilayah tersebut bagi penduduknya. Pengarahan mobilitas penduduk melibatkan implementasi kebijakan atau program yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengatur arus migrasi penduduk. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan akses ke layanan dasar, penciptaan lapangan kerja, atau kebijakan pembangunan regional yang menyasar wilayah-wilayah dengan potensi ekonomi yang belum tergarap.

Gambar 2.57 menunjukkan migrasi ke Kota Denpasar pada tahun 2020 mencapai 282.689 orang, terdiri dari 131.032 laki-laki dan 151.657 perempuan. Jumlah migran ini mencerminkan dinamika perpindahan penduduk yang signifikan ke wilayah ini, memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan struktur populasi kota Denpasar. Pada Tahun 2020 tercatat angka migrasi keluar di Kota Denpasar sebesar 127.682 dengan laki-laki sejumlah 59.763 dan perempuan sebanyak 67.919.

Gambar 2.57
Migrasi Masuk, Migrasi Keluar dan Migrasi Netto Seumur Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020

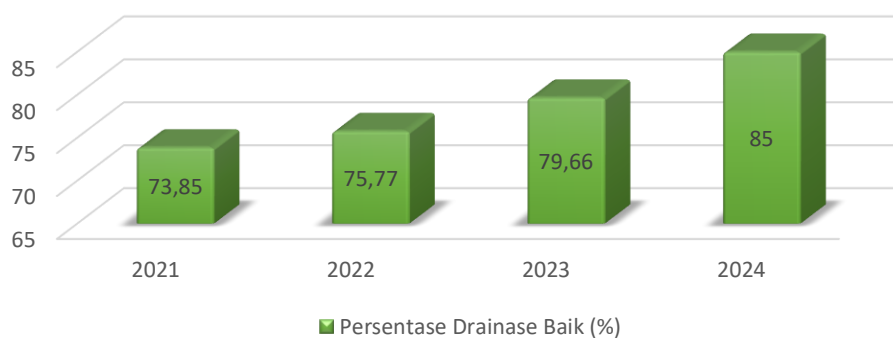


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020

2.4.3 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat

Kota besar seperti Kota Denpasar sangat membutuhkan sistem pembuangan seperti drainase yang baik. Hal ini karena, Kota Denpasar menghadapi masalah pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Kondisi ini jika tidak didukung oleh kepemilikan drainase yang baik akan menyebabkan masalah berupa banjir dan penyebaran penyakit. Banjir merupakan masalah yang besar jika musim penghujan datang, sehingga untuk menghadapi hal tersebut pengelolaan drainase menjadi sangat penting.

Gambar 2.58
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik di Kota Denpasar tahun 2021 - 2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, 2024

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat dapat dihitung dengan panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km) dibagi panjang seluruh drainase di daerah kabupaten/kota (Km). Gambar di atas

menunjukkan persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Denpasar pada tahun 2021 hingga 2024.

Dari tahun 2021 hingga 2024, persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Denpasar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, persentase tersebut berada di angka 73,85 persen. Angka ini mengalami peningkatan tiap tahun hingga pada tahun 2024 persentase drainase dalam kondisi baik mencapai 85%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan dan pemeliharaan drainase di Kota Denpasar berhasil menjaga dan bahkan meningkatkan kondisi drainase yang baik dari tahun ke tahun.

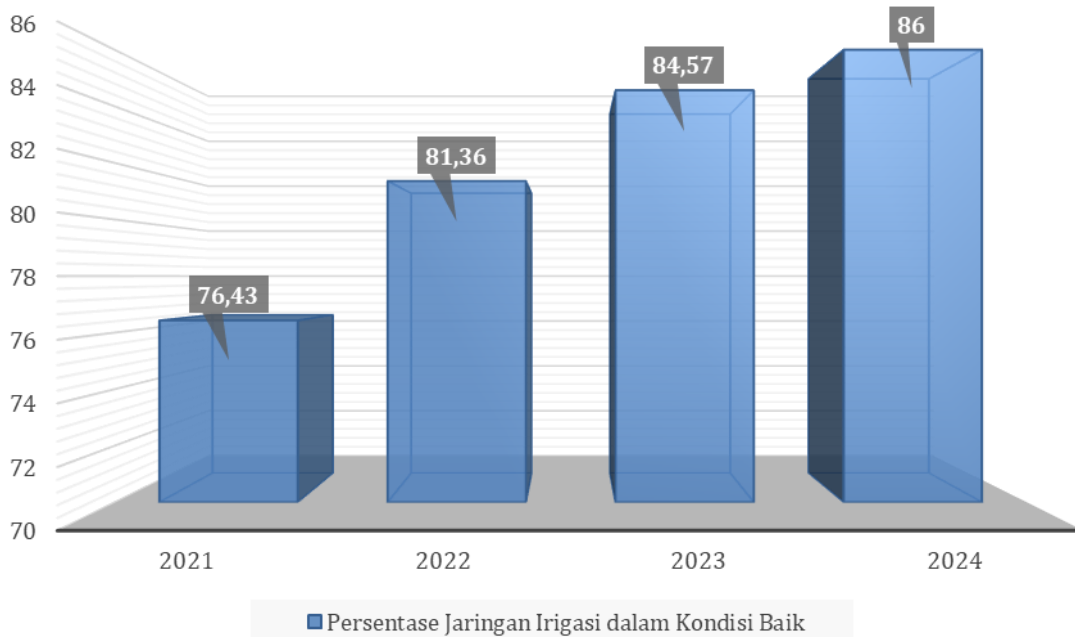
2.4.4 Sarana Prasarana Irigasi Kondisi Baik

Sarana prasarana irigasi yang berada dalam kondisi baik memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan pertanian. Sarana prasarana ini mencakup berbagai elemen, seperti saluran air, bendung, pompa, jaringan pipa, dan beragam struktur lainnya yang digunakan untuk mengalirkan air ke lahan pertanian secara efisien. Dalam konteks penelitian ilmiah, ketersediaan sarana prasarana irigasi yang baik akan menjadi faktor yang memengaruhi produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006, irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk mendukung pertanian dalam meningkatkan produksi pertanian guna ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya peran irigasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat petani. Di Kota Denpasar, sebagian wilayahnya merupakan lahan pertanian, sehingga pemerintah telah membangun jaringan irigasi untuk memastikan pengairan yang cukup pada lahan pertanian tersebut. Keberadaan infrastruktur irigasi yang baik akan membantu meningkatkan hasil panen dan mengurangi risiko kekurangan air pada lahan pertanian, sehingga berdampak pada peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Gambar di bawah menunjukkan pada tahun 2021, persentase jaringan irigasi yang berada dalam kondisi baik di Kota Denpasar adalah 76,43 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, dan terus meningkat menjadi 86 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam

pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi di Kota Denpasar, sehingga mayoritas jaringan irigasi tetap dalam kondisi baik.

Gambar 2.58
Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Denpasar
Tahun 2021 – 2024



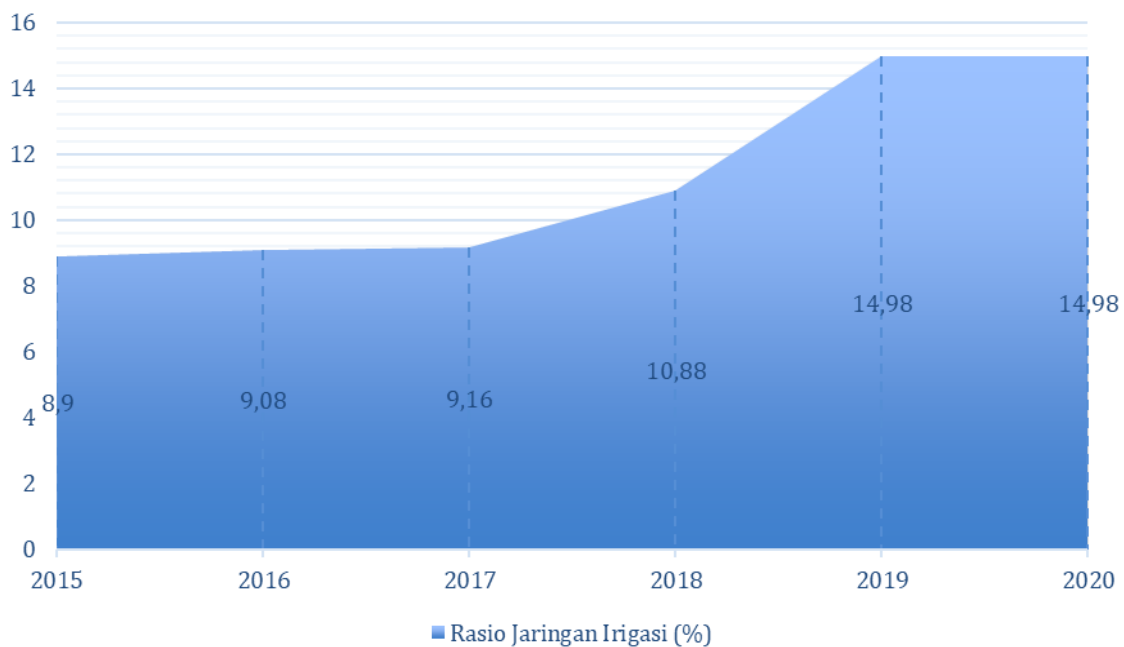
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, 2025

Irigasi juga harus dianalisis dari rasio jaringan irigasi. Rasio jaringan irigasi dihitung berdasarkan panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budidaya pertanian. Hal ini juga harus dihitung agar kita mengetahui proporsi yang tepat. Keberadaan jaringan irigasi dapat membantu meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Mulai tahun 2015, rasio jaringan irigasi di Kota Denpasar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2015, rasio tersebut adalah 8,90 persen. Angka ini mengalami kenaikan kecil pada tahun 2016 menjadi 9,08 persen dan sedikit lagi pada tahun 2017 menjadi 9,16 persen. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2018, di mana rasio melonjak ke 10,88 persen. Lonjakan ini diikuti oleh peningkatan lebih lanjut pada tahun 2019, dengan rasio jaringan irigasi mencapai 14,98 persen, dan angka ini bertahan hingga tahun 2020.

Kenaikan ini mencerminkan peningkatan yang signifikan dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi di Kota Denpasar selama periode ini. Ini mungkin disebabkan oleh investasi yang lebih besar dalam proyek irigasi, perbaikan sistem yang ada, atau kebijakan yang lebih fokus pada pengelolaan sumber daya air untuk

mendukung pertanian dan kebutuhan lainnya. Keberadaan jaringan irigasi dapat membantu meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

Gambar 2.59
Rasio Jaringan Irigasi di Kota Denpasar Tahun 2015 – 2020 (%)



Sumber: Pemerintah Kota Denpasar, 2012-2022

2.4.5 Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap

Jalan merupakan sebuah infrastruktur penting sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan jalan menjadi sangat penting dalam memberikan akses dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dan sosial. Kualitas jalan yang baik akan memberikan kenaikan inklusifitas kepada seluruh penduduk di Kota Denpasar. Tingkat kualitas kondisi jalan menjadi indikator yang menunjukkan kesiapan sarana prasarana mobilitas dan aksesibilitas masyarakat. Menurut Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga, kualitas kondisi jalan dapat diklasifikasikan menjadi:

- Jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata dan tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan.
- Jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan.
- Jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan jalan kurang dari 20 persen dari luas jalan yang ditinjau.

d) Jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak dalam ukuran besar, dan terkelupas cukup dalam, disertai dengan kerusakan lapis fondasi seperti amblas, sungkur, dan sebagainya.

Konsep tingkat kemandapan jalan yang digunakan oleh Ditjen Bina Marga diukur dengan parameter sebagai berikut:

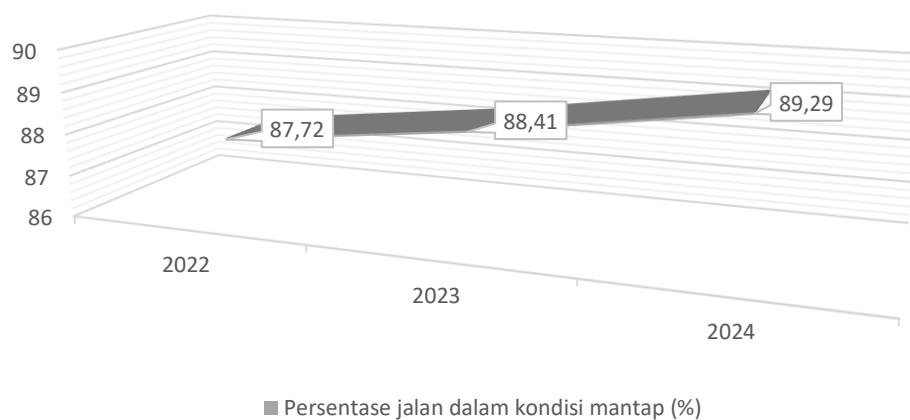
- a) Parameter kerataan jalan atau *International Roughness Index* (ISI)
- b) Parameter lebar jalan dan Rasion Volume Kapasitas (VCR)
- c) Parameter lebar jalan dan volume Lalu Lintas Harian (LHR)

Jalan dalam kondisi mantap merupakan proporsi dari panjang jalan yang memenuhi kategori kondisi baik dan kondisi sedang terhadap total panjang jalan. Jalan yang memiliki kondisi mantap maka secara fungsional mampu melayani lalu lintas dengan aman, nyaman dan lancar sesuai standar teknis. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, total panjang ruas jalan di Kota Denpasar pada tahun 2023 adalah 544,64 km, yang terdiri dari 49,88 km jalan negara, 44,63 km jalan provinssi dan 450,13 km jalan kota.

Berdasarkan Gambar 2.60, persentase jaringan jalan di Kota Denpasar dalam kondisi mantap mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, 87,72% jalan di Kota Denpasar dalam kondisi mantap, dan pada 2024 mencapai angka 89,29%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar ruas jalan di Kota Denpasar sudah dalam kondisi layak dan aman untuk menjamin keselamatan serta kelancaran mobilitas penduduk Kota Denpasar.

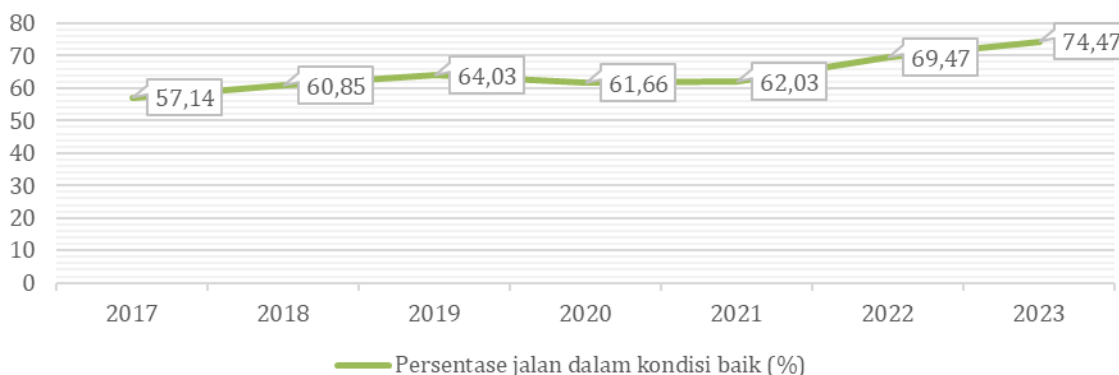
Gambar 2.60

Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap di Kota Denpasar Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, 2025

Gambar 2.61
Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2017 – 2023 (%)



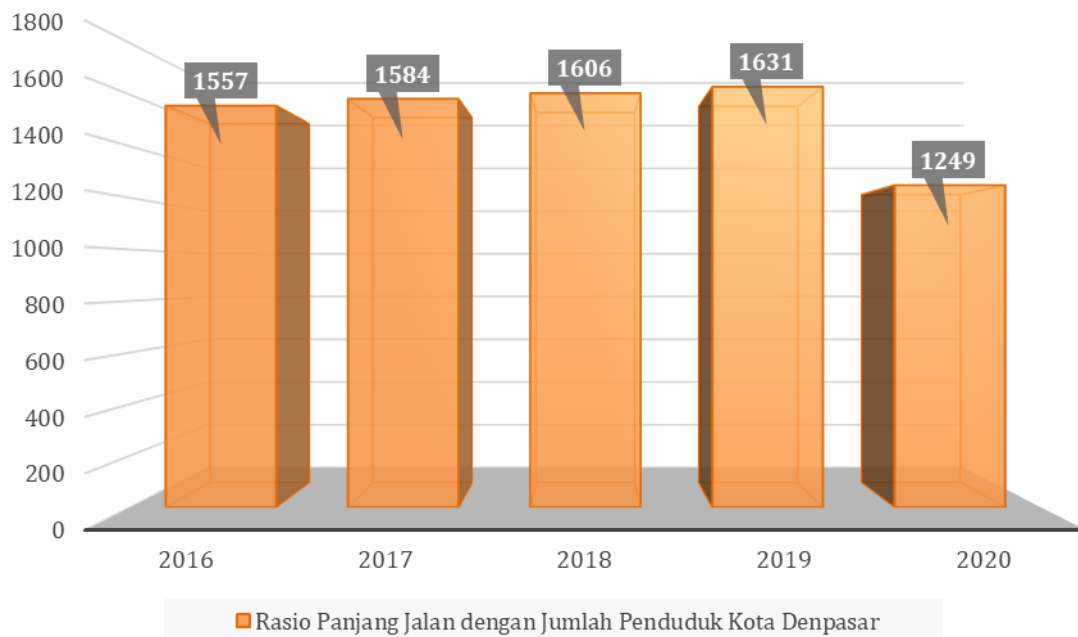
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, 2024

Selanjutnya, Gambar 2.61 menunjukkan fluktuasi persentase jaringan jalan di Kota Denpasar dalam kondisi baik. Sama halnya dengan kondisi pada gambar 2.60, persentase jaringan jalan dalam kondisi baik yang disajikan pada gambar di bawah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase setiap tahunnya. Data ini memperkuat bahwa peningkatan persentase jalan kondisi mantap di Kota Denpasar juga diikuti dengan peningkatan persentase jaringan jalan dengan kondisi baik.

Kemampuan daya tampung lalu lintas penduduk harus mempertimbangkan kondisi pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar. Perbandingan panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Denpasar akan menjadi sebuah acuan penting untuk memastikan panjang jalan dapat memfasilitasi seluruh kegiatan perjalanan dan mengakomodasi kegiatan perekonomian dan sosial kemasyarakatan.

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menunjukkan nilai perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah penduduk. Semakin besar kapasitas jalan, maka semakin tinggi jumlah pergerakan masyarakat yang dapat dilayani. Rasio ini menunjukkan perbandingan 1 km jalan berbanding dengan sejumlah penduduk. Nilai rasio di Kota Denpasar mengalami penurunan pada tahun 2020. Terdapat tren penurunan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Denpasar. Hal ini kemungkinan terjadi akibat terjadi kenaikan penduduk, sehingga rasio ini menjadi menurun dibandingkan dari tahun sebelumnya.

Gambar 2.62
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Denpasar 2016 - 2020



Sumber: Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Data pada gambar 2.62 menunjukkan, Pada tahun 2016, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Denpasar tercatat sebesar 1.557, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh pembangunan infrastruktur jalan baru atau peningkatan pemeliharaan jalan yang berhasil mengakomodasi populasi yang bertambah. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2017 dengan rasio mencapai 1.584, mencerminkan keberlanjutan dalam pengembangan dan perbaikan jaringan jalan. Pada tahun 2018, rasio meningkat lagi menjadi 1.606, menunjukkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperbaiki dan memperluas jaringan jalan untuk mengikuti pertumbuhan penduduk. Puncaknya, pada tahun 2019, rasio ini mencapai 1.631, mencerminkan upaya signifikan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan drastis dalam rasio ini menjadi 1.249. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang lebih cepat daripada pembangunan jalan, kerusakan infrastruktur jalan, atau alokasi anggaran yang berkurang untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan. Pandemi COVID-19 juga berpengaruh terhadap prioritas dan alokasi sumber daya pemerintah, sehingga mempengaruhi kondisi infrastruktur jalan.

2.4.6 Permukiman Layak Huni

Perumahan layak huni merupakan sebuah kebutuhan primer di Kota Besar seperti Kota Denpasar. Hal ini menjadi penting untuk memastikan seluruh penduduk mendapatkan dan memiliki rumah layak huni. Rumah layak huni juga menjadi kunci penting kesehatan dan kenyamanan hidup di Kota Denpasar. Sejak tahun 2019, Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan rumah tangga yang memiliki rasio rumah/hunian layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- a) Kecukupan luas tempat tinggal; minimal 7,2 m² per orang (*sufficient living space*)
- b) Memiliki akses terhadap air minum layak
- c) Memiliki akses terhadap sanitasi layak
- d) Ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/seng/kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok/pleteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/ viny/ karpet/ ubin/ tegel/ teraso/ kayu/ papan/ semen/ bata merah.

Tabel 2.24
Rasio Permukiman Layak Huni tahun 2019 – 2022 (%)

Tahun	Luas Permukiman Layak Huni	Luas Wilayah Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni
2017	5.720,64	5.904,69	0,9688
2018	5.847,22	5.904,69	0,9903
2019	5.827,52	5.904,69	0,9869
2020	5.854,17	5.904,69	0,9914
2021	6.819,31	6.866,05	0,9932
2022	6.820,35	6.866,05	0,9933
2023	6.841,13	6.866,05	0,9964
2024	6.842,93	6.866,05	0,9966

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

Tabel 2.24 menunjukkan bahwa rasio permukiman layak huni di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, rasio permukiman layak huni tercatat sebesar 99,14 persen. Rasio ini meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 99,94 persen, dan tetap stabil pada angka yang sama di tahun 2021. Pada tahun 2022, rasio ini sedikit meningkat lagi menjadi 99,95 persen. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dari pemerintah dan pihak terkait dalam

meningkatkan kualitas permukiman di Kota Denpasar. Langkah-langkah yang mungkin telah diambil termasuk peningkatan infrastruktur dasar, renovasi dan pembangunan rumah, serta peningkatan akses terhadap fasilitas umum seperti air bersih dan sanitasi. Dengan rasio permukiman layak huni yang mendekati 100 persen, ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Denpasar tinggal di lingkungan yang memenuhi standar kelayakan huni, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Tingkat Rasio Permukiman Layak Huni (RPLH) Kota Denpasar periode 2017–2024 menunjukkan pola yang konsisten tinggi, dengan nilai berkisar antara 0,9688 hingga 0,9966. Indikator ini menggambarkan perbandingan antara luas permukiman layak huni dan total luas wilayah permukiman, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin baiknya kondisi hunian yang memenuhi standar teknis, lingkungan, dan infrastruktur dasar (BPS Kota Denpasar, 2024).

Pada tahun 2017, luas permukiman layak huni tercatat 5.720,64 hektare dari total 5.904,69 hektare, menghasilkan rasio 0,9688. Angka ini meningkat menjadi 0,9903 pada 2018 seiring bertambahnya luas permukiman layak huni menjadi 5.847,22 hektare. Namun, pada 2019 terjadi sedikit penurunan ke 0,9869 yang kemungkinan merefleksikan penurunan kualitas sebagian wilayah permukiman akibat tekanan laju urbanisasi atau degradasi lingkungan. Peningkatan kembali terlihat pada 2020 menjadi 0,9914, meskipun pada saat itu dunia dilanda pandemi COVID-19. Kondisi ini menarik karena di banyak kota global, pandemi menyebabkan tertundanya program infrastruktur dan penurunan kualitas pelayanan publik (World Bank, 2021). Fakta bahwa Denpasar tetap mengalami kenaikan mengindikasikan adanya ketahanan tata kelola kota, terutama dalam program peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Salah satu faktor pendukungnya adalah keberlanjutan kebijakan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang sejak 2016 fokus mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman (Kementerian PUPR, 2023). Tahun 2021 menjadi tonggak penting dengan bertambahnya luas wilayah permukiman dari 5.904,69 hektare menjadi 6.866,05 hektare. Perubahan ini kemungkinan terkait dengan konversi lahan non-permukiman menjadi permukiman atau pembaruan data spasial wilayah administrasi kota. Luas permukiman layak huni pada tahun tersebut mencapai 6.819,31 hektare dengan rasio 0,9932, menandakan bahwa ekspansi wilayah diikuti oleh upaya

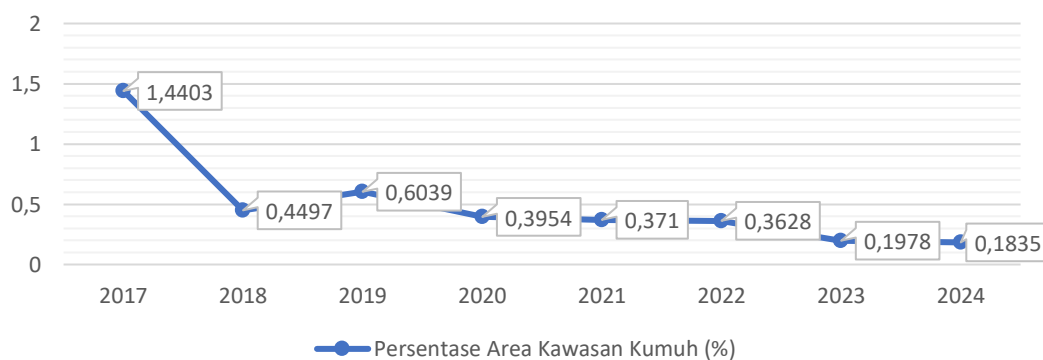
mempertahankan kelayakan hunian pada standar tinggi. Periode 2022–2024 mencatat stabilitas yang luar biasa dengan kisaran rasio 0,9933–0,9966. Nilai tertinggi terjadi pada 2023 (0,9964) dan 2024 (0,9966), menegaskan bahwa hampir seluruh permukiman di Denpasar berada pada kategori layak huni. Menurut kerangka Urban Livability yang dikemukakan Pacione (2003), kualitas lingkungan perkotaan — termasuk perumahan layak huni, akses pelayanan dasar, dan infrastruktur yang memadai — menjadi elemen kunci kesejahteraan penduduk kota. Dengan rasio mendekati 1, Denpasar menunjukkan kinerja tata kelola kota yang selaras dengan prinsip ini.

Keberhasilan ini juga sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya poin 11.1 yang menekankan penyediaan perumahan layak, aman, dan terjangkau bagi semua warga pada tahun 2030 (United Nations, 2015). Namun, pencapaian agregat yang tinggi tidak serta-merta menjamin pemerataan kualitas di seluruh wilayah kota. Masih terdapat potensi ketimpangan, di mana kantong-kantong wilayah dengan kualitas hunian rendah tertutupi oleh angka rata-rata yang tinggi. Oleh sebab itu, tantangan ke depan bagi Denpasar adalah memastikan pemerataan kualitas permukiman melalui pengendalian tata ruang, perlindungan lingkungan, dan penguatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, data RPLH Kota Denpasar tidak hanya mencerminkan capaian teknis pembangunan permukiman, tetapi juga menjadi indikator strategis bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan. Konsistensi angka yang tinggi, meski di tengah tekanan global seperti pandemi, menjadi bukti bahwa integrasi kebijakan perumahan, tata ruang, dan perlindungan lingkungan merupakan kunci keberhasilan menciptakan kota yang layak huni secara merata dan berkelanjutan.

Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Denpasar selama periode 2017–2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan, mencerminkan keberhasilan program penataan kawasan perkotaan. Indikator ini dihitung dari perbandingan luas permukiman kumuh dengan luas wilayah kota, dan menjadi parameter penting dalam mengukur kualitas lingkungan perkotaan (BPS Kota Denpasar, 2024). Pada 2017, luas permukiman kumuh tercatat 184,05 hektare, setara dengan 1,4403% dari luas wilayah kota. Angka ini menandakan masih cukup luasnya kawasan yang masuk kategori kumuh pada awal periode pengamatan. Tahun 2018, terjadi penurunan drastis menjadi 57,47 hektare atau 0,4497% dari luas wilayah kota. Penurunan tajam ini dapat dikaitkan dengan intervensi besar-besaran program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dan penataan

kawasan berbasis community-driven development yang banyak diterapkan di Bali (Kementerian PUPR, 2023). Namun, pada 2019 luas permukiman kumuh kembali naik menjadi 77,17 hektare atau 0,6039%. Kenaikan ini kemungkinan disebabkan oleh faktor urbanisasi cepat dan konversi lahan tanpa pengendalian tata ruang yang memadai. Menurut UN-Habitat (2020), fenomena ini umum terjadi di kota-kota berkembang, di mana pertumbuhan penduduk perkotaan melampaui kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur permukiman yang memadai. Memasuki 2020, luas permukiman kumuh menurun lagi menjadi 50,52 hektare atau 0,3954%, meskipun saat itu Indonesia dan dunia tengah menghadapi pandemi COVID-19. Justru, beberapa kota memanfaatkan masa perlambatan aktivitas ekonomi untuk melakukan revitalisasi kawasan padat penduduk. Pada 2021, luas permukiman kumuh kembali menyusut menjadi 46,74 hektare atau 0,3710%, dan stabil pada 2022 sebesar 45,70 hektare atau 0,3628%. Periode 2023–2024 menjadi puncak pencapaian, di mana luas permukiman kumuh turun signifikan menjadi 24,92 hektare (0,1978%) dan kemudian 23,12 hektare (0,1835%) pada 2024. Angka ini mendekati kondisi slum free city, atau kota dengan lingkungan permukiman kumuh di bawah 0,2% dari luas wilayah.

Gambar 2.63
Percentase Area Kawasan Kumuh di Kota Denpasar tahun 2016 - 2020



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Denpasar, 2021

Secara teoritis, pencapaian ini selaras dengan konsep *Urban Livability* yang dikemukakan Pacione (2003), di mana pengurangan kawasan kumuh merupakan salah satu pilar peningkatan kualitas hidup di kota. Selain itu, keberhasilan Denpasar sejalan dengan target SDG 11.1 yang menekankan pentingnya akses menyeluruh terhadap perumahan yang layak dan peningkatan kualitas permukiman kumuh pada 2030 (*United Nations*, 2015). Fenomena ini juga sejalan dengan tren global yang menunjukkan bahwa

kota-kota dengan tata kelola lingkungan yang baik mampu menurunkan kawasan kumuh secara signifikan melalui kombinasi kebijakan tata ruang, investasi infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat (*World Bank, 2021*). Dalam konteks Indonesia, capaian ini menunjukkan bahwa Denpasar berhasil memadukan intervensi pemerintah pusat melalui program seperti Kotaku dengan strategi lokal berbasis partisipasi warga, yang efektif dalam mempercepat rehabilitasi lingkungan kumuh menjadi kawasan layak huni. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah menjaga keberlanjutan capaian ini agar tidak terjadi rebound akibat tekanan urbanisasi, migrasi masuk, atau keterbatasan perawatan infrastruktur. Penguatan regulasi tata ruang, pemberdayaan masyarakat lokal, dan monitoring berkala kualitas lingkungan menjadi kunci dalam mempertahankan Denpasar.

2.5 Penataan Administrasi Kependudukan

2.5.1 Penataan dan Pengelolaan Database Kependudukan

Penataan dan pengelolaan database kependudukan yang akurat dan terintegrasi merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan penegakan kebijakan pemerintah. Database kependudukan yang baik memungkinkan pemerintah untuk memahami profil demografis masyarakat secara menyeluruh, memantau dinamika pertumbuhan penduduk, serta menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pada bab ini, akan dibahas pentingnya penataan database kependudukan, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya, serta strategi kebijakan untuk memperbaiki sistem tersebut. Salah satu elemen kunci dari penataan database kependudukan adalah akurasi data. Untuk memastikan ketepatan data, pemerintah perlu melakukan pendataan berkala melalui sensus penduduk, registrasi kelahiran dan kematian, serta pencatatan perpindahan penduduk. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti ketidakpatuhan masyarakat terhadap pelaporan peristiwa penting (kelahiran, kematian, pindah tempat tinggal), kurangnya infrastruktur teknologi informasi, serta adanya data ganda atau ketidakcocokan antar instansi terkait. Hal ini mengakibatkan potensi ketidakakuratan dalam data yang tercatat, yang pada akhirnya mempengaruhi perencanaan kebijakan publik.

Integrasi antar instansi dalam pengelolaan database kependudukan juga menjadi tantangan signifikan. Berbagai lembaga pemerintahan, seperti Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kementerian Sosial, serta lembaga terkait lainnya, sering kali memiliki sistem dan prosedur yang berbeda dalam pengelolaan data. Hal ini menghambat upaya sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang lebih kuat antar lembaga untuk menciptakan satu sistem database kependudukan yang terintegrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, penerapan teknologi digital dalam pengelolaan data sangatlah krusial. Implementasi sistem informasi berbasis teknologi, seperti e-KTP dan basis data terpusat, harus diperkuat dan dipelihara secara berkala. Dengan adanya teknologi tersebut, proses pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, keamanan data juga harus menjadi prioritas utama, mengingat pentingnya melindungi informasi pribadi masyarakat dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan data.

Dengan penataan dan pengelolaan database kependudukan yang baik, pemerintah akan mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mengelola sumber daya secara lebih efisien. Selain itu, sistem database yang terintegrasi akan mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sehingga memberikan dampak positif pada pembangunan jangka panjang.

2.5.2 Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan yang efektif dan efisien merupakan aspek krusial dalam upaya pemerintah untuk memastikan kepastian identitas dan hak-hak setiap warga negara. Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian adalah dasar administrasi kependudukan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap layanan publik, jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dalam bab ini, akan dibahas pentingnya penataan dokumen kependudukan, tantangan yang dihadapi dalam proses penerbitannya, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan sistem ini. Penataan dokumen kependudukan yang baik dimulai dari proses pencatatan yang akurat dan tepat waktu. Setiap peristiwa penting, seperti kelahiran, pernikahan, perceraian, kematian, serta perubahan alamat, harus tercatat secara resmi oleh instansi terkait. Namun, di banyak daerah, masih terdapat kendala dalam memastikan seluruh penduduk terdaftar dan memiliki dokumen kependudukan

yang sah. Beberapa tantangan utama meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan sipil, sulitnya akses ke layanan administrasi di daerah terpencil, serta minimnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung proses pencatatan secara digital. Selain itu, masalah kecepatan dan efisiensi dalam penerbitan dokumen juga menjadi perhatian. Warga sering kali menghadapi birokrasi yang rumit dan waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan penduduk di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem pelayanan administrasi kependudukan untuk mempercepat proses penerbitan dan meminimalkan hambatan birokrasi.

Dengan reformasi dalam penataan dan penerbitan dokumen kependudukan, pemerintah dapat memastikan seluruh warga negara memiliki identitas hukum yang jelas, yang pada gilirannya akan mempermudah akses mereka terhadap berbagai hak dan layanan publik. Sistem ini tidak hanya mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan menyediakan administrasi yang inklusif dan terjangkau. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan data dasar kependudukan dengan administrasi kependudukan yang berkelanjutan antara lain sebagai berikut:

1) Pendaftaran Daring Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (TARING DUKCAPIL)

Inovasi Taring Dukcapil merupakan Pelayanan semua jenis layanan Administrasi Kependudukan melalui daring/online. TARING DUKCAPIL (Pendaftaran Daring Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) ini diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 8 Juni 2020 melalui alamat website. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan kependudukan yang cepat, efisien, dan mudah diakses, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas dan interaksi fisik. Dengan Taring Dukcapil, masyarakat Kota Denpasar tidak lagi harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus berbagai keperluan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan berbagai layanan lainnya. Cukup dengan

mengakses situs web yang disediakan, semua proses administrasi dapat dilakukan secara online, mulai dari pendaftaran hingga penerimaan dokumen. Layanan ini dirancang untuk mempermudah warga dalam mendapatkan layanan administrasi kependudukan dengan cara yang lebih praktis dan modern. Selain mengurangi antrean dan waktu tunggu di kantor layanan, Taring Dukcapil juga diharapkan dapat meningkatkan akurasi data kependudukan karena semua informasi diinput langsung oleh pemohon. Keamanan data juga menjadi prioritas utama dengan penggunaan sistem yang dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan untuk melindungi data pribadi warga.

Peluncuran Taring Dukcapil juga didukung oleh berbagai fasilitas pendukung, seperti petunjuk penggunaan yang mudah dipahami, layanan bantuan melalui call center, dan tutorial online yang membantu warga memahami proses pendaftaran dan pengurusan dokumen. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan.

Taring Dukcapil merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya modernisasi layanan publik di Kota Denpasar, menjawab tantangan zaman dengan solusi yang inovatif dan berbasis teknologi. Inovasi Taring Dukcapil merupakan Pelayanan semua jenis layanan Administrasi Kependudukan melalui daring/online. **TARING DUKCAPIL** (Pendaftaran Daring Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) ini diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 8 Juni 2020 melalui alamat website :

<https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id>

Selain dimanfaatkan oleh warga Denpasar untuk mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, **TARING DUKCAPIL** juga dimanfaatkan oleh WNA dan penduduk luar Kota Denpasar untuk perekaman dan pencetakan KTP-el. Sejak tanggal 7 November 2022 pengajuan permohonan melalui **TARING DUKCAPIL** dapat dilakukan 24 jam, pemohon mendapatkan informasi kapan berkas permohonan mereka akan diverifikasi oleh petugas. Kuota permohonan yang diverifikasi oleh petugas, yaitu :

- Senin s.d Kamis adalah 500 permohonan/hari,
- Jumat adalah 300 permohonan/hari.

Apabila notifikasi permohonan sudah selesai, pemohon dapat memilih salah satu opsi pengambilan, yaitu:

- Mencetak secara Mandiri di mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)
- Mengambil ke kantor
- Memanfaatkan jasa pengantaran Gojek/Grab

Dengan penerapan sistem daring sepenuhnya, maka masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil.

2) SAPA GOJEK & SAPA GRAB (Siap Antar Pakai Gojek/Grab)

Inovasi SAPA GOJEK (Siap Antar Pakai Gojek) merupakan kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek). Sementara itu, SAPA GRAB (Siap Antar Pakai Grab) adalah kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan PT. Grab Teknologi Indonesia (Grab). Kedua inovasi ini menawarkan satu tambahan pilihan dalam penyelesaian dokumen kependudukan, yaitu pengantaran dokumen langsung ke alamat masyarakat.

Inovasi SAPA GOJEK diluncurkan pada tanggal 1 September 2020, sementara SAPA GRAB diperkenalkan pada tanggal 30 Desember 2020. Dengan hadirnya layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengambil dokumen yang sudah jadi. Proses ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga warga, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam meminimalisir kerumunan dan interaksi langsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Melalui kerjasama ini, Gojek dan Grab menyediakan layanan pengantaran yang dapat diandalkan dan efisien, memastikan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian sampai ke tangan masyarakat dengan aman dan tepat waktu. Warga cukup mengajukan permohonan pengantaran melalui aplikasi atau website yang tersedia, dan dokumen yang sudah selesai diproses oleh Disdukcapil akan diantarkan langsung oleh kurir Gojek atau Grab ke alamat yang tertera. Implementasi layanan SAPA GOJEK dan SAPA GRAB juga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih modern dan adaptif terhadap

kebutuhan zaman. Inovasi ini menambah daftar solusi digital yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, mengukuhkan komitmen mereka untuk memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan ramah pengguna.

Inovasi SAPA GOJEK dan SAPA GRAB merupakan contoh nyata bagaimana teknologi dan kerjasama dengan sektor swasta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga mendukung visi Kota Denpasar menuju kota yang lebih cerdas dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

3) Inovasi Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran melalui Fasilitas Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Penerbitan Akta Kelahiran 3 hari selesai)

Sebelum adanya inovasi ini pelayanan akta kelahiran sering dikeluhkan masyarakat karena pelayanan yang relatif lama, berbelit-belit dan mahal (menggunakan jasa). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali menindaklanjuti persoalan tersebut dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk memberikan pelayanan penerbitan akta kelahiran untuk bayi yang baru lahir di Puskesmas dan RSUD di Kota Denpasar. Permohonan akta kelahiran oleh petugas kesehatan melalui email. Dalam jangka waktu 3 hari akta kelahiran sudah selesai.

4) Pelayanan Langsung Jadi (PELANGI)

Inovasi PELANGI (Pelayanan Langsung Jadi) merupakan salah satu terobosan pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui layanan keliling atau layanan jemput bola. Melalui inovasi ini, masyarakat Kota Denpasar dapat memperoleh berbagai dokumen kependudukan dengan cepat, langsung jadi, dan langsung diberikan di tempat. Pelayanan PELANGI dirancang untuk menjangkau warga yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses kantor Disdukcapil, seperti warga lanjut usia, penyandang disabilitas, atau warga yang tinggal di daerah terpencil. Tim PELANGI akan mendatangi lokasi-lokasi strategis seperti balai banjar, sekolah, puskesmas, atau tempat-tempat umum lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dengan hadirnya PELANGI, warga tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan biaya untuk datang ke kantor Disdukcapil. Proses penerbitan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian dapat diselesaikan di lokasi layanan PELANGI, sehingga warga bisa langsung menerima dokumen yang dibutuhkan tanpa harus menunggu lama. Layanan ini juga dilengkapi dengan peralatan canggih dan tenaga profesional yang siap melayani masyarakat dengan cepat dan akurat. Selain itu, program PELANGI juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid. Tim PELANGI juga sering memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya administrasi kependudukan dan manfaat memiliki dokumen resmi.

Dengan adanya inovasi PELANGI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Inovasi ini tidak hanya mempermudah proses administrasi kependudukan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. PELANGI adalah langkah maju dalam upaya modernisasi layanan publik di Kota Denpasar. Melalui pendekatan jemput bola dan pelayanan langsung jadi, PELANGI mampu menghadirkan solusi yang praktis dan efektif bagi warga dalam mengurus administrasi kependudukan, menjadikan pelayanan publik semakin dekat dan mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pelaksanaan **PELANGI** dilakukan terhadap penduduk yang memiliki kendala:

- Disabilitas;
- Sakit;
- Berada di dalam LP; dan
- Terkendala untuk hadir ke tempat layanan adminduk.

PELANGI dilaksanakan di:

- Desa/kelurahan;
- Rumah penduduk;
- Rumah sakit; dan
- Lembaga pemasyarakatan.

Inovasi ini diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2021.

5) Sistem Cetak Dokumen Administrasi Kependudukan di Desa dan Kelurahan (SI CANDRA)

Inovasi SI CANDRA merupakan suatu inovasi pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk warga Kota Denpasar yang dilaksanakan di desa dan kelurahan. SI CANDRA adalah singkatan dari Sistem Cetak Mandiri Dokumen Administrasi Kependudukan, yang mencerminkan upaya nyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Program SI CANDRA hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam mencetak dokumen kependudukan secara mandiri, baik karena tidak memiliki printer maupun karena lokasi tempat tinggal yang jauh dari kantor Disdukcapil. Melalui program ini, masyarakat dapat mencetak dokumen administrasi kependudukan seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian di kantor desa atau kelurahan terdekat. SI CANDRA memberikan satu tambahan opsi penyelesaian dokumen yang sebelumnya diajukan melalui TARING DUKCAPIL, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen yang diperlukan tanpa harus datang ke kantor pusat Disdukcapil. Inovasi ini dirancang untuk mempercepat proses penerbitan dokumen dan mengurangi beban antrean di kantor Disdukcapil.

Keunggulan SI CANDRA adalah kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Warga yang tidak memiliki fasilitas printer di rumah atau yang tinggal jauh dari pusat kota kini dapat memanfaatkan fasilitas ini di desa atau kelurahan mereka. Dengan begitu, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh warga untuk mengurus dokumen dapat diminimalisir. Selain itu, penerapan SI CANDRA juga didukung oleh perangkat teknologi yang memadai serta tenaga operator yang terlatih, memastikan bahwa setiap dokumen yang dicetak memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Program ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang menjamin kerahasiaan data pribadi masyarakat.

Inovasi SI CANDRA adalah langkah progresif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan adanya program ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.

6) Pencatatan Perkawinan Langsung Jadi (SAMSKARA GRAHASTA)

Inovasi SAMSKARA GRAHASTA merupakan salah satu terobosan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diperkenalkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Inovasi ini berfokus pada pencatatan perkawinan langsung jadi, yang diterapkan dalam rangka percepatan peningkatan pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya kepemilikan Akta Perkawinan bagi warga Kota Denpasar. Melalui SAMSKARA GRAHASTA, proses permohonan akta perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan perkawinan. Artinya, pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dapat langsung mendapatkan akta perkawinan, kartu keluarga baru, dan KTP-el yang diperbarui di lokasi upacara perkawinan. Hal ini tentu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pasangan pengantin, karena mereka tidak perlu mengurus dokumen tersebut di kemudian hari atau harus mendatangi kantor Disdukcapil.

Inovasi ini diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 2 Januari 2023. Sejak diluncurkannya, SAMSKARA GRAHASTA mendapat respons positif dari masyarakat karena mampu memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan demikian, pasangan pengantin tidak hanya merayakan hari bahagia mereka, tetapi juga langsung mendapatkan dokumen kependudukan yang sah dan diakui oleh negara. Proses pelaksanaan SAMSKARA GRAHASTA melibatkan koordinasi yang baik antara petugas Disdukcapil dengan pihak yang menyelenggarakan upacara perkawinan. Petugas akan hadir di lokasi upacara untuk melakukan verifikasi data dan mencetak dokumen yang diperlukan. Dengan dukungan teknologi modern dan sistem yang terintegrasi, seluruh proses dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat.

Inovasi SAMSKARA GRAHASTA merupakan wujud komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan dekat dengan masyarakat. Inovasi ini juga menjadi contoh nyata bagaimana pelayanan administrasi kependudukan dapat disesuaikan dengan

kebutuhan dan situasi warga, sehingga tercipta layanan yang tidak hanya efektif, tetapi juga memudahkan dan membahagiakan. SAMSKARA GRAHASTA adalah langkah maju dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik di Kota Denpasar. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan setiap pasangan pengantin dapat langsung memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah, sehingga tidak ada lagi keterlambatan atau kesulitan dalam mendapatkan akta perkawinan, kartu keluarga, dan KTP-el.

2.5.3 Perekaman Dokumen KTP Elektronik

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan dokumen identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah. KTP-el berfungsi sebagai alat identifikasi yang sah dan diakui secara nasional, memuat data biometrik seperti sidik jari dan foto digital, yang bertujuan untuk mencegah adanya duplikasi atau pemalsuan data. Kepemilikan KTP-el tidak hanya penting sebagai bukti identitas, tetapi juga menjadi syarat dalam berbagai keperluan administratif, seperti pembuatan paspor, akses layanan kesehatan, perbankan, dan kepemilikan hak pilih dalam pemilu. Cakupann penduduk yang memiliki dokumen KTP-el dapat dicerminkan melalui data persentase penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el. Persentase perekaman KTP-el dapat di Kota Denpasar menunjukkan persentase yang baik selama lima tahun terakhir, sebagaimana tercermin dalam Tabel 2.25. Data persentase perekaman KTP-el dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan capaian yang secara konsisten tinggi, dengan persentase selalu berada di atas 95 persen. Pada tahun 2018, cakupan sudah sangat tinggi yaitu 99 persen, meskipun sempat menurun menjadi 96 persen pada 2019. Namun, tren kemudian kembali meningkat pada 2020 dengan capaian 99,56 persen, serta terus naik pada 2021 dan 2022 dengan capaian yang sama sebesar 98,58 persen. Setelah itu, terjadi sedikit penurunan pada 2023 menjadi 97,47 persen dan meningkat kembali pada 2024 menjadi 99,65 persen, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor administratif seperti keterlambatan pencatatan atau pembaruan data kependudukan. Menariknya, pada tahun 2024 cakupan kepemilikan KTP-el kembali melonjak hingga 99,65 persen, menjadikannya capaian tertinggi sepanjang periode. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa kepemilikan KTP-el di masyarakat sudah hampir universal, dengan fluktuasi kecil yang tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan administrasi kependudukan

berjalan efektif dan mampu memastikan hampir seluruh penduduk memiliki identitas resmi sebagai dasar untuk mengakses berbagai layanan publik.

Tabel 2.25
Persentase Perekaman Dokumen KTP-el Kota Denpasar Tahun 2018 - 2024

Aspek Layanan	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perekaman KTP	99	96	99,56	98,58	98,58	97,47	99,65

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Data ini mengindikasikan bahwa program rekaman KTP-el di Denpasar berjalan dengan sangat efektif, dengan sebagian besar penduduk yang wajib KTP telah menyelesaikan perekaman KTP-el mereka. Meskipun terdapat perbedaan kecil antara jumlah penduduk wajib KTP dan yang telah rekam KTP-el di setiap kecamatan, selisih ini relatif kecil, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil penduduk yang perlu didorong lebih lanjut untuk melakukan rekaman KTP-el. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya memiliki KTP-el sebagai identitas resmi. KTP-el bukan hanya menjadi alat pengidentifikasi, tetapi juga berperan penting dalam akses terhadap berbagai layanan publik seperti perbankan, pendidikan, kesehatan, dan hak pilih dalam pemilu. Dengan pencapaian ini, Kota Denpasar diperkirakan akan terus memperbaiki kualitas dan cakupan pelayanan kependudukan untuk mencapai target 100 persen kepemilikan KTP-el dalam beberapa tahun mendatang, sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil dan merata terhadap dokumen kependudukan.

2.5.4 Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang mencatat kelahiran seorang anak, termasuk nama anak, tanggal lahir, tempat lahir, serta nama orang tua. Kepemilikan akta kelahiran penting karena digunakan untuk berbagai keperluan administratif seperti pendaftaran sekolah, klaim hak-hak hukum, serta akses terhadap pelayanan kesehatan dan sosial. Persentase kepemilikan dokumen akta kelahiran pada penduduk usia 0 – 17 tahun di Kota Denpasar mengalami fluktuasi pada periode tahun 2018 - 2024, sebagaimana pada Tabel 2.25. Melihat capaian ini, persentase penerbitan akta kelahiran hampir keseluruhan dari jumlah permohonan akta kelahiran penduduk Kota Denpasar

pada tahun bersangkutan. Peningkatan yang terjadi terdapat upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.26
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kota Denpasar Tahun 2018-2024

Aspek Layanan	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
% Cakupan Kepemilikan Akta Lahir	95,9	100	97,42	100	100	99,21	99,38

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.5.5 Kepemilikan Dokumen Akta Kematian

Penerbitan akta kematian selama tahun 2019 - 2023 sudah mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat yang ditunjukkan pada Tabel 2.26. Hal ini menandakan bahwa penduduk di Kota Denpasar mengalami peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan.

Tabel 2.27
Penerbitan Akta Kematian Kota Denpasar Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penerbitan Akta Kematian di Kota Denpasar	3.980	3.561	5.190	4.486	4.364

Sumber : Data DKB Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2023
Aplikasi Pelayanan Daerah, 2023

Tabel 2.28 menunjukkan fluktuasi dalam penerbitan akta kematian di Kota Denpasar antara tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, jumlah akta kematian yang diterbitkan mencapai 3.980, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3.561. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang memperlambat proses administrasi, meskipun angka kematian sebenarnya mungkin meningkat. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan signifikan dengan 5.190 akta kematian diterbitkan, yang bisa disebabkan oleh lonjakan kasus kematian akibat COVID-19 dan penyelesaian *backlog* dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, penerbitan kembali menurun menjadi 4.486 dan sedikit lebih rendah di tahun 2023, dengan 4.364 akta yang diterbitkan. Fluktuasi ini mencerminkan bagaimana faktor-faktor seperti tingkat mortalitas, kebijakan kesehatan, dan efisiensi administrasi sangat mempengaruhi jumlah akta kematian yang diterbitkan. Penelitian yang dilakukan oleh

Suryani et al. (2021) juga menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap penerbitan akta kematian, baik dari segi peningkatan jumlah kematian yang harus dicatat maupun keterlambatan administrasi akibat kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan selama pandemi.

Tabel 2.28
Cakupan Kepemilikan Akta Kematian di Kota Denpasar Tahun 2018-2024

Aspek Layanan	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
% Cakupan Kepemilikan akta kematian	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Data cakupan kepemilikan akta kematian dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan angka yang konsisten sempurna, yaitu 100 persen setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa seluruh peristiwa kematian yang tercatat telah diikuti dengan penerbitan akta kematian tanpa adanya kekurangan atau keterlambatan yang tercermin dalam data. Konsistensi angka 100 persen selama tujuh tahun berturut-turut menunjukkan sistem administrasi kependudukan, khususnya dalam pencatatan peristiwa kematian, berjalan dengan sangat baik, tertib, dan optimal. Capaian ini sekaligus menandakan adanya kepastian hukum dan pelayanan publik yang merata, karena akta kematian merupakan dokumen penting untuk kepentingan administrasi keluarga, warisan, maupun hak-hak sipil lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan pencatatan akta kematian berada dalam kondisi sangat ideal, stabil, dan tidak menghadapi hambatan berarti sepanjang periode tersebut.

2.5.6 Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen resmi yang diberikan kepada anak berusia 0 hingga 17 tahun sebagai bentuk identitas diri sebelum mereka mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Kepemilikan KIA sangat penting karena memberikan banyak manfaat, seperti mempermudah akses anak terhadap berbagai layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi, serta sebagai bukti identitas yang sah saat melakukan perjalanan domestik maupun keperluan administratif lainnya. Upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam mendorong kepemilikan KIA terus mengalami peningkatan melalui berbagai program dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Tabel 2.29
Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kota Denpasar Tahun 2018 - 2024

Aspek Layanan	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
% Cakupan Kepemilikan KIA	29,88	56,82	61,4	67,69	76,09	78,2	80,34

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Data cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dan konsisten. Pada tahun 2018, cakupan kepemilikan KIA baru mencapai 29,88 persen. Namun, dalam setahun berikutnya terjadi lonjakan yang cukup besar hingga 56,82 persen pada 2019. Peningkatan ini terus berlanjut dengan pertumbuhan bertahap, yakni 61,4 persen pada 2020, 67,69 persen pada 2021, serta mencapai 76,09 persen pada 2022. Selanjutnya, meskipun laju pertumbuhannya sedikit melambat, angka cakupan tetap menunjukkan tren naik, yaitu 78,2 persen pada 2023 dan mencapai 80,34 persen pada 2024.

Kenaikan yang signifikan sejak 2018 menandakan adanya upaya intensif dalam sosialisasi maupun pelayanan penerbitan KIA. Meski pertumbuhan setelah 2022 tidak secepat sebelumnya, capaian di atas 80 persen pada 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif, karena mayoritas anak di Kota Denpasar sudah memiliki identitas resmi. Hal ini penting untuk menjamin hak-hak anak dalam mengakses layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum.

2.5.7 Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan

Akta Perkawinan adalah dokumen kependudukan resmi yang menyatakan dan mengesahkan status pernikahan seseorang di mata hukum. Kepemilikan Akta Perkawinan sangat penting bagi pasangan karena tidak hanya memberikan status hukum yang sah, tetapi juga berfungsi sebagai dasar bagi pemenuhan hak-hak sipil lainnya, seperti hak waris, jaminan sosial, dan keperluan administrasi yang membutuhkan bukti pernikahan resmi. Cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada penduduk Kota Denpasar menunjukkan peningkatan yang positif seiring dengan berbagai program dan inovasi layanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.

Tabel 2.31 menunjukkan persentase cakupan kepemilikan dokumen Akta Perkawinan di Kota Denpasar dari tahun 2018 hingga 2024. Selama periode 7 tahun tersebut, capaian kepemilikan akta perkawinan di Kota Denpasar selalu pada angka 100

persen. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa seluruh pasangan menikah yang pernikahannya tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sudah memiliki dokumen akta pernikahan.

Tabel 2.30
Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan Kota Denpasar
Tahun 2018 – 2024

Aspek Layanan	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
% Cakupan Kepemilikan akta perkawinan	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.5.8 Kepemilikan Dokumen Akta Perceraian

Akta Perceraian merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pengadilan setelah putusan perceraian sah secara hukum. Dokumen ini sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai bukti sah perpisahan secara hukum, tetapi juga mempengaruhi hak-hak keperdataan yang terkait dengan warisan, hak asuh anak, pembagian harta, serta keperluan administratif lainnya. Di Kota Denpasar, cakupan kepemilikan Akta Perceraian menjadi salah satu fokus dalam upaya pemerintah untuk memperbaiki administrasi kependudukan dan melindungi hak-hak warga negara pasca perceraian. Berdasarkan Tabel 2.32, cakupan kepemilikan dokumen akta perceraian di Kota Denpasar selalu pada capaian 100 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh penduduk Kota Denpasar yang melaporkan perceraianya sudah memiliki akta perceraian.

Tabel 2.31
Persentase Cakupan Dokumen Akta Perceraian Kota Denpasar Tahun 2018-2024

Aspek Layanan	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
% Cakupan Kepemilikan akta cerai	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.5.9 Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak

Tabel 2.33 menunjukkan cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak di Kota Denpasar dari tahun 2017 hingga tahun 2020 memiliki persentase 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pelaporan dan pencatatan anak pada tahun 2017 hingga tahun 2020 telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan secara keseluruhan. Capaian 100 persen ini mencerminkan keberhasilan pemerintah Provinsi

Bali, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam memastikan bahwa setiap pengangkatan anak didaftarkan dengan baik dan legal di mata hukum. Hal ini juga menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi terkait pentingnya pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak untuk menjamin hak-hak hukum anak tersebut di masa depan, baik dari segi identitas maupun perlindungan hukum.

Tabel 2.32
Persentase Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak Kota Denpasar Tahun 2017-2020 (Persen)

Indikator	2017	2018	2019	2020
Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5.10 Cakupan Dokumen Akta Pengakuan Anak

Akta Pengakuan Anak adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyatakan pengakuan hukum seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan resmi. Kepemilikan dokumen ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi anak, khususnya terkait dengan status perdata, hak waris, dan akses terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Di Kota Denpasar, cakupan kepemilikan Akta Pengakuan Anak terus diupayakan agar seluruh anak yang lahir di luar perkawinan resmi dapat diakui secara hukum dan tercatat secara sah dalam sistem administrasi kependudukan.

Selama tahun 2017 hingga tahun 2020 terlihat pada Tabel 2.34 tercakup 100 persen dokumen akta pengakuan anak pada Kota Denpasar. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap pengajuan Akta Pengakuan Anak selama periode tersebut telah tercatat dan diproses secara menyeluruh, tanpa adanya kasus yang terlewatkan. Capaian 100 persen ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kota Denpasar, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam menjalankan program pencatatan pengakuan anak. Keberhasilan ini mencerminkan sistem administrasi kependudukan yang efektif dan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan pengakuan anak. Dengan pencapaian tersebut, pemerintah berhasil memastikan bahwa hak-hak anak yang diakui secara hukum tetap terjaga dan terlindungi.

Tabel 2.33
Persentase Cakupan Dokumen Akta Pengakuan Anak Kota Denpasar
Tahun 2017 -2020 (%)

Indikator	2017	2018	2019	2020
Cakupan dokumen akta pengakuan anak	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.4.11 Cakupan Dokumen Akta Pengesahan Anak

Akta Pengesahan Anak adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengesahkan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan resmi setelah orang tuanya menikah. Dokumen ini penting karena memberikan status hukum yang sah kepada anak, memastikan hak-hak keperdataan seperti hak waris, dan memberikan perlindungan hukum yang setara dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan resmi. Cakupan kepemilikan Akta Pengesahan Anak menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan memperbaiki sistem administrasi kependudukan. Cakupan dokumen akta pengesahan anak di Kota Denpasar menunjukkan persentase 100 persen setiap tahunnya selama tahun 2017 hingga tahun 2020 yang ditunjukkan Tabel 2.35. Persentase ini menunjukkan bahwa jumlah permohonan pelaporan penerbitan akta pengesahan anak pada tahun yang bersangkutan telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlaksana secara menyeluruh.

Tabel 2.34
Persentase Cakupan Dokumen Akta Pengesahan Anak Kota Denpasar
Tahun 2017-2020 (%)

Indikator	2017	2018	2019	2020
Cakupan dokumen akta pengesahan anak	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5.12 Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Nama

Pelaporan dan pencatatan perubahan nama merupakan proses penting dalam sistem administrasi kependudukan yang memungkinkan warga negara untuk secara resmi mengubah nama mereka dan tercatat dalam dokumen kependudukan. Akta perubahan nama ini sangat penting karena setiap perubahan nama harus diakui secara

hukum dan diperbarui dalam seluruh dokumen resmi, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta-akta penting lainnya. Di Kota Denpasar, pemerintah terus berupaya untuk memperluas cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama guna memastikan bahwa setiap warga yang melakukan perubahan nama dapat terakomodasi dengan baik dan mendapatkan dokumen resmi yang sesuai. Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada Kota Denpasar dari tahun 2017 hingga tahun 2020 memiliki persentase 100 persen. Hal ini menunjukkan oleh Tabel 2.36 bahwa jumlah permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada tahun 2017 hingga tahun 2020 telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan secara keseluruhan. Capaian 100 persen ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kota Denpasar, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam menjalankan program pencatatan administrasi kependudukan. Keberhasilan ini mencerminkan sistem administrasi kependudukan yang efektif dan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan perubahan nama. Dengan pencapaian tersebut, pemerintah berhasil memastikan bahwa hak-hak penduduk diakui secara hukum tetap terjaga dan terlindungi.

Tabel 2.35
Persentase Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak Kota Denpasar Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5.13 Cakupan Ketersediaan Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan platform digital yang dirancang untuk mengelola data kependudukan secara terpusat dan real-time. SIAK memfasilitasi pencatatan berbagai peristiwa kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan alamat, dan perubahan status lainnya, sehingga seluruh data kependudukan terintegrasi dalam satu sistem yang dapat diakses oleh berbagai lembaga pemerintah. Cakupan ketersediaan data SIAK sangat penting karena menentukan seberapa lengkap dan akurat data kependudukan yang tercatat secara nasional.

Di Kota Denpasar, cakupan ketersediaan data SIAK terus ditingkatkan melalui beberapa inisiatif, yang diintegrasikan melalui inovasi digital TARING DUKCAPIL. Tujuan dari perluasan cakupan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh peristiwa kependudukan yang terjadi di kota tersebut dapat tercatat secara lengkap dan akurat di dalam sistem. Selain itu, ketersediaan data yang terbaru secara otomatis memungkinkan proses administrasi kependudukan, seperti penerbitan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen kependudukan lainnya, dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Cakupan ketersediaan data SIAK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sudah mencapai 100 persen yang dapat dilihat pada Tabel 2.37. Persentase ini menunjukkan bahwa keterisian data SIAK pada menu meliputi nama dusun, nama Ibu, kawin tercatat sudah sepenuhnya terlengkapi. Cakupan ketersediaan data SIAK adalah persentase keterisian di menu data SIAK yang meliputi kelengkapan nama dusun, nama Ibu, kawin tercatat dibandingkan dengan keterisian data SIAK. Capaian 100 persen ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kota Denpasar, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam menjalankan program pencatatan administrasi kependudukan. Keberhasilan ini mencerminkan sistem administrasi kependudukan yang efektif. Dengan pencapaian tersebut, pemerintah berhasil memastikan bahwa hak-hak penduduk diakui secara hukum tetap terjaga dan terlindungi.

Tabel 2.36
Persentase Cakupan ketersediaan data SIAK Kota Denpasar Tahun 2017 - 2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Cakupan dokumen akta perkawinan	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

BAB III

PROYEKSI PENDUDUK

DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN

Proyeksi penduduk merupakan gambaran perkiraan jumlah dan karakteristik penduduk di masa depan yang didasarkan pada tren demografi saat ini, seperti tingkat kelahiran, kematian, migrasi, serta struktur usia penduduk. Proyeksi penduduk menjadi alat yang sangat penting untuk merencanakan kebutuhan dan kapasitas layanan publik serta memastikan tercapainya kondisi ideal kependudukan. Pada bagian ini, terdapat data mengenai parameter kependudukan yang hasilnya diperoleh melalui perhitungan proyeksi, analisis potensi, serta dampak yang mungkin timbul. Proyeksi penduduk didasarkan pada hasil perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan penekanan khusus pada indikator demografis seperti asumsi kelahiran, asumsi kematian, dan migrasi, yang semuanya diintegrasikan ke dalam modul DemProj. Meskipun perhatian utama tertuju pada pilar pengendalian penduduk, pembahasan juga mencakup analisis kondisi ideal yang diharapkan serta potensi dan dampak dari pilar-pilar lainnya.

Proyeksi ini dibatasi pada interval 5 tahun, dengan informasi mengenai proyeksi penduduk untuk setiap interval waktu tersebut serta analisis potensi dan dampak yang mungkin terjadi. Kondisi ideal kependudukan dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dicapai melalui lima pilar: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, penyebaran penduduk yang merata, dan administrasi kependudukan yang tertib. Pada skenario ideal, jumlah penduduk terkendali dan seimbang dengan kapasitas lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, bab ini menyajikan informasi komprehensif mengenai proyeksi penduduk, analisis potensi, dampak yang mungkin terjadi, dan kondisi ideal yang diharapkan di Kota Denpasar dalam perkembangan 5 tahunan. Proyeksi ini diharapkan dapat membantu merencanakan distribusi sumber daya, lapangan kerja, dan layanan sosial untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Denpasar.

3.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Proyeksi Penduduk

Salah satu aspek krusial dalam pembangunan suatu negara adalah faktor penduduk. Keberhasilan perencanaan pembangunan dapat dicapai dengan

mempertimbangkan tantangan dan peluang yang berkaitan dengan aspek kependudukan yang sedang dan akan datang. Proyeksi penduduk merupakan suatu metode untuk bisa merepresentasikan jumlah penduduk dengan menggunakan perhitungan tertentu, yang didasarkan pada asumsi-asumsi komponen seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam konteks pertumbuhan penduduk Indonesia, pemahaman dapat diperoleh melalui faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan tersebut. Meskipun demikian, perhitungan berdasarkan laju pertumbuhan penduduk masih belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan suatu proyeksi penduduk agar kita dapat memperoleh informasi mengenai karakteristik penduduk di masa yang akan datang.

Tujuan yang diinginkan adalah mencapai keselarasan dalam pertumbuhan penduduk, dengan mengacu pada indikator *Total Fertility Rate (TFR)* dalam rentang 2 sampai 2,19 hingga 2045. Pada tahun 2025, targetnya adalah TFR sebesar 1,88, sementara pada tahun 2045 diharapkan berada dalam nilai ideal 2,1. Penekanan pada rentang ini dianggap sebagai skenario ideal untuk Kota Denpasar, yang bertujuan untuk mencegah perubahan jumlah penduduk yang ekstrim. Rentang nilai ini juga dianggap sebagai standar ideal berdasarkan beberapa studi yang mengkaji TFR. Dengan memastikan TFR berada dalam rentang tersebut, diharapkan Kota Denpasar dapat mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) tanpa mengalami penambahan atau pengurangan yang signifikan.

Keadaan penduduk tumbuh seimbang merujuk pada situasi di mana jumlah total populasi tidak mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan. Dalam konteks ini, situasi tersebut ditandai oleh *Total Fertility Rate (TFR)* setara dengan 2,1 per perempuan atau Net Reproduction Rate (Angka Reproduksi Bersih = NRR) sebesar 1 per perempuan (Tukiran, 2010). Hal ini sesuai dengan fase pembangunan kependudukan dalam RPJPN, di mana pada periode 2020-2024, fokusnya adalah pada "bertahannya penduduk yang tumbuh dan seimbang." Di Kota Denpasar, targetnya adalah mencapai kondisi penduduk yang tumbuh dan seimbang hingga tahun 2024, dan kondisi ini diharapkan dapat dipertahankan hingga tahun 2045. Tujuannya adalah untuk menghindari potensi masalah demografis yang mungkin timbul akibat TFR yang berada di bawah tingkat penggantian. Gubhaju & Moriki-Durand (2003) menyatakan bahwa potensi masalah tersebut meliputi penuaan penduduk, kekurangan tenaga kerja,

peningkatan rasio ketergantungan lansia, dan feminisasi pada kelompok usia tua/lansia. Meskipun demikian, untuk mengatasi fluktuasi nilai TFR, proyeksi di Kota Denpasar akan mempertimbangkan tiga skenario TFR, yaitu kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan TFR=2,1, TFR stabil pada angka 2,04 setelah tahun 2020, dan TFR stabil pada angka 2,1. Keadaan yang diharapkan untuk indikator fertilitas adalah rendahnya Crude Birth Rate (CBR), yang idealnya berkisar antara 12,02 hingga 15,5. Semakin rendah nilai CBR, semakin dianggap baik, dan angka ini dianggap masih relevan untuk kondisi Indonesia secara keseluruhan.

Sementara itu, untuk indikator *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR), diinginkan nilai yang lebih dari 60 persen dalam periode 2021-2045. Pada sisi mortalitas di Kota Denpasar, diwakili oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH), targetnya adalah nilai AHH pada tahun 2045 diharapkan mencapai 76,53. Ini berarti rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2035 memiliki peluang untuk hidup hingga 76-77 tahun. Dalam rinciannya, proyeksi BPS menunjukkan AHH laki-laki sebesar 73,81 tahun dan AHH perempuan sebesar 79,95 tahun.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang diinginkan dan proyeksi penduduk yang telah dikemukakan, terdapat beberapa potensi dan dampak kependudukan yang dapat diperkirakan di Kota Denpasar. Dari sisi potensi, pemerintah Kota Denpasar dapat memanfaatkan beberapa peluang sebagai berikut:

- 1) Diperkirakan jumlah penduduk Kota Denpasar akan terus meningkat secara berkelanjutan. Keadaan ini memberikan potensi positif, terutama dalam konteks ketenagakerjaan, karena pertumbuhan penduduk yang signifikan juga menciptakan peningkatan jumlah angkatan kerja. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan dan program ketenagakerjaan yang dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang melimpah.
- 2) Tingginya angka harapan hidup secara positif terkait dengan kesejahteraan masyarakat, dan oleh karena itu, peningkatan terus-menerus dalam Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Denpasar menjadi peluang besar ke depannya. Hal ini menandakan perbaikan yang semakin baik dalam derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, peningkatan angka harapan hidup di Kota Denpasar juga dianggap sebagai anugerah dan tindakan bijaksana yang diasosiasikan dengan orang tua. Hidup lebih lama memiliki konsekuensi positif, memungkinkan

seseorang tinggal bersama keluarga lebih lama dan menikmati kebahagiaan dalam tahap hidup berikutnya. Ini juga memberi peluang lebih besar bagi anak-anak untuk menghabiskan waktu bersama orang tua mereka, menunjukkan rasa hormat, dan memberikan penghormatan kepada mereka. Oleh karena itu, lamanya usia yang akan dimiliki oleh penduduk Kota Denpasar dapat berperan dalam mempromosikan hubungan harmonis di antara anggota keluarga di masa depan.

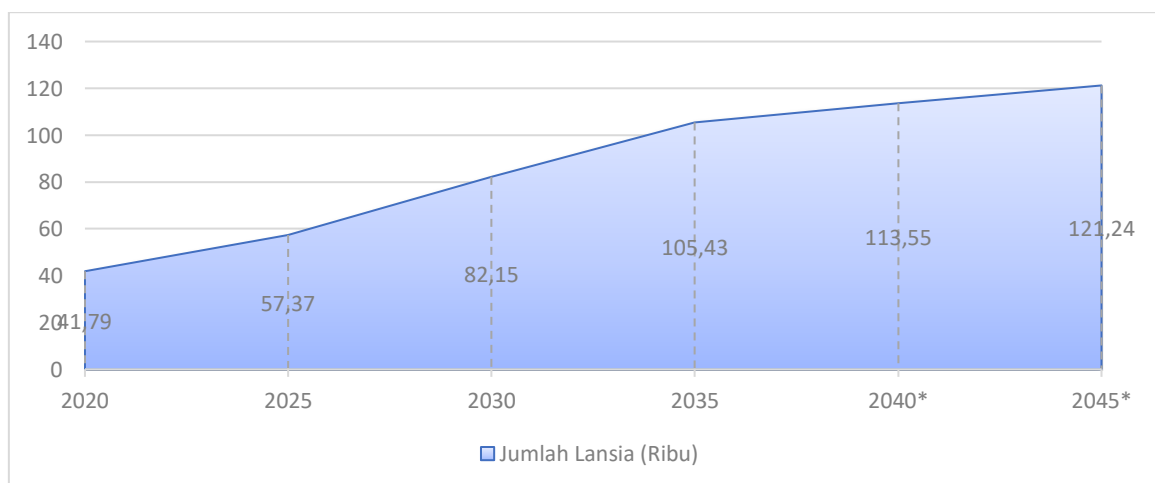
- 3) Angka ketergantungan yang potensial untuk dimanfaatkan di awal periode. Maksudnya adalah dari periode 2020-2045, jika dilihat berdasarkan angka ketergantungannya adalah cenderung mengalami kenaikan. Pada 2022 angka ketergantungan penduduk di Kota Denpasar sebesar 37,64. Jika dibagi periode 5 tahunan, angka ketergantungan yang nilainya berada di bawah 40 adalah antara 2020-2030. Sedangkan setelah 2030 diprediksi nilainya sudah lebih dari 40. Artinya adalah potensi pemanfaatan untuk bonus demografi di Kota Denpasar masih dapat dilaksanakan secara optimal sampai dengan 2030. Potensi penduduk usia produktif yang masih banyak sampai dengan 2030 harus benar-benar dioptimalkan karena diprediksi setelah 2030 jumlah penduduk usia produktif di Kota Denpasar akan berangsur-angsur turun.
- 4) Munculnya generasi baru yang disebut generasi baru yang berkembang jauh berbeda dari sebelumnya yakni generasi Z dan Alpha. Generasi ini merupakan generasi yang paling dekat dan melek terhadap teknologi. Memiliki aktivitas tinggi dan sangat bergantung pada sosial media. Kemampuan penggunaan teknologi sangat tinggi dan adaptif terhadap perubahan dunia serta menyukai tantangan baru. Potensi pengembangan dari generasi Z dan Alpha adalah mereka dapat bekerja menggunakan teknologi dan cepat menemukan informasi sehingga perkembangan dunia akan menjadi lebih cepat.

Telah dijelaskan potensi penduduk diatas, terdapat juga analisis mengenai dampak. Untuk dampak, berdasarkan hasil proyeksi penduduk di Kota Denpasar, beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian antara lain:

- 1) Proyeksi penduduk Kota Denpasar mengindikasikan peningkatan yang signifikan pada jumlah dan persentase lansia di Kota Denpasar. Jumlah lansia (65 tahun ke atas) diperkirakan akan melonjak tiga kali lipat dari 41,79 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 121,24 ribu jiwa pada tahun 2045. Persentase lansia dalam populasi juga

diprediksi meningkat dari 220 persen pada tahun 2045. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan lansia, seperti pendirian rumah sakit geriatrik dan fasilitas lain yang bersifat pro-lansia. Seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup di Kota Denpasar, populasi lansia diperkirakan akan terus bertambah, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam penyediaan layanan kesehatan dan sosial yang memadai. Rumah sakit geriatrik, yang secara khusus melayani kebutuhan kesehatan lansia, dapat menjadi salah satu solusi untuk menangani tantangan kesehatan yang kompleks di usia lanjut, seperti penyakit kronis, penurunan fungsi fisik, dan gangguan kognitif. Selain itu, fasilitas publik yang ramah lansia seperti pusat kegiatan komunitas, transportasi yang mudah diakses, serta tempat tinggal yang didesain untuk kenyamanan dan keamanan lansia juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pengembangan infrastruktur ini harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan lansia, termasuk program dukungan sosial, akses ke layanan kesehatan yang terjangkau, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Dengan demikian, integrasi antara pembangunan infrastruktur fisik dan kebijakan yang berorientasi pada lansia akan menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan aktif dan sehat bagi mereka, serta memastikan bahwa kelompok lansia dapat tetap berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Gambar 3.1
Jumlah Lansia di Kota Denpasar tahun 2020 - 2045



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024. Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 2020 – 2035 Hasil Perhitungan*

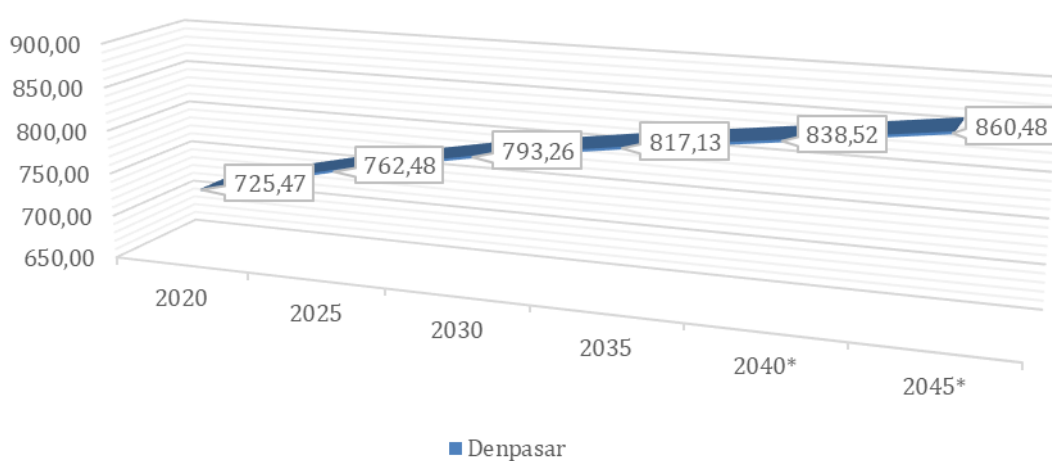
- 2) Proyeksi penduduk menyoroti ancaman terhadap jumlah penduduk usia produktif di masa mendatang di Kota Denpasar. Diperkirakan bahwa mulai tahun 2030, proporsi penduduk usia produktif akan mengalami penurunan, yang dapat menyebabkan masalah serius ketergantungan. Untuk mengatasi potensi kekurangan tenaga kerja di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan terintegrasi. Salah satu upaya utama adalah pengembangan sumber daya manusia yang fokus pada peningkatan keterampilan dan kompetensi, agar tenaga kerja di masa depan mampu bersaing di pasar global yang semakin dinamis. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan formal, terutama di bidang-bidang yang memiliki permintaan tinggi di industri, seperti teknologi informasi, sains, dan teknik. Selain itu, pendidikan vokasional dan program pelatihan keterampilan harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang. Selain pengembangan keterampilan, kebijakan yang mendukung partisipasi tenaga kerja juga sangat penting. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang memberikan insentif bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal dan memastikan inklusivitas, seperti mendukung partisipasi perempuan, kelompok disabilitas, serta kaum muda dalam angkatan kerja. Langkah-langkah untuk meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja melalui regulasi yang mendukung *work-life balance*, seperti program kerja fleksibel dan kebijakan cuti yang memadai, akan membantu mempertahankan tenaga kerja dalam jangka panjang. Dengan demikian, melalui kombinasi dari peningkatan pendidikan, pengembangan keterampilan, dan kebijakan yang mendukung partisipasi serta kesejahteraan pekerja, kekurangan tenaga kerja di masa depan dapat diantisipasi secara efektif, dan produktivitas ekonomi nasional dapat tetap terjaga.
- 3) Meskipun Rasio jenis kelamin terlihat seimbang, perbedaan kecil dalam jumlah laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi dinamika sosial terkait pernikahan. Jika jumlah laki-laki sedikit lebih tinggi, ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam ketersediaan pasangan potensial, terutama dalam kelompok usia tertentu. Hal ini dapat menimbulkan persaingan lebih besar di kalangan laki-laki untuk mencari pasangan, yang bisa berdampak pada stabilitas sosial.
- 4) Kondisi bonus demografi Kota Denpasar, mengalami pertumbuhan pesat dalam jumlah penduduk usia produktif. Seperti halnya tren nasional, proyeksi penduduk

di Denpasar menunjukkan bahwa kelompok usia 15-64 tahun mendominasi populasi Kota Denpasar. Dengan mayoritas penduduk berada dalam usia produktif, Denpasar memiliki potensi besar untuk memanfaatkan bonus demografi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana Kota Denpasar mampu menyediakan cukup lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk menyerap lonjakan penduduk usia kerja. Denpasar, sebagai pusat ekonomi dan pariwisata di Bali, memiliki peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor utama seperti pariwisata, jasa, dan industri kreatif. Namun, ketergantungan ekonomi pada pariwisata juga dapat menjadi risiko jika tidak diimbangi dengan diversifikasi ekonomi yang lebih luas. Untuk itu, penting bagi pemerintah kota untuk tidak hanya fokus pada pengembangan sektor pariwisata, tetapi juga memperkuat sektor-sektor lain seperti teknologi, pendidikan, dan industri kreatif yang dapat menyerap tenaga kerja terampil dalam jumlah besar. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar menjadi kunci untuk memanfaatkan bonus demografi di Denpasar. Jika tenaga kerja di kota ini memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan industri, mereka akan lebih mudah terserap ke dalam pasar kerja, mengurangi risiko pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, bonus demografi di Denpasar dapat dikelola dengan baik dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk produktif dan lapangan pekerjaan yang tersedia.

- 5) Generasi Z dan generasi Alpha merupakan generasi baru yang tumbuh dalam era yang sangat dinamis dan rentan terhadap berbagai perubahan ekstrem, baik secara psikologis, fisik, maupun ekonomi. Dilihat dari aspek psikologis, generasi Z menghadapi tantangan mental yang lebih serius dibandingkan generasi sebelumnya. Tingkat stres yang tinggi, paparan media sosial yang intens, serta tekanan untuk selalu tampil sempurna membuat mereka lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, bahkan peningkatan kasus bunuh diri. Hal ini diperparah oleh stigma sosial yang masih melekat, sehingga banyak dari mereka yang enggan mencari bantuan atau merasa terisolasi. Dilihat dari kondisi fisiknya, generasi ini juga menghadapi risiko yang tak kalah besar.

Akses yang mudah terhadap teknologi dan perubahan pola interaksi sosial mengurangi aktivitas fisik dan meningkatkan risiko kesehatan terkait gaya hidup yang kurang aktif. Selain itu, kekerasan fisik, baik yang terjadi di dunia nyata maupun dunia maya (*cyberbullying*), menjadi ancaman yang nyata dan dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di sekolah dan dalam interaksi digital. Kekerasan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik tetapi juga memperburuk kondisi mental mereka. Dilihat dari sisi ekonomi, pola konsumsi yang tinggi dan budaya konsumtif yang semakin mengakar membuat generasi ini cenderung rentan terhadap masalah keuangan di masa depan. Keinginan untuk mengikuti tren dan gaya hidup mewah, yang sering kali dipicu oleh media sosial, dapat membuat mereka kurang mempersiapkan diri untuk kestabilan finansial jangka panjang. Tanpa kesadaran finansial yang baik, generasi ini bisa menghadapi kesulitan dalam mencapai keamanan ekonomi, seperti kesulitan menabung, berinvestasi, atau mengelola utang dengan bijak. Akibatnya, ketahanan mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan bisa terganggu, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pendidikan keuangan sejak dini.

Gambar 3.2
Proyeksi Penduduk Kota Denpasar 2020-2045 (Ribu Jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023. Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020 – 2035 (hasil olah*)

3.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Pembahasan Peningkatan kualitas penduduk dalam pilar *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) memiliki kaitan erat dengan upaya untuk mencapai kondisi yang diinginkan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, seperti yang diuraikan dalam pembahasan mengenai kualitas penduduk di Kota Denpasar. Salah satu ukuran utama dalam aspek kesehatan adalah angka harapan hidup, yang menjadi indikator penting untuk mengevaluasi tingkat kesehatan masyarakat. Dalam konteks GDPK, upaya untuk meningkatkan angka harapan hidup mencakup berbagai program kesehatan yang fokus pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas gizi dan penanggulangan penyakit. Kota Denpasar, menargetkan peningkatan angka harapan hidup menjadi 76,25 tahun pada tahun 2025, dan lebih lanjut meningkat menjadi 80,54 tahun pada tahun 2045. Hal ini sejalan dengan pilar GDPK yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas penduduk melalui program kesehatan berkelanjutan. Pencapaian target tersebut tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam penyediaan layanan kesehatan, tetapi juga mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Aspek pendidikan dalam GDPK bertujuan untuk memastikan masyarakat Kota Denpasar mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang baik menjadi fondasi untuk menciptakan penduduk yang terampil dan produktif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kondisi ekonomi jangka panjang. Dalam konteks ekonomi, kualitas penduduk yang ditingkatkan melalui pendidikan dan kesehatan yang baik akan menciptakan masyarakat yang lebih siap menghadapi tantangan global, termasuk dalam hal lapangan kerja dan stabilitas ekonomi. Target-target seperti yang telah ditetapkan dalam angka harapan hidup di Kota Denpasar merupakan bagian dari upaya yang lebih luas dalam GDPK untuk menciptakan penduduk yang sehat, terdidik, dan sejahtera secara ekonomi, sehingga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Berikut merupakan gambaran kualitas penduduk di Kota Denpasar.

- 1) Pada bidang kesehatan yang diterapkan di Kota Denpasar mencakup angka kematian bayi, angka kematian ibu, persentase ASI eksklusif, angka kematian anak balita, stunting, serta data kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Diharapkan bahwa pada tahun 2025 angka kematian bayi dapat turun menjadi 10, dan menjadi

4 pada tahun 2045. Angka kematian ibu diharapkan mencapai 120 pada tahun 2025 dan mengalami penurunan menjadi 34,95 pada tahun 2045. Persentase ASI eksklusif diharapkan meningkat dari 79% pada tahun 2025 menjadi 92,5% pada tahun 2045. Proyeksi menunjukkan penurunan angka kematian anak balita dari 11,6 pada tahun 2025 menjadi 5,6 pada tahun 2045. Target nilai stunting diharapkan mencapai 9,9 pada tahun 2025 dan menurun menjadi 0,27 pada tahun 2045. Selanjutnya, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional pada penduduk Kota Denpasar diharapkan dapat dipertahankan pada angka 100% hingga tahun 2045.

- 2) Untuk bidang pendidikan, tujuan utama pendidikan adalah meningkatkan keterjangkauan dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui peningkatan terus-menerus pada indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Target untuk indikator harapan lama sekolah diharapkan mencapai 14,14 tahun pada tahun 2025, meningkat menjadi 16 tahun pada tahun 2045. Dengan demikian, secara keseluruhan, diharapkan anak usia 7 tahun yang memasuki pendidikan formal pada tahun 2045 memiliki peluang untuk menempuh pendidikan selama 16 tahun atau setara dengan tingkat pendidikan Sarjana Strata 1. Untuk indikator APS pada kelompok usia 7-12 tahun, targetnya adalah mencapai 99,24 pada tahun 2025, dan meningkat menjadi 100 pada tahun 2045. Sementara itu, untuk indikator APS pada kelompok usia 13-15 tahun, diharapkan nilai pada tahun 2025 mencapai 98,81 dan meningkat menjadi 99,97 pada tahun 2045.
- 3) Pada bidang Ekonomi, fokus utama adalah meningkatkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar. Tujuan utama mencakup penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, serta mengurangi beban ketergantungan melalui indikator persentase penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk produktif. Diharapkan persentase penduduk miskin dapat mencapai 2,47 persen pada 2025, turun menjadi 0,02 persen pada 2045. Tingkat pengangguran terbuka diharapkan mencapai 1,62 - 2,1 persen pada 2025, dan berkurang menjadi 0,3 – 0,91 persen pada 2045. Sementara itu, target rasio ketergantungan diharapkan mencapai 37,27 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 32,06 persen pada 2045. Indikator ekonomi lainnya meliputi tingkat kesempatan kerja, PDRB per kapita, persentase PMKS yang tertangani, pertumbuhan ekonomi, dan indeks Gini di Kota Denpasar.

PDRB per kapita diharapkan mencapai nilai antara Rp. 221.000.000 s.d. Rp. 270.000.000 pada tahun 2045. Indeks Gini diharapkan mencapai 0,335 pada tahun 2025 dan menurun menjadi 0,292 pada tahun 2045.

Sejumlah potensi dan dampak kependudukan dapat diperkirakan di masa mendatang. Dari segi peluang, pemerintah Kota Denpasar memiliki beberapa kesempatan strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan. Salah satu potensi utama adalah pertumbuhan penduduk usia produktif yang dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama jika dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Dengan populasi produktif yang kuat, Denpasar bisa menjadi pusat ekonomi kreatif, pariwisata, dan industri berbasis teknologi, yang sejalan dengan tren global. Adapun potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah:

- 1) Pada bidang kesehatan, tingginya angka harapan hidup mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat yang baik dan akses yang semakin merata terhadap layanan kesehatan. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat secara umum mampu menikmati kualitas hidup yang lebih baik, didukung oleh penurunan angka kematian, peningkatan layanan kesehatan, serta keberhasilan dalam penanganan penyakit menular maupun tidak menular. Tingginya angka harapan hidup juga mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat, seperti pola makan yang lebih baik, rutin berolahraga, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Indikator ini juga menjadi bukti keberhasilan program kesehatan preventif, seperti imunisasi, kampanye kesehatan, serta program perbaikan gizi yang menasar kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran dan akses terhadap obat-obatan yang lebih baik turut berkontribusi terhadap peningkatan harapan hidup. Tidak hanya kesehatan fisik, angka harapan hidup yang tinggi juga menandakan semakin besarnya perhatian terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis, dimana layanan dukungan psikologis dan pengelolaan stres menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Peningkatan angka harapan hidup tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam hal perawatan dan pengobatan penyakit, tetapi juga menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai determinan sosial kesehatan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup

yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat. Angka harapan hidup yang tinggi dengan demikian menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kualitas kesehatan masyarakat secara holistik.

- 2) Pada Pada bidang pendidikan, terutama di era digitalisasi, Kota Denpasar memiliki peluang besar untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan industri masa depan. Digitalisasi memungkinkan akses yang lebih luas ke materi pendidikan melalui platform daring, pelatihan jarak jauh, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Dengan integrasi teknologi ini, sistem pendidikan di Denpasar dapat mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan era digital, seperti keterampilan di bidang teknologi informasi, coding, kecerdasan buatan, dan analitik data. Ini akan sangat relevan dalam mendukung sektor ekonomi baru, termasuk sektor kuartener. Sektor kuartener, yang berfokus pada layanan berbasis pengetahuan seperti penelitian, teknologi informasi, pendidikan, dan konsultasi, berkembang pesat di era digital dan sangat potensial di Kota Denpasar. Dengan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, Denpasar bisa mencetak generasi yang ahli di bidang ini, memungkinkan kota untuk menjadi pusat inovasi di Bali. Peningkatan pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan sektor kuartener akan membuka lapangan pekerjaan di bidang-bidang yang berkaitan dengan teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak, data science, serta riset dan pengembangan, yang kini menjadi pilar penting dalam ekonomi modern. Dengan demikian, digitalisasi di bidang pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas SDM lokal tetapi juga memperkuat kemampuan Denpasar untuk bersaing dalam sektor kuartener, yang menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di era digital.
- 3) Pada Pada bidang ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin memiliki potensi besar untuk memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar. Seiring dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan pengangguran dapat ditekan melalui penciptaan lapangan kerja baru yang lebih beragam, terutama dalam sektor-sektor yang berkembang di era digital dan teknologi. Selain itu, penerapan teknologi

dalam berbagai industri, seperti pariwisata, layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kreatif, dapat membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dan produktivitas, sehingga tingkat kemiskinan berangsur-angsur berkurang. Kemajuan ini juga menciptakan lingkungan yang lebih dinamis, di mana jenis pekerjaan baru akan terus bermunculan, mulai dari sektor teknologi informasi, e-commerce, hingga industri kreatif berbasis digital. Hal ini tidak hanya membuka peluang bagi tenaga kerja terampil tetapi juga mendorong munculnya wirausaha baru yang lebih inovatif. Prediksi menunjukkan bahwa perubahan ini akan semakin memacu inovasi, yang menjadi fondasi utama dalam menghadapi persaingan global yang semakin terbuka. Dalam lingkungan ini, kreativitas menjadi kunci utama untuk bersaing, karena pekerjaan yang bersifat monoton dan manual akan digantikan oleh teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan. Munculnya berbagai jenis pekerjaan baru yang berbasis inovasi dan teknologi diharapkan dapat menggairahkan perekonomian Kota Denpasar. Hal ini akan memperkuat daya saing kota dalam berbagai sektor, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas dan beragam. Selain itu, dengan adanya dukungan kebijakan yang proaktif dari pemerintah, pertumbuhan ekonomi ini dapat berlangsung secara inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

Mempertimbangkan kondisi yang diharapkan di Kota Denpasar, beberapa aspek penting yang perlu mendapat perhatian meliputi kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pemerataan pembangunan ekonomi. Keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan Kota Denpasar. Dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang terus meningkat, tantangan terkait pengelolaan sumber daya alam, polusi, dan penurunan kualitas lingkungan perlu ditangani secara serius. Langkah-langkah seperti pengelolaan sampah yang lebih efisien, perlindungan terhadap ruang terbuka hijau, serta penerapan kebijakan ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak keseimbangan alam. Keberlanjutan lingkungan ini juga erat kaitannya dengan pariwisata, sektor andalan Kota Denpasar, di mana daya tarik wisata yang berkelanjutan akan mendukung perekonomian lokal. Adapun persoalan yang dapat diperhatikan di Kota Denpasar meliputi:

- 1) Pada bidang kesehatan, peningkatan jumlah lansia di Kota Denpasar dapat menimbulkan tantangan yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia, kebutuhan akan layanan kesehatan yang lebih kompleks dan berkesinambungan, seperti perawatan geriatri, fasilitas kesehatan khusus, dan dukungan sosial yang memadai, akan meningkat. Jika tidak ada strategi yang tepat, peningkatan jumlah lansia dapat membebani sistem kesehatan, baik dari segi fasilitas, tenaga medis, maupun anggaran. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program-program yang mendukung kualitas hidup lansia, termasuk pencegahan penyakit, perawatan jangka panjang, serta program kesehatan mental dan fisik yang berkelanjutan. Hal yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa lansia membawa beban finansial yang besar bagi keluarga mereka. Tekanan besar untuk memberikan dukungan finansial kepada orang tua dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan antara generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda, dan oleh karena itu, perlu dikelola dengan hati-hati. Selain itu, umur panjang tidak selalu berkorelasi dengan kesehatan yang optimal. Risiko penyakit meningkat seiring bertambahnya usia, meskipun kemajuan teknologi medis. Beberapa penyakit, seperti demensia, dapat meningkat secara signifikan seiring bertambahnya usia, yang pada gilirannya akan meningkatkan biaya perawatan. Harapan hidup yang lebih lama dan tingkat kesuburan yang lebih rendah juga dapat mengakibatkan kurangnya angkatan kerja muda, yang kemudian dapat memberikan beban ketergantungan yang tinggi pada populasi lansia dan berdampak pada ekonomi secara keseluruhan.
- 2) Pada bidang pendidikan, dampak dari tingginya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah adalah meningkatnya tuntutan untuk memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketika angka rata-rata lama sekolah meningkat, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak individu yang menghabiskan waktu lebih lama dalam sistem pendidikan formal, yang berarti kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat meningkat. Namun, peningkatan ini juga menimbulkan tantangan, yaitu kebutuhan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, baik dari segi infrastruktur, tenaga pengajar, maupun teknologi pendukung di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil. Tingginya harapan lama sekolah mencerminkan aspirasi masyarakat untuk

memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Tantangan lain yang muncul adalah memastikan bahwa pendidikan yang diperoleh tidak hanya bersifat formal, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kurikulum wajib disesuaikan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digitalisasi dan globalisasi. Selain itu, akses ke pendidikan yang berkualitas tidak boleh terbatas pada jenjang tertentu, tetapi juga harus mencakup pendidikan sepanjang hayat, termasuk pelatihan vokasional dan pendidikan nonformal, agar masyarakat dapat terus meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk memenuhi tuntutan ini, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung pemerataan pendidikan di semua tingkatan, termasuk akses yang lebih baik bagi kelompok marginal dan daerah tertinggal. Upaya peningkatan sarana prasarana, pelatihan guru, dan penggunaan teknologi digital dalam pendidikan dapat menjadi langkah kunci untuk mencapai target pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi. Dengan demikian, dampak positif dari tingginya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas SDM yang siap bersaing di kancah nasional maupun internasional.

- 3) Pada bidang ekonomi, pengangguran dan kemiskinan, terutama di kalangan generasi muda, memiliki hubungan yang erat dengan fenomena NEET (*Not in Education, Employment, or Training*), yaitu kelompok individu yang tidak terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan. NEET sering kali menjadi indikator nyata dari permasalahan struktural dalam bidang ekonomi dan sosial yang dapat memperburuk tingkat pengangguran dan kemiskinan, yang pada akhirnya mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kelompok NEET, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda, menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pekerjaan, sering kali karena kurangnya keterampilan atau pengalaman yang relevan di pasar tenaga kerja. Kondisi ini memperparah pengangguran struktural, di mana pasar kerja tidak dapat menyerap tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Selain itu, semakin lama mereka berada dalam status NEET, semakin besar risiko kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, sehingga mereka terperangkap dalam siklus kemiskinan dan keterbatasan ekonomi. Individu yang tergolong NEET sering kali

berasal dari kelompok keluarga berpenghasilan rendah, yang menyebabkan mereka tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka. Akibatnya, mereka kesulitan meningkatkan mobilitas sosial dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Kelompok NEET yang tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan memiliki prospek kerja yang lebih rendah dan cenderung berada dalam pekerjaan yang tidak stabil atau berpenghasilan rendah, yang mengakibatkan mereka terjebak dalam kemiskinan yang berkelanjutan. Fenomena NEET ini dapat berdampak jangka panjang pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Meningkatnya jumlah NEET akan mengurangi produktivitas dan potensi ekonomi, karena sebagian besar populasi usia produktif tidak berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, ketidakaktifan ekonomi pada generasi muda dapat menambah beban sosial, seperti meningkatnya ketergantungan pada bantuan sosial dan munculnya masalah kesehatan mental akibat kurangnya prospek kerja dan ketidakpastian masa depan. Untuk mengatasi dampak pengangguran, kemiskinan, dan NEET, diperlukan kebijakan yang komprehensif, termasuk program pelatihan vokasional, peningkatan akses pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk menciptakan peluang kerja yang relevan dengan keterampilan yang dimiliki generasi muda dan mendorong mereka untuk kembali ke pendidikan atau pelatihan. Dengan demikian, pengurangan kelompok NEET tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga memperkuat ekonomi secara keseluruhan.

3.3 Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, sehat, dan produktif. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memainkan peran utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, pembangunan keluarga tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anggotanya, mendukung pengembangan potensi setiap individu, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan stabil. Pendidikan menjadi kunci penting. Keluarga harus berperan sebagai pendukung utama dalam

proses pendidikan formal dan nonformal, serta mendorong pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan keterampilan sosial. Pendidikan dalam keluarga ini mencakup bagaimana orang tua memberikan teladan, membangun komunikasi yang baik, serta memastikan anak-anak memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Ketika keluarga memiliki fondasi pendidikan yang kuat, anak-anak akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan dan mampu berkontribusi positif pada masyarakat.

Isu nasional mengenai pembangunan keluarga, seperti yang diangkat dalam program iBangga, relevan dengan situasi di Kota Denpasar. Program ini bertujuan untuk memastikan keluarga memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan pemenuhan gizi, serta melindungi keluarga dari kerentanan ekonomi dan sosial. Dengan pertumbuhan urbanisasi dan tantangan lingkungan yang kompleks, keluarga di Denpasar perlu intervensi yang berkelanjutan, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang baik dan pendidikan yang inklusif, untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan ekonomi dan sosial. Upaya seperti pencegahan stunting, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan menjadi penting untuk mendukung ketahanan keluarga, terutama dalam menghadapi tekanan sosial yang disebabkan oleh perubahan gaya hidup perkotaan. Pemerintah daerah juga perlu bekerja sama dengan BKKBN untuk memastikan bahwa program keluarga berencana dan pendampingan keluarga dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Denpasar dapat mengembangkan keluarga-keluarga yang tangguh, siap menghadapi tantangan modern, dan mampu berkontribusi pada pembangunan yang lebih luas.

Permasalahan rumah tangga, seperti masalah komunikasi, keuangan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perbedaan dalam pengasuhan anak, berpotensi menciptakan kerentanan baru yang dapat memperburuk situasi yang sudah ada di dalam keluarga. Ketika masalah-masalah ini tidak dikelola dengan baik, keluarga rentan mengalami keretakan hubungan, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental anggotanya. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi utama keluarga sebagai tempat pertama di mana anak-anak belajar nilai-nilai moral, budaya, dan agama yang menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian. Keluarga memiliki peran krusial dalam membentuk generasi masa depan yang berkualitas. Kualitas keluarga tidak hanya mempengaruhi perkembangan individu tetapi juga berdampak langsung pada kualitas bangsa secara keseluruhan.

Dalam keluarga yang sehat dan harmonis, anak-anak dibimbing dengan nilai-nilai positif yang membentuk kepribadian mereka sebagai individu yang berakhlak baik, memiliki rasa tanggung jawab, dan mampu berkontribusi pada masyarakat. Sebaliknya, keluarga yang mengalami konflik terus-menerus cenderung menghasilkan individu yang kurang stabil secara emosional dan sosial, yang pada akhirnya dapat mengganggu perkembangan masyarakat secara luas. Sebagai lingkungan utama bagi tumbuh kembang anak, keluarga tidak hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan fisik, tetapi juga penanaman nilai-nilai moral dan agama yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pembangunan keluarga harus menjadi prioritas dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan keluarga yang kuat dan sejahtera, bangsa dapat mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan masa depan, berdaya saing tinggi, dan membawa bangsa menuju kemajuan yang lebih baik.

Indikator yang digunakan untuk mengukur aspek pembangunan keluarga di Provinsi Bali mencakup sejumlah dimensi yang mencerminkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga. Indikator-indikator ini meliputi tingkat perceraian, kepemilikan rumah oleh keluarga, tingkat kemiskinan, serta rentannya keluarga terhadap kemiskinan. Selain itu, masalah sosial seperti anak-anak dan lansia yang terlantar juga menjadi perhatian penting dalam menilai kualitas pembangunan keluarga. Berbagai program pembangunan keluarga, seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) turut dijadikan indikator untuk menilai sejauh mana partisipasi keluarga dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Program-program ini bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam berbagai aspek, baik ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan ketahanan dan kualitas hidup keluarga di Denpasar.

Target pencapaian untuk indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Denpasar adalah sebesar 99,87 persen pada tahun 2025. Angka ini diproyeksikan akan meningkat hingga mencapai 100 persen pada tahun 2045. Upaya mencapai target ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap keluarga memiliki akses ke tempat tinggal yang aman dan layak. Pencapaian target-target ini

membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Penyediaan infrastruktur perumahan yang memadai, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program pengentasan kemiskinan, serta penguatan peran keluarga dalam pendidikan dan kesehatan merupakan langkah-langkah penting dalam mencapai pembangunan keluarga yang berkelanjutan di Kota Denpasar. Dalam upaya pembangunan keluarga melalui program Kelompok Kegiatan (Pokan), terdapat indikator kelompok kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan UPPKA yang berkegiatan. Indikator untuk lima Poktan tersebut memiliki target yang sama yaitu diharapkan mencapai angka 100 persen pada tahun 2025, dan dapat dipertahankan setiap tahun hingga mencapai 100 persen juga pada tahun 2045.

3.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk di Kota Denpasar tidak hanya bertujuan untuk mengelola arus migrasi dan distribusi populasi, tetapi juga harus didasarkan pada proyeksi perkembangan masa depan yang lebih berkelanjutan. Pentingnya antisipasi terhadap perkembangan tersebut semakin jelas ketika mempertimbangkan kebutuhan untuk menghindari penumpukan penduduk di area tertentu yang dapat memperburuk masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, langkah penataan yang diambil harus sejalan dengan pembangunan wilayah yang adil dan merata. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengarahkan mobilitas penduduk di Denpasar melibatkan beberapa faktor penting yang langsung mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan infrastruktur dasar dan dukungan terhadap perkembangan ekonomi. Penekanan pada kondisi baiknya infrastruktur seperti sarana irigasi, akses air minum, perbaikan rumah tidak layak huni, serta infrastruktur transportasi yang memadai, merupakan elemen kunci dalam menciptakan kawasan yang lebih strategis dan layak huni. Dengan memperhatikan juga kondisi drainase dan pengembangan infrastruktur di kawasan strategis dan berkembang pesat (KSCT), pemerintah kota dapat memastikan bahwa arah mobilitas penduduk sejalan dengan upaya menciptakan perkembangan Kampung Keluarga Berkualitas mandiri dan kawasan urban yang berkembang seimbang. Semua ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang proaktif dan berbasis indikator dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Denpasar. Melalui integrasi antara

penataan yang sudah berjalan dan indikator yang dirancang untuk mengantisipasi pertumbuhan di masa depan, Kota Denpasar berupaya menjaga keseimbangan dalam pertumbuhan penduduk dan pengembangan infrastruktur secara inklusif.

Persentase jaringan irigasi yang berada dalam kondisi baik diharapkan mencapai persen pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2045. Target pencapaian persentase drainase dalam kondisi baik diharapkan mencapai 86,5 persen pada tahun 2025, dengan proyeksi peningkatan menjadi 100 persen pada tahun 2045. Adapun persentase pemukiman kumuh diharapkan mencapai 0,144 persen pada tahun 2025 dan turun menjadi 0 persen pada tahun 2045 yang menandakan bahwa tidak ada permukiman di Denpasar yang masuk dalam kategori kumuh.

Tercapainya persentase jalan dalam kondisi mantap di Kota Denpasar diharapkan mencapai 90,19 persen pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 95,69 persen pada tahun 2045. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri di Kota Denpasar diharapkan dapat mencapai 40 persen pada tahun 2025, dan meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2045.

3.5 Penataan Administrasi Kependudukan

Penataan administrasi kependudukan memiliki relevansi langsung dengan kondisi di Kota Denpasar, terutama dalam hal ketersediaan akses penerbitan dokumen kependudukan yang menyeluruh bagi masyarakat. Upaya penataan data ini tidak hanya melibatkan pencatatan dasar seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan, tetapi juga difokuskan pada peningkatan cakupan dokumen penting seperti KTP elektronik (E-KTP), akta kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak, serta berbagai akta legal lainnya yang mencakup perubahan status keluarga dan kewarganegaraan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh data kependudukan terintegrasi dan terkelola dengan baik, memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses dokumen-dokumen tersebut.

Indikator keberhasilan penataan data kependudukan diukur melalui kepemilikan KTP-EI dan akta kelahiran yang merata pada seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan tren peningkatan penerbitan dokumen selama tiga tahun terakhir, target pencapaian 100 persen kepemilikan KTP-EI dan akta kelahiran pada tahun 2045 menjadi prioritas yang

sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Ketersediaan data yang akurat melalui SIAK tidak hanya membantu pemerintah dalam memberikan layanan publik yang tepat sasaran, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang terdokumentasi secara lengkap, adil, dan transparan. Dengan pencapaian ini, Denpasar dapat memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses penuh terhadap hak-hak sipilnya, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Cakupan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan untuk penduduk berusia kurang dari 17 tahun diharapkan mencapai 82 persen pada tahun 2025, dengan proyeksi peningkatan menjadi 94,5 persen pada tahun 2045. Cakupan dokumen Kartu Keluarga (KK) ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun 2025 dan tahun 2045. Selain itu, cakupan dokumen akta kematian diharapkan mencapai 100 persen pada tahun 2025 dan tetap konsisten pada angka tersebut hingga tahun 2045. Data capaian untuk persentase cakupan dokumen akta perkawinan dan dokumen perceraian di Kota Denpasar diharapkan mencapai 100 persen pada tahun 2025 dan tetap mempertahankan angka tersebut hingga tahun 2045.

Beberapa permasalahan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Denpasar yang memengaruhi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil antara lain:

- 1) Belum memiliki sistem dalam mengawasi penduduk pendatang tanpa jaminan kerja dan persebaran penduduk pendatang. Pihak pemilik rumah sewa atau kost-kostan belum memiliki sistem pelaporan terhadap penduduk rumah tinggal tersebut.
- 2) Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat, terutama terkait jaringan komunikasi data dan ketersediaan blangko, menciptakan ketidakseimbangan dalam stok blangko kependudukan, dengan beberapa jenis blangko berlebihan sementara blangko KTP elektronik mengalami kekurangan;
- 3) Perlunya penyesuaian sarana dan prasarana layanan pendukung kependudukan dan pencatatan sipil dengan regulasi terbaru, yang menekankan pelayanan daring dan mandiri. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan infrastruktur dan fasilitas layanan yang lebih memadai;
- 4) Perlu dilaksanakan sinkronisasi data kependudukan untuk menghasilkan kebijakan pembangunan dan publik yang presisi;

- 5) Validasi data kependudukan masih memerlukan perhatian, sehingga data tersebut belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan kependudukan dan perencanaan pembangunan; dan
- 6) Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk segera melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi, pendampingan, dan pendekatan aktif, tingkat partisipasi masyarakat masih belum optimal dalam melaporkan peristiwa kependudukan. Selain itu, dinamika perubahan peristiwa kependudukan menjadi hambatan, sehingga langkah-langkah yang diambil oleh dinas belum sepenuhnya dapat mengimbangi percepatan perubahan data kependudukan.

BAB IV
VISI DAN ISU STRATEGIS
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Pada bagian ini merupakan bagian untuk menggambarkan visi dan isu strategis pembangunan kependudukan di Kota Denpasar. Visi dari Pembangunan kependudukan ini akan sejalan dengan dan mendukung visi pembangunan di Kota Denpasar 2045. Bagian ini akan menurunkan kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan daerah pada bagian BAB V berikutnya. Berikut merupakan visi dan isu strategis pembangunan kependudukan di Kota Denpasar.

4.1 Visi Pembangunan Kependudukan Daerah

Untuk mewujudkan pembangunan kependudukan jangka panjang, maka terdapat hal penting yang harus disusun untuk mengarahkan pembangunan kependudukan pada rencana dan visi pembangunan Kota Denpasar jangka Panjang yakni melalui penetapan visi. Visi GDPK Kota Denpasar adalah:

“TERWUJUDNYA PENDUDUK BERBUDAYA, BERKUALITAS DAN TUMBUH SEIMBANG UNTUK MENCAPAI KOTA DENPASAR YANG BERBUDAYA, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”

Adapun arti dari visi penduduk berbudaya, berkualitas dan tumbuh seimbang dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penduduk Berbudaya adalah gambaran penduduk di Kota Denpasar yang masih memegang prinsip dan nilai budaya misalnya seperti prinsip *vasudaiva kutumbakam* yang memiliki arti semangat *menyama braya* yang kental serta nilai budaya yang lain. Budaya menjadi faktor kunci agar arah pembangunan tidak hilang, karena jati diri sebuah bangsa tergantung dari budaya yang telah dijaga dan diwariskan tanpa menyebabkan batasan untuk mengembangkan diri.
- b. Penduduk Berkualitas adalah menggambarkan kondisi penduduk yang memiliki kualitas kesehatan baik fisik dan mental, kualitas pendidikan baik formal maupun informal serta kemampuan literasi dan numerasi yang baik, berkualitas dalam bidang kehidupan ekonomi yang digambarkan dari pendapatan dan ketimpangan yang rendah. Kualitas ini menggambarkan kondisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang baik dari penduduk di Kota Denpasar.

- c. Penduduk Tumbuh Seimbang adalah penduduk yang kecepatan perubahan jumlahnya bersifat konstan dan proporsi untuk masing-masing kelompok umurnya relatif tetap. Pada kondisi ini penduduk dianggap tumbuh secara konstan tanpa perubahan ekstrim pada jenis kelompok umur, sehingga dapat mempertahankan TFR sesuai dengan target yang diharapkan dan mengurangi peluang terjadinya peningkatan ketergantungan dijangka panjang untuk penduduk di Kota Denpasar.

4.2 Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah

Isu strategis dari GDPK Kota Denpasar diperoleh dari berbagai kriteria sebagai pertimbangan, antara lain:

Masukkan penyusunan isu berbasis teori.

1. Sisi Urgensi, dapat dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut untuk diselesaikan. Selain itu apakah isu tersebut memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi atau nasional.
2. Sisi *Seriousness* atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat.
3. Sisi *Growth* atau tingkat perkembangan masalah yaitu apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah, serta pertimbangan kemungkinan atau solusi untuk dikelola dan memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka isu strategis Kota Denpasar berdasarkan telaah permasalahan, potensi dan dampak menurut 5 pilar GDPK adalah sebagai berikut:

A. Pengendalian kuantitas penduduk yang belum Optimal

Isu strategis yang pertama terkait dengan belum optimalnya pengendalian kuantitas penduduk. Jika dilihat dari data yang ada, terdapat tren pertumbuhan penduduk Kota Denpasar yang positif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dengan bentuk pertumbuhan ekspansif. Namun hal ini tidak diikuti oleh nilai TFR yang masih dibawah 2 dan ada tren jumlah perkawinan yang menurun namun disisi lain tingkat migrasi di Kota Denpasar paling tinggi bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Kabupaten lain di Provinsi Bali. Saat nilai TFR dibawah dua

dengan tren perkawinan yang menurun, hal ini akan memberikan ancaman terhadap kuantitas penduduk Kota Denpasar di masa depan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang. Kondisi akan diperparah jika rasio ketergantungan lansia mengalami peningkatan.

B. Peningkatan kualitas penduduk yang masih membutuhkan intervensi pemerintah

Isu strategis yang kedua di Kota Denpasar masih terkait dengan tiga isu yakni isu kesehatan, pendidikan, ekonomi. Pada isu kesehatan masih terdapat masalah terkait dengan tren angka kematian ibu yang positif selama 5 tahun terakhir dan belum optimalnya pelayanan sanitasi, ini menggambarkan dengan kondisi akses kesehatan yang semakin terbuka dan luas di Kota Denpasar masih ada potensi kematian ibu yang positif. Bukan hanya jumlah fasilitas kesehatan yang menjadi penting untuk ditingkatkan, namun bagaimana seluruh penduduk dapat mendapatkan pelayanan walaupun dalam kondisi tidak memiliki kemampuan finansial. Selain itu, isu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi isu besar karena bagaimanapun akses diberikan atau dibangun tanpa kesadaran dan keinginan yang kuat dari masyarakat, maka kualitas kesehatan dari penduduk tidak akan tercapai sesuai dengan rencana yang diinginkan. Selanjutnya, untuk isu pendidikan masih rendahnya partisipasi sekolah untuk umur 16-19 tahun dan 19-24 tahun serta angka harapan sekolah yang rendah. Walaupun infrastruktur serta sarana prasarana pendidikan sudah banyak disediakan oleh pemerintah dan swasta, namun angka partisipasi dan angka harapan sekolah masih rendah, ini menandakan bahwa keinginan dan upaya untuk dapat mengenyam pendidikan masih rendah.

Selanjutnya, isu terakhir adalah isu ekonomi yakni terjadi peningkatan tren pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja yang belum optimum dan masih terdapat penduduk miskin merupakan tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas penduduk. Memang tidak mungkin untuk menurunkan tingkat pengangguran dan penduduk miskin ke angka nol persen, namun penting untuk dilaksanakan upaya untuk mencapai pengangguran dan kemiskinan yang rendah dengan tren yang menurun. Kualitas penduduk merupakan hasil akhir yang diinginkan dari upaya pembangunan penduduk di Kota Denpasar.

C. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Keluarga

Isu yang ketiga adalah terkait dengan kualitas pemberdayaan keluarga karena masih minimalnya kesadaran masyarakat akan pemberdayaan dan literasi digital. Hal ini akan menyebabkan perkembangan kondisi kualitas keluarga akan berisiko dimasa depan. Isu terkait keluarga yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan pemberdayaan gender, hal ini merupakan bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kunci pemberdayaan ada di level keluarga, apalagi terkait dengan pemberdayaan gender. Kondisi pemberdayaan masih menjadi isu penting, hal ini akan menjadi masalah jika tidak diikuti oleh akses pangan belum setara. Isu belum optimalnya akses pangan yang setara menjadi permasalahan besar dalam upaya pemberdayaan keluarga dan perempuan terlebih lagi, permasalahan ini menjadi darurat jika terjadi fluktuasi perekonomian seperti inflasi.

D. Pengarahan mobilitas penduduk untuk mendukung pembangunan kota

Mobilitas penduduk dan pembangunan kota merupakan hal yang saling berkaitan. Tata kota dan mobilitas penduduk merupakan sebuah isu penting. Pembangunan kota yang berhasil jika mampu mengakomodasi mobilitas penduduk, namun disisi lain mobilitas penduduk sangat sulit dikendalikan. Hal ini diperparah dengan migrasi yang relatif tinggi di Kota Denpasar. Migrasi yang tinggi dengan luas kota yang relatif sempit telah menyebabkan kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini akan berdampak kepada kemacetan dan isu penegakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan telah menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini telah menarik penduduk datang dari berbagai daerah dari Provinsi Bali atau luar Provinsi Bali. Mobilitas penduduk untuk pembangunan kota tidak bisa dilaksanakan secara ideal karena ada kecenderungan penduduk akan berkumpul dengan pusat pertumbuhan, hal ini terjadi pada beberapa daerah seperti Denpasar Barat, dimana pada kecamatan tersebut jumlah dan kepadatan penduduk sangat tinggi karena kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Badung yang merupakan pusat pertumbuhan di Provinsi Bali.

E. Data dan informasi kependudukan yang belum tersinkronisasi dengan proses perencanaan dan kebijakan pemerintah

Isu terakhir dari data dan informasi bukan atau tidak terkait dengan pelayanan atau sistem informasi, namun lebih kepada data dan informasi belum tersinkronisasi dengan proses perencanaan dan kebijakan pemerintah, salah satu isu terkait hal ini adalah sinkronisasi program penanganan pengangguran. Proses sinkronisasi data dan informasi kependudukan akan memberikan pemerintah panduan untuk melaksanakan kegiatan dan program untuk menurunkan pengangguran di Kota Denpasar. Data dan informasi kependudukan menjadi sangat penting untuk mengurangi jurang antara tenaga kerja dan pasar tenaga kerja.

F. Keamanan Kependudukan terkait Kekerasan Kepada Anak, Perempuan dan Ibu serta Potensi Masalah Mental dan Bunuh Diri

Isu keamanan dan kekerasan kepada anak, perempuan, dan ibu serta kasus mental dan bunuh diri menjadi isu penting dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Permasalahan ini memiliki peluang untuk terjadi dimasa yang akan datang. Permasalahan ini sering terjadi terkait misalnya pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak dan perempuan akibat pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang tinggi. Pengawasan terhadap anak, perempuan dan ibu masih menjadi hal tabu dan kurang mendapatkan perhatian, padahal permasalahan kekerasan baik fisik dan verbal serta seksual menjadi masalah penting dan berdampak terhadap masa depan penduduk di Kota Denpasar.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Bab ini menguraikan sejumlah arahan kebijakan strategis daerah dalam pengembangan 5 pilar kependudukan. Harapannya adalah agar pedoman tersebut dapat terintegrasi secara efektif dalam implementasi praktis melalui berbagai dokumen pembangunan, sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan pada 5 pilar pembangunan kependudukan.

5.1 Strategi Kebijakan

Menyikapi berbagai isu strategis, berbagai arah strategis kebijakan pembangunan kependudukan di Kota Denpasar yang direncanakan untuk masa depan antara lain:

1. Mengelola pertumbuhan penduduk dengan mengendalikan angka kelahiran melalui optimalisasi akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana.
2. Mengatur pola pernikahan melalui pengaturan syarat pernikahan bagi calon pengantin diwajibkan memiliki sertifikat yang disebut Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL)
3. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang usaha.
4. Memperkuat pemberdayaan dan ketahanan keluarga, fokus pada peningkatan kemampuan pengasuhan dan perkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga miskin, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
5. Memperkuat pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya potensi kekerasan dan pelecehan terhadap anak, perempuan dan ibu
6. Mengatur penyebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan kapasitas dan daya dukung lingkungan untuk mempengaruhi kepadatan penduduk
7. Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat diandalkan, yang terintegrasi dalam sistem informasi sebagai dasar perencanaan pembangunan.
8. Menyelenggarakan pembangunan kependudukan melalui administrasi kependudukan yang modern, maju, transparan, dan terkendali.
9. Memperkuat pendidikan budaya untuk mendukung pertumbuhan dan

pembangunan Kota Denpasar.

10. Dalam upaya meningkatkan efektivitas capaian kinerja pembangunan kependudukan maka respon kebijakan perlu ditindaklanjuti dengan membentuk kelompok kerja (Pokja) pembangunan kependudukan, meliputi:

- a) Pokja pengendalian kuantitas penduduk
- b) Pokja peningkatan kualitas penduduk
- c) Pokja pembangunan keluarga
- d) Pokja penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk
- e) Pokja penataan administrasi kependudukan

POKJA di masing – masing pilar pembangunan kependudukan disesuaikan dengan kebutuhan tergantung kepada respon terhadap pentingnya isu pembangunan kependudukan di masing – masing pilar sebagai contoh: untuk pilar pengendalian kuantitas penduduk di Kota Denpasar setidaknya perlu dibentuk 2 (dua) POKJA yaitu POKJA Penduduk Tumbuh Seimbang, dan POKJA Bonus Demografi. Untuk peningkatan kualitas penduduk, misalnya dapat dibentuk 3 (tiga) POKJA seperti POKJA Bidang Kesehatan, POKJA Bidang Pendidikan, POKJA Bidang Ekonomi. Untuk pembangunan keluarga dapat dibentuk POKJA Pembangunan Keluarga dan POKJA Kesejahteraan Sosial. Untuk penataan dan persebaran mobilitas penduduk misalnya perlu dibentuk POKJA Penataan, Persebaran, dan Mobilitas Penduduk. Kemudian untuk pilar penataan administrasi kependudukan perlu dibentuk POKJA Penataan Data dan Administrasi Kependudukan. Sekretariat masing – masing POKJA ada di Organisasi Perangkat Daerah yang terdepan dalam menangani isu strategis yang ingin dipecahkan dengan koordinator berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Denpasar. Anggota POKJA adalah Organisasi Perangkat Daerah yang secara operasional berkaitan dengan isu strategis pembangunan kependudukan dengan melibatkan mitra – mitra kerja terkait secara lintas sektor.

5.2 Arah Kebijakan

Setelah menentukan strategi kebijakan, maka selanjutnya penting untuk menentukan arah kebijakan. Berbagai arah kebijakan dari pembangunan kependudukan di Kota Denpasar dalam 5 pilar dirinci sebagai berikut:

5.2.1 Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pengendalian kuantitas penduduk di Kota Denpasar bertujuan untuk mengelola pertumbuhan penduduk secara seimbang. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Kota Denpasar dapat melakukan intervensi kebijakan dalam mengatur fertilitas dan mengurangi mortalitas. Aspek pengelolaan fertilitas dilaksanakan melalui program perencanaan keluarga. Program tersebut mencakup:

1. pengaturan syarat perkawinan;
2. pendewasaan usia perkawinan;
3. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
4. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
5. peningkatan kesejahteraan keluarga;
6. penggunaan alat, obat, atau metode kontrol kehamilan;
7. peningkatan akses terhadap layanan keluarga berencana;
8. peningkatan pendidikan dan peran perempuan dan;
9. pendataan dan pemetaan kependudukan.

Sedangkan upaya untuk penurunan mortalitas dilaksanakan melalui:

1. Peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan anak;
2. Penurunan angka kematian ibu hamil;
3. penurunan angka kematian ibu saat melahirkan;
4. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
5. penurunan angka kematian bayi dan anak.
6. Konseling ibu hamil dan pasca melahirkan

5.2.1 Pilar Peningkatan Kualitas Penduduk

Pemerintah Kota Denpasar menekankan pentingnya upaya meningkatkan kualitas penduduk melalui pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan memiliki peran utama dalam meningkatkan mutu kehidupan manusia, sekaligus membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif untuk mencapai kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) menjadi pendorong utama perkembangan di masa depan, berdampak signifikan pada sektor ekonomi dan perubahan sosial budaya masyarakat.

Peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui upaya berikut:

- a. peningkatan kualitas di bidang pendidikan, langkah-langkah yang diambil melibatkan:
 1. pemerataan infrastruktur pendidikan di setiap kecamatan yang berkualitas setara;
 2. peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, dengan memperhatikan aspek ekonomi dan fisik;
 3. peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal, maupun informal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional;
 4. pengurangan kesenjangan pendidikan antar jenis kelamin dengan meningkatkan akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan;
 5. peningkatan dalam pengawasan terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan;
 6. peningkatan pembangunan manusia berbasis gender; dan
 7. peningkatan keterlibatan pemuda dalam pembangunan.
- b. Pada bidang kesehatan, kebijakan yang dapat dilakukan melalui:
 1. pemerataan infrastruktur dan pelayanan kesehatan di setiap kecamatan;
 2. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
 3. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
 4. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- c. Pada bidang ekonomi, beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain:
 1. peningkatan kegiatan bursa kerja;
 2. peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran; dan
 3. pengurangan disparitas ekonomi sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan.

5.2.3 Pilar Pembangunan Keluarga

Penting bagi semua pihak, termasuk lintas sektor dan Pemerintah Daerah, untuk memberikan perhatian khusus pada isu strategis Pembangunan Keluarga guna mempercepat terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mendukung pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni yaitu melalui:

- 1) pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
- 3) pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara;
- 4) pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga;
- 5) peningkatan akses informasi dan edukasi tentang pengasuhan dan perkembangan anak;
- 6) peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, edukasi, konseling dan pelayanan terkait kehidupan berkeluarga;
- 7) peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- 8) pengawasan terhadap tindakan kekerasan dan pelecehan anak, perempuan dan ibu;
- 9) pelaksanaan konseling terhadap calon pengantin, keluarga miskin dan anak serta perempuan yang pernah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual;
- 10) penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga;
- 11) pendidikan budaya untuk keluarga baik dilaksanakan secara berkelompok ataupun individu; dan
- 12) peningkatan kualitas pembangunan keluarga.

5.2.4 Pilar Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Kebijakan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk di Kota Denpasar diarahkan untuk melakukan:

1. sinkronisasi rencana tata ruang kota dengan kebijakan kependudukan;
2. pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
3. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;

4. pengarahan persebaran penduduk sesuai kebutuhan masing-masing wilayah;
5. pencegahan kemunculan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa;
6. penyediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah Kota Denpasar; dan
7. penyediaan prasarana dan sarana perhubungan yang merata berdasarkan rencana pengembangan wilayah.

5.2.5 Pilar Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Kebijakan penataan administrasi kependudukan di Kota Denpasar yang diharapkan sebagai berikut:

1. penyusunan sistem pengawasan penduduk pendatang melalui sistem terpadu;
2. sinkronisasi data dan informasi kependudukan dengan sistem perpajakan, ketenagakerjaan, pemetaan, pengawasan tempat tinggal;
3. peningkatan penataan dan pengelolaan basis data kependudukan;
4. peningkatan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan; dan
5. optimalisasi mutu pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

BAB VI PETA JALAN (ROADMAP)

Untuk melaksanakan pembangunan kependudukan, maka penting untuk disusun peta jalan pembangunan. Pada bagian ini merupakan tahapan implementasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan untuk 20 tahun, antara 2025 sampai dengan 2045, dengan periode pembangunan 5 tahun untuk sebuah periode pembangunan. Berikut adalah tahapan implementasi melalui capaian target 5 tahunan dalam 5 pilar GDPK di Kota Denpasar.

6.1 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

Roadmap pembangunan kuantitas penduduk di Kota Denpasar untuk periode 2025-2045 mengarah pada pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang. Pada periode lima tahun pertama, nilai fertilitas total (TFR) akan dipertahankan pada angka 2,0, dan selanjutnya, akan dipertahankan dalam rentang 2,0 hingga 2,1. Kondisi mempertahankan nilai ini menjadi sangat penting untuk mencegah defisit populasi di Kota Denpasar. Oleh karena itu, perlu memantau dan mengendalikan beberapa indikator dalam fertilitas. Dalam rangka itu, rincian mengenai capaian target dan kondisi yang diinginkan perlu diketahui melalui *Roadmap* yang disajikan secara informatif. Secara rinci, *Roadmap* untuk indikator pengendalian jumlah penduduk di Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Denpasar
Tahun 2025-2045**

No	Indikator	Baseline		Tahun				
		Tahun	Angka	2025	2030	2035	2040	2045
1	Total Fertility Rate (TFR)	2024	1,87	1,88	1,95	2,03	2,1	2,1
2	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15 - 19 tahun	2024	8,9	8,5	6,7	5,2	4,1	3,2
3	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (<i>Demand Satisfied</i>)	2024	74,6	74,9	76,2	77,3	78,4	79,4
4	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Wanita	2024	23	23,04	23,24	23,44	23,64	23,84
5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	2024	52,7	53,5	57,5	61,5	65,5	69,5

No	Indikator	Baseline		Tahun				
		Tahun	Angka	2025	2030	2035	2040	2045
6	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2024	53	53,56	56,36	59,16	61,96	64,76
7	Unmet Need	2024	15,72	15,22	12,72	10,22	7,72	5,22
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	2024	0,96	0,91	0,71	0,52	0,54	0,46
9	Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	2024	15,8	15,4	13,4	11,4	9,4	7,4

*kondisi normal antara 2,0 dan 2,2; kondisi ideal 2,1

6.1.1 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk Lima Tahunan

Tabel 6.2 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk tahun 2025 – 2029

No	Indikator	Baseline		Tahun				
		Tahun	Angka	2025	2026	2027	2028	2029
1	Total Fertility Rate (TFR)	2024	1,87	1,88	1,9	1,91	1,93	1,94
2	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15 - 19 tahun	2024	8,9	8,5	8,1	7,7	7,3	7
3	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (<i>Demand Satisfied</i>)	2024	74,6	74,9	75,2	75,4	75,7	75,9
4	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Wanita	2024	23	23,04	23,08	23,12	23,16	23,2
5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	2024	52,7	53,5	54,3	55,1	55,9	56,7
6	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2024	53	53,56	54,12	54,68	55,24	55,8
7	Unmet Need	2024	15,72	15,22	14,72	14,22	13,72	13,22
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	2024	0,96	0,91	0,88	0,83	0,79	0,75
9	Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	2024	15,8	15,4	15	14,6	14,2	13,8

Tabel 6.3 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk tahun 2030 – 2034

No	Indikator	Tahun				
		2030	2031	2032	2033	2034
1	Total Fertility Rate (TFR)	1,95	1,97	1,98	2	2,01
2	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15 - 19 tahun	6,7	6,4	6,1	5,8	5,5
3	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (<i>Demand Satisfied</i>)	76,2	76,4	76,7	76,9	77,1

No	Indikator	Tahun				
		2030	2031	2032	2033	2034
4	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Wanita	23,24	23,28	23,32	23,36	23,4
5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	57,5	58,3	59,1	59,9	60,7
6	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	56,36	56,92	57,48	58,04	58,6
7	Unmet Need	12,72	12,22	11,72	11,22	10,72
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,71	0,67	0,63	0,60	0,56
9	Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	13,4	13	12,6	12,2	11,8

Tabel 6.4 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk tahun 2035 – 2039

No	Indikator	Tahun				
		2035	2036	2037	2038	2039
1	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,03	2,04	2,05	2,07	2,09
2	<i>Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15 - 19 tahun</i>	5,2	5,0	4,8	4,5	4,3
3	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (<i>Demand Satisfied</i>)	77,3	77,5	77,8	78	78,2
4	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Wanita	23,44	23,48	23,52	23,56	23,6
5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	61,5	62,3	63,1	63,9	64,7
6	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	59,16	59,72	60,28	60,84	61,4
7	Unmet Need	10,22	9,72	9,22	8,72	8,22
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,52	0,54	0,54	0,54	0,54
9	Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	11,4	11	10,6	10,2	9,8

Tabel 6.5 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk tahun 2040 – 2045

No	Indikator	Tahun					
		2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2	<i>Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15 - 19 tahun</i>	4,1	3,9	3,7	3,6	3,4	3,2
3	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (<i>Demand Satisfied</i>)	78,4	78,6	78,8	79	79,2	79,4
4	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Wanita	23,64	23,68	23,72	23,76	23,8	23,84

No	Indikator	Tahun					
		2040	2041	2042	2043	2044	2045
5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	65,5	66,3	67,1	67,9	68,7	69,5
6	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	61,96	62,52	63,08	63,64	64,2	64,76
7	Unmet Need	7,72	7,22	6,72	6,22	5,72	5,22
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,54	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
9	Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	9,4	9	8,6	8,2	7,8	7,4

*kondisi normal antara 2,0 dan 2,2; kondisi ideal 2,1

6.2 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk

6.2.1 Bidang Ekonomi

Roadmap Kota Denpasar untuk aspek ekonomi memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kemandirian dan perekonomian wilayah. Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, beberapa indikator yang digunakan meliputi persentase penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, rasio ketergantungan, pengangguran terbuka, tingkat kesempatan kerja, PDRB per Kapita, Persentase PMKS yang ditangani, pertumbuhan ekonomi, indeks gini. Rincian mengenai indikator ekonomi Kota Denpasar dapat ditemukan pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6 Roadmap Indikator Ekonomi Kota Denpasar tahun 2025 – 2045

No	Indikator	Baseline		Tahun				
		Tahun	Angka	2025	2030	2035	2040	2045
1	Tingkat Kemiskinan	2024	2,59	2,47	1,95	1,305	0,66	0,02
2	Rasio ketergantungan / <i>Dependency Ratio</i>	2024	37,81	37,27	35,96	34,66	33,36	32,06
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2024	2,11	1,62 - 2,1	0,94 - 1,4	0,73 -1,24	0,51 - 1,07	0,30 - 0,91
4	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	2024	86.425,33	87.203,94 - 93.432,79	92.187,02 - 98.260,15	128.200 – 137.670	168.390 – 192.880	221.000 – 270.000
5	Pertumbuhan Ekonomi	2024	5,55	5,65 - 5,9	8,75 - 9	7,49 -8,48	6,40 - 8,00	5,50 - 7,50
6	Gini Ratio	2024	0,3413	0,335	0,322	0,312	0,302	0,292
7	Tingkat Partisipasi	2024	60,5	61,26	65,05	68,85	72,65	76,45

	Angkatan Kerja Perempuan							
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

6.2.1.1 Roadmap Bidang Ekonomi Lima Tahunan

Tabel 6.7 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi tahun 2025-2029

No	Indikator	Baseline		Tahun				
		Tahun	Angka	2025	2026	2027	2028	2029
1	Tingkat Kemiskinan	2024	2,59	2,47	2,35	2,25	2,14	2,04
2	Rasio ketergantungan/ <i>Dependency Ratio</i>	2024	37,81	37,27	37,01	36,74	36,48	36,22
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2024	2,11	1,62-2,1	1,49-1,96	1,36-1,82	1,23-1,68	1,1-1,54
4	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	2024	86.425,33	87.203,94 - 93.432,79	88.761,15 - 94.990	89.695,48 - 95.924,33	90.474,08 - 96.702,94	91.408,41 - 97.637,26
5	Pertumbuhan Ekonomi	2024	5,55	5,65 - 5,9	5,9 - 6,6	7 - 8	8 - 8,5	8,5 - 9
6	Gini Ratio	2024	0,3413	0,335	0,332	0,327	0,325	0,323
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	2024	60,5	61,26	62,02	62,78	63,54	64,3

Tabel 6.8 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi tahun 2030-2034

No	Indikator	Tahun				
		2030	2031	2032	2033	2034
1	Tingkat Kemiskinan	1,95	1,82	1,69	1,56	1,43
2	Rasio ketergantungan/ <i>Dependency Ratio</i>	35,96	35,70	35,44	35,18	34,92
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,94-1,4	0,90-1,37	0,85-1,34	0,81-1,30	0,77-1,27
4	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	92.187,02- 98.260,15	103.100- 105.130	108.880- 112.470	114.990- 120.340	121.420- 128.710
5	Pertumbuhan Ekonomi	8,75-9	8,49-8,89	8,23-8,78	7,97-8,68	7,73-8,58
6	Gini Ratio	0,322	0,320	0,318	0,316	0,314
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	65,05	65,81	66,57	67,33	68,09

Tabel 6.9 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi tahun 2035-2039

No	Indikator	Tahun				
		2035	2036	2037	2038	2039
1	Tingkat Kemiskinan	1,31	1,18	1,05	0,92	0,79
2	Rasio ketergantungan/ <i>Dependency Ratio</i>	34,66	34,40	34,14	33,88	33,62
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,73-1,24	0,68-1,20	0,64-1,17	0,60-1,14	0,55-1,10
4	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	128.200-137.670	135.360-147.280	142.930-157.530	150.930-168.500	159.410-180.270
5	Pertumbuhan Ekonomi	7,49-8,48	7,26-8,38	7,03-8,28	6,81-8,19	6,60-8,09
6	Gini Ratio	0,312	0,310	0,308	0,306	0,304
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	68,85	69,61	70,37	71,13	71,89

Tabel 6.10 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi tahun 2040-2045

No	Indikator	Tahun					
		2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Tingkat Kemiskinan	0,66	0,53	0,40	0,27	0,14	0,02
2	Rasio ketergantungan/ <i>Dependency Ratio</i>	33,36	33,10	32,84	32,58	32,32	32,06
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,51-1,07	0,47-1,04	0,42-1,01	0,38-0,97	0,34-0,94	0,30-0,91
4	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	168.390-192.880	177.920-206.410	188.030-220.960	198.770-236.600	210.180-253.460	221.000-270.000
5	Pertumbuhan Ekonomi	6,40-8,00	6,20-7,91	6,01-7,82	5,82-7,73	5,64-7,64	5,50-7,50
6	Gini Ratio	0,302	0,300	0,298	0,296	0,294	0,292
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	72,65	73,41	74,17	74,93	75,69	76,45

6.2.2 Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan, banyak indikator yang berkaitan dengan pembangunan di Kota Denpasar. Untuk itu, penting sekali untuk ditetapkan *roadmap* pada bidang pendidikan untuk mencapai visi GDPK Kota Denpasar pada jangka panjang. Terdapat beberapa indikator *road map* pembangunan pendidikan antara lain rata-rata lama sekolah, APS penduduk 7-12 tahun, APS penduduk 13-15 tahun, dan harapan lama sekolah. Pada indikator pendidikan, *Roadmap* pendidikan Kota Denpasar 2025-2045 disajikan pada Tabel 6.11.

Tabel 6.11 Roadmap Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2025-2045

No	Indikator	Baseline		Tahun				
		Tahun	Angka	2025	2030	2035	2040	2045
1	Harapan Lama Sekolah	2024	14,13	14,14	14,16	14,775	15,39	16
2	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	2024	11,53	11,59	11,74	12,66	13,58	14,5
3	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	2024	99,18	99,24	99,56	99,86	100	100
4	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	2024	98,49	98,67	99,1	99,525	99,95	100

6.2.2.1 Roadmap Bidang Pendidikan Lima Tahunan

Tabel 6.12 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan tahun 2025-2029

No	Indikator	Baseline		Tahun				
		Tahun	Angka	2025	2026	2027	2028	2029
1	Harapan Lama Sekolah	2024	14,13	14,14	14,14	14,15	14,15	14,15
2	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	2024	11,53	11,59	11,62	11,65	11,68	11,71
3	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	2024	99,18	99,24	99,31	99,37	99,43	99,5
4	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	2024	98,49	98,67	98,75	98,84	98,93	99,01

Tabel 6.13 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan tahun 2030-2034

No	Indikator	Tahun				
		2030	2031	2032	2033	2034
1	Harapan Lama Sekolah	14,16	14,28	14,41	14,53	14,65
2	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	11,74	11,92	12,11	12,29	12,48
3	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	99,56	99,62	99,68	99,74	99,8
4	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	99,1	99,19	99,27	99,36	99,44

Tabel 6.14 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan tahun 2035-2039

No	Indikator	Tahun				
		2035	2036	2037	2038	2039
1	Harapan Lama Sekolah	14,78	14,90	15,02	15,14	15,27
2	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	12,66	12,84	13,03	13,21	13,40
3	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	99,86	99,92	99,98	100	100
4	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	99,53	99,61	99,70	99,78	99,86

Tabel 6.15 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan tahun 2040-2045

No	Indikator	Tahun					
		2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Harapan Lama Sekolah	15,39	15,51	15,64	15,76	15,88	16,00
2	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	13,58	13,76	13,95	14,13	14,32	14,5
3	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	100	100	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	99,95	100	100	100	100	100

6.2.3 Bidang Kesehatan

Roadmap Kota Denpasar pada aspek kesehatan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Parameter yang digunakan untuk menilai kesejahteraan ini adalah angka harapan hidup, bayi, angka kematian ibu, persentase ASI eksklusif, angka kematian anak balita, tingkat stunting, sanitasi, cakupan kualitas air bersih. Rincian mengenai indikator kesehatan Kota Denpasar dapat ditemukan dalam Tabel 6.16 pada *roadmap* berikut ini.

Tabel 6.16 Roadmap Indikator Kesehatan Kota Denpasar tahun 2025-2045

No	Indikator	Baseline		Tahun				
		Tahun	Angka	2025	2030	2035	2040	2045
1	Usia Harapan Hidup	2024	76,01	76,25	77,45	78,48	79,51	80,54
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	2024	10,56	9	7,5	6	4,5	3
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	2024	123,23	99	70	58,3	46,6	34,95

No	Indikator	Baseline		Tahun				
		Tahun	Angka	2025	2030	2035	2040	2045
4	Angka Kematian Balita	2024	11,97	11,6	10,1	8,6	7,1	5,6
5	Persentase ASI Eksklusif	2024	79,2	79	85	87,5	90	92,5
6	Prevalensi Stunting	2024	10,4	10,4	7,4	4,9	2,4	0,27
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	2024	99,74	100	100	100	100	100

6.2.3.1 Roadmap Bidang Kesehatan Lima Tahunan

Tabel 6.17 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan tahun 2025-2029

No	Indikator	Baseline		Tahun				
		Tahun	Angka	2025	2026	2027	2028	2029
1	Usia Harapan Hidup	2024	76,01	76,25	76,49	76,73	76,97	77,21
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	2024	10,56	10	9,7	9,4	9,1	8,8
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	2024	123,23	120	119,5	119	118,5	118
4	Angka Kematian Balita	2024	11,97	11,97	11,94	11,91	11,88	11,85
5	Persentase ASI Eksklusif	2024	79,2	79	81	83	84	85
6	Prevalensi Stunting	2024	10,4	10,4	10,4	8,9	8,9	8,9
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	2024	99,74	100	100	100	100	100

Tabel 6.18 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan tahun 2030-2034

No	Indikator	Tahun				
		2030	2031	2032	2033	2034
1	Usia Harapan Hidup	77,45	77,69	77,90	78,10	78,31
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,5	8,2	7,9	7,6	7,3
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	117,5	112	106,5	101	95,5
4	Angka Kematian Balita	11,82	11,79	11,76	11,73	11,7
5	Persentase ASI Eksklusif	85	85,5	86	86,5	87
6	Prevalensi Stunting	7,4	6,9	6,4	5,9	5,4
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	100	100	100	100	100

Tabel 6.19 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan tahun 2035-2039

No	Indikator	Tahun				
		2035	2036	2037	2038	2039
1	Usia Harapan Hidup	78,51	78,72	78,93	79,13	79,34
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	7	6,7	6,4	6,1	5,8
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	90	84,5	79	73,5	68
4	Angka Kematian Balita	11,67	11,64	11,61	11,58	11,55
5	Persentase ASI Eksklusif	87,5	88	88,5	89	89,5
6	Prevalensi Stunting	4,9	4,4	3,9	3,4	2,9
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	100	100	100	100	100

Tabel 6.20 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan tahun 2040-2045

No	Indikator	Tahun					
		2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Usia Harapan Hidup	79,54	79,75	79,96	80,16	80,37	80,54
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	4
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	62,5	57	51,5	46	40,5	34,95
4	Angka Kematian Balita	11,52	11,49	11,46	11,43	11,4	11,37
5	Persentase ASI Eksklusif	90	90,5	91	91,5	92	92,5
6	Prevalensi Stunting	2,4	1,9	1,4	0,9	0,4	0,27
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	100	100	100	100	100	100

6.2.4 Bidang Kualitas Lainnya

Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi merupakan bagian penting dalam pembangunan kependudukan dan manusia di Kota Denpasar. Terdapat bidang kualitas lain yang penting sekali direncanakan pembangunannya yakni terkait pembangunan manusia secara keseluruhan dan pembangunan pada gender. Gender menjadi sangat penting karena peran wanita dalam segala bidang kehidupan menjadi hal yang tidak terpisahkan baik sebagai *work force* dan pembangunan manusia secara keseluruhan. Pembangunan *Roadmap* bidang kualitas lainnya Kota Denpasar 2025-2045 disajikan pada dibawah ini.

Tabel 6.21 Roadmap Indikator Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kualitas Lainnya tahun 2025-2045

No	Indikator	Baseline		Tahun				
		Tahun	Angka	2025	2030	2035	2040	2045
1	Indeks Pembangunan Manusia	2024	85,11	85,53	86,31	87,09	87,87	88,65
2	Indeks Pembangunan Gender	2024	96,77	96,89	97,48	98,08	98,67	99,27
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	2024	72,8	73,43	76,58	79,73	82,88	86,03

6.2.4.1 Roadmap Bidang Kualitas Lainnya Lima Tahunan

Tabel 6.22 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kualitas Lainnya tahun 2025-2029

No	Indikator	Baseline		Tahun				
		Tahun	Angka	2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks Pembangunan Manusia	2024	85,11	85,53	85,69	85,84	86,00	86,16
2	Indeks Pembangunan Gender	2024	96,77	96,89	97,01	97,13	97,25	97,37
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	2024	72,8	73,43	74,06	74,69	75,32	75,95

Tabel 6.23 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kualitas Lainnya tahun 2030-2034

No	Indikator	Tahun				
		2030	2031	2032	2033	2034
1	Indeks Pembangunan Manusia	86,31	86,47	86,62	86,78	86,93
2	Indeks Pembangunan Gender	97,48	97,60	97,72	97,84	97,96
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	76,58	77,21	77,84	78,47	79,1

Tabel 6.24 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kualitas Lainnya tahun 2035-2039

No	Indikator	Tahun				
		2035	2036	2037	2038	2039
1	Indeks Pembangunan Manusia	87,09	87,25	87,40	87,56	87,71
2	Indeks Pembangunan Gender	98,08	98,20	98,32	98,44	98,56
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	79,73	80,36	80,99	81,62	82,25

Tabel 6.25 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kualitas Lainnya tahun 2040-2045

No	Indikator	Tahun					
		2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Indeks Pembangunan Manusia	87,87	88,03	88,18	88,34	88,49	88,65
2	Indeks Pembangunan Gender	98,67	98,79	98,91	99,03	99,15	99,27
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	82,88	83,51	84,14	84,77	85,4	86,03

6.3 Roadmap Pembangunan Keluarga

Roadmap pembangunan keluarga Kota Denpasar tahun 2025-2045 lebih berfokus pada sejumlah pencapaian diantaranya Indeks Ketahanan Keluarga, angka persentase jumlah kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yang mendukung Program Keluarga Berencana (BKB, BKR, BKL), jumlah kegiatan BKB, jumlah kegiatan BKR, jumlah kegiatan BKL, jumlah kegiatan PIK R, jumlah kelompok kegiatan UPPKA, indeks ketahanan keluarga, indeks keluarga miskin. Hal ini untuk mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera, sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang ideal dan seimbang. Setiap target terkait indikator pembangunan keluarga di Kota Denpasar tercantum dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 6.26 Roadmap Indikator Pembangunan Keluarga Kota Denpasar

No	Indikator	Baseline		Target				
		Tahun	Angka	2025	2030	2035	2040	2045
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	2024	68,63	69,2-70,2	73,9-74,7	77,4-78	80,2-80,8	82,4-82,8

No	Indikator	Baseline		Target				
		Tahun	Angka	2025	2030	2035	2040	2045
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	2023	72,56	73,76	79,76	85,76	91,76	97,76
3	Indeks Lansia Berdaya	2024	63,9	64,8	68,9	72,4	75,3	77,7
4	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	2024	91,9	92,5	94,9	96,5	97,7	98,4
5	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	2024	99,85	99,87	99,95	100	100	100
6	Rasio rumah layak huni	2024	0,252	0,251	0,243	0,238	0,231	0,225
7	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	2024	9,29	9,33	9,53	9,765	10	10,235
8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	2023	53,21	53,49	54,17	59,72	65,27	70,84

6.3.1 Roadmap Indikator Pembangunan Keluarga Lima Tahunan

Tabel 6.27 Roadmap Pembangunan Keluarga tahun 2025-2029

No	Indikator	Baseline		Tahun				
		Tahun	Angka	2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	2024	68,63	69,2-70,2	70,2-71,2	71,2-72,1	72,1-73	73-73,9
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	2023	72,56	73,76	74,96	76,16	77,36	78,56
3	Indeks Lansia Berdaya	2024	63,9	64,8	65,7	66,5	67,3	68,1
4	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	2024	91,9	92,5	93,1	93,6	94,1	94,5
5	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	2024	99,85	99,87	99,89	99,90	99,92	99,94
6	Rasio rumah layak huni	2024	0,252	0,251	0,249	0,247	0,246	0,244
7	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	2024	9,29	9,33	9,37	9,41	9,45	9,49
8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	2023	53,21	53,49	53,61	53,75	53,89	54,03

Tabel 6.28 Roadmap Pembangunan Keluarga tahun 2030-2034

No	Indikator	Tahun				
		2030	2031	2032	2033	2034
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	73,9-74,7	74,6-75,4	75,4-76,1	76,1-76,8	76,8-77,5
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	79,76	80,96	82,16	83,36	84,56
3	Indeks Lansia Berdaya	68,9	69,7	70,4	71,1	71,7
4	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	94,9	95,3	95,6	96	96,3
5	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	99,95	99,97	99,98	100	100
6	Rasio rumah layak huni	0,243	0,242	0,241	0,24	0,239
7	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	9,53	9,58	9,62	9,67	9,72
8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	54,17	55,28	56,39	57,50	58,61

Tabel 6.29 Roadmap Pembangunan Keluarga tahun 2035-2039

No	Indikator	Tahun				
		2035	2036	2037	2038	2039
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	77,4-78	78-78,6	78,5-79,1	79,1-79,7	79,6-80,2
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	85,76	86,96	88,16	89,36	90,56
3	Indeks Lansia Berdaya	72,4	73,0	73,6	74,1	74,7
4	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	96,5	96,7	97,0	97,2	97,5
5	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	100	100	100	100
6	Rasio rumah layak huni	0,238	0,237	0,235	0,234	0,232
7	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	9,77	9,81	9,86	9,91	9,95
8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	59,72	60,83	61,94	63,05	64,16

Tabel 6.30 Roadmap Pembangunan Keluarga tahun 2040-2045

No	Indikator Ekonomi	Tahun					
		2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	80,2-80,8	80,7-81,1	81,1-81,6	81,6-82	82-82,4	82,4-82,8
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	91,76	92,96	94,16	95,36	96,56	97,76
3	Indeks Lansia Berdaya	75,3	75,8	76,3	76,7	77,2	77,7
4	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	97,7	97,8	98,0	98,1	98,3	98,4
5	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	100	100	100	100	100
6	Rasio rumah layak huni	0,231	0,230	0,229	0,227	0,226	0,225
7	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,00	10,05	10,09	10,14	10,19	10,24
8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	65,27	66,38	67,49	68,60	69,71	70,84

6.4 Roadmap Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pendataan dan persebaran merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penataan kota. Sehingga, penting sekali untuk ditetapkan *roadmap* terkait penataan, persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk. *Roadmap* Kota Denpasar terkait penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk ditunjukkan pada Tabel 6.31.

Tabel 6.31 Roadmap Indikator Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Kota Denpasar tahun 2025-2045

No	Indikator	Baseline		Target				
		Tahun	Angka	2025	2030	2035	2040	2045
1	Persentase irigasi dalam kondisi baik	2024	86	87	97	100	100	100
2	Persentase drainase dalam kondisi baik	2024	85	86,5	94	96,5	99	100
3	Rasio permukiman layak huni	2024	0,9966	0,9974	1	1	1	1
4	Persentase luas permukiman kumuh	2024	0,184	0,144	0	0	0	0
5	Persentase jalan dalam kondisi mantap	2024	89,29	90,19	92,69	93,69	94,69	95,69
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	2024	29,6	40	90	100	100	100

6.4.1 Roadmap Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Lima Tahunan

Tabel 6.32 Roadmap Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk tahun 2025-2029

No	Indikator	Baseline		Tahun				
		Tahun	Angka	2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase irigasi dalam kondisi baik	2024	86	87	89	91	93	95
2	Persentase drainase dalam kondisi baik	2024	85	86,5	88	89,5	91	92,5
3	Rasio permukiman layak huni	2024	99,66	99,74	100	100	100	100
4	Persentase luas permukiman kumuh	2024	0,184	0,144	0	0	0	0
5	Persentase jalan dalam kondisi mantap	2024	89,29	90,19	90,69	91,19	91,69	92,19
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	2024	29,6	40	50	60	70	80

Tabel 6.33 Roadmap Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk tahun 2030-2034

No	Indikator	Tahun				
		2030	2031	2032	2033	2034
1	Persentase irigasi dalam kondisi baik	97	99	100	100	100
2	Persentase drainase dalam kondisi baik	94	94,5	95	95,5	96
3	Rasio permukiman layak huni	100	100	100	100	100
4	Persentase luas permukiman kumuh	0	0	0	0	0
5	Persentase jalan dalam kondisi mantap	92,69	92,89	93,09	93,29	93,49
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	90	100	100	100	100

Tabel 6.34 Roadmap Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk tahun 2035-2039

No	Indikator	Tahun				
		2035	2036	2037	2038	2039
1	Persentase irigasi dalam kondisi baik	100	100	100	100	100

No	Indikator	Tahun				
		2035	2036	2037	2038	2039
2	Persentase drainase dalam kondisi baik	96,5	97	97,5	98	98,5
3	Rasio permukiman layak huni	100	100	100	100	100
4	Persentase luas permukiman kumuh	0	0	0	0	0
5	Persentase jalan dalam kondisi mantap	93,69	93,89	94,09	94,29	94,49
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	100	100	100	100	100

Tabel 6.35 Roadmap Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk tahun 2040-2045

No	Indikator	Tahun					
		2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Persentase irigasi dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100
2	Persentase drainase dalam kondisi baik	99	99,5	100	100	100	99
3	Rasio permukiman layak huni	100	100	100	100	100	100
4	Persentase luas permukiman kumuh	0	0	0	0	0	0
5	Persentase jalan dalam kondisi mantap	94,69	94,89	95,09	95,29	95,49	94,69
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	100	100	100	100	100	100

6.5 Roadmap Penataan Administrasi Kependudukan

Roadmap data dan informasi kependudukan Kota Denpasar Tahun 2025–2045 menitikberatkan pada upaya memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan, seperti KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak. Layanan tersebut diupayakan agar dikelola dengan baik, memiliki aksesibilitas yang baik, dan kredibilitas yang terjamin melalui adopsi berbagai inovasi dalam penyediaan layanan dokumen kependudukan. Tabel 6.36 merinci target-target Kota Denpasar hingga tahun 2045 dalam hal indikator data dan informasi kependudukan.

**Tabel 6.36 Roadmap Indikator Penataan Administrasi Kependudukan Kota
Denpasar Tahun 2025-2045**

No	Indikator	Baseline		Target				
		Tahun	Angka	2025	2030	2035	2040	2045
1	Cakupan perekaman KTP-EI	2024	99,65	99,92	99,97	100	100	100
2	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	2024	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	2024	80,32	82	87	89,5	92	94,5
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	2024	99,38	99,50	99,80	100	100	100
5	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	2024	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	2024	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	2024	100	100	100	100	100	100

6.5.1 Roadmap Penataan Administrasi Kependudukan Lima Tahunan

**Tabel 6.37 Roadmap Penataan Administrasi Kependudukan
tahun 2025-2029**

No	Indikator	Baseline		Tahun				
		Tahun	Angka	2025	2026	2027	2028	2029
1	Cakupan perekaman KTP-EI	2024	99,65	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96
2	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	2024	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	2024	80,32	82	83	84	85	86
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	2024	99,38	99,50	99,60	99,65	99,70	99,75
5	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	2024	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	2024	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	2024	100	100	100	100	100	100

Tabel 6.38 Roadmap Penataan Administrasi Kependudukan tahun 2030-2034

No	Indikator	Tahun				
		2030	2031	2032	2033	2034
1	Cakupan perekaman KTP-El	99,97	99,99	100	100	100
2	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100	100	100	100	100
3	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	87	87,5	88	88,5	89
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	99,80	99,85	99,9	99,95	100
5	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	100	100	100	100	100
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	100	100	100	100	100
7	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100	100	100	100	100

Tabel 6.39 Roadmap Penataan Administrasi Kependudukan tahun 2035-2039

No	Indikator	Tahun				
		2035	2036	2037	2038	2039
1	Cakupan perekaman KTP-El	100	100	100	100	100
2	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100	100	100	100	100
3	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	89,5	90	90,5	91	91,5
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	100	100	100	100	100
5	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	100	100	100	100	100
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	100	100	100	100	100
7	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100	100	100	100	100

Tabel 6.40 Roadmap Penataan Administrasi Kependudukan tahun 2040-2045

No	Indikator	Tahun					
		2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Cakupan perekaman KTP-El	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Tahun					
		2040	2041	2042	2043	2044	2045
2	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	92	92,5	93	93,5	94	94,5
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100	100	100	100	100	100

BAB VII

PENUTUP

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Denpasar telah menghasilkan visi pembangunan kependudukan daerah, strategi kebijakan, dan tentunya *roadmap*/peta jalan. Visi pembangunan kependudukan di Kota Denpasar merupakan sebagai berikut.

“TERWUJUDNYA PENDUDUK BERBUDAYA, BERKUALITAS DAN TUMBUH SEIMBANG UNTUK MENCAPAI KOTA DENPASAR YANG BERBUDAYA, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”.

Untuk mencapai Visi tersebut maka terdapat beberapa pilar kebijakan yang tersusun yang terkait antara lain seperti kebijakan pilar pengendalian kuantitas penduduk, kebijakan peningkatan kualitas penduduk, kebijakan pilar pembangunan berkualitas, kebijakan pilar penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, pilar penataan administrasi kependudukan.

Untuk mencapai visi tersebut di atas maka disusunlah peta jalan pembangunan yang berumur 20 tahun sampai dengan 2045. Peta jalan tersebut akan berhasil dan sukses jika pembangunan kependudukan didukung oleh tim dan kelembagaan yang kuat untuk mendukung dan mendorong setiap organisasi pemerintah daerah terkait mencapai target pada masing-masing peta jalan yang telah dibuat. Hal ini membutuhkan penyusunan peraturan daerah untuk memayungi kegiatan pembangunan kependudukan di Kota Denpasar yang akan berumur 20 tahun.

WALIKOTA DENPASAR

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2020. Panduan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2023
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, 2023
- Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2023
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Denpasar, 2023
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2023. Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas : Kebijakan Kependudukan Indonesia 2020-2050.
- Pemerintah Kota Denpasar, 2023
- Pengadilan Negeri Denpasar, 2023
- Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
- Rah JH, Sukotjo S, Badgaiyan N, Cronin AA, Torlesse H. Improved sanitation is associated with reduced child stunting amongst Indonesian children under 3 years of age. *Matern Child Nutr.* 2020; 16(S2):e12741.
- Katan, 2023. Pendidikan Perempuan. Worldbank <https://www.worldbank.org/en/topic/girlseducation>.
- Nizaruddin, M. Irsyad. The Effect of Sanitation on Stunting Prevalence in Indonesia. *Populasi*, [S.l.], v. 30, n. 2, p. 34-51, dec. 2022. ISSN 2476-941X.
- Vellayati, Winni Isnasari dan Artidiatun Adji. 2019. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup Saat Lahir Dan Angka Kematian Bayi Baru Lahir.